



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021-2026

**RPJMD
2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

2021



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketrentaman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang

signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
24. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD DAN RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW Provinsi Lampung, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RTRW Kabupaten Lampung Tengah, RPJPD Kabupaten Lampung Tengah, RPJPN dan RPJMN.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*).

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|----------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Umum Kondisi Daerah |
| BAB III | : Gambaran Umum Keuangan Daerah |
| BAB IV | : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah |
| BAB V | : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran |
| BAB VI | : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah |
| BAB VII | : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah |
| BAB VIII | : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| BAB IX | : Penutup |

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui perjabaran ke dalam RKPD, Renstra PD, Renja PD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pelaksanaan RPJMD Renstra PD.
- (3) Kepala PD melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (4) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 26 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**


NIRLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 09**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
PROVINSI LAMPUNG : 04/ 1191 /LTG/2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 ini disusun sebagai penyempurnaan atas dokumen rancangan akhir, rancangan awal, dan rancangan teknokratik yang sebelumnya telah disusun dan dibahas bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana petunjuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Substansi RPJMD adalah penjabaran visi, misi, janji-janji kampanye, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun ke depan serta menyelaraskan dengan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, strategi, arah kebijakan, program strategis, kerangka pendanaan, dan indikator kinerja pembangunan daerah. RPJMD tersebut akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKPD dan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 ini. Kami berharap kerja sama dan dukungan semua pihak akan terus terjalin dan terbangun pada tahap pelaksanaan RPJMD hingga mampu mewujudkan visi yaitu "Rakyat Lampung Tengah Berjaya".

Gunung Sugih, 4 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH

dto

MUSA AHMAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	~	i
DAFTAR ISI	~	ii
DAFTAR TABEL	~	v
DAFTAR GAMBAR	~	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	~	1-1
1.2	Dasar Mukim Penyusunan	~	1-5
1.3	Hubungan Antar Dokumen	~	1-9
1.3.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan	~	1-10
1.3.2	Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah	~	1-18
1.3.3	Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RTRW	~	1-18
1.3.4	Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Perangkat Daerah	~	1-19
1.3.5	Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RKPD	~	1-20
1.3.6	Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renja Perangkat Daerah	~	1-21
1.3.7	Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan KLHS RPJMD	~	1-22
1.3.8	Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya	~	1-23
1.4	Maksud dan Tujuan	~	1-23
1.5	Sistematika Penulisan	~	1-24

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	Aspek Geografi dan Demografi	~	2-1
2.1.1	Aspek Geografi	~	2-1
2.1.2	Aspek Demografi	~	2-26
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	~	2-28
2.2.1	Pertumbuhan PDRB	~	2-28
2.2.2	Inflasi	~	2-35
2.2.3	PDRB Perkapita	~	2-35
2.2.4	Indeks Gini	~	2-36
2.2.5	Penduduk Miskin	~	2-38
2.2.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia	~	2-42
2.2.7	Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia	~	2-44
2.2.7.1	Dimensi Pengetahuan	~	2-45
2.2.7.2	Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	~	2-46
2.2.7.3	Pengeluaran Per Kapita	~	2-46
2.2.8	Angka Melek Huruf	~	2-50
2.2.9	Persentase Balita Gizi Buruk	~	2-50
2.2.10	Prevalensi Balita Gizi Kurang	~	2-51
2.2.11	Cakupan Desa Siaga Aktif	~	2-51
2.2.12	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	~	2-52
2.2.13	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	~	2-52
2.2.14	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I	~	2-53
2.2.15	Indek Kepuasan Masyarakat	~	2-54

2.2.16	Presentase PAD terhadap Pendapatan	~	2-54
2.2.17	Opini BPK	~	2-55
2.2.18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	~	2-55
2.2.19	Pengusutan Cadangan Pangan	~	2-56
2.2.20	Penanganan Daerah Rawan Pangan	~	2-56
2.2.21	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRE Kautan	~	2-57
2.2.22	Produksi Sektor Pertanian	~	2-57
2.2.23	Produksi Sektor Perkebunan	~	2-58
2.2.24	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRE	~	2-58
2.2.25	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRE	~	2-59
2.2.26	Pertumbuhan Industri	~	2-59
2.3	Aspek Pelayanan Umum	~	2-59
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	~	2-60
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	~	2-114
2.3.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan	~	2-174
2.3.4	Fokus Layanan Penunjang Urusan	~	2-198
2.3.5	Fokus Layanan Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	~	2-212
2.3.6	Fokus Layanan Umum Kewilayahan	~	2-212
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	~	2-213
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	~	2-213
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	~	2-214
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	~	2-215
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	~	2-215
2.5	Capaian Standar Pelayanan Minimal	~	2-216
2.6	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)	~	2-223
2.7	Pencapaian Kinerja RPJMD Periode 2018-2020	~	2-282
2.7.1	Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD 2016-2020	~	2-283
2.7.2	Capaian Kerjasama	~	2-289

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	~	3-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	~	3-2
3.1.1.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	~	3-2
3.1.1.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah	~	3-4
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah	~	3-7
3.1.2	Neraca Daerah	~	3-10
3.1.2.1	Aset	~	3-10
3.1.2.2	Kewajiban	~	3-10
3.1.2.3	Ekuivalen Dana	~	3-11
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	~	3-16
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah	~	3-16
3.2.2	Analisis Pembiayaan	~	3-16
3.3	Kerangka Pendanaan	~	3-20
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	~	3-20
3.3.1.1	Proyeksi Pendapatan	~	3-20
3.3.1.2	Proyeksi Belanja Daerah	~	3-21
3.3.1.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah	~	3-22
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	~	3-27

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1	Permasalahan Pembangunan	~	4-1
4.1.1	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	~	4-1
4.1.1.1	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	~	4-1

4.1.1.2	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	~	4-4
4.1.1.3	Layanan Urusan Pilihan	~	4-10
4.1.1.4	Layanan Urusan Penunjang	~	4-12
4.1.1.5	Pungsi Lainnya Pendukung Urusan	~	4-14
4.1.1.6	Pemerintahan Umum	~	4-14
4.2	Isu Strategis	~	4-15
4.2.1	Telaah Isu Strategis Lingkungan Global	~	4-15
4.2.2	Telaah Isu Strategis Terhadap KLHS	~	4-17
4.2.3	Telaah Isu Strategis Terhadap RPJM Nasional	~	4-19
4.2.4	Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	~	4-21
4.2.5	Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Daerah Lain	~	4-24
4.2.6	Telaah Isu Strategis Terhadap RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031	~	4-27
4.2.7	Telaah Isu Strategis Terhadap RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008-2025	~	4-33
4.2.8	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	4-40

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1	Visi	~	5-1
5.2	Misi	~	5-4
5.3	Tujuan dan Sasaran	~	5-9

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1	Strategi	~	6-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	~	6-8
6.2.1	Arah Kebijakan Tahunan	~	6-8
6.2.2	Isu Strategis dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	~	6-10
6.3	Strategi dan Arsh Kebijakan dengan Pendekatan Spasial	~	6-15
6.3.1	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang	~	6-15
6.4	Program Pembangunan Daerah	~	6-18
6.4.1	Program Unggulan Kabupaten Lampung Tengah	~	6-18
6.4.2	Program Rekomendasi KLHS Kabupaten Lampung Tengah	~	6-37
6.6	Program Pembangunan Daerah	~	6-44

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	~	7-1
7.2	Program Perangkat Daerah	~	7-5

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama	~	8-1
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	~	8-5

BAB IX PENUTUP

9.1	Pedoman Transisi	~	9-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	~	9-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	1-4
Tabel 1.2	Sinkronisasi RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi Lampung	~	1-12
Tabel 2.1	Jumlah Kampung/Kelurahan, Luar Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	~	2-4
Tabel 2.2	Tutupan Lahan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031	~	2-13
Tabel 2.3	Persentase Ancaman Bencana Kekeringan, Gempa, Dan Kebakaran Mutan Berdasarkan Luar Wilayah di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-25
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 dan Tahun 2020	~	2-26
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020	~	2-27
Tabel 2.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)	~	2-29
Tabel 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)	~	2-30
Tabel 2.8	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)	~	2-32
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~	2-33
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2015-2020	~	2-34
Tabel 2.11	Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020	~	2-35
Tabel 2.12	Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020	~	2-36
Tabel 2.13	Jumlah Rumah Tangga Sederhana Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PDST Data 2018-2017 Belum Akurat Karena Belum Terintegrasi Dengan Aplikasi SHKS NG	~	2-42
Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	~	2-43
Tabel 2.15	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~	2-44
Tabel 2.16	Dimensi Pengetahuan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-46
Tabel 2.17	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHML) Lampung Tengah	~	2-47
Tabel 2.18	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Tengah	~	2-49
Tabel 2.19	Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah	~	2-50

Tabel 2.20	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Tengah	~	2-51
Tabel 2.21	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Lampung Tengah	~	2-51
Tabel 2.22	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Lampung Tengah	~	2-52
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Tengah	~	2-52
Tabel 2.24	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Kerja Ke Atas Kabupaten Lampung Tengah	~	2-53
Tabel 2.25	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Kabupaten Lampung Tengah	~	2-54
Tabel 2.26	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	~	2-54
Tabel 2.27	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-55
Tabel 2.28	Opini BPK Kabupaten Lampung Tengah	~	2-55
Tabel 2.29	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-56
Tabel 2.30	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-56
Tabel 2.31	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-57
Tabel 2.32	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB konstan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-57
Tabel 2.33	Produksi Sektor Pertanian (PAD1/Ton) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-58
Tabel 2.34	Produksi Sektor Perkebunan (Ton) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-58
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah	~	2-58
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah	~	2-59
Tabel 2.37	Pertumbuhan industri Kabupaten Lampung Tengah	~	2-59
Tabel 2.38	Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2020	~	2-62
Tabel 2.39	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	~	2-64
Tabel 2.40	Sarana Prasarana Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	~	2-69
Tabel 2.41	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik Per Jumlah Penduduk	~	2-71
Tabel 2.42	Jumlah Tenaga Kesehatan	~	2-73
Tabel 2.43	Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Poyandu)	~	2-75
Tabel 2.44	Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	~	2-76
Tabel 2.45	Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan	~	2-77
Tabel 2.46	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan	~	2-81
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	~	2-82
Tabel 2.48	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2020	~	2-91
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-92
Tabel 2.50	Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah	~	2-95

Tabel 2.51	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pengairan	~	2-96
Tabel 2.52	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2016 - 2020	~	2-100
Tabel 2.53	Perkembangan Jumlah Rumah Sehat (Rumah Layak Huni) Tahun 2016 - 2020	~	2-100
Tabel 2.54	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban Keluarga Tahun 2016 - 2020	~	2-100
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Pengguna Listrik Tahun 2016-2020	~	2-100
Tabel 2.56	Luas Lingkungan Kumuh (Lingkungan Kumuh) Tahun 2016-2020	~	2-101
Tabel 2.57	Penataan Ruang	~	2-101
Tabel 2.58	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	~	2-103
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	~	2-105
Tabel 2.60	Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	~	2-107
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	~	2-107
Tabel 2.62	Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-110
Tabel 2.63	Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	~	2-113
Tabel 2.64	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2015 - 2020	~	2-117
Tabel 2.65	Pencapaian Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2015 - 2020 di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-118
Tabel 2.66	Pencapaian Kinerja Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	~	2-122
Tabel 2.67	Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	~	2-123
Tabel 2.68	Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2016 - 2020	~	2-127
Tabel 2.69	Perkembangan Ketersediaan Energi, Lemak, Protein Perkapita Perhari Tahun 2016 - 2020	~	2-127
Tabel 2.70	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020	~	2-128
Tabel 2.71	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Tengah 2015 - 2020	~	2-129
Tabel 2.72	Kebutuhan Pangan di Lampung Tengah 2015-2020	~	2-129
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Urusan Pangan 2015-2020	~	2-131
Tabel 2.74	Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 - 2019	~	2-132
Tabel 2.75	Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020	~	2-133
Tabel 2.76	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015- 2020	~	2-136
Tabel 2.77	Pencapaian Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah 2016-2020	~	2-137
Tabel 2.78	Klasifikasi Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2020 di Kabupaten Lampung Tengah	~	2-139
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tahun 2015-2020	~	2-141

Tabel 2.80	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015- 2020	~ 2-143
Tabel 2.81	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020	~ 2-144
Tabel 2.82	Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2015-2020	~ 2-145
Tabel 2.83	Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Melakukan Uji KIR di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020	~ 2-153
Tabel 2.84	Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020	~ 2-154
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Dibidang Perhubungan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020	~ 2-155
Tabel 2.86	Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2020	~ 2-158
Tabel 2.87	Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2020	~ 2-161
Tabel 2.88	Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2015 - 2020	~ 2-162
Tabel 2.89	Perkembangan PMA dan PMDN Tahun 2015 - 2020	~ 2-163
Tabel 2.90	Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2015-2020	~ 2-164
Tabel 2.91	Perkembangan Kepemudaan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~ 2-165
Tabel 2.92	Peringkat PORPROV Lampung Tahun 2015-2020	~ 2-166
Tabel 2.93	Pencapaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2020	~ 2-166
Tabel 2.94	Pencapaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015- 2020	~ 2-167
Tabel 2.95	Pencapaian Kinerja Urusan Pertandingan Tahun 2015-2020	~ 2-168
Tabel 2.96	Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2015-2020	~ 2-169
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 2015-2020	~ 2-169
Tabel 2.98	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2015-2020	~ 2-171
Tabel 2.99	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2015-2020	~ 2-173
Tabel 2.100	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2020	~ 2-175
Tabel 2.101	Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-177
Tabel 2.102	Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-177
Tabel 2.103	Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-178
Tabel 2.104	Objek Wisata Tirta di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-178
Tabel 2.105	Objek Wisata Air Modern di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-179
Tabel 2.106	Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-179
Tabel 2.107	Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-180
Tabel 2.108	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-182

Tabel 2.109	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-184
Tabel 2.110	Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2020 (Ribu Ha)	~ 2-188
Tabel 2.111	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perkebunan Tahun 2015-2020	~ 2-189
Tabel 2.112	Populasi Sapi, Kerbau, Kambing Di Lampung Tengah	~ 2-190
Tabel 2.113	Populasi Sapi Potong Dan Kambing Kabupaten Lampung Tengah	~ 2-191
Tabel 2.114	Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2016 - 2020	~ 2-192
Tabel 2.115	Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2015- 2020	~ 2-193
Tabel 2.116	Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2020	~ 2-194
Tabel 2.117	Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Tahun 2015 - 2020	~ 2-195
Tabel 2.118	Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2015- 2020	~ 2-197
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Tahun 2015 - 2020	~ 2-199
Tabel 2.120	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Keuangan Tahun 2015 - 2020	~ 2-201
Tabel 2.121	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2015- 2020	~ 2-203
Tabel 2.122	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015- 2020	~ 2-204
Tabel 2.123	Persentase Kompetensi Kepegawaian Tahun 2015 - 2020	~ 2-204
Tabel 2.124	Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2015- 2020	~ 2-205
Tabel 2.125	Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2015 - 2020	~ 2-207
Tabel 2.126	Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2015 - 2020	~ 2-210
Tabel 2.127	Jumlah Rapat/ Bidang Yang Difasilitasi Tahun 2015- 2020	~ 2-210
Tabel 2.128	Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2015- 2020	~ 2-211
Tabel 2.129	Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015- 2020	~ 2-211
Tabel 2.130	Pencapaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 - 2020	~ 2-212
Tabel 2.131	Pencapaian Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2015- 2020	~ 2-214
Tabel 2.132	Pencapaian Indikator Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2015- 2020	~ 2-215
Tabel 2.133	Pencapaian Indikator Fokus Iklim Investasi Tahun 2015- 2020	~ 2-215
Tabel 2.134	Pencapaian Indikator Fokus Sumberdaya Manusia Tahun 2015- 2020	~ 2-216
Tabel 2.135	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	~ 2-219
Tabel 2.136	Pencapaian Indikator SDOs Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2020	~ 2-225
Tabel 2.137	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)	~ 2-266

Tabel 2.138	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)	~	2-272
Tabel 2.139	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)	~	2-276
Tabel 2.140	Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	~	2-281
Tabel 2.141	Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2020	~	2-283
Tabel 2.142	Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~	2-289
Tabel 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	3-2
Tabel 3.2	Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan	~	3-3
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	3-5
Tabel 3.4	Kontribusi Komponen Realisasi Belanja	~	3-6
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lampung Tengah	~	3-6
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Lampung Tengah	~	3-7
Tabel 3.7	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Lampung Tengah	~	3-8
Tabel 3.8	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Daerah	~	3-12
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Penuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015- 2020	~	3-16
Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran 2015-2020	~	3-16
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran	~	3-18
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah	~	3-19
Tabel 3.13	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Tengah	~	3-23
Tabel 3.14	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	3-28
Tabel 3.15	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	~	3-30
Tabel 4.1	Iru Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis	~	4-19
Tabel 4.2	Agenda Kerja Utama Berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan Dalam RPJMD Provinsi Lampung	~	4-22
Tabel 4.3	Keterkaitan Iru Strategis Nasional, Provinsi, KLMB, dan Kabupaten Lampung Tengah	~	4-37
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008-2025, Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Misi & Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024	~	5-7
Tabel 5.2	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026	~	5-10
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lampung Tengah	~	6-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	6-6
Tabel 6.3	Iru Strategis dan Rekomendasi Pilar Sosial	~	6-11
Tabel 6.4	Iru Strategis dan Rekomendasi Pilar Ekonomi	~	6-13
Tabel 6.5	Iru Strategis dan Rekomendasi Pilar Lingkungan	~	6-13

Tabel 6.6	Ibu Strategis dan Rekomendasi Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	~	6-14
Tabel 6.7	Penjabaran Program Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 Sebagaimana Dimutakhirkan Melalui Kemendagri No. 050-3708 Tahun 2020	~	6-21
Tabel 6.8	Rekomendasi KLMS dan Program Kabupaten Lampung Tengah	~	6-37
Tabel 6.9	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lampung Tengah	~	6-45
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Tengah	~	7-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	7-6
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	8-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	8-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026	~	1-4
Gambar 1.2	RPJMD Dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	~	1-20
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah	~	2-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	~	2-4
Gambar 2.3	Peta Kelereng Kabupaten Lampung Tengah	~	2-7
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah	~	2-8
Gambar 2.5	Peta Sub Das Way Seputih Kab. Lampung Tengah	~	2-10
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah	~	2-12
Gambar 2.7	Peta Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031	~	2-13
Gambar 2.8	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031	~	2-14
Gambar 2.9	Peta Sistem Perkotaan Kab. Lampung Tengah	~	2-20
Gambar 2.10	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir	~	2-22
Gambar 2.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor	~	2-24
Gambar 2.12	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Wilayah	~	2-25
Gambar 2.13	Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020	~	2-37
Gambar 2.14	Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020	~	2-39
Gambar 2.15	Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 - 2020	~	2-39
Gambar 2.16	Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020	~	2-40
Gambar 2.17	Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020	~	2-41
Gambar 2.18	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020	~	2-41
Gambar 2.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-43
Gambar 2.20	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-45
Gambar 2.21	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (MLS) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-46
Gambar 2.22	Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kabupaten Lampung Tengah	~	2-47
Gambar 2.23	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Tengah	~	2-49
Gambar 2.24	Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SB)	~	2-267
Gambar 2.25	Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)	~	2-271
Gambar 2.26	Target TPB yang Tidak ada/belum ada Data (NA)	~	2-275
Gambar 4.1	Lingkungan Strategis Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026	~	4-15
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Prioritas Nasional (Nawa Cita II)	~	5-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Tujuan tersebut dilakukan melalui upaya sistematis dan terencana berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan daerah juga merupakan salah satu wujud dari berjalannya fungsi pemerintahan yang secara aplikatif dilaksanakan bersamaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, serta pemberdayaan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Tujuan dari SPPN adalah (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 dan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah terpilih telah dilantik pada 26 Februari 2021. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, daerah diharuskan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah.

Pada saat yang sama, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-4 (tahap akhir) dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2003-2023, serta menjadi momentum strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah menuju masyarakat Lampung Tengah yang maju, aman, adil, dan sejahtera di berbagai bidang pembangunan. Untuk menjaga momentum tersebut, banyak hal baik yang sudah dibangun dan dihasilkan pada tiga tahapan sebelumnya perlu dipertahankan sekaligus perlunya penyempurnaan dan inovasi baru sejalan dengan dinamika masyarakat perkembangan daerah serta kemajuan yang ingin diwujudkan pada periode ini.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangan berdasarkan bidang urusannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta isu-isu strategis yang berkembang. Dalam penyusunan RPJMD, diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang BPPN maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kampung, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 menjadi dokumen yang sangat strategis, antara lain sebagai:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 tahap ke empat.
3. Pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun.
4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah.
5. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
6. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang dimiliki.
7. Pedoman penyusunan Rencana Strategis tahun 2021-2026 bagi Perangkat Daerah serta pedoman penyusunan RPJMDes bagi seluruh kampung di Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan demikian akan tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Tengah.

Tahapan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Tabel 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026



Tabel 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

Tahapan	Keterangan
Rancangan Teknokratik RPJMD	Proses teknokratik memuat evaluasi indikator kinerja pembangunan pada seluruh urusan konkuren kewenangan daerah kota dan evaluasi kinerja keuangan periode lalu melalui pendekatan ilmiah, serta merumuskan isu strategis daerah. Penyusunan teknokratik berisi Bab 1 hingga Bab 4.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	Paralel dengan penyusunan Teknokratik RPJMD, proses penyusunan KLHS RPJMD bertujuan memetakan kondisi kinerja indikator-indikator yang terkait dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Indikator yang belum baik menjadi landasan penyusunan isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan terintegrasinya kajian lingkungan dengan RPJMD diharapkan pembangunan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
Rancangan Awal RPJMD	Tahap ini memuat pengintegrasian proses teknokratik dan proses politik. Permasalahan yang dipetakan dalam teknokratik kemudian diintegrasikan dengan visi-misi-janji Kepala daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih tajam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Selanjutnya tahap ini juga sudah memetakan program-program serta indikator program dan keuangan indikator per program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD berisi BAB 1 hingga Bab 9. Konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun. Rancangan Awal perlu di ajukan ke DPRD, paling lambat 40 hari setelah kepala daerah dilantik. Rancangan Awal perlu di ajukan ke Provinsi paling lambat 30 hari setelah kepala daerah dilantik.
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Tahap ini dilaksanakan paralel dengan Rancangan awal RPJMD. Tahap ini melakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah, sehingga penyusunan program dan kegiatan tidak berlandaskan kepada keinginan, melainkan berlandaskan pada analisis permasalahan yang perlu diselesaikan. Apa yang diidentifikasi dalam Rancangan awal Renstra menjadi masukan Rancangan Awal RPJMD, sehingga yang termuat dalam RPJMD benar-benar merupakan masukan dari Renstra Perangkat daerah. Rancangan awal Renstra berisi Bab 1 hingga Bab 7.

Tahapan	Keterangan
Rancangan RPJMD	Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD yang telah mengakomodir masukan-masukan dari proses konsultasi publik-proses pembahasan di DPRD-proses pembahasan di Provinsi. Setelah tahap penyusunan rancangan RPJMD diselenggarakan Musrenbang, atau paling lambat Musrenbang RPJMD dilaksanakan 75 hari setelah kepala daerah di lantik.
Rancangan Akhir RPJMD	Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

Sumber data: Permendagri No 56/2017; Permendagri No 7/2018 (diolah)

Sebagai dokumen publik, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian, matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen RPJMD ini merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota sekitar di Provinsi Lampung.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1621);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknik Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketertaman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknik Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1751);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah, RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 tersebut dengan dokumen lain yang relevan diantaranya

RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Daerah lain yang berbatasan, RPJPD Kabupaten, RTRW Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan rencana pembangunan sektoral lainnya baik yang berada di Kabupaten Lampung Tengah maupun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Lampung, dan RPJMD Daerah lain yang berbatasan

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman dan memperhatikan RPJMN Nasional. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Hal pokok yang diperhatikan adalah bahwa arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan akan masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2025 akan memperhatikan sektor prioritas pembangunan daerah dan agenda kerja utama pembangunan daerah Provinsi Lampung. Sektor prioritas pembangunan daerah tersebut adalah (i) pembangunan bidang pariwisata dan budaya; (ii) reformasi birokrasi; (iii) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (iv) pembangunan bidang kesehatan; (v) pembangunan bidang pendidikan; (vi) pembangunan bidang infrastruktur; (vii) pembangunan bidang pertanian dan perdesaan; (viii) pembangunan bidang industri; dan (ix) pembangunan bidang lingkungan hidup. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah juga akan memperhatikan 33 agenda kerja utama pembangunan daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 juga dilakukan dengan memperhatikan RPJMD daerah lain yang berbatahan dengan menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD daerah lain adalah (i) visi pembangunan Kota Metro sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga berbasis ekonomi kerakyatan dengan penekanan misi pembangunan yaitu meningkatkan kualitas SDM sektor pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan good governance; (ii) visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan daerah yang aman, mandiri, dan sejahtera dengan penekanan misi pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kerukunan agama dan budaya, layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, perekonomian untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, good governance, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (iii) visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, dan berdaya saing dengan penekanan misi pembangunan yaitu mengembangkan SDM produktif, kreatif, dan inovatif; perekonomian daerah yang kokoh, merata, dan berkelanjutan; memperluas cakupan prasarana dan yang terintegrasi antar wilayah; good governance; kehidupan masyarakat yang religius, partisipatif, taat hukum, dan mentransformasi budaya daerah sebagai sumber energi sosial pembangunan; dan (iv) visi pembangunan kabupaten lain yang berbatahan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah.



Tabel 1.2 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi Lampung

RPJMD Tahunan ke-IV (RPJMD Kab. Lampung Tengah 2021-2022)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMD 2019-2024	
	Visi	Program Unggulan	Visi	Agenda Kerja Utama	Visi	Agenda Pembangunan
Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera					Terciptanya Indonesia Maju yang Berkeadilan, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa	
	Misi ke-1: Peningkatan taraf Kesehatan, Pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat	Pendidikan Berjaya: Meningkatkan kualitas tingkat Pendidikan Dasar melalui beasiswa untuk masyarakat tidak mampu dan atau berprestasi Kesehatan Berjaya: Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Misi ke-2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pengandang disabilitas.	1. Smart School: pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan 2. Lampung Sehat - Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (korensi) dengan pemerintah kabupaten/kota 3. Anak Muda Berjaya: mendorong keterampilan dan	Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



RPJMD Tahapan ke-IV (RPJMD Kab. Lampung Tengah 2022-2026)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026	RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024	RPJMN 2019-2024
	Lapangan Pejuang ASAG Lampung, peningkatan kualitas guru, mendukung peran kader dan bidan desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan, Perbaikan Rumah Sani di wilayah Timur dan Barat Pemuda Milenial Berjaya: Meningkatkan wadah yang menginspirasi, menginspirasi ragam kreatifitas dan inovasi untuk menunjang peningkatan UNGW serta Ekonomi Rakyat	formal, semi-formal, gerakan malu menganggur, membuka usaha muda, pendirian ganggang remaja	



KPJMD Tahapan ke-IV (KPJMD Kab. Lampung Tengah 2009-2009)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2011-2016		KPJMD Prioritas Lampung 2019-2024	KPJMD 2019-2024		
Misi	Misi	Misi	Misi	Misi	Misi	
Misi ke-4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, efisien dan tepat	Misi ke-1: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berkeseluruhan Lingkungan Guna Efisiensi Penguasaan Manusia, Ruang dan Jasa	Misi ke-2: Setiap Infrastruktur Jalan (jalan) harus ada pertepatan pertepatan pertepatan jalan untuk aman nyaman dan Lampung Lampung serta secara pertepatan	Misi ke-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan aksesibilitas produk dan komoditas utama.	1. Infrastruktur Lampung Secara komprehensif antar kabupaten/kota untuk mengembangkan zona pertumbuhan baru, infrastruktur untuk layanan wisata, infrastruktur pertanian, perikanan dan infrastruktur telekomunikasi	Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan Misi ke-4: Meningkatkan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan 2. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 3. Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Sosial
Misi ke-5: Meningkatkan pelayanan dan keamanan serta keamanan masyarakat melalui peningkatan tata laksana pemerintahan, budaya, hukum, adat, agama, sosial, budaya dan sumber daya manusia.	Misi ke-2: Menciptakan kemakmuran masyarakat yang adil, aman, damai serta kondusif guna menciptakan	Misi ke-5: Meningkatkan kehidupan yang religius (agama), kebudayaan, aman dan damai.	Misi ke-5: Meningkatkan kehidupan yang religius (agama), kebudayaan, aman dan damai.	1. Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pusat kegiatan sebagai pusat	1. Perlindungan bagi agribisnis bangsa dan membina rasa aman pada seluruh warga	Revitalisasi Mental dan Pembangunan Kelangkaan



RPJMD Tahapan ke-IV (RPJMD Kab. Lampung Tengah 2022-2025)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2025		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMD 2019-2024	
Politik dan hukum antara demokrasi dan otonomi	Inovasi	Sains		informasi dan komunikasi publik untuk membangun radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan 2. Lampung Raya Festival: menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, moralitas kebangsaan lokal dan mengembangkan kearifan serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan		
	Misi ke-4: meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui	Pemerintah Berkeadilan: meningkatkan profesionalisme birokrasi, penguatan jaring pengaman	Misi ke-5: membangun ketahanan ekonomi	1. Kerja Sama Berkeadilan (KSB): memperkuat jalinan kemitraan para pelaku untuk membangun bisnis.	Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan



RPJMD Tahapan ke-IV (RPJMD Kab. Lampung Tengah 2022-2025)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2025		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMD 2019-2024	
	penguatan produksi pertanian dan perikanan hulu-hulu dengan dan stabilitas harga jual hasil dari guna mencapai angka kemandirian	komoditas unggulan pertanian untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani STRUKAM Berjaya mendorong berkembangnya UMKM di setiap Lampung sebagai poros ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai angka kemandirian	memerankan sektor pertanian dan wilayah perikanan yang sejalan dengan wilayah perikanan.	pupuk pasar, modal dan asuransi bagi anak petani (pertanian skala luas) 3. Memfungsikan BUMN untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (berkaitan) dengan pemerintah kabupaten/kota		dan Berkoordinasi 2. Mengembangkan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Misi ke-2: meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Pelayanan Berjaya membangun dan melayani akses masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pelayanan usaha yang mandiri.	Misi ke-3: Meningkatkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	1. Meningkatkan efisiensi pemerintahan, melalui sistem pengurangan biaya berbasis kinerja dan kompetensi (job it assessment) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Misi ke-6: Penguatan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Misi ke-8: Penguatan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan dan Transformasi Pelayanan Publik



RPJMD Tahapan ke-IV (RPJMD Kab. Lampung Tengah 2022-2026)	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2021-2026		RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024		RPJMDN 2019-2024	
				1. APBD Reformasi Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program peningkatan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat 2. Smart Village: meningkatkan taraf ekonomi dan layanan pemerintahan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation 3. Pendampingan Program Pembangunan Desa	Misi ke-2: Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan	

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RPJPD Kabupaten Lampung Tengah

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan tahap ke-IV dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008-2025. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 telah mengamanatkan bahwa tahap ke-IV pembangunan daerah akan diprioritaskan pada program/kegiatan yang bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada periode lima tahun ketiga sekaligus juga bertujuan untuk memacu dan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pembangunan daerah jangka panjang yang dipedomani dalam rangka RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 adalah (i) peningkatan SDM berdaya saing dan religius; (ii) sistem agribisnis yang maju dan tangguh; (iii) perketatan dan ketertarikan serta keamanan masyarakat; (iv) pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan terasi; (v) pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (vi) pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 secara perencanaan kewilayahan dilakukan berpedoman pada arahan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, Provinsi maupun Kabupaten melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana program-program pemerintah daerah dengan RPPL yang ditetapkan dalam indikasi program utama perwujudan struktur ruang dan pola ruang.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021 - 2026 akan memuat program/kegiatan rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW. Kebijakan penataan ruang yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah adalah pengembangan pertanian modern; pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang; pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan, dan pusat pelayanan secara terpadu; pengembangan minapolitan; pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana; peningkatan SDM unggul dan berdaya saing; dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

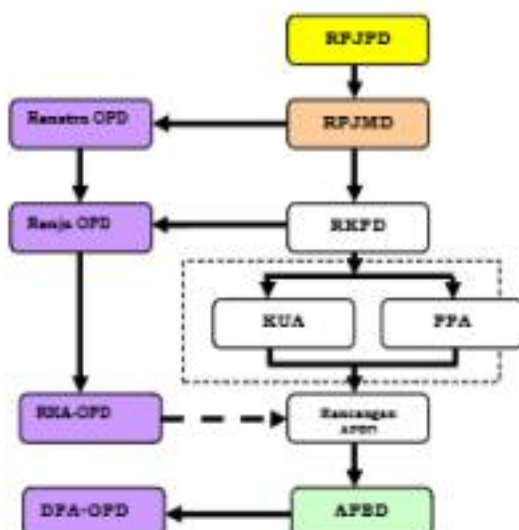
Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah juga sangat berhubungan dengan rencana program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 yang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan yang secara otomatis akan menjadi bagian dari kebijakan dan program dalam RPJMD Lampung Tengah 2021-2026.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada selanjutnya menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 akan dan harus mencerminkan upaya pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu *Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya*. Program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada upaya untuk pencapaian misi pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah yaitu setiap infrastruktur jalanमुख (SIJALU) berjaya, keberagaman umat berjaya, pelayanan berjaya, pendidikan berjaya, petani berjaya, dan kesehatan berjaya.

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 juga akan memberikan arahan dan pedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam hal merumuskan tujuan pembangunan daerah. Seluruh program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu (i) mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan; (ii) mewujudkan kondisi aman, tertib dan tentram dalam kehidupan masyarakat; (iii) mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas; (iv) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penanggulangan kemiskinan yang terpadu; dan (v) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan produktif.



Gambar 1.2. RPJMD Dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah mulai Tahun Anggaran 2022 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan APED setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah, maka di dalamnya akan memuat dan menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 setiap tahunnya. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan/kampung, kecamatan, dan kabupaten. Prioritas, sasaran, rencana program, dan kegiatan tahunan pembangunan daerah pada RKPD harus berpedoman, selaras, dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, RPJMD Provinsi Lampung, serta RPJM Nasional.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Renja Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD 2021 - 2026 akan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Seluruh program dan kegiatan tahunan dalam Renja OPD 2021 - 2026 bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yaitu *Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya*. Program dan kegiatan tahunan dalam Renja OPD 2021 - 2026 disusun dan dilaksanakan untuk mengimplementasikan misi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yaitu percepatan infrastruktur, stabilitas keamanan, *good governance*, petani berjaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Renja OPD 2021 - 2026 juga disusun dengan memperhatikan program unggulan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan bagian dari visi misi Kepala Daerah yaitu percepatan perbaikan jalan mulus, menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan umat beragama, menjangkau dan melayani aspirasi masyarakat serta

meningkatkan pelayanan publik dan pembuatan perizinan usaha kecil dan menengah, meningkatkan mutu pendidikan guna menciptakan generasi cemerlang, meningkatkan produksi para petani dan mempertahankan stabilitas harga produk pertanian, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, penyediaan ruang dan fasilitas pemberdayaan SDM, dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Renja OPD juga disurur dengan memperhatikan tema RKPD tahunan dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten Lampung Tengah.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan KLHS RPJMD

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Rencana Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD secara kaedah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup pertimbangan rekomendasi isu strategis, permasalahan, dan tataran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah akan sangat berhubungan dengan isu strategis hasil konsultasi publik pemerintah daerah dalam KLHS, diantaranya, pertama, isu strategis pilar sosial yang berkaitan dengan isu kemiskinan, fungsi lembaga kesehatan, layanan dasar bidang sosial, stunting, ibu hamil dan bayi, KB, angka harapan hidup, layanan pendidikan, dan kekerasan anak dan perempuan. Kedua, isu strategis pilar ekonomi yang berkaitan dengan isu PDB perkapita, infrastruktur destinasi wisata dan potensi wilayah, desa tertinggal, dan PAD. Ketiga, isu strategis pilar lingkungan yang berkaitan dengan isu akses rumah tangga terhadap air minum, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), kesiapan menghadapi bencana, pengelolaan sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan rehabilitasi lahan kritis. Keempat, isu strategis pilar hukum dan tata kelola kelembagaan yang berkaitan dengan isu sosialisasi aturan hukum dan undang-undang, keterwakilan perempuan, dan kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, antara lain:

- 1) Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDG's);
- 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG);
- 3) Rencana Aksi Nasional Mak Asasi Manusia (RANMAM);
- 4) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK);
- 5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
- 6) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Lampung Tengah;
- 7) *Grand Design* Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah;
- 8) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Lampung;
- 9) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung;
- 10) RAD Pengurangan Risiko Bencana;
- 11) Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 12) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
- 13) Aksi Penanganan Konflik Sosial.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah lima tahun ke depan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah terdapatnya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan:

- a. Arah kebijakan keuangan daerah.
- b. Strategi pembangunan daerah.
- c. Kebijakan umum daerah; dan

- d. Program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Hubungan Antar Dokumen
4. Maksud dan Tujuan
5. Sistematika Penulisan

BAB II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Pelayanan Umum
4. Aspek Layanan Umum Kewilayahan
5. Aspek Daya Saing Daerah
6. Pencapaian Kinerja RPJMD Periode 2015 - 2020

BAB III - GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3. Kerangka Pendanaan

BAB IV - PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
2. Penelaahan Isu Strategis
3. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

BAB V - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran
4. Prioritas Pembangunan Daerah 2021-2026 (Program Unggulan)

BAB VI - STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi dan Arah Kebijakan
2. Program Pembangunan Daerah
3. Program Prioritas



BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan

BAB VIII - KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lampung Tengah

BAB IX - PENUTUP

1. Pedoman Transisi
2. Keidakh Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam lima tahun terakhir yang mencakup aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta gambaran kinerja pencapaian RPJMD periode sebelumnya (2016-2021) sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta menjadi pijakan perumusan target kinerja pembangunan Kabupaten Lampung Tengah dalam lima tahun ke depan (2021-2026).

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

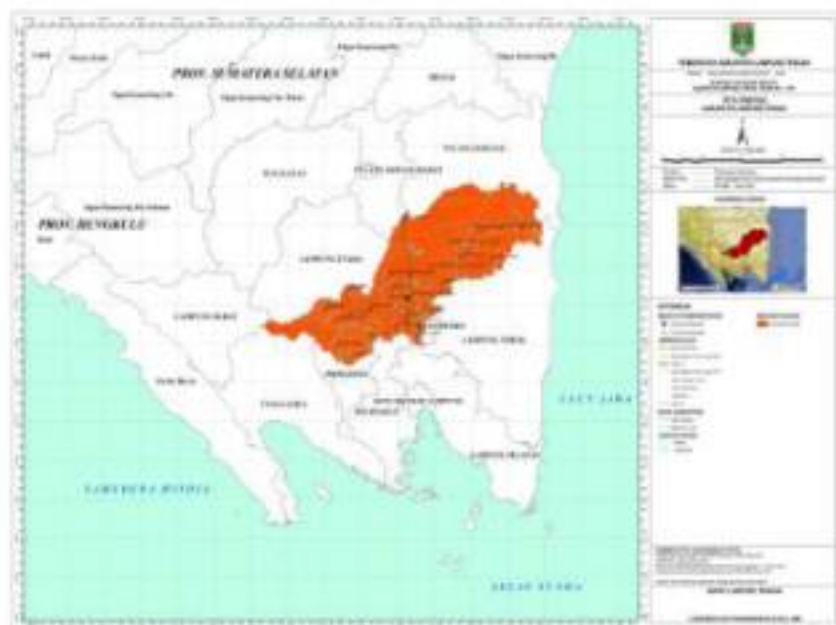
Pada bagian Aspek Geografi dan Demografi disajikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah hingga tingkat kecamatan dan kampung/kelurahan.

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

2.1.1. Aspek Geografi

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki letak yang sangat strategis. Secara umum Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah yang dinamis dan berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik pada bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Gambar 2.1
Peta Orientasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Bersamaan dengan pembentukan tersebut, juga terjadi perpindahan Ibu Kota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 ini, luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3.802,68 Km².

Berdasarkan hasil survey Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sekarang berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.659,37 Km². Kemudian berdasarkan hasil survey ulang oleh BAPPEDA Kabupaten Lampung Tengah tahun 2006 dalam kegiatan penyusunan Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil survey yang

dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas wilayah 4.789,82 Km². Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen dan publikasi resmi.

Selanjutnya berdasarkan kebijakan Penggunaan Satu Sumber Peta (*One Map Policy*), disyaratkan penggunaan Peta Batas Administrasi yang bersumber dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PBBW-BIG) dalam penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan peta tersebut dilakukan perhitungan ulang menggunakan Software SIG sehingga diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah 484.550,04 Ha atau 4.845,50 Km² yang dipakai saat ini sebagai luas administrasi secara resmi.

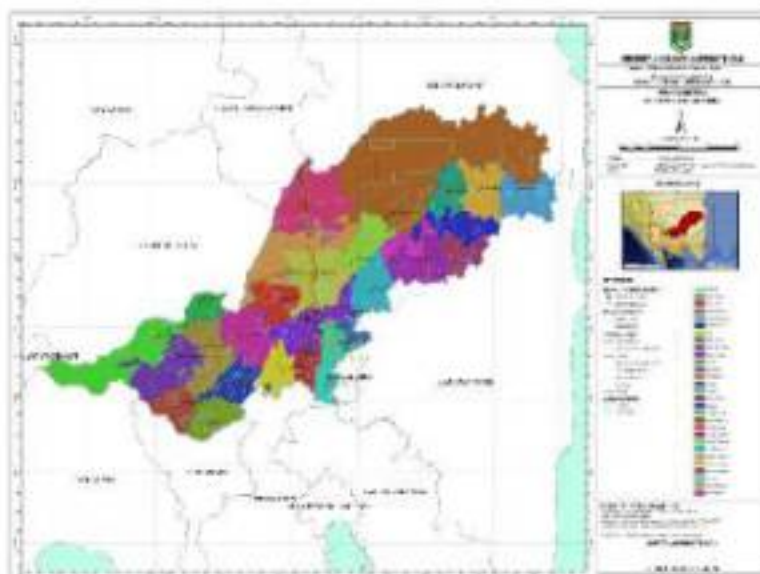
Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak di antara 104°35' sampai dengan 105°30' Bujur Timur dan 4°30' sampai dengan 4°15' Lintang Selatan dengan ibukota di Kota Gunung Sugih.

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan dan 301 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesisir, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah adalah Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.789,15 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Batu Nuban seluas 6.370,67 Ha.

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Tabel 2.1
Jumlah Kampung/Kelurahan, Luas Wilayah Menurut Kecamatan di
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km ²	%	Kampung	Kelurahan
1	Pedang Ratu	Maduyang Ratu	164,00	3,61	13	-
2	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	70,22	1,54	6	-
3	Belagel Lingga	Nagri Katon	272,68	6,00	14	-
4	Pubian	Nagri Kepayungan	187,40	4,12	20	-
5	Anak Tuha	Nagara AjiTua	162,68	3,58	12	-
6	Kalirajo	Kalirajo	111,90	2,46	17	-
7	Sandang Agung	Sandang Agung	97,90	2,13	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	104,88	2,31	17	-
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	164,01	3,61	11	4
10	Bekri	Kurumedadi	94,13	2,07	8	-
11	SumiRatu	Bukusari	63,71	1,40	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	64,18	1,41	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	60,70	1,34	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	46,90	1,03	7	-
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	130,00	2,86	14	-
16	Tarbanggi Besar	Tarbanggi Besar	217,13	4,73	7	3
17	Seputih Agung	Dono Arum	106,96	2,35	10	-
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ikr	214,43	4,72	8	-
19	Terusan Nunyal	Gunung Betin Ikr	239,69	5,37	7	-
20	Spt. Mataram	Kurnia Mataram	113,96	2,55	12	-

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah Kampung/Kel	
			km ²	%	Kampung	Kelurahan
21	Edr. Mataram	Jati Datar	1.017,89	22,49	9	-
22	Spt. Banyak	Tanjung Harapan	186,62	3,01	18	-
23	Way Seputih	Buko Binangun	62,84	1,37	6	-
24	Rumbia	Rano Basuki	118,89	2,60	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	97,75	2,15	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya Utama	93,88	2,08	10	-
27	Spt. Surabaya	Gaya Baru Satu	141,55	3,11	18	-
28	Edr. Surabaya	Surabaya Ilir	188,09	3,04	10	-
	Jumlah		4.545,50	100,0	301	10

Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

b. Kondisi Topografi

Secara Topografi Lampung Tengah dapat dibagi 5 (lima) bagian yaitu :

- Daerah Topografi Berbukit sampai Bergunung.
Daerah ini terdapat di Kecamatan Selangai Lingga dengan ketinggian rata-rata 1.600 mdpl.
- Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang.
Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300-500 mdpl.
- Daerah Dataran Aluvial.
Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubusan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25-75 mdpl dengan kemiringan 0%-3%.
- Daerah Rawa Pasang Surut.
Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5-1 mdpl.
- Daerah River Basin.
Kabupaten Lampung Tengah memiliki 3 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Selampung di Kecamatan Selangai Lingga.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).

- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga dan Sendang Agung.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Selagai Lingga, dan Sendang Agung.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu:

- **Tanah Usaha Khusus I.**

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 - 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

- **Tanah Usaha Utama IA dan B**

Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.

- **Tanah Usaha Utama IC**

Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa disirai relatif ber-kurang.

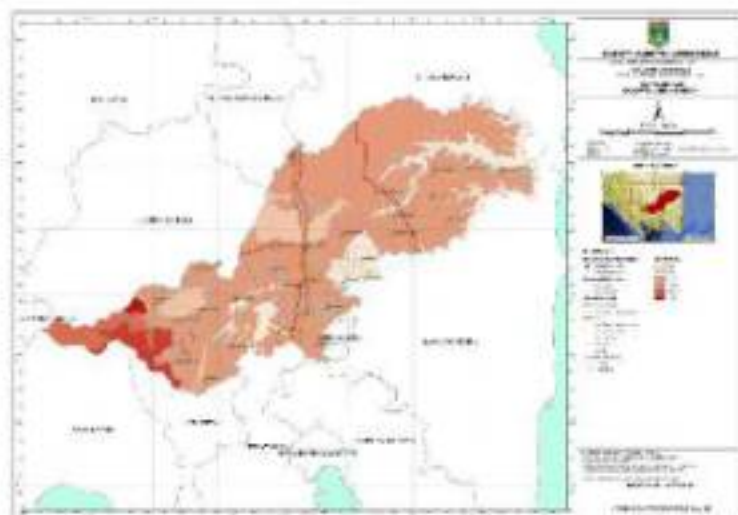
- **Tanah Usaha Utama ID**

Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.

- **Tanah Usaha Utama II**

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

a. Kondisi Geologi

Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi yaitu Luffa Lampung (Latocot) yang hampir meliputi seluruh daerah Lampung Tengah dengan tanah Latocot dan Podsolik. Pada ketinggian 50-500 meter terdapat bahan Luffa Lampung yang semakin ke barat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan Gunung Api (Pliktoten). Di bagian utara wilayah ini terdapat formasi Palembang yang lebih didominasi oleh morfologi dataran rendah, sedangkan bagian barat daya fisiografinya menjadi daerah berbukit dan pegunungan karena masuk Jalur Bukit Barisan.

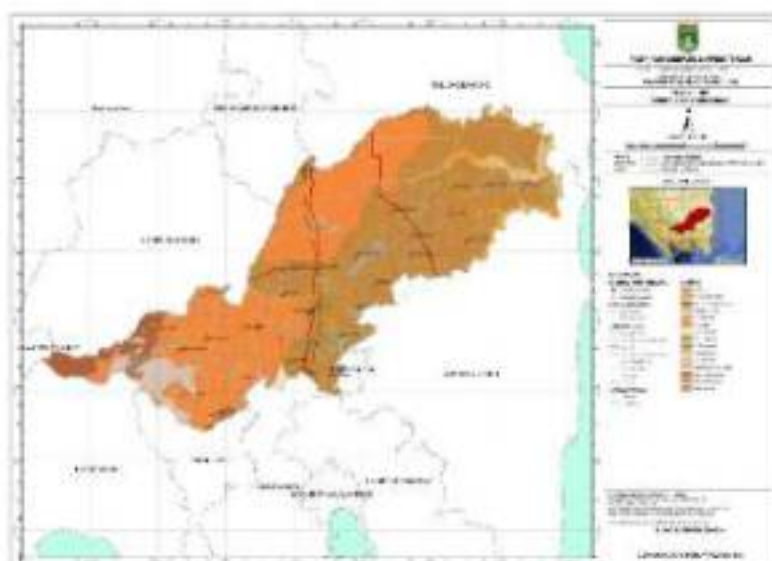
Di wilayah Kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo terdapat batuan Tachocot, Granit Kapen dan batuan Metamorf Sakis (Pratercier) selain juga mempunyai potensi sumber bahan galian batu Gamping. Endapan batuan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh *tuffs with purniceous* dan *Coarse grained clastic tuffaceous*.

Bagian utara Kabupaten Lampung Tengah lebih didominasi oleh endapan *tuffs dengan purniceous*, sedangkan bagian selatan lebih didominasi oleh *Coarse grained clastic tuffaceous*. Namun begitu formasi-formasi batuan lainnya tetap ada diantaranya yaitu:

1. Endapan pasir kwarsa, rawa, dan alluvium.
2. Batuan gunung api kuarter muda dengan komposisi batuan breksi, lava, dan andesit-basaltis.

3. Formasi Lampung. Formasi ini terdiri atas batuan tuff berbatu apung, batuan pasir tufan dan sisipan tuffit yang berumur Pleistocen.
4. Formasi Terbanggi yang menjadi dengan formasi Kasai. Komposisi batuan ini meliputi batuan pasir dengan sisipan batulempung.
5. Formasi Kasai. Merupakan percelingan batu pasir tufaan dengan tuff batu apung, strukturnya yaitu silang siur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikan.
6. Formasi Gumai yang berumur Miosen Awal-Tengah. Formasi ini tersusun oleh batuan serpih gamping, napal, batu lempung, dan batu lanau.
7. Formasi Hulu Simpang. Susunan batuan ini terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuff bersusunan andesitik basaltik terubah, berurat kuarsa dan mineral sulfida.
8. Formasi Talangaker yang berumur Oligosen dengan susunan breksi konglomerat, batupasir kuarsa, batu pasir sisipan lignit/batubara, dan batu gamping.
9. Formasi Komplek Gunung Asih dengan susunan batuan malihan seperti Sekis, kuarsit, marmer, gneis, dan perlit.
10. Batuan terobosan Mesoizoikumakhir.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

d. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Keadaan hidrologi di Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah adalah sungai Way Seputih yang membentang sejauh 193 km dan melintasi 12 kecamatan. Sungai Way Seputih ini dikategorikan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749.299,20 ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461.922,20 ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih.

Selain terdapatnya DAS Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi bagian dari wilayah DAS lainnya seperti DAS Sekampung di bagian selatan dan DAS Tulang Bawang di bagian utara. Dengan demikian, wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi jalur wilayah bagi 3 (tiga) DAS di Provinsi Lampung yaitu:

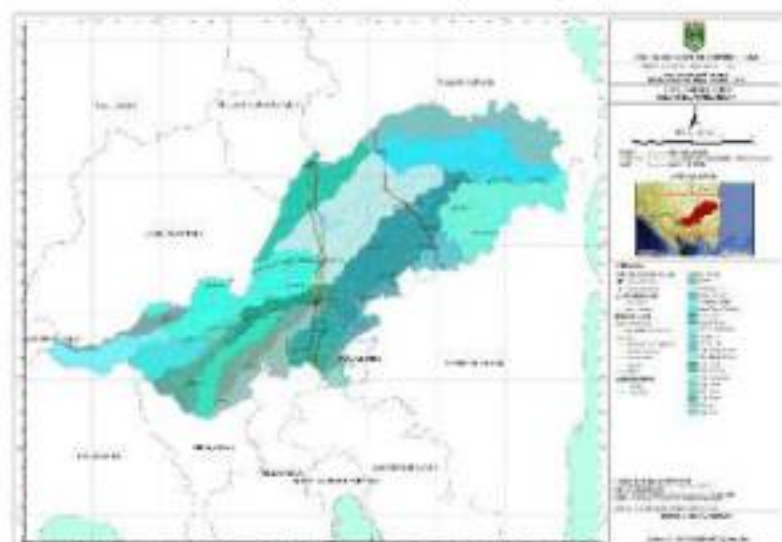
1. DAS Way Seputih.
2. DAS Way Sekampung.
3. DAS Way Tulang Bawang.

Tidak kurang dari 18 (delapan belas) sungai dan anak sungainya terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Sungai-sungai tersebut membelah dan membentang di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan total panjang sungai-sungai secara keseluruhan adalah 813 km melebihi panjang garis keliling Kabupaten Lampung Tengah (517,077 km). Beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah, adalah:

1. Way Waya
2. Way Ketaya
3. Kali Pasir
4. Way Besi
5. Kali Macar
6. Way Tipo
7. Way Seputih
8. Way Pengakuan
9. Way Tatayan
10. Way Pubian
11. Kali Punggur

12. Way Sekampung
13. Way Raman
14. Way Bening
15. Way Keliwang
16. Way Buring
17. Way Pengubuan
18. Way Pengandungan

Gambar 2.5
Peta Sub DAS Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2021

e. Kondisi Klimatologi

Bagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Lampung Tengah hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim A. Sebagian besar wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Lampung Tengah merupakan daratan rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0-50 mdpl sedangkan pada wilayah bagian barat merupakan pegunungan dengan Kecamatan Pubian (Kampung Kota Batu) dengan ketinggian berkisar 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan titik terendah berada di Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang/Sedewa) yang ketinggiannya hanya 7 meter di atas permukaan laut.

Wilayah dengan jumlah curah hujan tertinggi berada di wilayah utara sekitar Kecamatan Bandar Mataram dan Terusan Nunyai dengan curah hujan di atas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 150-260 mm/bulan. Curah hujan rendah atau di bawah rata-rata berada di sekitar Kecamatan Bekri, Padang Ratu, Bangunrejo, Kalirejo, dan Anak Tuha yang merupakan kawasan sentra perkebunan sawit di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan terbagus yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga memiliki jumlah hujan di bawah rata-rata, yaitu sekitar 80-100mm/bulan.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (Monsoon Asia). Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukkan bahwa temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20°-28°C dengan suhu rata-rata pertahun 26,3°C. Temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif stabil dan tidak pernah menunjukkan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup baik. Kelembaban udara rata-rata di wilayah ini berkisar 80-88%.

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari samudera Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,63 km/jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26°-28°C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33°C dan juga temperatur minimum 22°C.

Gambar 2.6
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

f. Kondisi Tutupan Lahan

Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009, seperti teruang dalam revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031, didominasi oleh lahan bukan sawah sebesar 68,75 persen yang terdiri dari ladang/huma, tegal dan perkebunan, dan lahan sawah 28,929 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan pertanian sawah dan bukan sawah akan sangat berarti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan wilayah.

Gambar 2.7
Peta Tutupan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2011-2031



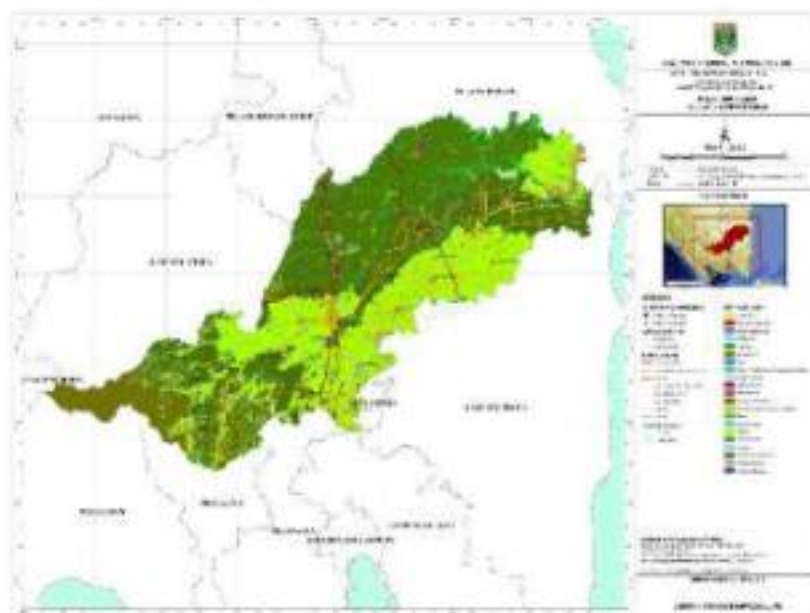
Sumber data: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Tabel 2.2
Tutupan Lahan Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

No.	JENIS	LUAS (ha)	(%)
1	Alang Alang	846,54	0,186
2	Boundary Jalan Tol	772,22	0,170
3	Danau Tapal Kuda	68,86	0,015
4	Danau / Situ	224,85	0,049
5	Kempang	209,00	0,045
6	Hutan Rimba	26426,75	5,814
7	Kolam Okridasi & Pengelolaan Limbah	300,58	0,066
8	Lahan Terbuka	38,31	0,009
9	Pabrik / Industri	1325,25	0,288
10	Pemukaman	1,23	0,0004
11	Perkebunan/Kebun	219317,59	48,249
12	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	37532,66	8,237
13	Rawa	20419,93	4,492
14	Saluran Irigasi	533,54	0,118
15	Sawah	181496,07	28,929
16	Semak Belukar	5334,65	1,218
17	Sungai	2825,35	0,512
18	Tanah Kotorang / Gundul	876,69	0,193
19	Tegalan / Ladang	6070,90	1,336
20	Terminal Bandara	21,88	0,005
	Jumlah	454550,04	100,00

Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Gambar 2.8
Peta Tutupan Lahan Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

g. Kondisi Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031. Pertimbangan ini dilakukan dalam upaya mewujudkan ruang Kabupaten Lampung Tengah sebagai kawasan agribisnis yang berwawasan lingkungan, serta mampu menggerakkan perekonomian wilayah. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 - 2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala provinsi atau beberapa kabupaten serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah provinsi meliputi kawasan perkotaan Terbanggi Besar, perkotaan Bandar Jaya, dan perkotaan Gunung Sugih (TEREAGUS) yang berfungsi sebagai Pusat pemerintahan dan pelayanan regional, pusat pendidikan unggulan terpadu,

pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat koleksi dan distribusi, serta simpul transportasi regional.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan meliputi : (1) PKL Kalirejo di kawasan perkotaan Kalirejo yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, industri kecil dan menengah, minapolitan dan permukiman; dan (2) PKL Seputih Banyak di kawasan perkotaan Seputih Banyak yang berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, industri menengah dan besar, perdagangan jasa dan permukiman.
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, yaitu PKLp Bandar Sari di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi.
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi:
 - a. PPK Kota Gajah di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pusat pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, dan minapolitan;
 - b. PPK Watex di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pematangan produk unggulan;
 - c. PPK Kurnia Mataram di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengembangan peternakan sapi; dan;
 - d. PPK Gaya Baru I di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi hutan lindung.

5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi:
- a. PPL Dono Arum yang berfungsi sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri menengah;
 - b. PPL Sendang Mulyo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri dan kawasan wisata;
 - c. PPL Bangun Rejo berfungsi sebagai pengembangan komoditi perkebunan, pengembangan peternakan, dan kawasan industri;
 - d. PPL Sukobinangun yang berfungsi sebagai pengembang pertanian lahan kering dan kawasan industri kecil menengah;
 - e. PPL Reno Bacuki yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pertanian lahan basah, dan permukiman perkampungan;
 - f. PPL Bina Karya Utama yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan dan permukiman perkampungan;
 - g. PPL Surabaya Ilir yang berfungsi sebagai kawasan minapolitan, perdagangan jasa, dan konservasi kawasan lindung;
 - h. PPL Negeri Kepayang yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian, pengembangan perkebunan, dan pengembangan agribisnis/industri pengolahan;
 - i. PPL Gedung Sari yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman perkampungan;
 - j. PPL Trimurjo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah, Sentra pemasaran pertanian dan perdagangan jasa;
 - k. PPL Tanggul Angin yang berfungsi sebagai pengembangan agribisnis dan tanaman pangan, perdagangan jasa;
 - l. PPL Rukti Marjo yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan pengembangan ternak besar, dan

- m. PFL Kusumodadi yang berfungsi sebagai pengembangan perkebunan, peternakan dan pertanian hortikultura.

Adapun rencana sistem perkotaan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

- 1) **Pusat Kegiatan Lokal (PKL):** PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Lampung Tengah telah ditetapkan dalam RTRWP Lampung 2009 - 2029 di dua wilayah yaitu:
 - a. **PKL TERBAGUS** yang meliputi Kecamatan Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan unggulan terpa-du, perdagangan dan jasa dan pusat koleksi dan distribusi. PKL TERBAGUS akan melayani selu-ruh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. **PKL Kalirejo** dengan fungsi utama pusat perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan produksi perikanan air tawar. PKL Kalirejo akan melayani beberapa kecamatan disekitarnya seperti Kecamatan Bangun Rejo, dan Kecamatan Bekri.
 - c. **PKL Seputih Banyak** dengan fungsi utama pusat pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya air tawar, payau, penangkapan dan industri pengolahan. PKL Seputih Banyak akan melayani beberapa Kecamatan di sekitarnya diantaranya yaitu Kecamatan Way Seputih, Seputih Raman, Rumbia, dan Seputih Surabaya.
- 2) **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK):** PPK merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di empat wilayah yaitu:
 - a. **PPK Haduyang Ratu** di kawasan perkotaan Padang Ratu yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan

perkebunan, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan.

- b. PPK Kota Gajah di kawasan perkotaan Kota Gajah yang berfungsi sebagai pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, serta kawasan minapolitan.
- c. PPK Gaya Baru I di kawasan perkotaan Seputih Surabaya yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa dan kawasan hutan lindung.
- d. PPK Bulusari di kawasan perkotaan Bumi Ratu Nuban yang berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan dan pusat pemasaran produk unggulan;
- e. PPK Kurnia Mataram di kawasan perkotaan Seputih Mataram yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga dan pengembangan peternakan sapi;
- f. PPK Bumi Nabung Ilir, PPK Bumi Nabung ditetapkan untuk mengkomodifikasi rencana pembentukan pusat pemerintahan di rencana DOB Seputih Timur. Adapun fungsi utama PPK Bumi Nabung adalah sebagai Pengembangan pertanian tanaman pangan, pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa dan permukiman perkotaan.
- g. PPK Negara Aji Tuha, PPK Anak Tuha memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, simpul transportasi darat dan permukiman perkotaan.
- h. PPK Reno Basuki, PPK Rumbia memiliki fungsi utama sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, permukiman perkotaan, dan perdagangan dan jasa.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL): merupakan kawasan perkotaan yang melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di 13 wilayah yaitu:

- a. PPL Dono Arum dengan fungsi utama sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri

- menengah. PPL Dono Arum akan melayani seluruh kampung dalam Kecamatan Seputih Agung.
- b. PPL Sendang Agung dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri, dan pariwisata. PPL Sendang Agung akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Sendang Agung.
 - c. PPL Bangun Rejo dengan fungsi utama sebagai pengembang komoditi perkebunan, peternakan, dan kawasan industri. PPL Bangun Rejo akan melayani kegiatan di seluruh kampung di Kecamatan Bangun Rejo.
 - d. PPL Sukobinangun dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan kering dan industri kecil dan menengah. PPL Sukobinangun akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Way Seputih.
 - e. PPL Bina Karya Utama dengan fungsi utama sebagai pengembangan komoditi perkebunan. PPL Bina Karya Utama akan melayani kampung-kampung di Kecamatan Putra Rumbia.
 - f. PPL Surabaya Ilir dengan fungsi utama sebagai kawasan minapolitan, perdagangan dan jasa, serta konservasi kawasan lindung. PPL Surabaya Ilir akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bandar Surabaya.
 - g. PPL Negeri Kepayungan dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian perkebunan, dan agribisnis/industri pengolahan. PPL Negeri Kepayang akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Pubian.
 - h. PPL Gedung Sari dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan. PPL Gedung Sari akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Anak Batu Aji.
 - i. PPL Trimurjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan kering, sentra pemasaran hasil pertanian, dan perdagangan

- dan jasa. PPL ini akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Trimurjo.
- j. PPL Tanggul Angin dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan agribisnis, serta perdagangan dan jasa. PPL Tanggul Angin akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Punggur.
- k. PPL Rukti Marjo dengan fungsi utama sebagai pengembangan pertanian lahan basah, dan pengembangan ternak besar. PPL Rukti Marjo akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Seputih Raman.
- l. PPL Kurumodadi dengan fungsi utama sebagai pengembangan perkebunan, peternakan, dan tanaman hortikultura. PPL Kurumodadi akan melayani seluruh kampung di Kecamatan Bekri.

Gambar 2.9
Peta Sistem Perkotaan Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031

Wilayah kabupaten Lampung Tengah mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan yang menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Provinsi Lampung adalah sebagai Kawasan Strategis Perkotaan Bandar Lampung.

h. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan kondisi eksisting wilayah, Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki resiko bencana alam geologi seperti letusan gunung berapi dan tsunami dikarenakan wilayahnya tidak dilalui oleh jalur pegunungan dan jauh dari laut. Peta potensi gerakan tanah terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa potensi gerakan tanah di sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori sedang ke rendah. Dengan demikian jenis bencana alam yang potensi terjadi adalah banjir, tanah longsor dan gempa bumi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1). Kawasan Rawan Bencana Banjir

Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir bustan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat feno-mena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulu terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor "bakat" atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

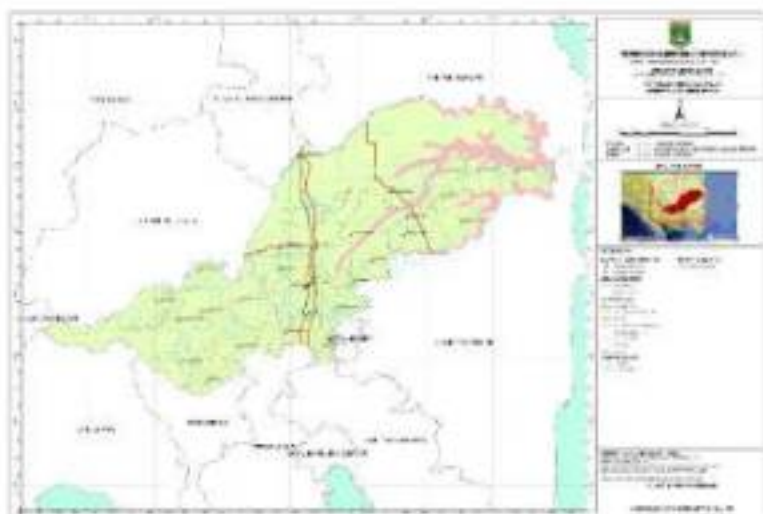
Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Selain itu berkurangnya daerah resapan air di wilayah daratan juga berkontribusi terhadap meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman yang telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah

berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Perilaku manusia yang menimbulkan bencana banjir diantaranya kegiatan pembalakan kayu secara ilegal, proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, perkebunan kopi skala besar, MPM, MTI, dan IPK yang tidak direncanakan dengan baik telah menyebabkan terjadinya banjir. Akibatnya, beberapa DAS di Lampung Tengah kondisinya semakin kritis, sehingga diperlukan adanya manajemen pengelolaan air. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Lampung Tengah secara umum terjadi di sekitar bantaran sungai Way Seputih dengan total luas sekitar 41.524,15 Ha yang meliputi sebagian besar wilayah yaitu Kecamatan Bander Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Seputih Benyek, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Putra Rumbia namun demikian kawasan yang paling rawan diantaranya adalah Kecamatan Bander Surabaya khususnya di Kampung Cabang.

Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir



Sumber data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2021

2). Kawasan Rawan Bencana Longsor

Bencana longsor merupakan suatu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Longsor merupakan bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang relatif pendek dalamumla(volume) yang sangat besar. Longsor sangat dipengaruhi oleh keseimbangan air dalam tanah.

Apabila keseimbangan air terganggu maka aliran permukaan akan meningkat yang mengakibatkan laju erosi meningkat. Tanah yang jenuh air berpo-tensi untuk longsor, pada umumnya longsor terjadi apabila:

- a. Kemiringan lereng cukup curam, sehingga memungkinkan massa tanah bergerak secara gravitasi
- b. Curah hujan yang tinggi: intensitas hujan tinggi dan jangka waktu hujannya lama
- c. Adanya bidang peluncur atau bidang gelincir (slide bed-plane) dibawah permukaan tanah. Dapat berupa lapisan atau batuan kedap air (impermeable layer)

Longsor dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan lahan, topografi, erodabilitas, serta tanaman penutup, yang dapat mengakibatkan:

- Kerusakan lingkungan
- Kerusakan lahan pertanian
- Kerusakan pemukiman, sarana, prasarana
- Kehilangan aset ekonomi dan manusia.

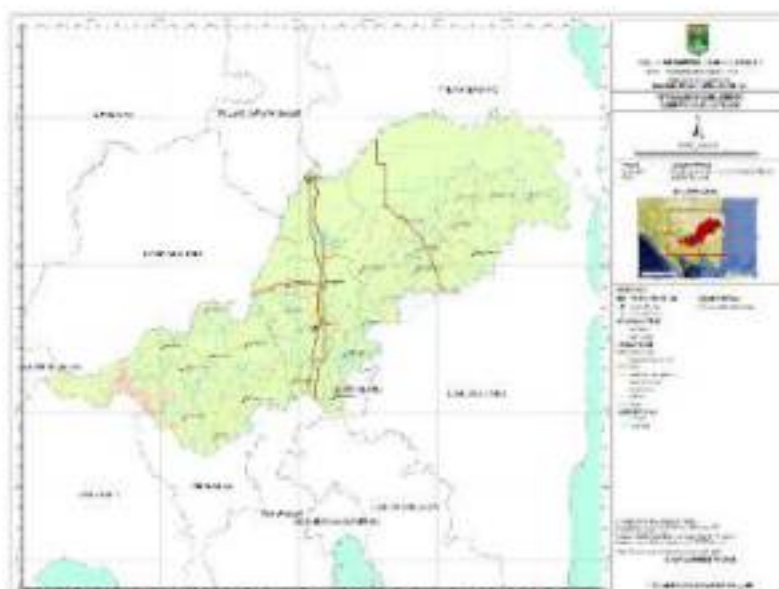
Selain itu, bahaya ikutan akibat longsor adalah bencana banjir, termasuk banjir yang membawa material keras, seperti kayu yang berasal dari pohon-pohon (debris flow), yang dapat menyebabkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Tanah longsor dapat disebabkan karena:

- Getaran-getaran bumi karena gempa, peledakan (bom, dan lain lain.)
- Perubahan kadar air dalam tanah akibat hujan lebat atau kenaikan ketinggian muka air
- Hilangnya penopang tanah permukaan bumi yang bisa terjadi akibat erosi
- Peningkatan beban pada tanah yang disebabkan oleh hujan deras, salju, oleh penumpukan batu-batu lepas, atau bahan-bahan yang dimuntahkan gunung api, bangunan, sampah/limbah, tanaman.

- Pengaliran atau tindakan fisik/kimiawi lainnya yang dapat menurunkan kekuatan tanah dan bebanuan dalam jangka waktu tertentu.

Kawasan rawan bencana tanah longsor dengan luas selidtar 6.777,26 Ha berada di selidtar kawasan hutan lindung di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Bendang Agung.

Gambar 2.11
Peta Kawasan Rawan Bencana Longsor



Sumber data: Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2031

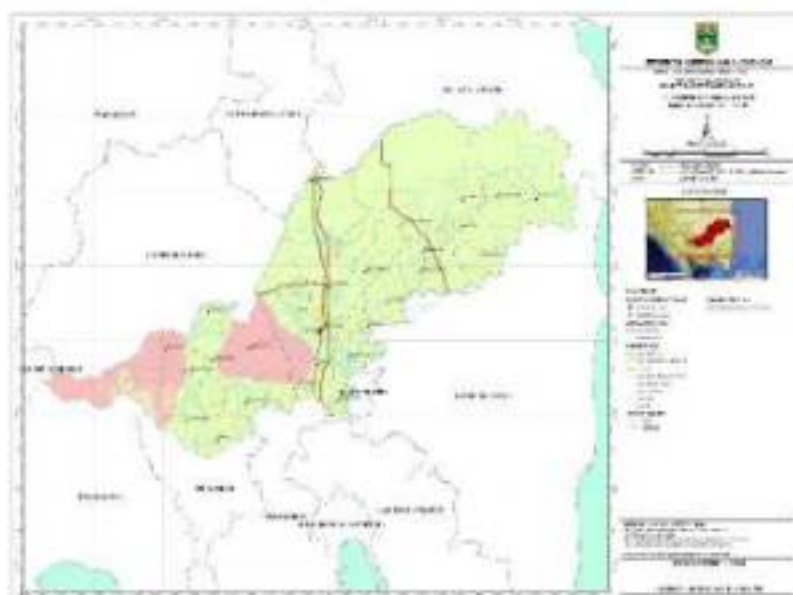
3). Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Bencana Gempa Bumi adalah bencana alam berupa peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Gempa Bumi terjadi karena pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).

Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Tengah mayoritas berkategori sedang tersebar di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, Kecamatan Bendang Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan

Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bungun Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Anak Ratu Aji dan Kecamatan Anak Tuha seluas kurang lebih 68.595,4 ha.

Gambar 2.12
Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Wilayah



Sumber data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Lampung Tengah Tahun 2011-2018

Mengacu pada Indeks Risiko Bencana (IRB) dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 oleh BNPB, dalam hal ini Kabupaten Lampung Tengah berada pada kelas risiko sedang dengan skor 131,20.

Tabel 2.3
Persentase Ancaman Bencana Kekeringan, Gempa, Dan Kebakaran Hutan Berdasarkan Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Tengah

No	Ancaman Bencana	Kelas Risiko (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kekeringan	5%	23%	23%	0,04	41%
2	Gempa	24%	17%	19%	20%	10%
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	1 %	30%	7%	40%	5%
4	Banjir Bandang	17%	19%	20%	24%	19%

Sumber data: BNPB Kabupaten Lampung Tengah

1.1.2. Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan, keadaan penduduk sangat menentukan keberhasilan karena penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan tetapi juga merupakan pelaku pembangunan.

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 berjumlah 1.460.48 jiwa. Penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 747.237 jiwa dan penduduk perempuan 712.808 jiwa. Banyaknya penduduk laki-laki tercermin dari ratio jenis kelamin, pada tahun 2020 ratio jenis kelamin 104,83 artinya pada tahun 2020 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk menurut umur dapat dipakai untuk menghitung angka beban ketergantungan yang lebih dikenal sebagai *Dependency Ratio* (DR). Selama periode tahun 2015-2020, *Ratio Ketergantungan Umur* (*Dependency Ratio*) mengalami penurunan dari sebesar 49,59 % tahun 2015 menjadi 48,92% tahun 2020. Interpretasi dari angka *Ratio Ketergantungan Umur* adalah dari 100 orang penduduk usia produktif di tahun 2019 menanggung 49 penduduk yang tidak produktif yang meliputi 39 orang anak-anak dan 10 orang usia lanjut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 dan Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2015				Jumlah Penduduk Tahun 2020			
	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio	Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
0-4	59.551	57.561	117.112	103,46%	58.233	56.247	114.480	104,69%
5-9	57.731	54.414	112.145	106,10%	60.337	57.452	117.789	105,02%
10-14	56.147	52.946	109.093	106,05%	57.636	54.047	111.683	106,64%
15-19	53.692	49.408	103.100	108,47%	59.260	56.179	115.439	106,48%
20-24	47.927	47.047	94.974	101,87%	62.838	60.695	123.533	103,60%
25-29	49.496	48.827	98.323	101,79%	62.053	61.165	123.218	101,48%
30-34	51.412	50.924	102.336	100,96%	59.741	58.881	118.622	101,46%
35-39	51.395	50.167	101.562	102,43%	58.007	57.109	115.116	101,57%
40-44	46.487	44.438	90.925	104,87%	57.133	56.142	113.275	101,81%
45-49	41.492	39.350	80.842	105,50%	51.877	49.770	101.647	104,23%
50-54	34.418	32.371	66.789	104,71%	44.402	41.213	85.615	107,74%
55-59	27.321	24.332	51.653	111,87%	37.748	34.332	72.080	109,79%
60-64	19.368	18.016	37.384	107,50%	28.663	25.771	54.434	111,22%
65-69	12.820	12.489	25.309	93,63%	21.056	19.569	40.625	112,69%
70-74	10.137	10.785	20.922	94,01%	13.340	11.751	25.091	113,52%
75	11.538	10.384	21.922	96,53%	14.223	12.435	26.658	106,87%
Jumlah	630.962	608.134	1.239.096	103,75%	747.237	712.808	1.460.045	104,83%

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2020

Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis dan dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan yang ditunjukkan oleh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun 5 tahun pada periode 2015-2020 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang terasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, yang saling berpengaruh satu dengan yang lain, dan selanjutnya berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padang Ratu	49.464	49.696	49.887	50.062	52.716
2	Belaga Lingga	33.328	33.610	33.866	34.113	35.966
3	Putan	42.128	42.308	42.448	42.879	43.884
4	Anak Tuha	37.388	37.399	38.181	38.391	48.028
5	Anak Ratu Aji	16.017	16.091	16.181	16.207	19.927
6	Kalirajo	66.921	67.478	67.988	68.468	76.384
7	Sandang Agung	87.892	87.779	87.938	88.079	93.998
8	Bangunrejo	57.291	57.318	57.688	57.844	70.242
9	Gunung Sugih	67.470	68.260	69.001	69.727	78.080
10	Bekri	26.901	27.155	27.389	27.615	31.870
11	Bumi Ratu Nuban	31.048	31.486	31.801	32.160	35.588
12	Trimurjo	51.414	51.741	52.028	52.297	58.570
13	Punggur	38.960	39.400	39.810	40.218	42.068
14	Kota Gajah	38.638	38.914	39.168	39.4902	37.064
15	Seputih Raman	48.749	49.147	49.505	49.850	54.080
16	Terbanggi Besar	119.127	120.912	122.626	124.328	129.482
17	Seputih Agung	49.777	50.388	50.882	51.289	57.479
18	Way Pengubuan	42.808	43.776	44.788	45.880	48.099
19	Teratan Nunyai	44.080	44.284	44.121	43.974	58.880
20	Seputih Mataram	48.080	48.332	48.594	48.841	58.386
21	Bandar Mataram	77.872	78.327	79.024	79.698	84.621
22	Seputih Banyak	48.088	48.880	49.010	49.488	53.488
23	Way Seputih	18.898	18.618	18.827	19.082	20.744
24	Rumbia	38.641	38.928	39.187	39.437	41.308
25	Bumi Nabung	32.102	32.268	32.400	32.524	38.112

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
26	Putra Rumbia	18.274	18.409	18.581	18.646	22.562
27	Sepuluh Surabaya	46.870	47.048	47.826	47.592	53.600
28	Bandar Surabaya	34.154	34.864	34.549	34.722	41.514

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini membahas mengenai kondisi umum kesejahteraan sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan, serta gambaran kinerja ekonomi makro kabupaten dan kontribusi sektor-sektor di dalamnya.

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Secara makro besaran PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp 71.591,6 triliun atau 2,95% dari Rp 71.380,7 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 71.952 triliun pada tahun 2019. Capaian peningkatan PDRB harga berlaku hanya sebesar 2,95% tidak lepas dari pengaruh dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pertumbuhan PDRB secara nasional mengalami perlambatan. Kendati demikian, masih terdapat beberapa perkembangan pada beberapa indikator. Namun perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Lampung Tengah, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Sementara itu, sama seperti halnya PDRB harga berlaku, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Lampung Tengah pun mengalami perlambatan/kontraksi, bahkan pada tahun 2020 menurun sebesar -1,02 persen dari sebesar Rp 47.837,7 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 47.348,0 triliun pada tahun 2020. Kondisi tersebut merupakan indikasi produk barang/jasa secara umum mengalami penurunan atau perekonomian Kabupaten Lampung Tengah secara makro berkembang ke arah negatif.



Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2016	2018	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.788,94	19.798,43	22.011,07	22.822,90	22.088,73	19.798,43
B	Pertambangan dan Penggalian	2.328,38	2.704,53	3.020,67	3.329,67	3.503,27	2.704,53
C	Industri Pengolahan	11.738,43	12.889,43	14.000,38	12.173,77	18.928,13	12.889,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39,80	43,13	56,36	63,89	70,53	43,13
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Deur Ulang	19,78	21,10	23,42	23,42	24,71	21,10
F	Konstruksi	4.043,31	5.483,05	6.335,59	6.937,39	7.006,79	5.483,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.929,34	5.603,03	5.938,83	6.293,94	7.384,12	5.603,03
H	Transportasi dan Pengudangan	1.370,34	1.518,99	1.669,65	1.779,80	1.906,17	1.518,99
I	Pengadaan Akomodasi dan Makan Minum	841,88	819,30	881,80	784,88	831,88	819,30
J	Informasi dan Komunikasi	1.329,84	1.003,84	1.971,84	2.167,89	2.384,89	1.003,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	788,70	804,88	889,33	1.087,37	1.114,37	804,88
L	Retail Ekst	871,16	1.031,72	1.143,29	1.244,80	1.368,25	1.031,72
M,N	Jasa Perumahan	88,48	87,43	72,38	78,73	81,87	87,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	882,31	887,67	1.088,67	1.088,73	1.128,24	887,67
P	Jasa Pendidikan	1.111,48	1.284,61	1.287,32	1.3481,63	1.881,63	1.284,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,88	284,10	237,82	280,40	273,48	284,10
R, S, T, U	Jasa Lainnya	279,23	303,33	223,83	304,83	404,83	303,33
Produk Domestik Regional Bruto		48.878,37	55.171,37	60.955,37	66.340,55	71.932,70	55.171,37

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah



Tabel 2.7
FDR Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.079,55	14.057,53	15.361,87	15.757,65	16.107,51	16.111,1
B	Pertambangan dan Penggalian	1.744,82	1.337,46	1.970,28	2.089,28	2.207,70	2.220,8
C	Industri Pengolahan	8.721,78	9.245,04	9.748,92	10.228,07	11.219,86	10.807,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33,41	29,33	47,35	51,55	55,81	60,0
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Deur Ulang	14,87	13,17	15,78	13,83	18,48	17,4
F	Konstruksi	3.843,18	4.341,38	4.840,25	5.036,46	5.388,99	5.279,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor	4.370,80	4.488,98	4.847,40	4.832,93	5.124,73	4.938,7
H	Transportasi dan Pergudangan	1.016,19	1.090,74	1.181,28	1.240,79	1.328,33	1.273,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	271,95	295,28	418,08	484,43	489,38	484
J	Informasi dan Komunikasi	1.328,82	1.443,41	1.840,99	1.788,87	1.920,83	2.018,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	637,33	649,59	671,87	695,59	720,39	747,1
L	Kec. Sesi	763,37	800,97	840,67	893,33	938,53	909,3
M	Jasa Perusahaan	42,88	44,07	48,30	48,33	49,57	48,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	803,43	827,68	854,89	887,95	720,14	743,6
P	Jasa Pendidikan	827,08	909,45	946,93	1.027,09	1.108,04	1.163
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	301,99	314,49	327,00	340,48	381,38	378,8
R, S, T, U	Jasa Lainnya	218,39	228,55	233,70	248,88	262,40	268,1
Produk Domestik Regional Bruto		38.773,80	40.849,37	43.187,05	45.436,32	47.937,70	47.346,00

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Selama periode 2018-2020, struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha diantaranya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; serta pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah.

Peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 36,09% (angka ini meningkat dari 35,07% di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,54 persen (menurun dari 23,37% di tahun 2019) disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 10,33% (turun dari 10,66% di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,74% (naik dari 10,02% di tahun 2019) dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,09%.

Seiring berjalannya waktu kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian mulai menurun. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lainnya, antara lain lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Penyebab menurunnya peran lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan diantaranya adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain, serta perubahan pola distribusi akibat percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan lapangan usaha lain yang terkait.



Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha1	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,28	26,28	26,11	26,26	24,88	26,00
B	Pertambangan dan Penggalian	4,50	4,90	4,97	4,91	4,57	3,59
C	Industri Pengolahan	22,99	22,56	22,97	22,87	22,61	22,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
F	Konstruksi	9,50	9,94	10,37	10,49	10,57	10,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makanan Minum	10,31	10,16	9,74	9,94	10,23	9,74
H	Transportasi dan Pergudangan	3,80	3,75	3,73	3,68	3,65	3,56
I	Pengadaan Akomodasi dan Istirahat Minum	1,11	1,12	1,12	1,14	1,12	1,12
J	Informasi dan Komunikasi	3,72	3,02	3,22	3,27	3,28	3,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,61	1,64	1,62	1,59	1,52	1,58
L	Retail Eceran	1,78	1,87	1,87	1,88	1,80	1,80
M	Jasa Perumahan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,77	1,72	1,72	1,72	1,67	1,79
P	Jasa Pendidikan	2,27	2,27	2,16	2,22	2,31	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,22	0,22	0,24	0,22	0,22	0,22
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,84
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam waktu setahun.

Ditinjau dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan, secara kategori merupakan gambaran kecepatan peningkatan volume produk yang dihasilkan pada kategori yang bersangkutan dan dapat dipergunakan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Kinerja perekonomian Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari 5,38 persen tahun 2015, naik menjadi 5,61 persen pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 mengalami pelambatan menjadi 5,27 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 5,45 dan sedikit meningkat pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,46 persen dan tahun 2020 justru berkontraksi atau menurun sebesar -1,02% akibat pandemi Covid-19.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015-2020

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,43	4,23	4,40	3,44	2,03	1,03
B	Pertambangan dan Penggalian	3,66	6,47	6,07	5,73	3,97	3,51
C	Industri Pengolahan	6,33	5,39	3,43	2,93	3,63	-3,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,93	17,43	20,70	3,36	7,33	7,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,39	4,13	3,97	0,34	4,01	3,6
F	Konstruksi	1,24	10,37	9,40	2,33	7,00	-2,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,63	2,02	1,93	6,02	6,31	-3,32
H	Transportasi dan Pergudangan	13,01	3,12	7,31	3,71	6,47	-4,21
I	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	11,21	6,37	5,99	3,46	7,67	-3,16
J	Informasi dan Komunikasi	3,63	16,42	14,10	3,60	7,93	6,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,72	3,33	3,43	3,33	3,33	3,72
L	Real Estat	6,66	3,43	5,17	3,23	4,93	-3,03
M,N	Jasa Perusahaan	7,33	2,33	2,77	4,27	4,34	-1,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	3,12	4,34	4,34	3,03	4,63	4,09
P	Jasa Pendidikan	7,26	4,30	4,12	3,46	7,94	4,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,41	6,19	5,33	3,94	4,52	10,33
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,79	3,23	3,17	6,94	3,26	-4,21
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,38	3,23	5,27	5,45	5,46	-1,02

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah

Apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori-kategori ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kategori dengan pertumbuhan di atas rata-rata (LPE Lampung Tengah yang merupakan baseline) dan kelompok kategori dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata. Ada beberapa kategori yang menunjukkan kinerja cukup tinggi di tahun 2019 atau tumbuh di atas rata-rata meliputi 10 (sepuluh) kategori yaitu pertambangan dan energi (5,97%), industri pengolahan (5,63%), pengadaan listrik dan gas (7,88%), konstruksi (7,00%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (6,31%), transportasi dan pergudangan (6,47%), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,67%), informasi dan komunikasi (7,95%), jasa pendidikan (7,94%), jasa lainnya (8,26%). Sedangkan lima kategori lainnya tumbuh di bawah rata-rata, yakni pertanian, kehutanan dan perkebunan; pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Meskipun tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19, namun beberapa lapangan usaha masih memberikan kontribusi positif yang cukup besar di atas 5% terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah. Diantaranya adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (7,93%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,6%), Informasi dan Komunikasi (6,24%), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (10,83%). Sedangkan sisanya mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar berada pada lapangan usaha industri pengolahan (-5,04%), transportasi dan pergudangan (-4,21%), dan jasa lainnya (-4,21%).

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 3,42 persen. Nilai ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (3,19 persen) dan Nasional (3,03 persen).

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Lampung Tengah	5,38	5,28	5,37	5,45	5,46	-1,02
2	Provinsi Lampung	5,12	5,14	5,16	5,25	5,37	-1,67
3	Nasional	4,9	5,0	5,1	5,2	5,02	-2,07

Sumber data: BPS Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Nasional

2.2.2. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2020, perhitungan inflasi Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Metro (daerah otonom terdekat dari Lampung Tengah) menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 2,33 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender (*point to point*) dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan 2019 dimana pada periode yang sama mengalami inflasi sebesar 2,93 persen. Kondisi inflasi pada tahun 2020 tersebut di atas inflasi Provinsi Lampung sebesar 2 persen berdasarkan perhitungan tahun kalender (*point to point*) dan *year on year (y-o-y)*. Angka tersebut berada di atas dari inflasi secara nasional sebesar 1,65 persen.

Tabel 2.11
Inflasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Nasional	Lampung	Lampung Tengah
1	2015	3,35	-	-
2	2016	3,02	2,78	2,92
3	2017	2,92	3,02	2,32
4	2018	3,18	2,73	1,64
5	2019	2,72	-	2,93
6	2020	1,65	2	2,33

Sumber data: BPS (diolah)

2.2.3. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan perkapita sama dengan PDRB perkapita yang diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan kata lain pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk yang berasal dari proses produksi seluruh kegiatan ekonomi.

Pada tahun 2020 pendapatan per kapita mengalami penurunan 0,41 persen atau dari semula Rp 55.709.190 rupiah/kapita/tahun,- pada tahun 2019 menjadi Rp 55.479.980 rupiah/kapita/tahunnya pada tahun 2020. Namun demikian, baik peningkatan maupun penurunan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan ataupun penurunan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB), selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional di Kabupaten Lampung Tengah tidak mutlak merata. Penurunan ini juga dimungkinkan terjadi karena dampak adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan perekonomian dunia, nasional, dan daerah menjadi semakin lelu. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Lampung Tengah per penduduk selama satu tahun.

Tabel 2.12
Pendapatan Perkapita Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020

Tahun	PDRB (Milyar rupiah)		Jumlah Penduduk	PDRB Perkapita (Rp)	
	Berlaku	Konstan		Berlaku	Konstan
2015	42.272,27	32.772,20	1.229.096	39.446.792	31.292.006
2016	55.171,27	40.949,27	1.250.426	44.119.942	32.746.764
2017	60.955,29	43.107,05	1.261.498	48.319.767	34.171.819
2018	66.340,55	45.456,32	1.271.566	52.172.321	35.748.298
2019	71.982,70	47.927,70	1.281.210	56.155.275	37.412.022
2020	71.591,00	47.348,00	1.460.045	55.479.980	36.692.280

Sumber data: Badan Pusat Statistik

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga ketimpangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, Koefisien

Gini diupayakan agar mendekati 0 (nol) untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Berdasarkan Data BPS mencatat Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah pada rentang tahun 2015-2020 sebesar 0,367 pada tahun 2015 dan mengalami fluktuasi hingga mencapai angka 0,304 pada tahun 2020, yang artinya semakin mendekati pemerataan sempurna. Penurunan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran (konsumsi) penduduk pada periode tersebut semakin merata. Meskipun tahun 2018 Koefisien Gini kembali mengalami kenaikan baik di Kabupaten Lampung Tengah maupun Provinsi Lampung. Selama kurun waktu tahun 2015-2020 Koefisien Gini Kabupaten Lampung Tengah di bawah (lebih baik) jika dibandingkan dengan Koefisien Gini Provinsi Lampung dan Nasional yang lebih mendekati ketimpangan sempurna (mendekati angka 1).

Gambar 2.13
Grafik Perkembangan Indeks Gini/Koefisien Gini
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

2.2.5. Penduduk Miskin

Pengukuran kemiskinan secara makro dilakukan BPS melalui estimasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi pengeluaran konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan (GKM) setara dengan besaran minimal jumlah rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari untuk 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan. Sedangkan kebutuhan dasar bukan makanan (GKNM) setara

dengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. Sehingga, secara teknis penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dari hasil pendataan BPS tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan sebanyak 1.860 jiwa dari 153.840 jiwa (12,03 persen) pada tahun 2019 menjadi sebanyak 152.260 jiwa (11,82 persen) pada tahun 2020, atau turun sebesar 0,21 persen. Penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 (0,21 persen) tersebut dibanding kabupaten dan kota di Propinsi Lampung berada pada peringkat ke-13.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,7 persen dari Rp 394.338 per kapita per bulan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.436.777 per kapita per bulan pada tahun 2020. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2013-2020, garis kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Namun demikian, kenaikan garis kemiskinan per tahunnya masih tetap dibawah garis kemiskinan Propinsi Lampung selama periode 5 tahun. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2020 menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Gambar 2.14
Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.15
Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2014 - 2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengendalikan peningkatan jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,

dan juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari tahun 2014 s.d. tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu turun dari 1,85 menjadi 1,63 atau turun sebesar 0,22 poin, artinya penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari tahun 2014 s.d. tahun 2020 juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, turun dari 0,45 menjadi 0,33 atau turun sebesar 0,12 poin, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit.

Gambar 2.16
Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,21 menjadi 11,82 % dari 12,03%, dan lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi sebesar 12,54%. Adapun rata-rata penurunan sebesar 0,22% dari tahun 2014 s.d. tahun 2020.

Gambar 2.17
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020



Sumber data: BPS

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah selama enam tahun secara signifikan, diiringi dengan menurunnya jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Gambar 2.18
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2020



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pendataan terakhir PEDT Tahun 2020 rekapitulasi jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari pengelompokan desil kondisi kesejahteraan 40% terendah mencapai 131.974 RTS, mengalami kenaikan RTS atau 0,85 persen dari pendataan BDT Tahun 2019 (74.106 RTS). Rata-rata KPM tahun 2018-2020 di Kabupaten Lampung Tengah mengalami kenaikan dengan pertumbuhan 35,84 persen per tahun.

Tabel 2.13
Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan
Berdasarkan Data PDBT Data 2015-2017 Belum Akurat Karena Belum
Terintegrasi Dengan Aplikasi SIKS NG

No	Kecamatan	JUMLAH RPH		
		2018	2019	2020
1	Padang Ratu	5.873	5.464	5.467
2	Selaengi Lingga	3.945	3.947	4.155
3	Putian	5.100	5.780	5.666
4	Anak Tuha	6.484	6.450	6.445
5	Anak Ratu Aji	2.560	2.561	2.559
6	Kalirajo	3.395	3.397	3.395
7	Sandang Agung	4.297	4.312	4.292
8	Bangunrajo	3.330	3.333	3.332
9	Gunung Sugih	7.096	7.190	7.099
10	Bekri	2.575	2.576	2.576
11	Bumi Ratu Nuban	4.073	4.077	4.077
12	Trimurjo	4.001	3.999	4.188
13	Punggur	3.388	3.390	3.593
14	Kota Ojah	2.142	2.146	2.173
15	Seputih Raman	3.739	3.733	3.744
16	Terbanggi Besar	3.622	3.637	3.639
17	Seputih Agung	4.377	4.373	4.366
18	Way Pengubuan	3.332	3.333	3.372
19	Terusan Nunyai	3.904	3.897	3.893
20	Seputih Mataram	6.516	6.520	6.519
21	Bandar Mataram	3.912	3.909	3.907
22	Seputih Banyak	4.744	4.741	4.751
23	Way Seputih	1.881	1.949	1.916
24	Rumbia	3.746	3.731	3.779
25	Bumi Nabung	3.932	3.933	3.925
26	Putra Rumbia	2.506	2.576	2.492
27	Seputih Surabaya	3.122	3.147	3.133
28	Bandar Surabaya	4.044	4.042	4.019
Jumlah		79.188	74.106	131.974

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

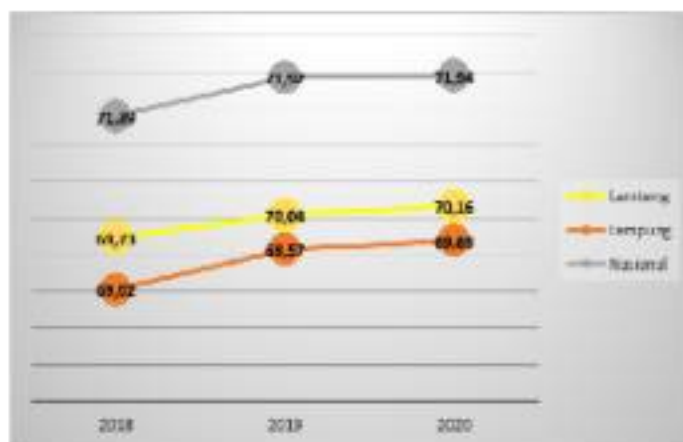
2.2.6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah selama periode 2015-2020 mengalami kemajuan yang signifikan, dengan pertumbuhan IPM pada periode Tahun 2015-2020 sebesar 3,77 persen dari sebesar 67,61 pada tahun 2015 menjadi 70,16 pada tahun 2020 (meningkat 2,55 poin).

Pada tahun 2020 status indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Tengah sudah berstatus "tinggi" yaitu 70,16, dan berada di atas Provinsi yang berstatus "sedang" yaitu 69,69! namun masih di bawah Nasional

yaitu 71,94. Dalam lingkup Kabupaten, IPM Kabupaten Lampung Tengah merupakan IPM tertinggi (70,16) di Provinsi Lampung. Sedangkan dalam lingkup Kabupaten/Kota, IPM Kabupaten Lampung Tengah merupakan IPM tertinggi ketiga (70,16) di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Gambar 2.19
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Kondisi pencapaian IPM Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-3 dan apabila dibandingkan hanya dengan kabupaten (tanpa kota) berada di posisi ke-2 tertinggi setelah Kabupaten Pringsewu. Namun apabila kita bandingkan dengan nasional IPM Kabupaten Lampung Tengah masih berada dibawah IPM Nasional.

Tabel 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupate/Kota
di Provinsi Lampung

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lampung Barat	64,54	65,45	66,06	66,74	67,50	67,80
2	Tanggamus	63,66	64,41	64,94	65,67	66,37	66,36
3	Lampung Selatan	65,22	66,19	66,95	67,68	68,22	68,38
4	Lampung Timur	67,10	67,88	68,08	69,04	69,54	69,37
5	Lampung Tengah	67,61	68,88	68,95	69,78	70,04	70,16
6	Lampung Utara	65,20	65,98	66,58	67,17	67,63	67,67
7	Way Kanan	65,18	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Tulang Rawang	66,08	66,74	67,07	67,70	68,23	68,52
9	Pecawaran	62,70	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79
10	Pringawu	67,88	68,26	68,61	69,43	69,97	70,30
11	Meruji	59,79	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63
12	Tulang Rawang Barat	63,01	63,77	64,52	65,30	65,93	65,78
13	Petitir Barat	60,88	61,50	62,20	62,96	63,79	63,91
14	Bandar Lampung	74,81	75,84	75,98	76,63	77,33	77,44
15	Metro	75,10	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19
	Propinsi Lampung	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69

Sumber data: Badan Pusat Statistik

2.2.7. Pencapaian Kapabilitas Dasar Manusia

Pencapaian pembangunan manusia, diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks di masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan lama sekolah (thn)	12,20	12,21	12,60	12,90	12,91	12,92
Rata-rata lama sekolah (thn)	7,14	7,37	7,38	7,51	7,57	7,58
Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,01	69,15	69,95	69,73	70,04	69,84
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	10.298,00	10.674,00	10.820,00	11.052,00	11.154,00	11.219,00
Indek Pembangunan Manusia	67,61	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16
Pertumbuhan IPM	0,87	1,06	0,91	1,15	0,44	0,12

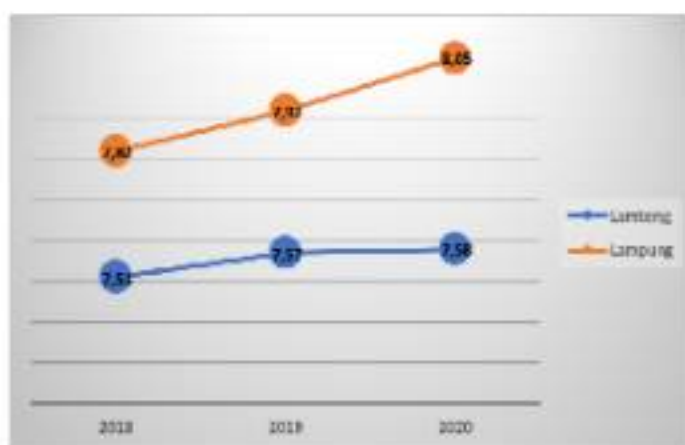
Sumber data: BPS Lampung Tengah

Pertumbuhan IPM di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya lebih didominasi pada dimensi Pengeluaran Perkapita yang mengalami pertumbuhan indeks sebesar 0,5 persen. Sedangkan dimensi Kesehatan mengalami pertumbuhan 0,012 persen dan Pendidikan untuk harapan lama sekolah mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 dan Rata-rata lama sekolah 0,13 persen.

2.2.7.1. Dimensi Pengetahuan

Indikator yang dipergunakan untuk menilai IPM di tinjau dari dimensi pengetahuan adalah angka rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka harapan lama sekolah (HLS). Pada Tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Tengah sebesar 7,15 dan pada tahun 2020 telah naik hingga mencapai 7,58. Namun nilai masih berada di bawah RLS Provinsi yaitu 8,05. Standar rata-rata lama sekolah dari UNDP adalah 15,00. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 7,58 tahun. Hal ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai pendidikan hingga kelas VII (SLTP).

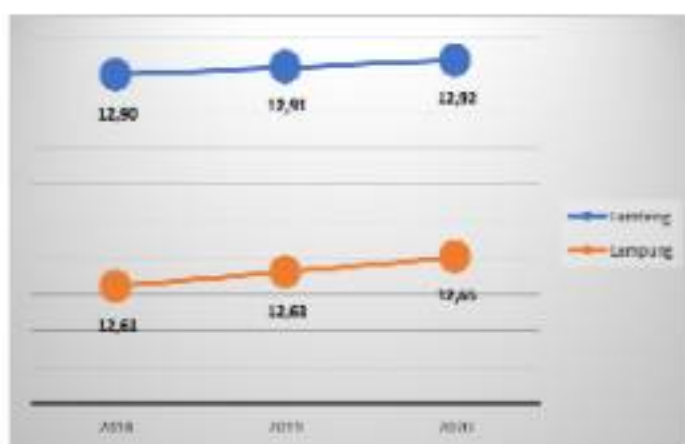
Gambar 2.20
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: BPS Lampung Tengah

Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2015 sebesar 12,2 dan pada tahun 2020 telah naik hingga mencapai 12,92. Namun angka ini masih berada lebih sedikit dari HLS Provinsi yaitu 12,65. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Lampung Tengah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I (D-I).

Gambar 2.21
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber: BPS Lampung Tengah

Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus mengalami peningkatan. Secara umum HLS dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di suatu wilayah/daerah. Dari capaian HLS dan RLS tersebut, maka indeks pengetahuan pada perspektif IPM di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 tercatat sebesar 0,623 poin dan kondisi ini mengalami peningkatan 0,012 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,611 poin.

Tabel 2.16
Dimensi Pengetahuan Kabupaten Lampung Tengah

N	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Harapan Lama Sekolah	12,20	12,21	12,60	12,90	12,91	12,92
2	Rata-rata Lama Sekolah	7,14	7,37	7,32	7,51	7,57	7,52
3	Indeks Pendidikan	0,577	0,585	0,596	0,609	0,611	0,623

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.7.2. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Pencapaian IPM jika di tinjau dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, maka indikator yang dipergunakan yaitu umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimana pada tahun 2020 telah mencapai 69,54 tahun. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, walaupun relatif lambat, UHH terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 1,07 persen selama

lima tahun dan meningkat 0,74 poin. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi.

Gambar 2.22
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015-2020, Kabupaten Lampung Tengah berhasil meningkatkan umur harapan hidup saat lahir sebesar 0,83. Selama periode tersebut, secara rata-rata tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. Pada Tahun 2015 umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 69,01 dan pada tahun 2020 telah naik hingga mencapai 69,84. Namun angka UHM ini masih berada dibawah UHM Propinsi yaitu 70,65. Angka UHM ini juga belum mencapai nilai maksimum standar UNDP sebesar 85,00.

Namun demikian jika dibandingkan dengan UHM Propinsi Lampung pada tahun 2020 yang mencapai 70,65 tahun, maka UHM Kabupaten Lampung Tengah masih terpaat 0,81 tahun lebih rendah dari Provinsi Lampung. Kondisi tersebut merefleksikan, dari perspektif IPM, derajat kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah masih berada dibawah rata-rata Provinsi Lampung.

Tabel 2.17
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHM) Lampung Tengah

N	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHM)	69,0	69,15	69,28	69,46	69,75	69,84
2	Indek Kesehatan	0,75	0,756	0,763	0,761	0,765	0,767

Sumber data: BPS Lampung Tengah

Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (life style); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Dari sisi lingkungan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2020 menunjukkan kondisi lingkungan belum sepenuhnya sehat, yang ditunjukkan dari masih terdapat 11,45 % rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih dan masih terdapat 3,7 % rumah tangga belum menikmati sanitasi layak. Belum semua penduduk dapat mengakses pelayanan dengan tenaga medis terutama untuk kelompok berpenghasilan rendah. Akselerasi pembangunan pada dimensi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah sangat intervensi dilakukan terhadap faktor-faktor de

terminan yang mempengaruhi dimensi tersebut, yang tidak sebatas pada sektor kesehatan, namun melibatkan hampir seluruh sektor pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pendidikan dan lain sebagainya. Pada dasarnya, upaya yang harus dilakukan harus diarahkan untuk meningkatkan kecukupan dan aksesibilitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan serta peningkatan responsivitas penduduk terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut.

Percepatan pelaksanaan program-program kesehatan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan yang disertai dengan upaya mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai serta tenaga medis yang lebih merata, mutlak harus dijaga dan ditingkatkan konsistensinya. Sehingga diharapkan dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara optimal. Disamping itu, akselerasi pencapaian IPM diharapkan tidak hanya bertumpu pada dinas teknis saja, melainkan harus terintegrasi dengan tugas-tugas kecamatan, kelurahan dan pemerintah-an desa, serta lebih diarahkan kepada upaya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dengan seluruh jaringan kerjanya.

2.2.7.3. Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian IPM di tinjau dari dimensi standar hidup layak, maka indikator yang dipergunakan adalah indikator perkembangan tingkat pengeluaran sebagai pendekatan pengukuran daya beli masyarakat di suatu wilayah. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 11,219 juta per kapita per tahun. Walaupun

relatif lambat, pengeluaran per kapita Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat selama lima tahun terakhir sebesar 556 poin dan tumbuh sebesar 6,31 persen. Selama kurun waktu tersebut perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 3,65 persen.

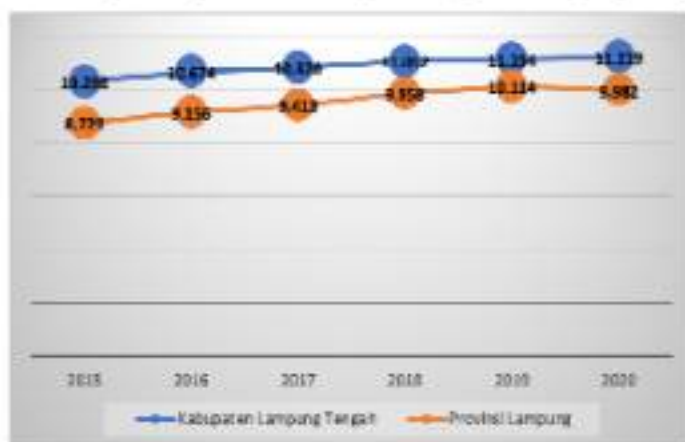
Tabel 2.18
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per Kapita (Rp 000)	10.298,00	10.674,00	10.820,00	11.052,00	11.154,00	11.219,00
Indek Daya Beli	0,868	0,878	0,884	0,898	0,897	0,899

Sumber data: BPS Lampung Tengah

Pada Tahun 2020, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Lampung Tengah mencapai Rp 11,219 juta per tahun. Nilai ini relatif lebih tinggi dibandingkan pengeluaran perkapita provinsi Lampung yaitu Rp 9,982 juta per tahun atau masih terputut hampir Rp 1,237 juta per kapita per tahun.

Gambar 2.23
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Lampung Tengah



Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.8. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf, semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program- program pemberantasan buta huruf. Angka melek huruf Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 telah mencapai 96,55 persen dan angka ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 94,95 persen. Meningkatnya kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan diharapkan akan membantu seseorang/penduduk untuk dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.19
Angka Melek Huruf Kabupaten Lampung Tengah

No	Tahun	Angka Melek Huruf		
		Laki-laki	Perempuan	(Rata rata Laki dan Perempuan)
1	2016	96,97	94,05	96,52
2	2017	98,05	94,63	96,39
3	2018	98,79	94,78	96,81
4	2019	96,54	93,09	94,95
5	2020	98,81	94,75	96,55

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.9. Persentase Balita Gizi Buruk

Penyebab gizi buruk atau *kwashiorkor* adalah karena anak tidak memperoleh makanan dengan kandungan energi dan protein yang cukup. Umumnya hal ini sering dikaitkan dengan tingkat perekonomian yang rendah. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, berkisar pada 0,01 persen sampai 0,07 persen. Selama kurun waktu tersebut perkembangan terendah terjadi pada tahun 2016 dan 2018, dengan pertumbuhan sebesar 0,01 persen dan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 0,07 persen.

Tabel 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase balita gizi buruk	0,02	0,01	0,08	0,01	0,02	0,07
Jumlah balita gizi buruk	20	15	30	14	21	10
Jumlah balita	118.705	115.351	113.579	111.743	109.907	138.688

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

2.2.10. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan metode pengukuran untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Lampung Tengah mengalami fluktuatif naik-turun dari 1,16 di tahun 2018 meningkat menjadi 3,97 di tahun 2019, kemudian turun kembali menjadi 1,66 di tahun 2020.

Tabel 2.21
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi balita gizi kurang	0	0	0	1,16	3,97	1,66
Banyaknya balita gizi kurang	0	0	0	1307	4869	2308
Jumlah balita	118.705	115.351	113.579	111.743	109.907	138.688

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

2.2.11. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos intervensi desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan intervensi dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, intervensi berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Perkembangan Desa siaga aktif di Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2016-2020 telah mencapai 100 persen. Artinya seluruh Desa di Kabupaten Lampung Tengah telah menjadi Desa Siaga Aktif.

Tabel 2.22
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan desa siaga aktif	97,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah desa siaga aktif	307	314	314	314	314	314
Jumlah desa siaga yang dibentuk	314	314	314	314	314	314

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

2.2.12. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi *nterven kerja (labor force participation rate)* adalah proporsi *nterven kerja* terhadap populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara 16 dan 64 tahun. Statistik ini berguna untuk menganalisis pasar tenaga kerja, terutama ketika menyandingkannya dengan tingkat pengangguran. Ketika ekonomi tumbuh dengan kuat, tingkat partisipasi meningkat karena prospek lapangan kerja dan upah membaik. Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 4,45 persen. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 1,66 persen. Adapun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019, yaitu menjadi 73,05 persen.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi angkatan kerja	n.a	69.40	71.88	72.85	72.17	73.05
Angkatan kerja 16 tahun ke atas	n.a	682.624	689.830	688.688	680.888	716.022
Jumlah penduduk usia 16 tahun ke atas	n.a	911.602	922.424	932.492	942.686	980.166

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja

2.2.13. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia >15 Tahun

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 16 tahun ke atas (*penduduk usia kerja*) adalah perbandingan kesempatan kerja penduduk terhadap total penduduk usia kerja (*penduduk usia 16 tahun ke atas*). Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja (*supply side*) dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang bekerja sama dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia.

Kelebihan dari sisi supply side dikurangi dengan demand side (pengangguran). Perkembangan rasio kesempatan kerja terhadap penduduk 15 Tahun ke atas di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Adapun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 73,05.

Tabel 2.24
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Kerja
Ke Atas Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas	n.a	69,40	69,86	71,99	70,28	73,05
Kesempatan kerja	632.624	632.624	639.830	671.808	662.599	683.826
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	n.a	911.602	922.424	932.492	942.686	930.166

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja

2.2.14. Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

Gambaran Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs), maupun keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga. Perkembangan Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 70 persen pada tahun 2018, menjadi 29 persen pada tahun 2019 atau turun sebesar 41 persen.

Rata-rata persentase Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus menurun dengan tingkat penurunan 14,42 persen per tahun. Rata-rata jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terus menurun dengan tingkat penurunan 13,17 persen per tahun.

Tabel 2.25
Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Lampung Tengah

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	22	66	67	70	29	29
Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	280.000	200.000	205.928	215.791	100.090	100.090
Jumlah keluarga	304.563	304.563	305.296	310.322	345.802	345.802

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah

2.2.15. Indeks Kepuasan Masyarakat

Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

IKM Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan, dari 72,92 di tahun 2016 menjadi 85,9 di tahun 2020. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 2,36 persen per tahun.

Tabel 2.26
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	77	72,92	80,59	80,71	85,9	85,9

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.16. Presentase PAD terhadap Total Pendapatan

Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan menggambarkan kemandirian daerah dalam mengupayakan pendanaan dalam pembangunan daerah. Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami trend peningkatan dari 5,9 persen di tahun 2016 menjadi 7,3 persen di tahun 2020.

Tabel 2.27
Presentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase PAD terhadap pendapatan	5,9	6,6	6,1	6,9	7,8
PAD (dalam juta rp)	154,89	164,04	144,96	172,53	179.888
Jumlah pendapatan daerah (dalam juta rp)	2.274.041,7	2.491.288,2	2.388.867,2	2.529.108,6	2.481.832,2

Sumber data: Dispenda Kabupaten Lampung Tengah

2.2.17. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2020 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menyampaikan informasi laporan keuangan sudah sesuai dengan kaedah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.28
Opini BPK Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber data: BPK Lampung Tengah

2.2.18. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis situasi konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, yang dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perkembangan skor PPH Kabupaten Lampung Tengah dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 85,4 pada tahun 2018 menjadi 86,7 pada tahun 2020.

Tabel 2.29
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Lampung Tengah

Uraian	2013	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81	88,5	81,8	85,4	86,7	86,9

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kab Lampung Tengah

2.2.19. Penguatan Cadangan Pangan

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan nasional dan daerah dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat baik ditingkat nasional maupun daerah. Perkembangan penguatan cadangan pangan Kabupaten Lampung Tengah mengalami penguatan sebesar 1,4 persen dari tahun 2018 yang sebesar 30,0 menjadi 31,4 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.30
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2013	2016	2017	2018	2019	2020
Penguatan Cadangan Pangan	30,0	30,0	30,0	30,0	31,4	31,4

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kab Lampung Tengah

2.2.20. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga. Hasil analisis nterv kewaspadaan pangan dan gizi yang menghasilkan peta situasi pangan dan gizi di tingkat wilayah kecamatan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. Upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi sangat penting diketahui siapa yang rentan pangan dan gizi, berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi serta dimana mereka tinggal, kemudian apa saja sebenarnya yang membuat mereka rentan. Untuk itu hasil analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi dilengkapi dengan data by name by addres masyarakat yang mengalami kerentanan pangan dan gizi sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Perkembangan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 15 persen menjadi 45 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.31
Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	15	15	33	40	40	45

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Kab Lampung Tengah 2021

2.2.21. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Konstan

Sektor pertanian terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan mencapai 33,60 persen dari total PDRB dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 34,26 persen.

Tabel 2.32
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB konstan Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PDRB konstan	36,85	43,84	51,06	55,19	33,60	34,26
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan (milyar rp)	17.766,94	19.796,40	22.011,10	25.085,70	16.107,52	16.222,2
Jumlah PDRB (milyar rp)	38.773,8	40.949,37	43.107,05	45.456,27	47.937,7	47.848,0

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.22. Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian, khususnya tanaman padi mengalami tren yang terus menurun dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 840.000 ton, terus turun hingga menjadi 771.669 ton pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 serta 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena terdapat perubahan pola hitung produksi padi, yang menggunakan pola Kerangka Sampel Area KSA) tanaman padi.

Tabel 2.33
Produksi Sektor Pertanian (Padi/Ton) Kabupaten Lampung Tengah

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi sektor pertanian (Padi/ton)	240.000	237.322	796.220	771.669	455.254	299.111

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.23. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi sektor perkebunan selama enam tahun terakhir (2015-2020) menunjukkan trend fluktuatif dan kecenderungan meningkat. Produksi kebun di Kabupaten Lampung Tengah meliputi tiga jenis komoditas utama, yaitu perkebunan karet dengan produksi primernya adalah latex dan bubuk, perkebunan kelapa sawit dengan produksi primernya adalah tandan buah segar, dan perkebunan kakao dengan produksi primernya adalah buah basah. Kenaikan produksi perkebunan tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai 280.166,49 ton dan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 118.278,00 ton.

Tabel 2.34
Produksi Sektor Perkebunan (Ton) Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi sektor perkebunan (Ton)	94.820,00	99.379,08	92.829,88	280.166,49	26.907,23	118.278,00

Sumber data: Dinas Peternakan dan Perkebunan

2.2.24. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan pada tahun 2015 mencapai 11,27 persen dari total PDRB, sempat mengalami penurunan pada tahun 2016-2018 hingga 10,61%, dan kemudian kembali meningkat pada 2019 menjadi 10,71% dan menurun kembali pada tahun 2020.

Tabel 3.35
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,27	10,89	10,85	10,61	10,71	10,43
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan (milyar rp)	4370,8	4452,98	4847,4	4820,92	5124,73	4.922,7
Jumlah PDRB (milyar rp)	38778,8	40949,37	48107,05	45456,27	47987,7	47.848,0

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.2.25. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian di Kabupaten Lampung Tengah mengalami tren yang terus meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dimana jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian pada tahun 2015 mencapai 22,54 persen dari total PDRB, terus mengalami peningkatan hingga 0,89 persen pada tahun 2019 menjadi 23,41 persen dari jumlah total PDRB. Namun pada tahun 2020 kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan menjadi hanya 22,4 persen.

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	22.52	22.58	22.61	22.72	23.41	22,4
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri (milyar rp)	8781.75	9245.94	9743.22	10828.07	11219.86	10,607.4
Jumlah PDRB (milyar rp)	38773.8	40949.27	43107.08	48486.27	47987.7	47,848.0

Sumber data: EPS Lampung Tengah

2.2.26. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu 2017 hingga 2020 mengalami tren yang terus menurun. Bahkan pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 Pertumbuhan industri di Kabupaten Lampung Tengah mengalami kontraksi yang kuat sehingga pertumbuhannya mencapai minus (-5,3 persen).

Tabel 2.37
Pertumbuhan Industri Kabupaten Lampung Tengah

Indikator Kinerja Program	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan industri	n.a	n.a	27,08	27,11	0,77	-5,3
Jumlah Industri Tahun (t-1)	n.a	n.a	482	1082	1678	1706
Jumlah Industri s/d Tahun n		482	1082	1678	1686	1614

Sumber data: EPS Lampung Tengah

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

gambaran umum kondisi daerah dari aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar) dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun modal sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka pendidikan yang ditamatkan (APT), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Angka Melanjutkan (AM), Fasilitas Pendidikan, Rasio guru/murid, Angka melek, dan kualifikasi pendidikan guru.

Rata-rata Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 2,67 persen per tahun. Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) juga terus meningkat dengan pertumbuhan masing-masing adalah SD (0,21 persen per tahun) dan SMP (0,40 persen per tahun). Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) juga terus meningkat dengan pertumbuhan masing-masing adalah SD (0,60 persen per tahun) dan SMP (2,25 persen per tahun).

Rata-rata Angka Putus Sekolah tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah untuk SD, SMP, dan SMP cenderung konstan. Demikian juga dengan angka Kelulusan Sekolah juga cenderung konstan dan sudah maksimal yaitu mencapai 100 persen. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs terus meningkat dengan pertumbuhan 2,60 persen per tahun.

Kondisi fasilitas bangunan baik juga terus meningkat dimana pertumbuhannya masing-masing adalah SD (1,10 persen per tahun) dan SMP (3,66 persen per tahun). Angka melek huruf terus meningkat dengan pertumbuhan 0,75 per tahun dan tahun 2020 angka melek huruf sudah mencapai 99,7 persen. Persentase guru berpendidikan S-1 terus meningkat dengan pertumbuhan 2,10 persen per tahun. Pada akhir 2020, guru berpendidikan S-1 sudah mencapai 92,74 persen.

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2020 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.
2. Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat.

Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).



Tabel 1.26
Pencapaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Berkas	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelengkapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ya	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
2	Angka Partisipasi Dasar (APD) :							
-	APD SD/SL/PAUD A	Ya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-	APD SMP/MTs/PAUD B	Ya	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
3	Angka gemilang yang amanah (AGY)							
-	AGY SD/SL/PAUD A	Ya	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Madya (APM) :							
-	APM SMP/MTs/PAUD A	Ya	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
-	APM SMP/MTs/PAUD B	Ya	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
5	Angka Partisipasi Lanjutan (APL) :							
-	APL SD/SL/PAUD A	Ya	99,99	99,99	100	100	99,99	99,99
-	APL SMP/MTs/PAUD B	Ya	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
6	Angka Putus Sekolah :							
-	Angka Putus Sekolah SD/SL/PAUD A	Ya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Angka Putus Sekolah SMP/MTs/PAUD B	Ya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Angka Kelulusan Sekolah :							
-	Angka Kelulusan SD/SL	Ya	100	100	100	100	100	100
-	Angka Kelulusan SMP/MTs/B	Ya	100	100	100	100	100	100
8	Angka Stagnasi (AS)							
-	Angka Stagnasi (AS) dan SD/SL dan SMP/MTs	Ya	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99



No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2020	2021	2021	2022	2022	2022
9	Realisasi Pendidikan							
	Sekolah pendidikan SD/SLB binaan kabupaten/kota	Unit	220	222	220	222	224	228
	Sekolah pendidikan SMP/MTs binaan kabupaten/kota	Unit	77	82	82	84	87	92
10	Rasio ketersediaan sekolah/pendidik non sekolah pendidikan dasar	ratio	65,43	65,43	65,43	65,5	65,55	65,55
11	Rasio ketersediaan sekolah/terdapat pendidik non sekolah pendidikan menengah	ratio	n/a	203,2	213,75	213,99	219,3	n/a
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	ratio	0,43	0,50	0,50	0,50	0,50	0,52
13	Rasio guru/terdapat murid pendidikan menengah	ratio	n/a	n/a	18,88	18,87	18,87	18,87
14	Rasio guru/murid per kelas semester sekolah dasar	ratio	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87
15	Rasio guru/terdapat murid per kelas rata-rata SMP	ratio	0,03	0,00	0,000	0,07	0,07	0,08
16	Frekuensi murid kelas 1 yang berhasil memperoleh sekolah dasar	Ratio	62,00	63,07	63,3	63,33	63,34	63,37
17	Angka mata kuliah pendidik non 12-24 tahun, pengakuan dan lainnya	Persen	89,22	89,22	89,3	89,6	89,6	89,7
18	Pendidik yang berusia >12 Tahun mata kuliah (tidak bisa absen)	Persen	89,6	89,28	89,28	89,21	89,24	89
19	Guru SD yang memenuhi kualifikasi SL/SL-01	Persen	65,60	62,62	69,72	74	82	82,68
20	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi SL/SL-01	Persen	82,88	81,77	85,57	85,67	85,72	85,76

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah



Tabel 2.39
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Berkas	Realisasi 2019
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-14 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	99,49
2	Pendidikan Keselamatan	Jumlah Warga Negara Usia 7-14 Tahun yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan keselamatan	100 %	9,67
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 3-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak	100 %	95,15

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah



Tabel 3.41
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

- Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jangka	Tahun	2015		2016		2017	
				TARGET	Realisasi (%)	TARGET	Realisasi (%)	TARGET	Realisasi (%)
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan fasilitas bagi peserta minimal 3 km untuk SD/MI dan 5 km untuk SMP/MTs dan belangsang pertumbuhan penduduk di daerah sasaran	SD	100	0	0	0	0	0	0
		SMP	100	0	0	0	0	0	0
2.	Rumahnya peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 25 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 30 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang belajar yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	SD	100	100	77	100	88	100	88
		SMP	100	100	80	100	86	100	80
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 25 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan kegiatan peserta didik.	SMP	100	85	67	100	66	100	26
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf administrasi lainnya, dan setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	SD	100	100	88	100	88	100	88
		SMP	100	100	87	100	88	100	87
5.	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 25 peserta didik dan 5 (lima) orang	SD	100	100	94	100	70	100	30



No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Jumlah	Total	2018		2019		2020	
				Target	Keseluruhan (%)	Target	Keseluruhan (%)	Target	Keseluruhan (%)
	pada salah satu atau pendidikan, dan untuk daerah khusus 1 (satu) orang pada setiap satuan pendidikan.								
6	Di setiap SMP dan NTA terdapat 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	800	800	100	97	100	78	100	78
7	Di setiap SD dan MI terdapat 1 (satu) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik Di atas SD dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	30	720	200	73	200	80	200	80
8	Di setiap SMP/NTA terdapat guru dengan kualifikasi akademik Di atas Di atas Di atas 75% dan apasudanya diantaranya 25% dan keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus mengutamakan sebesar 50% dan 25%	800	800	100	88	100	86	100	86
9	Di setiap SMP dan NTA terdapat guru dengan kualifikasi akademik Di atas Di atas Di atas telah memiliki sertifikat pendidik mengutamakan guru untuk mata pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	200	200	100	89	100	80	100	91
10	Di setiap Kabupaten/ Kota yang terdapat SD dan MI berakreditasi: akreditasi Di atas Di atas Di atas telah memiliki sertifikat pendidik.	80	730	100	97	100	78	100	78
11	Di setiap Kabupaten/ Kota yang terdapat SMP dan NTA berakreditasi: akreditasi Di atas Di atas Di atas telah memiliki sertifikat pendidik.	800	800	100	88	100	86	100	86



No.	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Masing	Total	2018		2019		2020	
				Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
15	Di setiap Kabupaten/ Kota semua pengantar sekolah dan mahasiswa memiliki kualifikasi akademik 2-1 atau 3-1/2 dan telah memiliki sertifikat pendidik								
16	Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif								
17	Rendahnya pengantar ke satuan pendidikan diketahui oleh baik setiap bulan dan setiap kunjungan diketahui selama 6 jam untuk melakukan observasi dan pemantauan	80	738	104	73	145	75	101	77
		2019	202	117	27	135	29	122	30

2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Persatuan Penduduk

Sampai dengan tahun 2020, jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 39 buah, dengan Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 32.854. Jumlah ini terdiri dari Jumlah Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) sebanyak 10 buah dengan Rasio persatuan Penduduk 1 : 128.131 dan Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan (TTP) sebanyak 29 buah dengan rasio persatuan Penduduk sebesar 1 : 44.153. Kondisi tersebut masih di bawah target nasional yaitu sebesar 1 : 25.000, sehingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, tingkat ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Sementara itu rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2020 mencapai 1 : 1,39 artinya bahwa dalam satu kecamatan bisa terdapat lebih dari 1 unit Puskesmas.



Tabel 2.40
Serang Prorata Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

No.	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2019	2018	2017	2016	2015	2000
1	Jumlah Puskesmas DTP (Dengan Tempat Pemukiman)	Unit	10	10	10	10	10	10
2	Jumlah Puskesmas TTP (Tanpa Tempat Pemukiman)	Unit	20	20	20	20	20	20
3	Jumlah Puskesmas Wampu POKED	Unit	10	10	10	10	10	8
4	Jumlah Posku	Unit	114	114	114	114	114	114
5	Jumlah Poskesdes	Unit	80	80	80	80	80	108
6	Rasio Puskesmas DTP Persatuan Penduduk	Rasio	123.909	128.048	128.149	127.188	128.121	128.041
7	Rasio Puskesmas TTP Persatuan Penduduk	Rasio	42.727	42.120	42.420	42.847	44.182	44.497
8	Rasio Puskesmas POKED Persatuan Penduduk	Rasio	123.909	128.048	128.149	127.188	128.121	181.301
9	Rasio Posku Persatuan Penduduk	Rasio	1079.7	10.989	11.065	11.154	11.329	11.319
10	Rasio Poskesdes Persatuan Penduduk	Rasio	13.042	13.183	13.278	13.384	9.780	10.323
11	Jumlah Kecamatan	Jumlah	20	20	20	20	20	20
12	Jumlah kampung/ Kelurahan	Jumlah	211	211	211	211	211	214
13	Rasio Puskesmas Per Desa	Rasio	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,81
14	Rasio Puskesmas Per Kecamatan	Rasio	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

b. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 sebanyak 9 (sembilan) unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 1 unit dan rumah sakit swasta 8 (delapan) unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 mencapai 1 : 143.379 yang berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah melayani 143.379 penduduk.



Tabel 2.41
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit dan Klinik Per Jumlah Penduduk

No	Uraian	Satuan	Tegalen Benerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	9	9	9	9	9	9
2	Jumlah Klinik	Unit	38	38	38	38	39	39
3	Rasio Rumah Sakit Tg Penduduk	Rasio	137,677	138,942,9	140,166	141,288	142,367,9	143,379,2
4	Rasio Klinik Tg Penduduk	Rasio	34419	34738	35042	34877	44123	44497
5	Jumlah Penduduk	Jumlah	1.299.006	1.290.488	1.281.405	1.3271.588	1.381.310	1.390.407

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

c. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Jumlah Tenaga Kesehatan secara keseluruhan selama tahun 2015 - 2020 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan terhadap jumlah penduduk masih kurang. Angka ideal rasio pemenuhan tenaga Kesehatan dokter adalah 1 : 2.500. Pada tahun 2020, jumlah tenaga dokter mencapai 231 orang dan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.460.045 jiwa, maka jumlah dokter yang seharusnya adalah 513 orang. Sehingga kekurangan tenaga dokter di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 sebanyak 282 orang.



Tabel 2.42
Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Unit/lok	Jenis	Tahun Rincian					
			2018	2019	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Umum * DD	Orang	142	122	142	146	122	122
2	Jumlah Dokter Spesialis	orang	33	32	32	116	122	79
3	Jumlah Dokter	Orang	221	226	222	272	200	221
4	Jumlah Perawat	Jns	1.229.290	1.226.420	1.221.482	1.271.222	1.221.212	1.400.012
5	Rasio Rasio Tenaga Kesehatan Perawat	Rasio	8,37	8,37	8,38	8,34	8,38	8,38
6	Jumlah Bidan	Orang	990	979	990	1000	1007	1007
7	Jumlah Bidan	Orang	721	721	721	948	720	722
8	Rasio Bidan Tenaga Kesehatan Perawat	Rasio	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,11
9	Jumlah Monev	Monev	811	811	811	811	811	811
10	Rasio Monev Monev Tenaga Kesehatan Jumlah Desa	Rasio	8,38	8,76	8,61	8,71	8,38	1,89

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Selama periode tahun 2015-2020, jumlah Posyandu di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan 79 buah posyandu atau 5,77% dari sebanyak 1.369 buah pada tahun 2015 menjadi sebanyak 1.448 buah pada tahun 2020. Namun demikian, sampai tahun 2020 masih terdapat Posyandu Pratama sebanyak 0,14 persen dan posyandu madya sebanyak 4,28 persen. Hal ini menggambarkan masih perlunya pembinaan peningkatan cakupan untuk meningkatkan strata posyandu madya ke purnama dan peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menaikkan strata pratama menjadi madya melalui penambahan jumlah Kader. Selain itu, perlu pembinaan tokoh masyarakat untuk meningkatkan strata purnama ke mandiri.



Tabel 3.45
Jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

No.	Unitas	Satuan	Capaian Kinerja					
			2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu Dharma	buah	0	0	0	1	2	2
2	Jumlah Posyandu Mitra	buah	504	525	525	554	62	62
3	Jumlah Posyandu Purnama	buah	798	1005	1005	1020	897	897
4	Jumlah Posyandu Mandiri	buah	107	175	175	181	175	175
5	Total Posyandu	buah	1389	1405	1405	1458	1440	1440
6	Persentase							
	- Posyandu Dharma	%	0	0	0	0,07	0,14	0,14
	- Posyandu Mitra	%	36,63	35,98	35,98	37,45	4,38	4,38
	- Posyandu Purnama	%	55,37	71,58	71,58	70,05	61,95	61,95
	- Posyandu Mandiri	%	7,82	12,64	12,64	12,43	12,15	12,15
7	Jumlah Balita	wang	118.700	118.321	118.579	111.743	109.907	108.089
8	Rasio Jumlah Balita Setiap Posyandu	Rasio	11,80	12,31	12,40	12,00	12,17	12,40

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah

e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2020 sebesar 69,31 persen. Namun apabila capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan -2,93 persen.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya:

- Kualitas sumber daya manusia bidang kebidanan;
- Sarana prasarana dalam mendukung pertolongan persalinan sesuai standar;
- Akses informasi mengenai pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan semakin meningkat;
- Kualitas pelayanan Antenatal care;
- Peran serta masyarakat dalam memobilisasi pertolongan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.44
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	orang	20.424	21.262	21.449	19.829	20.141	18.294
2	Jumlah Total Ibu Bersalin	orang	28.628	24.264	28.829	28.879	22.937	22.800
3	Persentase	%	71,4	88,1	80	68,1	87,8	69,21

Sumber: Dinas Kesehatan Lampung Tengah



Tabel 3.45
Pencapaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2019	2020	2020
1	Persentase balita gemuk	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
2	Jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan	kasus	15	15	15	15	15
3	Jumlah kasus kematian bayi	kasus	26	26	26	26	26
4	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	%	71,29	90,10	90,01	90,07	90,0
5	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	%	74,51	91,31	91,38	92,49	92,8
6	Cakupan Dosis/Komponen Universal Child Immunization (UCI)	%	99,00	100,00	99,49	99,4	100
7	Cakupan Dosis Stages Awal	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan Rumah yang mematuhi standar kesehatan (R)	%	71,01	80,20	78,20	78,20	77,42
9	Cakupan masyarakat yang menggunakan air bersih (A)	%	87,47	91,11	91,00	94,00	90,97
10	Cakupan menggunakan jamban keluarga/kasus (K)	%	77,14	78,73	78,89	80,28	81,10
11	Cakupan tempat pengolahan makanan	%	80,70	77,20	88,07	88,74	78,7
12	Persentase kasus KLB yg ditangani < 24 Jam	%	100	100	100	100	100
13	Persentase kasus MTM ditangani	%	100	100	100	100	100



No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Persentase kasus AIDS terangan	%	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Puskesmas mampu Penceg	%	36,33	36,33	35,64	35,64	35,51	35,51
16	Rasio RDR terhadap Penduduk	Ruman Sakti terhadap penduduk	137.677	138.940,8	140.186	141.388	142.367,9	143.378
17	Rasio Puskesmas terhadap penduduk	Puskesmas terhadap penduduk	10.883	10.780	11.086	11.184	11.336	11.319
18	Rasio dokter : penduduk	dokter terhadap penduduk	8.384	8.343	8.300	8.373	8.781	8.888
19	Rasio dokter spesialis : penduduk	dokter spesialis terhadap penduduk	14.577,8	15.340,8	15.884,4	16.184	16.417	16.334
20	Cakupan pelayanan Kesehatan Ruman Sakti							
	- Cakupan Rawat Jalan	orang	263.300	423.333	659.323	943.169	148.112	238.333
	- Cakupan Rawat Inap	orang	38.107	57.609	45.440	48.800	40.712	41.914
	- Cakupan Rawat GIG	orang						
	Quality of Plans							
	- Bed Occupancy Rate (BOR)	%	39,34	44,40	41,37	36,66	46,4	44,3



No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Turn Over Internal (TOI)	km	2	2	4	4	2	2
	- Rod Turn Over (RTO)	km	86	66	81	54	66	62
	Quality of Service :							
	- Average Length Of Stay(Artes)	Men	1	2	2	2	2	2
	- Net Death Rate (NDR)	Per 1000	2,37	4,72	2,90	12,37	7,6	22
	- Gross Death Rate (GDR)	Per 1000	2,78	11,84	12,81	18,70	18,2	18
	Angka Kematan Bayi (AKB)	Per 1000	4,7	2,91	2,93	4,95	2,6	0,6
	Angka Kematan Ibu Melahirkan (AKIM)	per 100.000	26,26	29,06	22,22	21,42	22,22	108,4

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

f. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan

Jenis layanan dasar untuk SPM bidang kesehatan tingkat kabupaten terdiri dari 12 jenis layanan. Rata-rata SPM tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 16,31 persen per tahun. Rata-rata SPM pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat 0,10 persen per tahun, pelayanan kesehatan ibu bersalin turun 0,47 persen per tahun, kesehatan bayi baru lahir turun 5,90 persen per tahun, kesehatan balita turun 1,57 persen per tahun, kesehatan pada usia pendidikan dasar meningkat 44,24 persen per tahun, kesehatan pada usia produktif meningkat 1,70 persen per tahun, kesehatan pada usia lanjut meningkat 13,34 persen per tahun, kesehatan penderita hipertensi meningkat 4,43 persen per tahun, kesehatan penderita diabetes mellitus meningkat 9,69 persen per tahun, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat meningkat 25,83 persen per tahun, kesehatan orang terduga tuberkulosis meningkat 48,92 persen per tahun, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) meningkat 32,88 persen per tahun.



Tabel 2.45
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun	Kecamatan					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	74,31	81,31	81,33	82,69	83,24	89,70
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	71,88	88,18	88,31	88,87	87,81	84,88
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	88,17	88,89	81,88	88,18	88,11	78,88
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	88,88	88,88	88,88	88,88	78,88	88,81
5	Pelayanan kesehatan pada usia produktif dasar	Jumlah Warga Negara usia produktif dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	84,88	88,87	87,88	74,88	88,88	87,88
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	n.a	n.a	88,88	87,88	88,88	88,87
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	78,88	87,88	88,88	88,88	81,88	88,81
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	n.a	n.a	88,88	88,88	87,88	81,88
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan	100 %	n.a	n.a	88,88	88,88	88,88	88,81



No	Jenis Pelayanan Masyarakat	Indikator Penguasaan	Target Tahun	Kebijakan					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Jumlah Kesehatan							
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang menerima layanan kesehatan	100 %	0,0	0,0	00,00	00,00	00,00	00,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan infeksi hepatitis virus yang memengaruhi daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah Warga Negara dengan infeksi hepatitis virus yang memengaruhi daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	0,0	0,0	0,0	00,00	00,00	00,00

Sumber data: Dinas Kesehatan Lampung Tengah

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Peningkatan Urutan Kesehatan Tahun 2015-2020

No	URUTAN	Rata-rata	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kemauan Biji (AKB) per 1000 kelahiran hidup		0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,0000000000	0,00
	Jumlah Kemauan Biji (AKB) per 1000 kelahiran hidup		00	00	00	00	00	00



No	URAIAN	Satuan	TAKSIR					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Baktiwan Melayu pada masa tahun tertentu		27.272	22.212	22.108	19.424	22.120	19.320
	Angka Kelangkaan Melayu Dayak		888	888,88	887	884	884	888,4
	Jumlah Baktiwan Dayak Berumur kurang 1 tahun/ pada masa tahun tertentu		122	88	88	88	72	12
5	Jumlah Baktiwan Melayu pada masa tahun tertentu		27272	22212	22108	19424	22120	19320
	Angka Kemiskinan Relatif per 1000 Kelahiran Melayu		1,88	1,87	1,86	1,87	1,14	1,8
	Jumlah Baktiwan Dayak Berumur kurang 1 tahun/ pada masa tahun tertentu		88	88	88	11	88	8
6	Jumlah Baktiwan Melayu pada masa tahun tertentu		27272	22212	22108	19424	22120	19320
	Angka Kemiskinan Relatif per 1000 Kelahiran Melayu		1,88	1,88	1,81	1,74	1,78	1,8
	Jumlah Baktiwan Dayak Berumur kurang 1 tahun/ pada masa tahun tertentu		72	74	88	88	88	88
7	Jumlah Baktiwan Melayu pada masa tahun tertentu		27272	22212	22108	19424	22120	19320
	Angka Kemiskinan Relatif per 100.000 kelahiran Melayu		22,88	22,28	20,22	20,22	24,22	120,28



No	URAIAN	Satuan	TAKSIR					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah di bawah yang merupakan karena hasil, proses, dan nilai di dalam wilayah tersebut selama 7 tahun		0	10	10	10	17	20
	Jumlah belah ketupat di wilayah tersebut dan pada tahun waktu yang sama		22246	24326	21326	18326	22210	18 322
2	Rasio Pao Yandu per satuan belah		11,12	12,21	12,62	12,22	12,17	1,2
	Jumlah pengemudi		1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Jumlah belah		118700	118801	118870	111710	108887	108 888
7	Rasio Paoheemas, Paoheemas, proses per satuan penduduk		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Jumlah paoheemas, paoheemas, paohe		100	120	120	120	120	120
	Jumlah penduduk		1000000	1000000	1000000	1070000	1000000	1000000
8	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk		0,007000000	0,007000000	0,007000070	0,007000007	0,007000000	0,000070000
	Jumlah rumah sakit		0	0	0	0	0	0
	Jumlah penduduk		1220000	1220000	1220000	1270000	1220000	1000000
9	Rasio Dokter per satuan penduduk		0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
	Jumlah dokter umum + gigi		100	100	100	100	100	100
	Jumlah penduduk		1000000	1000000	1000000	1070000	1000000	1000000



No	URAIAN	Satuan	TAKSIR					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Rasio Tenaga Media per seribu penduduk (media + apusaka)		0,018	0,018	0,018	0,022	0,004	0,010
	Jumlah tenaga media		220	224	229	278	200	221
	Jumlah penduduk		1216088	1250430	1281688	1271380	1281210	1400043
11	Belanja pengkajian kebidanan yang di tempur		78,1	78,8	188,8	188,8	188,8	88,8
	Jumlah pengkajian kebidanan yang mandapat penanganan di/atau di area wilayah kerja pada tahun waktu tertentu		8881	8888	888	8781	8788	8888
	Jumlah itu dengan pengkajian kebidanan di area wilayah kerja pada tahun waktu yang sama		2887	2886	2202	2781	2788	4228
12	Belanja pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		88,12	88,12	88	88,24	88,28	78,22
	Jumlah itu berasal yang dituang oleh tenaga kesehatan di area wilayah kerja pada tahun waktu tertentu		88128	81888	81188	18888	88124	17887
	Jumlah seluruh asuhan itu berasal di area wilayah kerja dalam tahun waktu yang sama		88888	88888	81888	18888	88888	88888



No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Balapan Dasi (balapukan Universal) Dasi Inersian (UI)		80,00	77,71	82,07	81,40	100,00	100,00
	Jumlah Dasi / Balapukan UI		100	215	200	207	215	215
	Jumlah Balapukan Dasi / Balapukan		215	215	215	215	215	215
13	Balapan Balok gas buang mandapati perawatan		100	100	100	100	100	100
	Jumlah Balok gas buang mandapati perawatan di antara pelayanan kegiatan di satu wilayah kerja pada tahun waktu tertentu		00	10	00	00	00	10
	Jumlah seluruh Balok gas buang yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama		00	10	00	00	00	10
13	Perawatan anah satu 1 tahun yang ditemukan sampai		80,0	100,0	88,0	111,7	100,0	8,7
	Jumlah anah satu 1 tahun yang mandapati insidensi sampai di suatu wilayah selama 1 tahun		00000	00000	00000	00077	00700	1000
	Jumlah anah satu 1 tahun pada 10		00100	00000	00000	00010	00000	00000
10	Rek Pelis ATP rata per 100 000 penduduk		0	0	1,00	0,306703012	2,037910100	0



No	URAIAN	Satuan	TAKSIR					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah kasus ZPP non-Felm yang dilaporkan		0	0	7	2	0	0
	Jumlah penduduk < 12 tahun		220000	220000	220070	220070	220000	221000
17	Saluran kelua pneumonia yang dilaporkan		0,00	0,07	0,00	00,00	10,00	10,00
	Jumlah penderita pneumonia kelua yang dilaporkan di suatu wilayah kerja pada tahun waktu base tahun		1007	710	270	200	071	227
	Jumlah penderita pneumonia pneumonia kelua di suatu wilayah kerja pada tahun waktu yang sama		11071	11000,1	0700,000000	0071,0000	0100,0001	0001
18	Saluran pemrosesan dan penanganan penderita penyakit TBC, DTA		100	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita baru TBC DTA (%) yang dilaporkan dan tercatat di suatu wilayah kerja selama 1 Tahun		011	710	000	1000	1011	1000
	Jumlah penderita pneumonia baru TBC DTA (%) dalam suatu wilayah kerja sama		011	710	000	1000	1011	1000
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk		07,00	01,70	00,00	100,11	100,00	10,00
	derajatnya kasus penderita TBC (baru dan lama)		000	1000	1101	0070	1011	100,00



No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	
	Jumlah Penduduk pada umur seksia yang sama		1218088	1220420	1231688	1271280	1291210	
00	Tingkat Kesehatan secara keseluruhan per 100.000 penduduk		9.5681 (100)	9.6788 (100)	9.6788 (100)	1.1788 (100)	9.5888 (100)	
	Jumlah Malas PA yang meninggal		0	0	0	0	0	
	Jumlah penduduk pada umur seksia yang sama		1218088	1220420	1231688	1271280	1291210	
01	Prevalensi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		100	100	100	100	100	
	Jumlah pasien tuberkulosis DOTS yang mendapat pengobatan melalui DOTS		811	748	826	768	1088	
	Jumlah pasien baru PA para DOTS yang diberikan ada dalam wilayah tersebut		811	748	826	768	1088	
02	Prevalensi kasus Tuberkulosis yang tidak dan sembuh dalam program DOTS		87	74	88	100	88	
	Jumlah pasien tuberkulosis para DOTS yang sembuh karena wilayah selama 1 tahun		281	282	692	768	1268	
	Jumlah Jumlah pasien PA Para DOTS yang tidak diulangi dan pada umur seksia yang sama		811	748	826	768	1088	



No	URAIAN	Satuan	TAKSIR					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
22	Seluruh pemukiman dan pemukiman penduduk yang terdampak		100	100	100	100	100	100
	Jumlah penderita DBD yang meninggal akibat DBD selama 1 tahun		177	221	72	109	200	110
	Jumlah penderita DBD yang meninggal dalam rumah waktu yang sama		177	221	72	109	200	110
23	Penderita Demam yang meninggal		22,07	10,90	41,97	22,20	22,07	22,07
	Jumlah penderita demam yang datang dan meninggal di rumah kesehatan dan luar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah penderita demam yang datang dan meninggal di rumah kesehatan dan jumlah penduduk		22000	22000,00%	22000,00%	22000,00%	22000,00%	22000
24	Angka kejadian malaria		0,20	0,20	0,11	0,20	0,22	n.a
	Penderita yang menderita malaria pada tahun terakhir		0	0	0	0	0	0
	Jumlah penderita malaria pada pemukiman rumah		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
25	Tingkat kematian akibat malaria		0	0	0	0	0	0



No	URAIAN	Satuan	TAKSIS					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah kegiatan kelompok monev		0	0	0	0	0	0
	Jumlah penyalahgunaan dana publik tahun 2 tahun		0	1000000	1000000	1000000	1000000	0
27	Penelitian RPT/ARIS (pemerit dan terakipulasi)		0,000000000	0,000000000	0,000000000	0,000	0,000	0,000
	Jumlah penyalahgunaan RPT dan ARIS		00	00	000	00	00	000
	Jumlah penyalahgunaan		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
28	Keputusan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		00,00000000	00,00000000	00,00000000	00,00000000	00,00000000	0
	Jumlah kunjungan pasien miskin di rumah kesehatan tingkat 1		00000	00000	00000	00000	00000	0
	Jumlah kunjungan pasien miskin di rumah kesehatan tingkat 2		00000	00000	00000	00000	00000	00000

Berikut data: Rincian Realisasi Anggaran Kepulauan Bangka Belitung

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah sepanjang 1.343,3 km dan terbagi dalam 366 ruas. Sampai dengan tahun 2020 jalan mantab di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 61,91 persen atau sepanjang 696,621 km. Kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun 2020 meliputi aspal/hotmix sepanjang 1.088,66 km (78,81%), Beton sepanjang 46,25 km (3,44%), lapis penetrasi/lataxir sepanjang 30,57 km (2,28%), Kerikil (Telford) sepanjang 184,99 km (13,77%), dan jalan tanah 22,82 Km (1,70%). Sementara itu, jumlah jembatan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 452 buah.

Tabel 2.48 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018-2020

Jenis Permukaan Jalan	2018		2019		2020	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Aspal (AC,HRS,ATB)	1018,839	75,48	1076,273	80,12	1088,661	78,81
Perkerasan Beton	22,568	1,68	82,874	2,41	46,285	3,44
Lapis Penetrasi/Lataxir/Macadam	278,867	20,35	-	-	30,574	2,28
Telford /Kerikil/Urpil	88,883	2,82	214,126	15,94	184,994	13,77
Tanah /Belum Tembus	1018,839	75,48	20,558	1,58	22,842	1,70
Jumlah	1.343,326	100	1.343,326	100	1.343,326	100

Sumber: Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, 2020



Tabel 2.49
Capaian Kinerja Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten Lampung Tengah

No.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	34,09	58,16	58,59	61,20	61,91	61,50
	Perang jalan kemudi baik	Km	412,177	898,071	827,038	844,423	810,447	813,888
	Jalan Kabupaten Kondisi Sedang	Km	-	-	181,788	83,01	17,38	817,718
	Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Ringan	Km	-	-	180,135	408,507	47,793	495,749
	Jalan Kabupaten Kondisi Rusak Berat	Km	-	-	337,864	338,356	487,736	13,563
	Perang jalan seluruhnya	Km	1.198,82	1.198,82	1.198,82	1.343,328	1.343,328	1.343,328
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,0010	0,0010	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
	Jumlah panjang jalan	Km	1.198,820	1.198,820	1.343,328	1.343,328	1.343,328	1.343,328
	Jumlah penduduk	Jawa	1.228.096	1.280.488	1.281.408	1.271.888	1.281.210	1.480.048
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m	%	n.a	n.a	0,50	0,88	1,21	n.a
	Perang jalan yang memiliki trotoar dan drainase	Km	n/a	n/a	7,324	12	18	n.a
4	Perang jalan menurun jenis permukaan							
	Aspal (AC,HRB,ATB)	Km	n/a	n/a	n/a	1013,939	1076,273	1038,661



No.	JALAN	Seluas	TAMBAH					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Paving Beton	km	N/A	N/A	N/A	22,568	32,514	48,215
	Logis Penetrasi/Lantai/ Macadam	km	N/A	N/A	N/A	215,367	-	30,874
	Telford / Kerikil / Upr	km	N/A	N/A	N/A	55,882	214,136	184,964
	Tanah / Balok Tambak	km	N/A	N/A	N/A	1015,839	20,865	22,843

b. Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur jaringan irigasi, pembangunan difokuskan dalam upaya meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah Irigasi Teknik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdapat daerah irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu D.I Way Seputih, D.I Way Pengubuan, dan D.I. Punggur Utara. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 67,789 km, jaringan irigasi sekunder 496,940 km dengan luas sawah yang tersiri 48.335 Ha.

Selain itu juga ada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Way Kali Pasir, D.I. Way Srikaton, D.I. Way Tatayan Kotabaru, dan D.I. Way Tipo Balak. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 44,892 km, jaringan irigasi sekunder 108,091 km dengan luas sawah yang tersiri 6.904 Ha.

Untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebanyak 163 daerah irigasi. Dengan panjang saluran irigasi primer sepanjang 403,888 km, jaringan irigasi sekunder 487,757 km dengan luas sawah yang tersiri 16.408 Ha.

Pada periode 2015-2020, di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata daerah irigasi teknis kewenangan pemerintah kabupaten yang kondisi baik adalah 94,46 persen dan rata-rata embung pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik meningkat 28,78 persen per tahun. Rata-rata persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan Hsr adalah 33,67 persen.

Selama periode 2015-2020, di Kabupaten Lampung Tengah rata-rata Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun terus menurun dengan penurunan 7,36 persen per tahun. Rata-rata persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik terus menurun dengan penurunan 0,20 persen per tahun. Rata-rata persentase jumlah embung dalam kondisi baik 51,85 persen. Rata-rata persentase jumlah bendung dalam kondisi baik 72,72 persen. Rata-rata persentase panjang talud dan bangunan pelengkap 66,80 persen. Rata-rata persentase luas sawah yang tersiri oleh jaringan irigasi 90,70 persen. Rata-rata persentase jumlah saluran irigasi dalam kondisi baik 61,34 persen.

Tabel 2.50
Daerah Irigasi Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kewenangan Pemerintah Pusat	Dt	3	3	3	3	3	3
2	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Dt	4	4	4	4	4	4
3	Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Dt	163	163	163	163	163	163

Sumber: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah 2021



Tabel 3.51
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Bidang Pengairan

No	Isian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Dewan irigasi teknis kewenangan pemerintah kabupaten yang berdiri baik	%	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40
2	Embang pada kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik	%	50	50	48	50	55
3	Perencanaan empakan sungai yang dipelihara bangunan lar	%	40	40	40	41	41
3.1	Relung empakan sungai yang dipelihara bangunan lar (Rm)	km	333	335	337	331	336
3.2	Relung seluruh empakan sungai kabupaten (Rm)	km	810	810	810	810	810
4	Tidak terjadi pemangsan > 2 kali setahun	%	98%	70%	81%	88%	88%
4.1	Lusutan daerah yang tergenang	ha	8.880	8.338	4.100	3.840	3.880
4.2	Lusutan daerah rawan genangan area berprosent tergenang	ha	7.777	7.400	6.074	6.000	6.307
5	Perencanaan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	10	10	11	17	18
5.1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	ha	1.820	1.710	1.903	1.820	1.980
5.2	Luas irigasi kabupaten	ha	18.830	18.830	18.830	11.180	11.180
6	Rasio jaringan irigasi		16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
6.1	Relung seluruh irigasi	km	2.780,08	2.780,08	2.780,08	2.780,08	2.780,08
6.2	Luas lahan budidaya pertanian	ha	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
7	Perencanaan jumlah embung dalam kondisi baik	%	20,20	20,90	26,07	71,40	72,60



No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
7.1	Jumlah embung dalam kondisi baik	unit	25	24	40	50	58
7.2	Jumlah embung	unit	45	84	80	70	78
8	Persentase jumlah bendung dalam kondisi baik	%	n.a	28	93,88	100	73
8.1	Jumlah bendung dalam kondisi baik	unit	n.a	1	18	18	49
8.2	Jumlah bendung	unit	n.a	4	14	18	87
9	Persentase panjang tebet dan tanggapan primier	%	85	70	80	100	74
9.1	Panjang tebet dan tanggapan pengkaji	m	3.920,00	2.190,00	2.340,00	3.888,00	277,23
9.2	Panjang tebet dalam keadaan baik	m	2.348,00	1.523,31	2.290,59	3.888,00	304,8
10	Persentase luas tanah yang terani oleh jaringan irigasi	%	78,80	70,88	70,88	70,80	91,87
10.1	Jumlah luas tanah yang terani oleh jaringan irigasi	ha	89.882	89.829	89.829	89.341	79.896
10.2	Jumlah luas tanah	ha	87.324	87.181	87.181	86.726	86.748
11	Jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	km	882,20	882,20	882,20	882,22,00	882,20
11.1	Jaringan irigasi primer dalam kondisi sedang	km	58,05	58,05	58,05	58,05,00	58,05
11.2	Jaringan irigasi primer dalam kondisi jelek	km	72,65	72,65	72,65	72,65	72,65
11.3	Total jaringan irigasi primer	km	891,91	891,91	891,91	891,92	891,91
12	Jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	km	287,88	287,88	287,88	287,88	287,88
12.1	Jaringan irigasi sekunder dalam kondisi sedang	km	26,28	26,28	26,28	26,28	26,28
12.2	Jaringan irigasi sekunder dalam kondisi jelek	km	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9
12.3	Total jaringan irigasi sekunder	km	406,93	406,93	406,93	406,94	406,94
13	Jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	km	422,84	426,84	426,88	890,173	898,441
13.1	Jaringan irigasi tersier dalam kondisi sedang	km	28,28	28,28	91,28,00	91,288	49,884



No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
12.2	Jumlah ingas serasir dalam kondisi,lelet	km	1.027,90	1.024,10	1.004,90	930,387	848,119
12.3	Total jumlah ingas serasir	km	1.800,10	1.800,10	1.800,10	1.800,10	1.800,10
14	Persentase jumlah saluran ingas dalam kondisi baik	%	60,4	60,61	60,00	60,40	60,00
14.1	Jumlah Saluran ingas dalam kondisi baik (km)	km	1.073,72	1.407,66	1.446,80	1.841,08	1.847,00
14.2	Jumlah Saluran ingas	km	2.780,98	2.780,98	2.780,98	2.780,98	2.780,98
18	Kecelakaan terhadap RT/R	%	n.a	08	70,6	70,6	70,6
18.1	Gasa wilayah	n.a	n.a	478.980	478.980	478.980	478.980
18.2	Gasa wilayah yang mati terhadap RT/R	n.a	n.a	134.535	204.447	204.447	204.447

Sumber data: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah

c. Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi air bersih dan sanitasi mencerminkan kesejahteraan penduduk yang menempatinnya. Untuk itu Pemerintah telah menetapkan target 100-0-100 yang bermakna 100% penduduk menggunakan air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi masyarakat baik. Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tahun 2016 - 2020 mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,56 persen. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 94,30 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menikmati air bersih.

Perkembangan jumlah rumah sehat (rumah layak huni) tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,70 persen. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 86,58 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk kategori rumah sehat (rumah layak huni).

Perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,78 persen. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 94,30 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menggunakan jamban sehat keluarga.

Perkembangan jumlah pengguna listrik tahun 2016 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,41 persen. Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 89,30 persen rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah sudah menjadi pengguna listrik.

Luas lingkungan kumuh (lingkungan kumuh) tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami kecenderungan menurun dengan rata-rata pertumbuhan penurunan 6,73 persen. Sampai dengan tahun 2020 Luas lingkungan kumuh (lingkungan kumuh) di Kabupaten Lampung Tengah hanya tinggal 1,52 persen.

Tabel 2.52
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519	339.563
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	278.743	285.898	285.898	298.319	320.207
	Persentase	84,80	86,18	86,18	88,12	94,30

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni)
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519	339.563
2	Jumlah Rumah sehat (Layak Huni)	283.714	283.732	286.732	287.502	294.002
	Persentase	77	85,51	85,54	86,18	86,58

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.54
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Jamban
Keluarga Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519	339.563
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Jamban Sehat Keluarga	298.455	308.455	311.855	315.240	320.207
	Persentase	90,88	92,95	93,04	93,12	94,30

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Pengguna Listrik Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	328.563	331.849	335.167	338.519	339.563
2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	275.992	275.992	281.512	285.686	308.229
3	Persentase	84	83,18	83,99	84,39	89,30

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.56
Luas Lingkungan Kumuh (Lingkungan Kumuh) Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan Lingkungan Permukiman (Ha)	527,38	527,38	527,38	642,21	553,74
2	Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Ha)	11,21	11,21	10,20	9,39	8,42
3	Persentase	2,1	2,1	1,9	1,54	1,52

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

d. Penataan Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah saat ini memiliki ruang terbuka hijau (RTH) seluas 5,26 Ha atau sebesar 5,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 2.57
Penataan Ruang

No	Uraian	Luas (m ²)		LOKASI
		2019	2020	
1	Taman Tugu Cenang	18.623	18.623	Kec. Gunung Sugih
2	Taman Kopiah Emas	3.063	3.063	Kec. Gunung Sugih
3	Taman Budaya	632	632	Kec. Gunung Sugih
4	RTH Way Tippe dan Halaman Pabung	245	245	Kec. Gunung Sugih
5	Kolam Air Mancur Utara-Selata	3.337	3.337	Kec. Gunung Sugih
6	Lapangan Upacara Baru	13.376	13.376	Kec. Gunung Sugih
7	RTH Plaza Bander Jaya	220	220	Kec. Gunung Sugih
8	Tugu Perbatasan Pemerintahan - Lampung Tengah	414	414	Kec. Bumi Ratu
9	Tugu Hense	12	12	Kec. Pangkur
10	RTH Poncowati	150	150	Kec. Terbanggi Besar
11	RTH Haji Pemanggilan	298	298	Kec. Padang Ratu
12	RTH Watas	100	100	Pasar Watas
13	RTH Taman Gajah	4.333	4.333	Kec. Gunung Sugih
14	RTH Kec. Padang Ratu	394	394	Kec. Padang Ratu
15	RTH Seputih Banyak	340	340	Kec. Seputih Banyak
16	RTH Sendang Agung	630	630	Kec. Sendang Agung
17	RTH Kota Gajah	110	110	Kec. Kota Gajah
18	RTH Bakri	112	112	Kec. Bakri
19	RTH Kampung Lempuyang Bander Kec. Way Pengubuan	66	66	Kec. Way Pengubuan
20	RTH Perbatasan Kampung Lempuyang Bander - Kec. Terbanggi Besar	75	75	Kec. Way Pengubuan

No	Uraian	Luas (m ²)		LOKASI
		2019	2020	
21	Kolam Air Mancur Masjid Istiqlal	88	88	Kec. Terbanggi Besar
22	RTH Dam Ramen	66	66	Kec. Punggur
Total RTH (m ²)		52.566	52.566	
Total RTH (ha)		5,26	5,26	

Sumber data: Dinas Pengairan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah layak huni pada tahun 2015 sebanyak 284.952, pada tahun 2016 sebanyak 285.352 unit, pada tahun 2017 sebanyak 286.102 unit, pada tahun 2018 sebanyak 286.782 unit, serta pada 2019 rumah layak huni sebanyak 287.502 unit. Adapun pada tahun 2020, jumlah rumah layak huni sebanyak 294.002 unit. Rata-rata pertumbuhan rumah layak huni selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Lampung Tengah adalah 0,63 persen, rata-rata Rasio permukiman layak huni adalah 0,43 persen, rata-rata cakupan ketersediaan rumah layak huni 93,30 persen, dan rata-rata cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah 100 persen. Capaian kinerja standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan 2,91 persen. Indikator yang digunakan untuk mengukur SPM tersebut ada 4 (empat) indikator, yaitu adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni, persentase penurunan luasan.



Tabel 3.68
Perumahan Rakyat dan Kemass Permukiman

No	URAIAN	SATUAN	TAMBAH					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni		0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34
	Jumlah rumah layak huni	unit	334.332	333.332	333.103	333.732	337.803	334.033
	Jumlah penduduk	jiwa	1.139.095	1.150.488	1.161.498	1.171.588	1.180.310	1.181.310
2	Rasio Permukiman layak huni		0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,94
	Luas permukiman layak huni	ha	487	488	490	491	493	494
	Luas wilayah permukiman	ha	527	527	527		527	527
3	Cakupan intradisiain rumah layak huni		91,3	92,2	92,4	92,6	92,9	94,4
	Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	266.431	274.204	273.744	276.204	277.144	278.331
	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	292.167	298.167	298.167	298.167	298.167	298.167
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terdampak		0,88	0,83	0,83	0,84	0,88	0,87
	Jumlah rumah terdampak NDR yang mendapat rumah layak huni dan perbaikan pada kurun waktu tertentu	unit	40.410	40.961	40.711	41.381	42.111	42.408



No	URAIAN	SATUAN	TAMU					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah rumah tangga SDRT pada tahun waktu tertentu	unit	73.793	73.793	73.793	73.793	73.793	73.793
5	Luas area permukiman kota	ha	3	10	34	490	499	501
6	Persentase penghunian permukiman rumah	%	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	Luas penghunian permukiman rumah	ha	40	3	6	6	5	4
	Luas wilayah	ha	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
7	Persentase luasan permukiman rumah di kawasan perkotaan	%	0	0	0	0	0	0
	Luasan permukiman rumah pada kawasan	ha	40	3	6	6	5	4
	Luas permukiman rumah	ha	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000	479.000
8	Frekuensi rumah tangga rumah perkotaan		0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	Jumlah rumah tangga rumah perkotaan	unit	40	3	6	6	5	4
9	Jumlah penghunian yang disalurkan SDU pada tahun waktu tertentu	unit	479.060	479.065	479.065	479.065	479.065	479.064

Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Tabel 3.59
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target %	Capaian		Peningkatan
				2019	2020	
1	Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93,59	92,54	96,55	1,54
2	Luasan Koneksi Rumah	Persentase penurunan luasan koneksi rumah	0,0000	1,70	1,82	0,27
3	Akses Air Bersih	Persentase penduduk terakses air bersih	90	98,13	99,3	1,30
4	Rumah Tinggal Bersantiaf	Persentase rumah tinggal bersantiaf	94,10	95,13	94,3	1,18

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat

Keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat erat kaitannya dengan tingkat kriminalitas. Rasa aman masyarakat menjadi tolak ukur kualitas indikator keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Indikator lain untuk menunjang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah keberhasilan penerapan suatu peraturan per Undang-Undang, seperti halnya peraturan daerah dan peraturan Bupati. Apabila penegakan hukum tidak berfungsi baik, peraturan per-undang-undangan yang paling sempurna sekalipun akan kurang bahkan tidak memberikan arti yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan ujung tombak untuk menilai apakah suatu peraturan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, menjamin adanya ketentraman dan ketertiban atau tidak. Indikator penegakan hukum antara lain tergambar dari jumlah kasus pelanggaran perda dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku ujung tombak penegakan perda.

Rasio Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunannya ialah 3,76 persen. Hal ini salah satunya di dukung oleh adanya peningkatan rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk yang rata-rata pertumbuhannya adalah 22,98 persen. Persentase penegakan PERDA di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 13,30 persen.

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit di Kabupaten Lampung Tengah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya 12,76 persen. Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya adalah 1,73 persen.



Tabel 3.60
Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Ridang Ketenteraman Ketertibn Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPN	Target Nasional	Target Daerah	Realisasi 2020	%
1	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan sesuai dan Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	28 Krt	28 Krt	100
2	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	28 Krt	28 Krt	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Lampung

Tabel 3.61
Capaian Kinerja Pembangunan
Ridang Ketenteraman Ketertibn Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)		1	1	1	1	1	1
	100 orang petugas Linmas	Orang	90	90	90	90	100	100
	1 orang kerja tidakgajian/borok	Orang	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K2 (Ketertiban, Ketenteraman, Kerdahan)	Persen	4	4	4	5	5	4



No.	URAIAN	SATUAN	TAMU					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pelaksanaan K3 yang dilaksanakan	Kerus	23	23	24	25	26	25
	Jumlah pelaksanaan K3 yang dilaporkan masyarakat dan terverifikasi oleh SATPPOL PP	Kerus	550	550	550	550	559	556
2	Jumlah kasus kebakaran di WUK yang terungkap dalam waktu maksimal 15 menit	Kebakaran	27	12	17	20	40	22
4	Persentase penagihan PERDA	Persen	0	13,33	17,60	20,00	26,32	30,00
	Jumlah penempatan penagihan PERDA	Kegiatan	2	2	2	2	2	0
	Jumlah pelanggaran PERDA	Kerus	10	10	17	12	19	20
2	Rasio angka kriminalitas per 10.000 Penduduk	Rasio	0	3,04	3,22	4,29	4,35	0
0	Rasio jumlah Sogrel AP per 10.000 Penduduk	Rasio	0	340	349	370	325	0
	Jumlah Penduduk	Orang	N/A	1.250.480	1.261.480	1.271.330	1.281.310	1.400.040

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah

5. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh keberadaan panti-panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain-lain).

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 54,64 persen. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 88 persen PMKS sudah memperoleh bantuan. Persentase PMKS skala skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 66,99 persen.

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya juga terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2020 sudah 100 persen PMKS telah menerima bantuan program pemberdayaan, semua panti telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan, wahana kesejahteraan berbasis masyarakat (WKBSM) telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan, korban bencana telah menerima bantuan selama masa tanggap darurat, dan korban bencana telah dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.



Tabel 2.42
Pencapaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2016-2020
di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kategori Pokok	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMS yang memperoleh bantuan	%	37	53	54	52	55
2	Persentase Jumlah PMS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan Kesejahteraan Sosial	%	2,72%	2,8%	0,80%	1,40%	0,80%
3	Jumlah Anak Terlantar yang diberikan Pemeliharaan	anak	47	47	200	180	200
4	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang difusi	orang	20	20	20	10	18
5	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibordaskan	lembaga	2	2	2	2	2
7	Persentase PMS skala skala yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	23	23	79	28	90
8	Jumlah PMPT yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Orang	25.823	26.281	70.458	26.281	146.288
9	Jumlah PMPT dalam 1 tahun yang seluruhnya memperoleh bantuan sosial	Orang	116.388	115.847	100.925	163.027	149.693
12	Persentase PMS yang menerima program pembordaskan melalui program usaha bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi sejenis lainnya	%	44	82	100	100	100



No	Kelompok POKD	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
11	Jumlah PKWT dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBB atau kelompok sosial ekonomi agensi	Orang	1.190	1.300	700	540	1.000
12	Jumlah PKWT dalam 1 (satu) tahun yang sebelumnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBB atau kelompok sosial ekonomi agensi	Orang	2.600	2.600	700	840	1.000
13	Persentase pensi yang menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100
14	Jumlah pensi sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Pensi	40	40	09	30	40
15	Jumlah pensi sosial dalam 1 (satu) tahun yang sebelumnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Pensi	40	40	00	30	40
16	Persentase sarana kesehatan kesehatan masyarakat (PKKM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan		100	100	100	100	100
17	Jumlah PKKM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan		143	143	143	143	143



No	Kelompok POKD	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
15	Jumlah UMKM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan sesuai standar		143	143	143	143	143
16	Persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
20	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Korban bencana	34	33	46	37	19
21	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Korban bencana	34	33	46	37	19
22	Persentase korban bencana yang divalerasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	104	100	100
23	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang divalerasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Kebijakan	12	17	28	48	32
24	Jumlah korban bencana yang seharusnya divalerasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat standar	Kebijakan	12	17	28	48	32

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah



Tabel 3.43
Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capainya					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas berlatar di luar pantai	Jumlah warga negara penyandang disabilitas berlatar di luar pantai	100 persen	1,22%	1,04%	1,05%	0,40%	0,16%	0,24%
2	Jumlah anak berlatar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pantai	Jumlah anak berlatar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pantai	100 persen	n.a	n.a	n.a	04,21%	20,21%	22,25%
3	Jumlah warga negara lanjut usia berlatar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pantai	Jumlah warga negara lanjut usia berlatar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pantai	100 persen	1,22%	1,04%	1,76%	3,80%	8,20%	8,88%
4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan	100 persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, untuk tahun 2018 dan 2019 diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 73,46 persen. Sedangkan pada tahun 2020 TPAK sebesar 72,81 persen. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) terdapat di antaranya 72 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Secara rata-rata selama kurun waktu 2015-2020 TPAK di Kabupaten Lampung Tengah adalah 71,10 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanti et al. (1995) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi

angkatan kerja adalah jenis kelamin. Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin ini disebabkan karena laki-laki lebih memiliki tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi (baik bekerja maupun mencari kerja) sedangkan perempuan cenderung mengurus rumah tangga.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 dan 2020, diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 2,71 persen sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi yaitu sebesar 4,42 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin maka tingkat pengangguran terbuka laki-laki selalu lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran terbuka perempuan. Secara rata-rata selama kurun waktu 2015-2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Tengah adalah 3,17 persen.

Rata-rata persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 7,41 persen. Bahkan pada akhir tahun 2020 hanya 21,27 persen pencari kerja yang ditempatkan. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya perekonomian. Sehingga semakin sedikit angkatan kerja yang berhasil ditempatkan dan semakin melemahnya serapan/lowongan untuk tenaga kerja. Karena dampak pandemi Covid-19 ini maka persentase tenaga kerja yang sudah mengikuti BPJS Ketenagakerjaan juga cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 3,03 persen.

Ratio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 1,33 persen. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 73,05 persen penduduk usia 15 tahun kerja ke atas telah memiliki kesempatan kerja.

Angka angketa pengusaha pekerja per tahun pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,34 persen. Namun semua (100 persen) kasus dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 20,25 persen.

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,34 persen. Jumlah lulusan S1/S2/S3 juga cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 7,00 persen



Tabel 2.64
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kegiatan
Tahun 2015 - 2020

No	Tahun	Angkatan Kerja			Subsektor Angkatan Kerja			Jumlah Subsektor Angkatan Kerja	Jumlah (Juta Kerja)	% Tingkat Pengang- guran Tertinggi	% Angkatan Kerja Terdapat Penduduk Juta Kerja/TFAD
		Sekolah	Pengang- guran	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Latihan				
1	2015										
	Lain-Lain	400.390	10.063	410.453	33.788	9.738	14.873	48.358	483.917	3.84	88.70
	Pertanian	313.728	8.837	322.565	30.808	180.848	10.401	221.843	438.330	3.37	83.38
2	2016										
	Lain-Lain	400.390	10.063	410.453	33.788	9.738	14.873	48.358	438.340	3.40	89.49
	Pertanian	313.732	8.837	322.569	30.808	180.843	10.482	221.843	444.112	3.84	80.03
3	2017										
	Lain-Lain	418.891	8338	426.118	18130	2489	17880	48.489	438.840	3.40	89.49
	Pertanian	323.838	12118	335.956	38038	180138	10310	218.478	444.118	3.84	80.08
4	2018										
	Lain-Lain	418.135	8.005	426.140	31.115	14.725	13.185	48.015	438.340	3.40	89.49
	Pertanian	323.179	9.275	332.448	39.039	156.419	12.114	197.563	444.115	3.84	80.05



No	Tahun	Angkutan Kerja			Sekolah	Bukan Angkutan Kerja			Jumlah Bukan Angkutan Kerja	Jumlah (Jala Kerja)	%	%
		Sekolah	Pengang- guran	Jumlah Angkutan Kerja		Pengurus Rumah Tangga	Sekolah	Jumlah Angkutan Kerja				
2	2019							0				
	Lain-Lain	410.820	7.977	424.797	28.472	13.747	13.234	22.493	474.308	1.29		27.08
	Pertanian	248.718	9.817	258.535	38.728	173.747	10.840	210.212	480.040	2.82		28.27
8	2020											
	Lain-Lain	438.428	18.178	441.988	37.709	7.743	20.082	55.529	497.478	2.58		28.34
	Pertanian	259.578	14.478	274.056	33.371	180.855	14.049	208.275	482.691	2.28		28.78

Sumber data: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.65
Pencapaian Kinerja Bidang Keternagakerjaan Tahun 2015 - 2020 di Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPU)	%	8.8	1.31	1.18	1.32	1.63	4.33
2	Rata-rata persentase pencari kerja yang dilampirkan	%	8.8	27.88	80.80	80	28.88	21.27
3	Persentase Tenaga Kerja Yang Sudah mengikuti B2J Ketrampilan	%	8.8	80	70	80	90	29.27
4	Angka partisipasi angkatan kerja		8.8	80.40	71.52	73.88	73.17	73.08



No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Anggaran biaya 12 tahun ke atas		R.R	822.824	829.820	828.820	830.223	716.022
	Jumlah penduduk usia 12 tahun ke atas		R.R	911.803	922.424	922.482	942.888	980.188
2	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 12 tahun ke atas		R.R	89,40	89,28	71,99	70,28	72,08
	Kesempatan kerja		822.824	829.824	829.820	871.208	882.510	888.826
	Jumlah penduduk usia 12 tahun ke atas		R.R	911.803	922.424	922.482	942.888	980.188
6	Angka sengketa perusahaan pekerja per tahun	Kasus	166,67	166,67	63,50	90,91	83,50	100
	Jumlah sengketa perusahaan pekerja	Kasus	8	8	4	11	8	12
	Jumlah perusahaan		24	24	24	121	144	289
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	Kasus	100	100	100	100	100	100
	Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		0	0	1	2	4	0
	Kasus yang diselesaikan		0	0	1	2	4	12
8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan							
	Pencari kerja yang ditempatkan	R.R	3.284	3.222	3.300	2887	2770	2770
	Pencari kerja yang terdaftar	R.R	2.912	2.892	4182	3238	2820	2820
9	Besaran pekerja/baru yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	88,21	88,21	88,00	88,00	88,57	100



No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Pekerja/buruh JUMBOSTEN		18.807	18.807	27.263	21.721	22.713	40.936
	Pekerja/buruh		28.872	28.872	22.429	22928	27.828	60.224
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	88,87	100	n.a	n.a	100	80
	Tenaga kerja yang dilatih		30	30	n.a	n.a	65	100
	Pendaftar pelatihan berbasis masyarakat		45	30	n.a	n.a	65	125
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		1,28	1,28	0,81	21,22	1,12	80
	Tenaga kerja yang dilatih		80	80	20	1200	68	100
	Pendaftar pelatihan kewirausahaan		2.912	2.912	2.882	6182	5687	108
12	Rasio lulusan S1/S2/S3		178,92	178,92	174,28	207,88	200,87	20,7
	Jumlah lulusan S1/S2/S3		21998	21998	21998	28295	25712	20229
	Jumlah penduduk		1250486	1250486	1261486	1271586	1281210	1480045

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Tujuan diselenggarakannya pemberdayaan perempuan adalah:

- a. Untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeuarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan ketetaraan dan keadilan gender.
- c. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan.
- d. Untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan perlindungan anak.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2020 tingkat IPG tertinggi terdapat di Kota Metro (95,55), sedangkan tingkat IPG terendah terdapat pada Kabupaten Meruti (84,17). Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi ke-7 dengan nilai IPG = 89,87. Rata-rata pertumbuhan IPG di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015-2020 adalah 0,18%.

Jumlah kasus KDRT tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 34,22 persen. Namun jumlah kasus KDRT yang ditangani juga terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 93,61 persen. Bahkan di akhir 2020 seluruh kasus (100 persen) KDRT telah berhasil ditangani.

Jumlah kasus terhadap perempuan dan anak tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 11,84 persen. Bahkan hingga akhir 2020 semua kasus (100 persen) terhadap perempuan dan anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berhasil ditangani.

Jumlah pekerja perempuan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,75 persen. Hal yang sama juga terjadi pada partisipasi angkatan kerja perempuan dengan rata-rata

pertumbuhan 3,46 persen. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,46 persen.

Tabel 2.66
Pencapaian Kinerja Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lampung Barat	91,65	n.a	92,47	92,74	92,55	92,55
2	Tanggamus	89,79	n.a	90,71	91,14	90,88	91,13
3	Lampung Selatan	88,89	n.a	89,52	89,87	89,54	89,60
4	Lampung Timur	87,51	n.a	87,88	88,67	88,78	88,88
5	Lampung Tengah	89,08	n.a	89,28	89,57	89,88	89,87
6	Lampung Utara	87,85	n.a	88,69	89,34	89,48	89,45
7	Way Kanan	87,54	n.a	87,85	88,23	88,22	88,19
8	Tulang Bawang	88,08	n.a	88,51	88,69	89,17	89,31
9	Pasawaran	86,13	n.a	87,28	87,57	87,80	87,20
10	Pringsewu	92,37	n.a	92,26	92,59	92,97	92,33
11	Metuji	84,88	n.a	88,82	84,49	84,22	84,17
12	Tulang Bawang Barat	87,93	n.a	88,08	88,53	88,45	88,56
13	Pesisir Barat	92,07	n.a	92,34	93,40	93,22	93,21
14	Kota Bandar Lampung	93,69	n.a	93,33	93,33	93,96	93,36
15	Kota Metro	94,64	n.a	94,97	94,93	95,02	95,55

Sumber data: BPS Provinsi Lampung/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Lampung Tengah



Tabel 3.47
Penempatan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2016	2018	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus KDRT	Kasus	n.a	10	24	20	40	40
1.1	Jumlah Kasus KDRT yang diangan	Kasus	n.a	4	9	20	40	40
1.2	Persentase Kasus KDRT yang diangan	%	n.a	21.05	27.5	100	100	100
2	Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak	Kasus	218	218	257	405	109	40
2.1	Jumlah Kasus terhadap perempuan dan anak yang diangan	Kasus	218	218	257	405	109	40
2.2	Persentase penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penanganan perempuan di lembaga pemerintah	%	n.a	n.a	2,28	2,20	2,4	n.a
3.1	Bekerja perempuan di lembaga pemerintah	orang	n.a	n.a	8,828	8,718	8,918	n.a
3.2	Jumlah pekerja perempuan	orang	n.a	n.a	225,711	225,173	242,719	n.a
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	orang	4	4	4	4	13	12
4.1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	orang	2	2	2	2	6	8
4.2	Jumlah kursi kursi di naenggrasan DPRD	orang	20	20	20	20	20	20
5	Jumlah pekerja perempuan	orang	222.272	222.272	225.711	225.173	242.719	n.a
6	Rasio KDRT	Rasio	0.03	0.03	0.09	0.04	0.01	n.a
6.1	Jumlah KDRT	Kasus	28	28	148	182	80	82



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2016	2016	2017	2018	2019	2020
6.2	Jumlah rumah tangga	RT	482.778	482.778	432.874	432.882	482.408	n.a
7	Partisipasi angketan kerja perempuan	%	23	24	28,88	27,18	27,11	n.a
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100
8.1	Jumlah pemaduan/laporan yang mendapatkan oleh unit pelayanan terpadu	Kasus	318	318	257	405	109	122
8.2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Kasus	318	318	257	405	109	122
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu rata (skema RPA/A dan PPT/PKT di rumah sakit)	%	20,4	20,4	49,2	47,4	20,4	20,7
9.1	Jumlah korban RPA/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu (skema RPA/A atau PPT/PKT di RS) diunit wilayah kerja tertentu pada tahun waktu tertentu	orang	120	120	141	145	28	54



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.2	Jumlah seluruh korban R0/A yang terdapat dalam ke guatan/has mampu melaksanakan kasus R0/A dan ke R0 dituntut untuk kepo terdapat dalam hukum dalam terdapat	orang	276	276	265	208	72	89
10	Cakupan penanganan hukum dan tingkat perlindungan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	90,13	90,13	90,93	90	90	90
11.1	Jumlah perkara yang diproses pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	137	137	144	161	48	28
11.2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diadukan	orang	122	122	202	222	90	70
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	n.a	100	72	100	100	100
12.1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	orang	n.a	276	208	208	72	89
12.2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	orang	n.a	276	265	208	72	89



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Jumlah pertemuan dan anak berbakat ketahanan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	orang	137	137	144	161	45	35
14	Jumlah korban yang mendapatkan rehabilitasi sosial	orang	137	137	144	161	45	35

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Lampung Tengah

3. Pangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Tabel 2.68
Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Beras (ton)	487.678	477.948	519.054	471.785	460.888
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.280.488	1.261.498	1.271.866	1.281.810	1.460.048
Rata-rata Perkapita (kg/thn)		389,987	378,878	408,201	368,166	315,667

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan.

Pada tabel 2.69 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata perkapita tahun 2016 sebesar 389,987 kg/th dan terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu 315,667 kg/th karena lahan produksi terimbas jalan tol dan lain-lain. Maka pola pangan harapan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah mengalami kenaikan/penurunan, hal ini ada perubahan perilaku dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam konsumsi pangan.

Tabel 2.69
Perkembangan Ketersediaan Energi, Lemak, Protein Perkapita
Perhari Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Protein (kalori)	11.924,16	11.441,62	15.072,82	10.989,41	11.700,68
2	Lemak (gram)	148,85	142,82	168,84	198,18	194,08
3	Protein (gram)	210,84	200,41	242,48	158,72	142,69

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan.

Pada tabel 2.70 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan ketersediaan lemak mengalami penurunan dari 195,15 gram pada tahun 2019 menjadi 194,03 gram tahun 2020, dan protein meningkat di tahun 2019 menjadi 153,72 gram menurun pada tahun 2020 menjadi 142,69 gram. Pola Pangan Harapan Masyarakat Lampung Tengah mengalami penurunan, hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku dari pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dalam konsumsi pangan.

Tabel 2.70
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Kelompok Pangan	2016	2017	2018	2019	2020	PPH Nasional
1	Padi - padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25
2	Umbi - umbian	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Pangan Hewani	16,8	14,7	18,4	16,7	18,4	24
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5
5	Buah /Biji Berminyak	0	0	0	0	0	1
6	Kacang - kacangan	2,9	2,8	9,8	3,8	3,8	10
7	Gula	2,5	2,5	2,5	2,4	2,1	2,5
8	Sayur dan Buah	26,2	30,0	28,7	29,7	26,3	30
9	Lain -lain	0	0,0	0,0	0,0	0,0	00
	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	80,9	82,5	86,7	85,2	82,7	100

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan.

Dari tabel 2.71 perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) Tahun 2016-2020 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 mencapai 85,2 dan pada tahun 2020 mencapai 82,7 terdapat beberapa komoditas pangan yang sudah memenuhi PPH Nasional seperti padi-padian, umbi-umbian, dan minyak/ lemak, sedangkan untuk komoditi yang lain belum mencapai PPH yang ditetapkan Nasional. Hal yang perlu diupayakan adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan yang belum memenuhi target PPH agar dapat meningkat dan seimbang terdistribusi.

Tabel 2.71
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Tengah 2015 - 2020

No	Jenis	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras	586.555	481.333	471.735	878.273	561.679	454.897
2	Jagung	267.432	283.029	472.334	472.334	432.988	343.027
3	Ubi Jalar	5.213	3.574	3.574	3.574	1.903	3.509
4	Ubi Kayu	1.907.273	1.336.331	1.133.211	1.133.211	1.402.129	1.372.943
5	K. Tanah	827	893	890	890	696	474
6	K. Kedelai	2.447	1.393	33	33	10.403	1.333
7	Kacang Hijau	224	224	234	234	129	224
8	Sayuran	33.106	44.639	34.364	34.364	19.136	33.106
9	Buah-Buahan	92.297	92.297	103.969	103.969	639.584	92.297
10	Ikan	27.947		33.333	33.333	33.376	40.370
11	Daging	19.805	14.896	19.805	19.805	933.394	19.133
12	Telur	n.a	n.a	4.993	4.993	229.403	9.900
13	M. Goreng	64.626	n.a	33.233	33.233	64.626	64.626
14	Gula	13.320	n.a	13.320	13.320	233.433	13.320

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah

Tabel 2.72
Kebutuhan Pangan di Lampung Tengah 2015-2020

No	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras	117.390	113.671	144.363	144.363	163.363	167.321
2	Jagung	1.233	1.230	1.261	1.261	1.471	1.460
3	Ubi Jalar	2.391	2.413	2.433	2.433	2.339	2.313
4	Ubi Kayu	10.656	10.754	10.349	10.349	12.650	12.556
5	Kacang Tanah	13.531	13.653	13.776	13.776	16.062	15.944
6	Kacang Kedelai	21.672	21.371	22.064	22.064	23.726	23.336
7	Kacang Hijau	644	650	656	656	763	729
8	Sayur sayuran	63.923	64.513	65.031	65.031	73.233	73.324
9	Buah-buahan	33.790	34.101	34.401	34.401	40.111	39.313
10	Ikan	16.159	n.a	16.349	16.349	19.063	13.922
11	Daging	3.167	3.213	3.260	3.260	6.134	6.033
12	Telur	11.132	n.a	11.333	11.333	13.233	13.140
13	Minyak Goreng	13.033	n.a	13.120	13.120	13.297	13.134
14	gula	11.152	n.a	12.637	12.637	13.003	14.392
15	Susu	1.177	1.133	1.193	1.193	1.397	1.337

Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah

Dari tabel 2.72 dan 2.73 di atas tentang perkembangan ketersediaan pangan Tahun 2020 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami surplus diantaranya padi, jagung, ubi kayu, sedangkan beberapa komoditas kebutuhan pangan yang mengalami kekurangan diantaranya kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan bawang merah. Hal yang perlu diupayakan adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan dapat seimbang terdistribusi, serta aman untuk kebutuhan pangan masyarakat.

Namun demikian secara umum tahun 2015-2020 rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat penurunan 2,35 persen per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan dan protein perkapita yang cenderung menurun dengan tingkat penurunan 0,96 persen per tahun. Untuk menjamin keamanan konsumsi oleh masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pengawatan dan pembinaan keamanan pangan, dimana aktifitas pengawatan dan pembinaan keamanan pangan terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 46,66 persen per tahun. Bahkan pada tahun 2020 aktifitas pengawatan dan pembinaan keamanan pangan sudah mencapai 97,78 persen.

Pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,44 persen per tahun. Selain itu aktifitas penanganan daerah rawan pangan juga terus ditingkatkan dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 32,02 persen per tahun.



Tabel 3.73
Capaian Kinerja Urusan Pangan 2018-2020

No.	URUSAN	SATUAN	TAMU					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan pangan utama	kg/ha	42,30	39,00	37,80	40,82	38,82	37,36
	Rasio jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	Ton	220222	407072	477942	219024	471722	409782
	Jumlah penduduk	Jwa	1229096	1230406	1231492	1271306	1231210	1292240
2	Ketersediaan dan protein perkapita	Kkal	61,02	58,82	57,02	62,02	58,21	57,78
	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) Ketersediaan pangan (kapita/hari) Kandungan Kalori X 800	Kalori	12988,1	11924,18	11441,82	13072,52	10989,41	12876,9
	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari) Ketersediaan pangan (kapita/hari) Kandungan Protein X 800	gr/kg/hr	228,89	210,94	200,41	242,42	195,15	222,87
3	Penggunaan dan pembiasaan makanan pangan	%	30,00	35,00	32,33	32,33	30,91	37,78
	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu sampel sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	sampel	9	12	100	130	1000	1100
	Jumlah sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di satu wilayah market urban yang akan diterapkan dalam kurun waktu tertentu	sampel	30	40	130	144	1100	1125
4	Pemantauan Stok Poka Pangan terapan	Stok	21	22,5	21,8	22,4	20,7	20,9
	Pengukuran Cadangan pangan	Ton	30	30	30	30	31,4	31,4 Ton
5	Pemantauan Daerah Rawan Pangan	Desam	18	18	25	40	40	48

4. Pertanahan

Saat ini tanah menjadi permasalahan yang terjadi didalam masyarakat karena setiap orang ingin berusaha untuk mempunyai dan menguasai tanah yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat. Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Jika ingin memperoleh sertifikat tanah, memerlukan proses pelaksanaan pendaftaran tanah yang harus disesuaikan dengan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Persentase luas tanah yang bersertifikat tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,44 persen per tahun. Sedangkan persentase luas tanah yang bersertifikat juga cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang sama per tahun. Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi penyelesaiannya juga cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 10,83 persen per tahun.

Tabel 2.74
Pencapaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015 - 2019

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	55,78	56,74	55,78	56,74	56,74
	Jumlah luas lahan bersertifikat	ha	-	267.202	271.778	271.778	271.778	271.778
	Jumlah luas wilayah	ha	478.982	478.982	478.982	478.982	478.982	478.982
2	Penyelesaian konflik tanah yang difasilitasi	100	60	100	66,67	100	66,67	66,67
	Jumlah kasus yang diselesaikan	kasus	6	8	8	8	8	8
	Jumlah kasus yang terdaftar	kasus	6	8	12	8	12	12
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100
	Jumlah jtn lokasi		8	6	6	10	14	14
	Pemohonan jtn lokasi		8	6	6	10	14	14

Sumber data: Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah

5. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang PPLH, lingkungan hidup adalah keratuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangtungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan dengan kualitas baik akan sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Kualitas tersebut dikatakan baik jika keadaan unsur hayati maupun unsur fisik yang ada mampu mendukung kehidupan berbagai spesies. Hal ini dapat dilihat dengan mengetahui daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Namun, daya dukung lingkungan bukanlah tanpa batas. Ia memiliki keterbatasan, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Semua indikator lingkungan hidup tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan masing-masing adalah indeks kualitas air (13,09 persen), indeks kualitas udara (5,76 persen), dan indeks kualitas lingkungan hidup (6,66 persen).

Tabel 2.75
Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Kualitas Air	IKA	41	43,33	46,67	51,70	71,62	73,33
2	Indek Kualitas Udara	IKU	64	70	74,9	81,24	86,33	84,33
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan	IKTL	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13	30,13
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	IKLM	43,33	45,30	48,32	51,93	59,40	59,43
4	Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen Amdal / IPAL / UKP / UPL	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penanganan Sampah	%	11,11	9,26	11,11	18,79	20,6	24,91
6	Persentase Penyelesaian Jumlah Kasus Lingkungan Hidup	%	0	0	2	3	1	0

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah

Dari tabel 2.75 terlihat bahwa IKLM Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu dari 43,25 meningkat menjadi 59,43. Peningkatan signifikan ini dari komponen indeks kualitas air (IKA) dari angka 41 pada tahun 2015 menjadi 73,58 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di beberapa titik sampel yang di pantau mengalami peningkatan kualitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Indek kualitas udara mengalami peningkatan dari 64 pada tahun 2015 menjadi 84,35 pada tahun 2020. Indeks kualitas tutupan hutan (IKTH) Kabupaten Lampung Tengah tidak banyak mengalami perubahan dari 30,13 pada tahun 2015 menjadi 30,13 pada tahun 2020.

Dari kinerja persentase perusahaan yang memiliki dokumen amdal/IPAL/UKP/UPL menunjukkan adanya kesadaran perusahaan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase jumlah perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKP/UPL adalah 100% .

Tahun 2016 jumlah wajib perusahaan sebanyak 285 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 285 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2017 jumlah wajib perusahaan sebanyak 305 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 305 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2018 jumlah wajib perusahaan sebanyak 309 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/UKP/UPL sebanyak 309 Perusahaan atau 100 persen. Tahun 2019 jumlah wajib perusahaan sebanyak 309 Perusahaan dengan perusahaan yang telah memiliki Dokumen Amdal/IPAL/ UKP/UPL sebanyak 309 Perusahaan atau 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang tinggi dari perusahaan untuk mematuhi ketentuan perundangan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Penanganan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan hidup baru mencakup 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar, dan itupun masih belum seluruh kampung/keurahan dapat terlayani. Gambaran pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan terdapat

peningkatan pengelolaan sampah an dari 11,11 persen pada tahun 2015 menjadi 20,06 persen pada tahun 2019, dengan volume sampah yang cenderung terus meningkat dari 10.800 ton pada tahun 2016, 10.800 ton pada tahun 2016. 13.500 ton pada tahun 2017, 14.500 ton pada tahun 2018, 14.500 ton pada tahun 2019 dan 16060 pada tahun 2020. Persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 33,69 persen per tahun.

Jumlah kasus lingkungan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan terutama di 3 tahun terakhir yaitu sebesar 2 kasus di tahun 2017, 3 Kasus di 2018, 1 kasus di tahun 2019, dan 0 kasus pada tahun 2020.

Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah pertama kali menyusun RPPLH dan Raperda tentang RPPLH tahun 2014. Raperda tersebut berhasil disahkan menjadi Perda RPPLH tahun 2017. Namun pada saat bersamaan terbit Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Perda tentang RPPLH Kabupaten Lamteng dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ternyata Perda tersebut tidak sesuai dengan SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016.

Pada tahun 2019 Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah menyusun kembali dokumen RPPLH, sudah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2020 Raperda RPPLH tersebut sudah masuk dalam Prolegda di DPRD Kabupaten Lampung Tengah, namun belum disahkan karena pandemi Covid 19.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertuban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Persentase penduduk wajib KTP yang telah memiliki E-KTP di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 2,97 persen per tahun. Persentase pertumbuhan penduduk yang telah memiliki akte kelahiran meningkat dengan tingkat pertumbuhan 26,76 persen per tahun. Jumlah kepala keluarga yang telah memiliki kartu keluarga meningkat dengan tingkat pertumbuhan 40,28 persen per tahun. Jumlah akte perkawinan yang diterbitkan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 40,58 persen per tahun. Jumlah akte kematian yang diterbitkan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 60,30 persen per tahun.

Tabel 2.76
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	jiwa	1.289.098	1.280.486	1.261.498	1.271.868	1.281.310	1.480.048
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP	orang	n.a	1.084.474	1.103.985	1.088.864	1.115.949	1.104.668
3	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman E-KTP	orang	n.a	825.227	898.818	902.942	985.223	985.223
4	Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah memiliki E-KTP	orang	n.a	218.407	247.721	292.560	915.672	986.072
5	Jumlah Penduduk Yang memiliki Akte Kelahiran	orang	n.a	279.708	578.299	621.754	665.603	687.673
6	Jumlah Kepala Keluarga	KK	n.a	463.772	439.274	439.383	452.495	472.800
7	Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	KK	n.a	39.168	53.322	59.034	104.823	395.021
8	Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan	akte	n.a	2.702	6.011	6.320	7.659	8.724



No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan	akte	n.a	808	498	790	1.807	1.992

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.77
Pencapaian Kinerja Administrasi Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Lampung Tengah 2016- 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ratio bayi berakte kelahiran	Persen	0,92	0,89	0,88	0,88	0,81
	Jumlah bayi berakte kelahiran		19.881	19.120	16.668	12.872	2.809
	Jumlah bayi		21.619	21.489	20.081	14.886	8.101
2	Ratio pasangan berakte nikah	Persen	0,06	0,14	0,18	0,17	0,20
	Jumlah pasangan nikah berakte nikah		2.702	6.011	6.820	7.689	8.724
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah		48.147	48.880	48.798	44.174	44.820
3	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi		ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	Ada/tidak ada						
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
	Sudah/belum						
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	0,78	0,77	0,88	0,90	0,86
	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan		811.782	847.721	892.686	912.296	980.881
	Jumlah penduduk wajib KTP		1.084.474	1.108.988	1.010.680	1.018.188	1.098.988
6	Cakupan penerbitan akte kelahiran	Persen	0,92	0,89	0,88	0,88	0,81
	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan		19.881	19.120	16.668	12.872	2.809
	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan		21.619	21.489	20.081	14.886	8.101

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kampung)

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah da-lam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengalokasikan dana desa guna meningkat-kan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Secara umum keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari Indek Desa Membangun (IDM). IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang dikembang-kan dalam 22 variabel dan 52 indikator, yaitu:

- Ketahanan Sosial: Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial, serta Permukiman.
- Ketahanan ekonomi: keberagaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkredivitan, lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah.
- Ekologi: kualitas lingkungan dan potensi/rawan bencana alam.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 memiliki jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 0 Desa, Desa tertinggal sebanyak 11, Desa Berkembang 207, Desa Maju sebanyak 83 Dan Desa Mandiri sebanyak 0. Kondisi tersebut lebih baik dibanding Tahun 2017 yang memiliki desa sangat tertinggal sebanyak 1 Desa, Desa tertinggal sebanyak 100, Desa Berkembang 177, Desa Maju sebanyak 23 Dan Desa Mandiri sebanyak 0.

Indikator pemberdayaan masyarakat lainnya pada tahun 2015-2010 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan masing-masing adalah untuk pertumbuhan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik (6,64 persen), pertumbuhan jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (6,49 persen), pertumbuhan kelompok binaan PKK (6,49 persen), pertumbuhan LSM aktif (22,79 persen), pertumbuhan jumlah LPM berprestasi (8,70 persen), pertumbuhan jumlah PKK aktif (6,42 persen), pertumbuhan jumlah Posyandu aktif (4,34 persen), dan pertumbuhan jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat (4,74 persen).



Tabel 3.78
Klasifikasi Indeks Desa Membangun Tahun 2017- 2020 di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	2017					2018					2019					2020				
		DI T	DI T	DI B	DI Mdr	DI Bdr	DI T	DI T	DI B	DI Mdr	DI Bdr	DI T	DI T	DI B	DI Mdr	DI Bdr	DI T	DI T	DI B	DI Mdr	DI Bdr
1	Padang Ratu	-	4	5	2	-	-	-	12	2	-	-	-	11	4	-	-	-	11	4	-
2	Amah Derah Ap	-	4	5	-	-	-	4	5	-	-	-	1	5	-	-	-	1	5	-	-
3	Belaga Lingga	-	5	11	-	-	-	1	10	1	-	-	-	10	2	-	-	-	10	2	-
4	Pulau	-	10	9	1	-	-	8	10	1	-	-	6	10	1	-	-	4	10	1	-
5	Jalan Tula	-	9	5	-	-	-	2	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	-
6	Kalorjo	-	3	11	3	-	-	1	10	4	-	-	-	7	10	-	-	-	7	10	-
7	Sondang Agung	-	5	5	1	-	-	3	6	1	-	-	-	8	1	-	-	-	8	1	-
8	Bangun Raja	-	-	16	1	-	-	-	16	2	-	-	-	14	2	-	-	-	14	2	-
9	Cunung Bugh	-	7	6	-	-	-	-	11	-	-	-	-	10	1	-	-	-	10	1	-
10	Balai	-	8	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	-
11	Buntala Tulan	-	6	2	1	-	-	-	7	2	-	-	-	1	8	-	-	-	1	8	-
12	Trimuro	-	4	7	-	-	-	-	7	4	-	-	-	6	5	-	-	-	6	5	-
13	Pinggan	-	-	7	2	-	-	-	4	8	-	-	-	2	7	-	-	-	2	7	-
14	Kala Gajah	-	-	8	2	-	-	-	8	2	-	-	-	6	2	-	-	-	4	2	-
15	Sepuluh Kaman	-	6	2	2	-	-	-	9	2	-	-	-	8	2	-	-	-	9	2	-
16	Tortangp Ksar	-	2	5	-	-	-	-	3	4	-	-	-	3	4	-	-	-	3	4	-
17	Sepuluh Agung	-	3	5	1	-	-	-	10	-	-	-	-	7	3	-	-	-	7	3	-
18	Way Penguluhan	-	4	4	-	-	-	2	4	2	-	-	1	8	2	-	-	1	8	2	-
19	Torosan Tunggal	-	5	2	-	-	-	6	-	2	-	-	2	1	2	-	-	2	1	2	-



No.	Kecamatan	2017					2018					2019					2020				
		DB T	DT	DB	D AG	D MAG	DB T	DT	DB	D AG	D MAG	DB T	DT	DB	D AG	D MAG	DB T	DT	DB	D AG	D MAG
20	Sepuh Hutan	-	4	2	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	-	-
21	Mandar Hutan	-	-	2	1	-	-	-	2	4	-	-	-	4	2	-	-	-	4	2	-
22	Sepuh Bayan	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-	-	-	12	1	-
23	Var Sepuh	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-
24	Bumbe	-	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-
25	Bumi Hujung	-	2	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-
26	Putra Rumbia	1	2	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-
27	Sepuh Sumbaga	-	2	2	1	-	-	4	2	1	-	-	2	2	1	-	-	2	2	2	-
28	Mandar Sumbaga	-	4	4	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-
	Jumlah	1	100	177	22	0	0	26	221	24	0	0	11	207	22	0	0	11	207	22	0

DBT : Desa Bangel Tunggul; DT : Desa Tunggul; DB : Desa Bumi Hujung; DAg : Desa Aja; DMAG : Desa Mandi
Sumber data: Dinas Perekonomian Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah



Tabel 3.79
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Toba 2016-2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Catatan sarana dan prasarana pemerintahan desa yang baik	Persan	80%	80%	80%	80%	70%	80%
	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik		176	179	189	203	218	240
	Jumlah seluruh pemerintahan desa		301	301	301	301	301	301
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persan	0,7	0,71	0,72	0,80	0,88	0,98
	Jumlah kelompok binaan LPM		210	218	228	243	287	387
	Jumlah LPM		301	301	301	301	301	301
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persan	0,7	0,71	0,78	0,80	0,88	0,98
	Jumlah kelompok binaan PKK		210	215	225	243	287	387
	Jumlah PKK		301	301	301	301	301	301
4	Persentase LPM aktif	Persan	20%	20%	20%	40%	40%	70%
	Jumlah LPM aktif		60	60	60	120	120	210
	Jumlah LPM		301	301	301	301	301	301
5	Persentase LPM berprestasi	Persan	70%	70%	80%	80%	80%	80%
	Jumlah LPM berprestasi		210	210	240	240	240	240



No	URAIAN	Satuan	TANPA					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah SPK		301	301	301	301	301	301
8	Persentase SPK aktif	Persen	88%	88%	76%	90%	88%	90%
	Jumlah SPK aktif		197	200	228	240	260	268
	Jumlah SPK		301	301	301	301	301	301
9	Persentase Pelayan aktif	Persen	81%	80%	79%	79%	84%	82%
	Jumlah Pelayan aktif		1125	1120	1117	1120	1259	1252
	Total Pelayan		1407	1407	1407	1408	1448	1448
10	Budaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	62%	66%	72%	74%	77%	79%
	Jumlah Budaya masyarakat mendukung Program pemberdayaan Masyarakat		189	204	217	229	232	238
	Total Program pemberdayaan Masyarakat		301	301	301	301	301	301
11	Pemeliharaan Peta Program pemberdayaan masyarakat	Persen	32%	33%	33%	40%	50%	52%
	program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan diperluas masyarakat		5	5	5	6	8	8
	Total peta program pemberdayaan masyarakat		13	13	13	13	13	13

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi kependudukan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan pembangunan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk produktif yang melimpah dan berkualitas jika dimanfaatkan dengan optimal akan mampu mendukung pembangunan suatu negara.

Indikator utama dalam pengendalian penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan dari tahun 2015-2020, dengan rata-rata penurunan sebesar 0,566 % per tahun. Walaupun mengalami penurunan, namun hal ini berbanding terbalik dengan kondisi jumlah penduduk Lampung Tengah yang mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020.

Tabel 2.80
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015- 2020

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
1	2015	1.229.092	0,97
2	2016	1.250.486	0,92
3	2017	1.261.498	0,88
4	2018	1.271.566	0,80
5	2019	1.281.310	0,77
6	2020	1.460.045	1,39

Sumber data: BPS Kab. Lampung Tengah

Salah satu strategi dalam penurunan atau pengendalian kelahiran penduduk adalah melalui program keluarga berencana (KB) dengan pemakaian alat kontrasepsi, terutama bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,39 persen per tahun. Pada akhir tahun 2020 sebanyak 71,81 persen PUS telah menjadi peserta KB aktif.

Tabel 2.81
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 - 2020

No	Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah PUS peserta KB Aktif	Persentase PUS Peserta KB Aktif
1	2015	504563	220111	43,6
2	2016	504563	223265	44,3
3	2017	505296	223265	44,2
4	2018	510322	234443	45,9
5	2019	545802	246345	45,1
6	2020	5345.978	247412	46,3

Sumber data: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



Tabel 3.82
Pencapaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
Tahun 2018-2020

No	Deskripsi	Satuan	TAMU					
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Tingkat pertumbuhan penduduk (LPR)	Persen	0,87	0,92	0,88	0,80	0,73	0,73
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,33	2,3	2,33	2,3	2,56	2,56
3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	0,8	28	28	28	28	28
	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	Dinas/ Badan	10	10	10	10	10	10
	Jumlah semua perangkat daerah	Dinas/ Badan	28	28	28	28	28	28
4	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang memenuhi dan melaksanakan Kewajiban Index Pengendalian Penduduk		28	28	28	28	28	28
	Jumlah perangkat daerah yang memenuhi & melaksanakan Kewajiban Index pengendalian penduduk	Dinas/Badan	10	10	10	10	10	10



No	Uraian	Satuan	TAMBAH					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah semua perangkat daerah	Dinas/Badan	28	28	28	28	28	28
2	Jumlah kegiatan (Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah) yang mengenai tentang pendidikan kuantitas dan kualitas penduduk		10	2	2	2	2	2
	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pendidikan Penduduk		10	5	5	2	5	5
6	Jumlah satuan yang melaporkan dan memantapkan data guru (parameter dan prestasi penduduk) untuk pemantauan dan pelaksanaan program pembangunan	Dinas/Badan	10	0	0	0	10	0
7	Jumlah kerja sama penyelenggara Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melakukan pendidikan masyarakat	sebutah	10	0	0	N/A	1	0
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga		0,70	0,70	0,67	0,69	0,63	0,63
	Jumlah anak		222.930	222.930	221.700	292.400	276.300	2762.30



No	Uraian	Satuan	TAMBAH					
			2019	2018	2017	2016	2015	2014
	Jumlah kelahiran		482.778	482.778	420.874	420.882	482.428	482.428
9	Rasio Akseptor KB	Persen		72,27	72,12	75,55	71,24	71,51
	Jumlah Akseptor KB	orang	300.000	320.111	320.388	324.443	348.348	347.370
	Jumlah pasangan usia subur	orang	304.582	304.582	308.286	310.322	348.802	348.927
10	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi wanita usia 15 - 49	Persen	48,82	72,27	72,12	75,55	71,24	71,51
	Jumlah peserta KB aktif	orang	320.111	320.111	320.388	324.443	348.348	347.370
	Jumlah pasangan usia subur	orang	304.582	304.582	308.286	310.322	348.802	348.927
11	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpuisi (unmet need)	persen	27,72	27,72	28,87	24,45	28,76	28,49
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpuisi	orang	84452	84452	83091	75879	99457	99567
	Jumlah pasangan usia subur	orang	304582	304582	308286	310322	348802	348927
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (PJLP)	persen	43,45	43,45	44,10	42,22	42,22	43,67
	Jumlah akseptor KB yang menggunakan PJLP	orang	95822	95822	98587	106075	106099	106018
	Jumlah akseptor KB	orang	320111	320111	320388	324443	348348	347370



No	Uraian	Satuan	TAMBAH					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Pembinaan tingkat kebidangkrupan pemekatan kontrasepsi	person	12,50	12,50	9,79	9,74	14,79	14,22
	Jumlah pasangan usia subur yang telah lai menggunakan kontrasepsi	orang	20709	20709	19628	20492	61071	80021
	Jumlah pasangan KB	orang	220111	220111	223302	224443	240345	247370
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	person	100,00	91	91,93	94,89	98,43	n.a
	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	orang	22499	10071	10762	10924	22104	n.a
	Jumlah anggota kelompok BKR	orang	22499	22499	22281	20921	22671	n.a
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber KB	person	100,00	91,47	49,89	49,79+22102	98,24+92112	98,049+92092
	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	orang	100	10000	10081	9808	20879	20811
	Jumlah anggota kelompok BKR	orang	100	21224	20847	20081	21227	21227
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber	person	26,82534961	26,82534961	32,58	37,64	37,40	103,41



No	Uraian	Satuan	TAMBAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	SD							
	Jumlah anggota kelompok MDL yang ber-KB	orang	3400	3400	3339	3310	9080	9828
	Jumlah anggota MDL	orang	3014	3014	2714	3008	3000	3000
	Jumlah PKB/ PLKB	orang	81	81	78	70	70	n.a
17	Camatan Komaja dalam Ruang Informasi dan Konseling Komaja/ Mahasiswa	persen	100,00	114,39	114,39	114,39	118,71	0,00
	Jumlah RM B/M	kelompok	80	80	80	80	88	88
	Jumlah kecamatan	kelompok	18	18	18	18	18	18
18	Camatan PKB/ PLKB yang diakapgunakan perangkat daerah KB untuk pemeriksaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	100,00	100	100	100	100	100
	Jumlah PKB dan PLKB yang diakapgunakan	orang	81	81	78	70	70	70
	Jumlah PKB/ PLKB	orang	81	81	78	70	70	70



No	Uraian	Satuan	TAMBAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
19	Catatan DUS prima KB anggota Usaha Pemukiman Fundagatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	person	100	100	100	100	100	100
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	orang	4480	4480	2870	2870	2870	2870
	Jumlah anggota kelompok UPPKS	orang	4480	4480	2870	2870	2870	2870
20	Rata Rata Penguas Pembantu Pokoknya KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	person	100	100	100	100	100	100
	Jumlah penguas Pembantu Pokoknya KB Desa	orang	211	211	211	211	211	211
	Jumlah desa/kelurahan	desa	211	211	211	211	211	211
21	Catatan koordinasi dan kontrol alat dan alat kontrasepsi untuk keluarga pemukiman masyarakat	person	100	98	91,78	100,00	87,84	91,14
	Jumlah calon per mis kontrasepsi yang tersedia di Puskesmas dan gudang Aliran Atas/luas		100000	48000	28800	28800	22800	47800
	Antonson Amnison		100000	80000	28800	28800	28008	80008



No	Uraian	Satuan	TAMBAH					
			2013	2014	2017	2018	2019	2020
	Masyarakat							
22	Calon penerima dan penerima bantuan (masyarakat) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KKR sesuai dengan standar pelayanan	Persn	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Penerima dan kelompok bekerjasama dengan BPJS		100	118	122	125	128	128
	Jumlah Penerima dan keluarga		100	118	122	125	128	128
23	Calon penerima informasi Data Milis Keluarga di setiap Desa	Persn	62,5	42,86	40,86	58,67	100	100
	Jumlah informasi data milis keluarga yang tersedia		50	30	30	40	60	60
	Jumlah seluruh informasi data milis keluarga		80	70	70	80	80	80
24	Calon kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 5 fungsi keluarga	Persn	88,14	88,24	88,11	88,82	88,44	88,31
	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 5 fungsi		8000	7300	6800	9700	10200	11088



No	Uraian	Satuan	TAMBAH					
			2013	2014	2017	2018	2019	2020
	Jumlah keluarga keprasan		12004	11020	11280	11210	11500	12000
25	Galangan keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	100	100	100	100	100	100
	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak yang memahami & melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang		32671	31251	30493	30000	30171	30111
	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak		32671	31251	30493	30000	30171	30111
26	Persentase Pembinaan program Kepedulikan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDdes	Persen	100	0/A	0/A	100	100	100
	Jumlah anggaran untuk urusan PKKB	Rupiah	9.000.000.000	0/A	0/A	3.451.308.510	4.372.112.510	3.313.095.330
	Jumlah APBD dan APBDdes	Rupiah	9.000.000.000	0/A	0/A	3.451.308.510	4.372.112.510	3.313.095.330

Sumber : Data RP & RK Kabupaten Lampung Tengah

9. Perhubungan

Bidang perhubungan memegang peranan yang cukup penting dalam upaya menjaga keselamatan pengguna jalan serta konektivitas antar daerah. Dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan telah dilakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan daerah diantaranya pengujian KIR kendaraan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat yang melakukan uji KIR di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016 - 2020 mengalami penurunan sebesar 1,70 persen. Penurunan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang tidak melakukan uji KIR pada masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020. Dimana penurunannya mencapai 46,29 persen. Jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR berturut-turut adalah truk, pick up, mikrolet, dan mobil tangki.

Tabel 2.83
Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Melakukan Uji KIR
di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019	2020
1	UMUM					
1.1	Truck	2752	3264	3838	2572	1971
1.2	Pick UP	102	147	218	188	28
1.3	Bus	81	41	339	542	65
1.4	Mikrolet	209	210	123	112	9
1.5	Mobil Penumpang	3	2	4	44	1
2	TDK UMUM					
2.1	Truck	2687	2721	3450	3106	2468
2.2	Pick UP	4498	4333	3092	6618	3390
2.3	Tangki	125	90	118	380	195
2.4	Bus	88	67	52	61	30
2.5	Kereta tempelan	60	67	62	6	25
JUMLAH		10.600	10.962	13.287	15.263	8.197

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Sampai dengan tahun 2020 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.451 unit atau meningkat sebesar 9,46 persen dibanding tahun 2016 yang berjumlah 1.212 unit. Pertumbuhan rata-rata jumlah rambu-rambu yang terpasang

tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 4,71 persen per tahun. Pada akhir tahun 2020 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan/memenuhi 57,46 persen kebutuhan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 2.84
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rambu-Rambu yang harus tersedia	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
2.	Jumlah Rambu-Rambu yang terpasang	1.212	1.311	1.311	1.451	1.451
	Persentase	48,00	51,92	51,92	57,46	57,46

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Pencapaian indikator jumlah izin trayek dapat dilihat dari perkembangan jumlah armada yang memiliki izin trayek. Sampai dengan tahun 2020 jumlah armada yang melakukan perpanjangan izin trayek di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 46 buah. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 6 trayek/jurusan atau mengalami penurunan sebesar 6 persen dibanding Tahun 2019 yang berjumlah 46 buah. Penurunan tersebut disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19, yang mengakibatkan berkurangnya pergerakan masyarakat terutama anak sekolah yang merupakan konsumen utama kendaraan angkutan umum.



Tabel 2.85
Capaian Kinerja Dibidang Perhubungan
Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 - 2020

No	Indikator Kinerja Program	TAMU					
		2015	2018	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.100.000	1.888.832	2.018.784	2.120.000	2.121.120	1.287.584
	Jumlah arus penumpang angkutan umum (smp/berasap/ kapal laut/ pesawat udara) yang masuk/ keluar daerah selama 1 (satu) tahun	2.100.000	1.888.832	2.018.784	2.120.000	2.121.120	1.287.584
	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/ keluar daerah	2.100.000	1.888.832	2.018.784	2.120.000	2.121.120	1.287.584
2	Ratio ton track	0,000040	0,000031	0,000032	0,000019	0,000020	0,0000048
	Jumlah ton ingah yang dibelikan	20	28	61	61	48	2
	Jumlah pendulang	1.280.488	1.280.488	1.881.511	2.180.800	2.318.510	1.280.487
3	Jumlah uji tar angkutan umum	10.221	10.800	10.982	12.287	12.287	7827
4	Jumlah Terminal Bus	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	2	2	2	2	2	4
5	Persentase layanan angkutan darat	60,71	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79
	Jumlah angkutan darat	432000	309183	242217	281888	424082	471217
	Jumlah penumpang angkutan darat	700.000	488.832	222.148	282.182	244.822	718.282



No	Indikator Kinerja Program	TANAH					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Persentase begitulan XIX angkutan umum	22,32	22,32	22,32	22,60	42,52	62,01
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki AKR pada Tahun n	04	04	02	02	04	111
	Jumlah angkutan umum pada Tahun n	280	326	278	287	321	179
7	Pemadangan Rambu-Rambu	18,40	18,40	22,17	18,88	18,47	18,41
	Jumlah pemadangan rambu-rambu pada Tahun n	620	154	196	150	140	120
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	1.000	1.000	846	804	820	700
8	Basir panjang jalan per jumlah kendaraan	20	20	28	28	32	30
	Panjang Jalan	1190,32	1190,32	1190,32	1343,320	1343,320	1343,320
	Jumlah Kendaraan	422000	329.160	243.217	381.888	424.280	471.217
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	82.000	82.420	82.400	87.217	87.210	41.107
10	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun	82.000	82.420	82.400	87.217	87.210	41.107

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

10. Komunikasi dan Informatika

Biduk manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Pengembangan teknologi menjadi instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Pada tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 86,76 persen, penduduk yang menggunakan HP/telepon mencapai 63,73 persen, rumah tangga dengan akses internet mencapai 90,39 persen, dan rumah tangga yang memiliki komputer pribadi mencapai 90,12 persen. Pertumbuhan luas wilayah yang tercoverage telekomunikasi pada tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan 5,00 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 luas wilayah yang tercoverage telekomunikasi mencapai 415.575 km² dari total keseluruhan wilayah yaitu 478.962 km².



Tabel 3.26
Pencapaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No.	Stratan	Setoran	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelangka Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		belum ada K3II	belum ada K3II	belum ada K3II	17,8%	71,4%	100,0%
	Jumlah K3II	kelompok	belum ada K3II	belum ada K3II	belum ada K3II	5	30	28
	Jumlah keramatan yang ada dalam kab/kota	28	28	28	28	28	28	28
2	Cakupan layanan telekomunikasi	isi*	87,80%	71,30%	74,90%	72,70%	82,50%	88,70%
	Lada Wilayah Yang Tercoverase		325.812	341.893	358.988	376.938	395.788	415.578
	Lada Wilayah Keseluruhan		472.922	472.922	472.922	472.922	472.922	472.922
3	Persentase penduduk yang menggunakan MP/telepon	orang	81,23%	84,10%	86,31%	88,00%	91,13%	93,73%
	Jumlah penduduk menggunakan MP/ telepon		844.320	878.548	712.272	748.892	782.187	822.348
	Jumlah penduduk		1.220.486	1.220.486	1.261.486	1.271.360	1.281.310	1.290.407
4	Persentase rumah tangga dengan akses internet	rumah tangga	80,00%	82,13%	81,34%	81,78%	81,80%	80,38%
	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet		204.702	201.762	214.926	228.622	232.898	242.578
	Jumlah rumah tangga		257.348	247.348	244.187	254.766	282.026	280.127
5	Persentase rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	rumah tangga	80,00%	82,07%	81,28%	81,80%	81,81%	80,12%



No.	Uraian	Setoran	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		236.773	251.373	214.828	234.813	221.294	242.862
	Jumlah rumah tangga		227.562	227.562	244.787	224.788	262.038	220.127

Sumber data: Dinas Kemaritiman dan Informations Kabupaten Lampung Tengah

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sampai dengan tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 717 unit. Dari Jumlah tersebut yang aktif sebesar 62,20 % atau sekitar 446 unit koperasi. Jumlah koperasi aktif tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,37 persen per tahun. Persentase usaha mikro kecil mencapai 99,10 persen dari total unit usaha. Rata-rata pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil adalah 4,70 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan jumlah EPK/LKM aktif mencapai 28,55 persen per tahun.

Peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah terbukti dengan kinerjanya dalam hal besarnya penyerapan tenaga kerja, kontribusinya terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRE), kontribusinya terhadap ekspor, sebagai sumber peningkatan pendapatan per- kapita, dan jumlah unit usaha yang banyak sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan output produksi. UMKM juga berperan sebagai tempat usaha terakhir ("last resort") bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari last resort masyarakat, maka UMKM menawarkan keunggulan yang mudah dimasuki dan sekaligus mudah untuk ditinggalkan (*free entry and exit*), tidak memerlukan persyaratan keterampilan tertentu, dapat mencakup diberbagai bidang usaha, memiliki ceruk pasar sendiri, dan tidak memerlukan modal besar untuk menjalankan usaha. UMKM juga merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat untuk bertahan hidup.



Tabel 3.27
Pencapaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

No.	URAIAN	Satuan	TAMBAH					
			2016	2018	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi aktif		85,04	85,48	81,36	88,33	80,88	81,00
	Jumlah koperasi aktif	koperasi	282	290	267	381	401	448
	Jumlah seluruh koperasi	koperasi	624	656	488	447	659	717
2	Persentase UKM non BPR / UKM aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah UKM non BPR/ UKM aktif	unit	5.416	5.383	6.379	6.803	6.777	60.973
	Jumlah seluruh UKM non BPR/ UKM	unit	5.416	5.383	6.379	6.803	6.777	60.973
3	Persentase BPR / UKM aktif	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah BPR/UKM aktif	unit	28	32	40	42	72	88
	Jumlah seluruh BPR/UKM	unit	28	32	40	42	72	88
4	Persentase Usaha Mikro Kecil	persen	96,21	96,37	96,66	96,67	96,63	96,61
	Jumlah usaha mikro dan kecil	unit	5.211	5.275	6.188	6.283	6.550	60.732
	Jumlah seluruh UKM	unit	5.416	5.383	6.379	6.803	6.777	60.973

Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah

12. Penanaman Modal

Secara umum keberhasilan di bidang penanaman modal dapat dilihat dari jumlah nilai investasi dan jumlah PMA/ PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah perusahaan yang berinvestasi menunjukkan peningkatan dari 54 perusahaan (PMA/ PMDN) pada tahun 2015 menjadi 198 perusahaan pada tahun 2020, dengan jumlah tenaga kerja yang terasap mencapai 36.221 orang

Pada Tahun 2020 jumlah investasi penanaman modal yang berkembang di Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp 13.580.010.671.158 atau mengalami peningkatan sebesar 46,62% persen dibandingkan dengan Tahun 2015 yang sebesar Rp 7.246.039.000.000,-. Daya serap tenaga kerja PMA/ PMDN pada tahun 2020 rata-rata mencapai 36.221 tenaga kerja, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 36.082.

Rata-rata pertumbuhan jumlah investor berkala nasional (PMDN/PMA) tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 28,01 persen per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan nilai investasi berkala nasional (PMDN/PMA) adalah 12,88 persen per tahun.

Tabel 2.88
Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase peningkatan nilai investasi	3,05%	n.a	26%	17%	16%	9%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Tengah



Tabel 3.59
Perimbangan PMA dan PMDN Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2017	2018	2019	2020
I.	Jumlah Perusahaan	24	24	24	121	144	182
	1. PMA	17	17	28	21	22	22
	2. PMDN	07	07	47	90	112	162
II.	Jumlah Tenaga Kerja	28.062	28.880	28.062	28.281	28.158	28.221
	1. Indonesia	25.969	25.851	25.971	25.891	26.041	26.130
	2. Asing	93	90	93	90	90	101
III.	Nilai Investasi (Pd Jasa)	7.248.029.000	7.248.029.000	9.163.728.000	10.758.024,8	12.492.132,481	13.880.010,871
	1. PMA	2.437.848.000	2.437.848.000	3.114.176.784	3.189.088,4	3.182.088.489	3.182.088.489
	2. PMDN	4.830.191.000	4.830.191.000	6.049.551.316	7.568.936,3	9.310.043.992	10.697.922.382
IV.	Waktu Pengalokasian Perumahan (hari)	7 hari	7 hari	7 hari	7 hari	2 hari	2 hari



Tabel 3.90
Pencapaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2018 – 2020

No	URAIAN	satuan	TAMBAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Daya Serap Tanaga Kerja	%	687,63	686	481	297	251	208
	Jumlah tenaga kerja terampil pada perusahaan		28.052	25.241	28.063	25.951	26.186	28.271
	Pria/PWID jumlah seluruh Pria/PWID		34	34	75	121	144	174
2	Ketepatan / Penurunan Total Defisiensi INDIK (nilai negatif)	%	0	0%	20%	20%	22%	-82,82%

Sumber data: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Pemuda dan Olah Raga

Pemuda merupakan harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Rata-rata jumlah pengusaha muda tahun 2018-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 14,21 persen per tahun. Rata-rata jumlah organisasi kepemudaan juga terus meningkat dengan pertumbuhan 13,50 persen per tahun. Rata-rata jumlah cabang olah raga yang terdaftar juga terus meningkat dengan pertumbuhan 11,11 persen per tahun.

Tabel 2.91
Perkembangan Kepemudaan di Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengusaha Muda	n.a	n.a	n.a	869	1.116	1.116
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan	n.a	16	19	20	26	26

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah

Prestasi olahraga dilahirkan dari pembinaan yang berkelanjutan, pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat senior guna menghasilkan prestasi olahraga ditingkat regional dan Nasional.

Prestasi Olahraga Kabupaten Lampung Tengah pada ajang Porprov ke VIII yang berlangsung pada tanggal 27 November 2017 s.d 17 Desember 2017 masih belum optimal, dalam hal ini Kabupaten Lampung Tengah berada di peringkat 6 dari 15 kabupaten/kota di Propinsi Lampung dengan mendapatkan Medali Perunggu dari 22 Cabang olah raga yang dipertandingkan kabupaten Lampung tengah mengikuti 21 Cabang olah raga dengan meraih 15 Emas. Terdapat 6 cabang olahraga yang menjadi unggulan yaitu Kempo, Taekwondo, Tenis Meja, Bridge, Catur dan Judo dengan jumlah 400 atlet yang disiapkan. Untuk ajang Porprov ke 9 tahun 2022 KONI menetapkan Kabupaten Pringsewu yang akan menjadi Tuan Rumah selanjutnya.

Tabel 2.92
Peringkat PORPROV Lampung Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cabang Olah Raga Yang Terdaftar	21	28	28	28

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah

Permasalahan bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewedahi aktifitas dan kreatifitas generasi muda yang mandiri dan kreatif.
2. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu/kelembagaan.
3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana olah raga masyarakat.
4. Terbatasnya pembinaan atlet.
5. Terbatasnya praktisi olahraga yang mempunyai kompetensi di setiap cabang olahraga.
6. Terbatasnya penyelenggaraan kompetisi berjenjang.
7. Terbatasnya kesiapan pada kompetisi berjenjang seperti PORWIL/POFDA

Tabel 2.93
Pencapaian Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 - 2020

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertantara Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	31,25	36,54	45,00	45,00	45,00
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif		5	7	9	9	9
	Jumlah seluruh organisasi pemuda		16	19	20	20	20
2	Jumlah atlet berprestasi	Orang	-	97	18	17	n.a
3	Jumlah prestasi olah raga	Buah	-	18	2	7	n.a
4	Jumlah Organisasi Olah Raga	Buah	12	28	28	28	n.a
5	Jumlah Kegiatan Keolahragaan	Cabang	7	10	25	35	n.a
6	Jumlah pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan	Kali	2	3	3	3	n.a
7	Jumlah pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi	Kali	3	6	6	6	n.a
8	Jumlah pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi	Kali	3	18	9	3	n.a

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah

14. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sampai dengan tahun 2020, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berhasil menyediakan informasi statistika dalam bentuk Buku "Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka", Buku "PDRB", dan Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi.

Tabel 2.94
Pencapaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka"	Ada/ tidak	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku "PDRB"	Ada/ tidak	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada
3	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/ tidak	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber data: Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Tengah

15. Persandian

Definisi persandian menurut Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 bahwa persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologi dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan bidang urusan persandian belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang mampu dan memahami system pengelolaan persandian.

Hingga tahun 2020, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sudah mencapai 100 persen. Rata-rata pertumbuhan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 32,17 persen per tahun.

Tabel 2.95
Pencapaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015 - 2020

URAIAN	Satuan	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		45,65%	50,00%	65,22%	79,73%	85,14%	100%
Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	OPD	21	23	30	39	62	74
Jumlah total perangkat daerah	46	46	46	46	74	74	74

16. Kebudayaan

Dalam masyarakat, pengertian kebudayaan sering diartikan sebagai *the general body of the art* yang meliputi seni musik, seni sastra, seni rupa, seni pahat, seni penge-tahuan, atau bagian-bagian indah yang terdapat dalam diri manusia.

Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan kebudayaan telah dilakukan melalui berbagai upaya diantaranya dengan melestarikan situs budaya, serta melakukan pembinaan dan pengembangan sanggar seni yang ada di Lampung Tengah.

Hingga tahun 2020, jumlah situs budaya di Kabupaten Lampung Tengah adalah 22 unit. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 100 persen. Rata-rata jumlah sanggar seni budaya tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung

Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,53 persen per tahun.

Tabel 2.96
Jumlah Sanggar Seni Budaya & Situs Budaya 2015 - 2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Situs Budaya	Unit	15	15	18	20	22	22
2	Jumlah Sanggar Seni Budaya	Unit	629	629	779	729	792	818

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2015 - 2020

No	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	1	1	1	1	5	5
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		15	15	16	16	18	18
	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah		15	15	16	16	18	18
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	0	0	1	1	1

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

17. Perpustakaan

Menurut Undang Undang Perpustakaan dinyatakan bahwa Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan

Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka:

- a. Dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan;
- b. Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapang-an ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik;
- c. Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik;

- d. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani dan menggunakan kemampuannya untuk menghargai hasil seni dan budaya manusia
- e. Dapat meningkatkan tarap kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya;
- f. Dapat menjadi WN yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa;
- g. Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.

Pada tahun 2019 Perpustakaan Kampung Purworejo mendapat penghargaan terbaik III tingkat Nasional dalam ajang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Surabaya, dan Tahun 2020 kampung Purworejo masuk dalam 10 besar perpustakaan terbaik Nasional di medan dalam ajang *Peer Learning Meeting* Nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Telaah terhadap Kebijakan nasional dan Provinsi berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 - 2024 terdapat sasaran pokok untuk meningkatnya kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, dan telah ditetapkan ke dalam arah kebijakan nasional pembangunan perpustakaan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pengembangan perpustakaan digital untuk memobilisasi pengetahuan dan meningkatkan akses masyarakat ke perpustakaan;
3. Penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga riset, media massa, industri penerbitan dan rekaman, kalangan profesional dan masyarakat;
4. Peningkatan jumlah perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.



Tabel 3.98
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2018 - 2020

No	URAIAN	Satuan	TANAH					
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Perscn	2.10	1.35	1.58	1.80	2.03	2.88
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 7 tahun	Orang	722	800	1.300	1.300	1.320	800
	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	345	480	825	750	800	310
2	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Perscn	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Buku	15.247	15.847	18.198	17.001	17.570	17.880
	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Buku	72874	83.574	88.474	87.214	90.434	90.744
3	Rasio perpustakaan persebaran penduduk	Rasio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah perpustakaan	Unit	50	50	70	879	1.299	1.299
	Jumlah penduduk	Orang	1.328.090	1.330.480	1.381.490	1.371.260	1.381.310	1.390.487
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun		748	800	1.370	1.300	1.330	210
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		15247	15.847	18.198	17.001	17.570	17.880

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

18. Kearsipan

Kearsipan (*fililing*) adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip (*file*) mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Ruang lingkup kegiatan kearsipan meliputi:

- penciptaan, penerimaan, pengumpulan arsip
- pengendalian, pemeliharaan dan perawatan arsip
- penyimpanan dan pemusnahan arsip.

Hingga tahun 2020, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai 100 persen. Rata-rata pertumbuhan jumlah dokumen yang telah diarsipkan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 49,16 persen per tahun.



Tabel 3.99
Pemonitoran Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAMBAH					
			2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki anti korupsi baku	Persen	0,05	100	100	100	100	100
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan anti korupsi baku anti korupsi baku	OPD	2	4	8	8	8	8
	Jumlah Perangkat Daerah		55	4	6	6	6	6
2	Peningkatan SDG pengada kesehatan	kegiatan	1	4	2	2	2	2
	Jumlah dokumen yang telah diterbitkan	Ruang	n.a	2.321	4.031	11.340	10.840	10.840

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lampung Tengah cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan perikanan.

Rata-rata pertumbuhan jumlah produksi perikanan berdasarkan jenis unit usaha perikanan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 4,53 persen per tahun. Penyumbang produksi terbesar berasal dari unit usaha kolam dengan rata-rata pertumbuhan 5,26 persen dan disusul oleh unit usaha perairan laut.

Rata-rata pertumbuhan jumlah produksi perikanan berdasarkan komoditas unggulan perikanan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 14,41 persen per tahun. Penyumbang produksi terbesar berasal dari komoditas ikan patin dengan rata-rata pertumbuhan 5,96 persen dan disusul oleh ikan lele dan ikan gurame. Rata-rata kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDPS adalah 3,99 persen per tahun.



Tabel 2.100
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2020

No	URAIAN	Satuan	TAMER					
			2015	2018	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan							
	Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Unit Usaha Perikanan (ton)		38.032	39.840,8	41.301	43.321	43.233	47.494
	- Nelayan	Ton	33.088	33.843	35.363	37.311	36.734	41.434
	- Karamba	Ton	210	888,10	877	878	1.161	290,8
	- Perairan Laut	Ton	2.362	3.430,350	3.473	3.468	3.473	3.217
	- Perairan Umum	Ton	1.791	1.817,381	1.790	1.804	1.873	1.940
	Jumlah Produksi Perikanan Berdasarkan Komoditas Unggulan Perikanan (ton)		24.118,80	23.838,30	25.242	27.491	40.238	43.849
	- Ikan	Ton	10.473,40	11.038	11.420	12.880	12.987	13.881
	- Gurame	Ton	8.016	8.551	8.850	9.385	10.216	10.591
	- Lele	Ton	3.437,30	3.341	3.300	3.000	11.303	11.333
	- Mola	Ton	0	3.828	3.873	3.874	3.784	4.187
	- Bawal	Ton	0	0	0	0	2,10	2,10
	- Bawal	Ton	3.188	3.308,80	3.300	3.184	0	3.387
	- Tani	Ton	0	0	0		118	61
	- Caging Kapur	kg	0	0	0		3.873	3.458
2	Konsumsi ikan							
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	Ton	28,74	28,77	28,00	28,4	28,8	28,31
	Tingkat Daerah (Ton)	Ton						



No	URAIAN	Satuan	TAMBAH					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Contoh lima kelompok Perikanan / nelayan			11.22				
	Jumlah kelompok / perikanan nelayan yang mendapatkan bantuan pada Tahun n	Kelompok	60	34	57	5	7	39
	Jumlah kelompok perikanan/ nelayan	Kelompok	180	202	218	18	22	294
4	Apa itu Perikanan							
	Keberhasilan sektor perairan dan perikanan terhadap PDRB		4.22	4.08	3.89	3.70	0.00	4.22
	Jumlah penduduk PDRB dan sektor perairan dan perikanan		1882.4	1880.3	1875.3	1880.7	n.a	1882.4
	Jumlah PDRB		28772.8	40949.27	42107.05	45456.27	47927.7	28772.8

Sumber data: Dinas Perikanan Kab. Lampung Tengah

2. Pariwisata

Kabupaten Lampung Tengah memiliki banyak objek wisata. Sebagian besar objek wisata tersebut adalah yang berbasis sumber daya alam, seperti wisata alam, wisata agro, dan wisata tirta. Objek wisata alam yang ada di kabupaten ini ada yang benar-benar alami dan ada pula yang buatan. Sementara itu, objek wisata agro di Kabupaten Lampung Tengah ada dua, yaitu Kampung Seyur Wisata Edukasi Liman Benawi yang terdapat di Kecamatan Trimurjo dan Perkebunan Nenas Aso Mulyo di Kecamatan Panggur.

Hingga tahun 2020, jumlah objek wisata alam yang ada di Kabupaten Lampung Tengah adalah 6 (enam) wisata alam, jumlah objek wisata alam buatan adalah 4 (empat) objek wisata buatan, jumlah objek wisata agro adalah 2 (dua) objek wisata, jumlah objek wisata tirta agro adalah 3 (tiga) objek wisata, jumlah objek wisata air modern adalah 3 (tiga) objek wisata, jumlah objek wisata budaya adalah 4 (empat) objek wisata, dan jumlah objek wisata religi dan sejarah adalah 4 (empat) objek wisata.

Tabel 2.101
Objek Wisata Alam di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Air Terjun Curug 7	Kampung Marga Jaya, Kecamatan Selagai Lingga	Panorama Alam	87
2	Air Terjun Curug Lestari	Kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian	Panorama Alam	45
3	Air Terjun Curug Gading	Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	85
4	Watu Agung	Kecamatan Terusan Hulyai	Panorama Alam	80
5	Watu Tumpang	Kecamatan Pubian	Panorama Alam	46
6	Sungai Cabang	Kecamatan Bandar Surabaya	Penyelenggaraan Event Perahu Dayung	40

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.102
Objek Wisata Alam Buatan di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Embung Tanjung Anom	Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Hulyai	Tempat Rekreasi dan Pemandangan	28



No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
2	Embung Dua Wisata Telaga Tangkit Puntang	Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian	Tempat Rekreasi, Pemancingan, dan event gastrack	48
3	Banyu Asri	Kampung Nyukangharjo, Kecamatan Selagai Lingga	Tempat Pemancingan, Taman Bermain, Karaoke, gastrack, dan meeting room	50
4	Banyu Belo	Kampung Watu, Kecamatan Kalirejo	Tempat Rekreasi, Perahu Bekak Air dan Pemancingan	50

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.103
Objek Wisata Agro di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kampung Sayur Wisata Edukasi Liman Benawi	Kampung Liman Benawi, Kecamatan Trimurjo	Rekreasi Agro Wisata Tanaman Obat, Sayur dan Buah	40
2	Parkebunan Nanas Asto Mulyo	Kampung Asto Mulyo, Kecamatan Punggur	Rekreasi Agro Wisata Buah Nanas Quin	50

Objek wisata tirta di Kabupaten Lampung Tengah ada tiga, yaitu Danau Telaga Rejo di Kecamatan Sendang Agung, Danau Tirta Geraga di Kecamatan Sepuluh Beryek dan Danau Bekri di Kecamatan Bekri (lihat Tabel 3.42). Selain objek wisata tirta di atas, kabupaten ini juga memiliki objek wisata air modern. Objek wisata tersebut adalah Kolam Renang Telaga Putri di Kecamatan Sepuluh Beryek, Kolam Renang Tirta Bering di Kecamatan Pubian dan Kolam Renang Telaga Rejo di Kecamatan Sendang Agung.

Tabel 2.104
Objek Wisata Tirta di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Danau Telaga Rejo	Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung	Panorama Alam	74

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
2	Danau Tirta Gangga	Kampung Swastika Buana, Kecamatan Sepuluh Banyak	Taman Rekreasi Danau, Pura, Patung Hanoman	80
8	Danau Bekri	Kecamatan Bekri	Panorama Alam	26

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.105
Objek Wisata Air Modern di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Kolam Renang Telaga Putri	Kampung Betis Sekti, Kecamatan Sepuluh Banyak	Kolam Renang, Water Boom, Sepeda Air, dan Kolam Ikan	46
2	Kolam Renang Tirta Bening	Kampung Payung Rajo, Kecamatan Pubian	Kolam Renang dengan beberapa permainan anak-anak	40
8	Kolam Renang Telaga Rejo	Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung	Kolam Renang dengan Panorama Alam Perbukitan Hijau	74

Sumber data: Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2019)

Selain objek-objek wisata berbasis sumber daya alam di atas, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki objek wisata budaya serta objek wisata religi dan sejarah. Sebagian besar objek wisata budaya berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih. Sementara itu, objek wisata religi dan sejarah tersebar di empat kecamatan, yaitu Makam Minak Ngediko Puhun bin Minak Brejo Noto di Kecamatan Bender Surabaya, Petilasan Syekh Abdul Qodir Jaeleni di Kecamatan Bangun Rejo, Makam Syekh Sadetullah di Kecamatan Terbanggi Besar serta Gua Maria di Kecamatan Sepuluh Maretan.

Tabel 2.106
Objek Wisata Budaya di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Tugu Kopyah Emas	Kecamatan Gunung Sugih	Tugu Kopyah Emas dan Foto Area	0,5
2	Nuwu Belak dan Sajat Agung	Kecamatan Gunung Sugih	Bangunan Kulturalistik Pertemuan Serbaguna	1

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
3	Kampung Wisata Terbanggi Besar	Kecamatan Terbanggi Besar	Rumah Adat Khat Lampung yang Berusia Ratusan Tahun dan Kesenian Adat Lampung	15
4	Tugu Gajah Siwo Margo	Kecamatan Gunung Sugih	Patung Gajah dengan Kereta Kencana dan Foto Area	3

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.107
Objek Wisata Religi dan Sejarah di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi	Destinasi	Jarak Tempuh dari Ibukota Kabupaten (Km)
1	Makam Minak Ngediko Pulun bin Minak Brajo Nato	Kecamatan Bandar Surabaya	Bukti Peninggalan Sejarah Keris, Sebuk, Buku Kaya Alim dan Rompi Terbang	90
2	Petilasan Syekh Abdul Qodir Ja'fani	Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Bangun Rajo	Panorama Alam, Tempat Petilasan dan Tempat Peristirahatan	45
3	Makam Syekh Sadatullah	Kecamatan Terbanggi Besar	Situs Sejarah Makam Syekh Sadatullah	6
4	Gua Maria	Kampung Pajar Mataram, Kec. Seputih Mataram	Panorama Alam dan Patung Bunda Maria	40

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

Wisata Alam Kabupaten Lampung Tengah

1. Danau Tirta Gangga Taman: terletak di Kecamatan Seputih Banyak dengan luas sekitar 175 ha. Pada mulanya berfungsi untuk penampungan air irigasi, namun seiring perkembangan waktu danau buatan tersebut akhirnya menjadi menarik untuk sarana rekreasi.
2. Air Terjun Curup Bilik Air: terletak di dusun Harapan Jaya kampung Gedung Marta Kecamatan Selagai Lingga.
3. Air Terjun Curup Tujuh: terletak di kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga.
4. Danau Telogo Rajo: terletak di kampung Sendang baru kecamatan Sendang Agung.

5. Danau Bekri: terletak di kecamatan Bekri
6. Pemancingan Ikan Way Seputih: terletak di daerah rusuk Kecamatan Rumbia. Pemancingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.
7. Pemancingan Kolam Kalirejo: terletak di Kecamatan Kalirejo tepatnya di kampung di Way Kerui. Peman-cingan ini termasuk dalam wisata minapolitan.

Dapat di lihat pada tabel bahwa jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 sebanyak 1206 kunjungan hanya tercapai 0,13 persen dari target kunjungan yang direncanakan yaitu 9000, hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menutup sementara lokasi2 wisata dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Dan PAD yang dicapai pada tahun 2020 1,78 persen. Namun demikian secara kuantitatif, nilai rupiah PAD dari sektor pariwisata dan rata-rata persentase peningkatan mencapai 6,52 persen per tahun.



Tabel 2.108
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata	%	172	172	148	122	118	0,12
	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata di Kabupaten dan Kota		8.800	8.800	8.800	8.244	8.206	1200
	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan di Kabupaten dan Kota		8.000	8.000	8.000	7.000	8.000	8000
2	Lama kunjungan wisata	hari	1	1	1	1	1	1
3	PAD Sektor wisata		1,78%	2,16%	1,83%	2,91%	2,08%	1,97%
	Pajak Hotel (juta rupiah)		184,4	180,8	208,9	821,4	4.181,2	2.809,8
	Pajak Rumah Makan (juta rupiah)		1.821,4	2.810,4	2.878,2	2.412,8	885,8	378,8
	Pajak Hiburan (juta rupiah)		110,2	119,7	115,7	170,2	287,8	300,0
	Total PAD sektor pariwisata (juta rupiah)		2.096,1	2.911,0	2.998,0	4.214,3	2.297,2	2.388,6
	Total PAD (juta rupiah)		118.582,8	124.994,8	164.040,7	144.961,2	173.523,1	173.678,78

Sumber data: Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah

3. Pertanian

Luas Lahan Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Tengah selama 8 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Lahan pertanian tanaman pangan terluas terdapat pada tanaman padi yaitu 143.232,4 Ha. Luas lahan tanaman padi pada tahun 2015 - 2017 mengalami kenaikan dari 140.242 Ha menjadi 159.182 Ha, tahun 2018 turun menjadi 135.640 Ha dan turun kembali menjadi 134.831 Ha pada tahun 2019. Sementara luas lahan tanaman jagung mengalami penurunan pada tahun 2016 (51.154 Ha) dari tahun 2015 (59.358 Ha) dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2019 (63.180). Luas lahan tanaman ubi kayu terus mengalami penurunan sampai tahun 2019.

Produktivitas tanaman padi dan palawija kabupaten lampung tengah pada tahun 2015 -2019 mengalami fluktuasi. Produktivitas dari yang tertinggi sampai terendah di Kabupaten Lampung Tengah adalah tanaman Ubi Kayu (248,93 Kg/Ha), diikuti dengan Ubi Jalar (114,93 Kg/Ha), Jagung (54,22 Kg/Ha), Padi (50,30), Kacang Tanah (13,89), Kedelai (13,20), dan terakhir Kacang Hijau (4,48). Hal ini menunjukkan besarnya lahan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah di kelola sudah cukup maksimal sehingga menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi dan dapat berpengaruh terhadap pendapatan para petani di kabupaten lampung tengah.

Rata-rata persentase kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat penurunan 0,12 persen per tahun. Kondisi ini terjadi salah satunya karena adanya kecenderungan penurunan luas tanam pertanian selama tahun 2016-2020 khususnya komoditas padi yaitu turun 3,75 persen per tahun. Namun demikian beberapa komoditas lain mengalami peningkatan luas tanam pertanian selama tahun 2016-2020, yaitu jagung (12,36 persen) dan ubi kayu (7,75 persen).

Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pangan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu padi (1,79 persen), jagung (22,91 persen), dan ubi kayu (8,72 persen). Rata-rata pertumbuhan kelompok terni tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing yaitu kelompok terni pemula (18,31 persen), kelompok terni lanjut (91,68 persen), dan kelompok terni madya (90,01 persen).



Tabel 2.109
 Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah

NO	URAIAN	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi pertanian/perikanan terhadap PDRB		28,25	28,88	28,11	28,06	24,88	28,00
	Jumlah Konsumsi PDRB dari sektor pertanian/perikanan	mlrper	17.788,54	19.796,42	22.011,07	22.885,8	26.085,73	28.827,7
	Jumlah PDRB	mlrper	62.878,27	68.171,27	80.065,28	88.240,88	71.262,7	71.801,8
2	Konsumsi sektor pertanian (lahan kering) terhadap PDRB	Persen	46,07	46,06	47,00	46,25	N/A	N/A
	Jumlah Konsumsi sektor pertanian (lahan kering)		15,05	14,96	14,93	14,72	N/A	N/A
	Jumlah PDRB sektor pertanian/perikanan		20,04	21,88	21,79	21,82	N/A	N/A
3	Konsumsi sektor perikanan (lahan luas) terhadap PDRB	Persen	12,87	12,79	11,21	10,22	0,00	N/A
	Jumlah Konsumsi perikanan (lahan luas)		2.629,8	2.822,6	2.822,4	2.885,8	n.a	n.a
	Jumlah PDRB sektor pertanian/perikanan		17.788,54	19.796,4	22.011,1	25.088,7	18.137,82	n.a
4	Konsumsi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	Jumlah Produksi padi/ bahan pangan utama lain hasil kelompok petani (sru Tahun n		828.487	827.222	798.580	771.889	708.402	n.a
	Jumlah produksi padi/ bahan pangan utama di daerah (sru Tahun n		828.487	827.222	798.580	771.889	708.402	n.a



NO	URAIAN	Kecamatan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Duren	5,41	4,95	5,27	4,90	4,90	5,20
	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)		222,427	227,333	790,500	771,009	703,402	722,147
	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)		162,127	162,043	161,038	160,827	144,399	138,000
6	Canagan lada kelampayan	Pondoh	11,00	4,00	3,00	3,87	10,18	1,87
	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pada Tahun n jumlah kelompok (ton)		551	345	103	187	518	85
			6.000	6.000	5.107	5.007	5.000	5.000
7	Luas Tanam Perikanan (Ha)							
	Padi	Ha	n.a	174.113	124.031	161.029	122.404	126.039
	Jagung	Ha	n.a	66.305	77.406	81.411	81.324	82.145
	Kedelai	Ha	n.a	302	116	12.314	3.000	n.a
	Ubi Kayu	Ha	n.a	79.805	89.187	82.118	67.708	102.770
8	Luas Padi							
	Padi	Ha	n.a	162.043	161.033	160.827	144.399	146.912



NO	URAIAN	Kecamatan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Jagung	Ha	n.a	46.060	77.310	80.713	59.041	68.175
	Kacang	Ha	n.a	303	30	10.330	n.a	n.a
	Ubi Kayu	Ha	n.a	88.730	23.718	64.360	60.368	88.348
9	Predikstirilisasi Tanaman Pangan							
	Padi	Ha/Ha	n.a	53,43	68,88	55,05	80,80	87,29
	Jagung	Ha/Ha	n.a	14,39	13,38	9,77	n.a	56,53
	Kacang	Ha/Ha	n.a	231,77	380,23	333,06	347,39	n.a
	Ubi Kayu	Ha/Ha	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	234,00
10	Predikstirilisasi Tanaman Pangan							
	Padi	ton	n.a	837.333	708.880	771.880	708.403	788.147
	Jagung	ton	n.a	341.513	530.713	451.634	359.506	385.436
	Kacang	ton	n.a	481	40,08	14.008	n.a	n.a
	Ubi Kayu	ton	n.a	1.730.106	1.287.280	1.433.638	1.300.624	2.303.483



NO	URAIAN	Ketersediaan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	Kelompok Tani							
	Pomula	poktan		1.040	1.706	3.005	3.843	3.800
	Lanjut	poktan		276	276	1.706	1.819	1.930
	Madra	poktan		0	10	378	413	413
	Utama	poktan		4.958	5.107	10	10	10
12	Perkembangan Lembaga tani							
	Jumlah Kelompok Tani			4.938	5.107	5.091	5.089	5.131
	Jumlah P2A			260	260	373	373	373
	Jumlah GP2A			24	24	24	24	24
	Jumlah UP2A			114	114	117	117	117
	Jumlah kelompok pemangkar bonih			45	45	45	45	45
	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat Bantuan dari Pemerintah			6.8	2.678	2.678	2.413	1.133

Sumber data: Dinas Pertanian, TPD Kabupaten Lampung Tengah

4. Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan tertinggi menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 - 2020 pada tanaman kelapa sawit produksi tertinggi terdapat pada Kec. Anak Tuha yaitu 9.438 ton tahun 2018 - 2019, tanaman kelapa produksi tertinggi terdapat pada kecamatan kalirejo 658 ton tahun 2018 - 2019, tanaman karet produksi tertinggi terdapat pada Kec. Seputih Surabaya 1.567 tahun 2018 - 2019, tanaman kopi produksi tertinggi terdapat pada Kec. Seputih Agung 44 ton tahun 2018-2019, tanaman kakao produksi tertinggi terdapat pada Kec. Kalirejo 578 ton tahun 2018-2019, dan yang terakhir tanaman tebu produksi tertinggi terdapat pada Kec. Terusan Nunyai 13.533 ton tahun 2018-2019. Namun demikian pada tahun 2020 seluruh produksi tanaman perkebunan pada setiap kecamatan mengalami penurunan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya dampak pandemi Covid 19 yang membuat lemahnya perekonomian termasuk pada produksi tanaman perkebunan.

Tabel 2.110
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan
Tahun 2018 - 2020 (ton)

No	Jenis Tanaman	Kecamatan	Produksi (Ton)		
			2018	2019	2020
1	Kelapa Sawit	Anak Tuha	9.438	9.438	3.286
2	Kelapa	Kalirejo	658	658	411
3	Karet	Seputih Surabaya	1.567	1.567	1.529
4	Kopi	Seputih Agung	44	44	66
5	Kakao	Kalirejo	578	578	1.057
6	Tebu	Terusan Nunyai	13.533	13.533	2.205

Sumber data: Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka (2018-2019)

Rata-rata produksi sektor perkebunan Kakao tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,67 persen per tahun. Produksi sektor perkebunan karet 0,06 persen per tahun, produksi sektor perkebunan kelapa dalam 2,19 persen per tahun, produksi sektor perkebunan kelapa sawit turun 7,08 persen per tahun, dan produksi sektor perkebunan lada 2,82 persen per tahun



Tabel 2.111
Penetapan Kinerja Utama Bidang Perkebunan Tahun 2018 - 2020

No	Indikator	Satuan	TAMBAH				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	15,07	13,79	11,21	10,33	n.a
	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)		3.439,8	3.632,0	3.633,4	3.885,8	n.a
	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan		17.700,94	19.790,4	23.011,1	23.083,7	18.107,32
2	Produksi sektor perkebunan Kelapa	ton	n.a	2.060,88	2.775,4	2.255,8	2.003
3	Produksi sektor perkebunan Karet	ton	n.a	4.320,22	4.790,28	4.701,2	4.320,22
4	Produksi sektor perkebunan Kelapa Dalam	ton	n.a	6.429,51	6.538,40	6.565,4	6.158
5	Produksi sektor perkebunan Kelapa Sawit	ton	n.a	28.232,94	29.772,23	22.941,3	42.222
6	Produksi sektor perkebunan Lada	ton	n.a	97,58	95,15	76,89	101
7	Produksi sektor perkebunan Tebu	Ton	n.a	18.315	18.387	210.728	28.222

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

5. Peternakan

Ternak ruminansia yang dilembaga di Lampung Tengah meliputi sapi, kerbau, kambing dan domba. Di antara keempat jenis ternak tersebut, berdasarkan data tahun 2018, populasi tertinggi adalah ternak sapi sebesar 273.136 ekor, kemudian diikuti kambing sebesar 232.776 ekor. Sedangkan ternak domba dan kerbau populasinya kurang, yaitu masing-masing 8.982 dan 5.216 ekor. Pada beberapa kecamatan, bahkan tidak tercatat data ternak domba, sedangkan ternak kambing cukup merata di seluruh kecamatan. Rata-rata jumlah sapi per kecamatan adalah 9.754 ekor, kerbau 186 ekor, kambing 8.315 ekor, dan domba 320 ekor.

Tabel 2.112
Populasi Sapi, Kerbau, Kambing Di Lampung Tengah

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Padang Ratu	7.351	621	10.635	43
2	Selanggai Lingga	2.722	126	4.393	182
3	Putian	5.026	695	6.276	87
4	Anak Tuha	4.054	708	5.672	272
5	Anak Ratu Aji	3.306	46	3.992	56
6	Kali Rejo	2.515	61	12.838	191
7	Sendang Agung	1.906	46	3.333	228
8	Bangun Rejo	10.690	127	16.584	563
9	Gunung Sugih	6.996	129	21.764	254
10	Bakri	9.063	62	3.130	96
11	Bumi Ratu Nuban	1.641	31	2.793	335
12	Trimurjo	2.683	411	3.343	679
13	Punggur	3.475	33	2.639	612
14	Kota Gajah	4.659	33	2.077	401
15	Seputih Raman	17.403	31	1.784	467
16	Terbenggi Besar	33.057	168	17.277	2.639
17	Seputih Agung	26.206	320	5.096	7
18	Way Pengubuan	3.760	247	3.777	356
19	Terusan Nunyai	5.180	13	9.304	n.a
20	Seputih Mataram	22.449	29	12.939	323
21	Bandar Mataram	12.994	332	19.300	15
22	Seputih Banyak	28.271	164	3.332	651
23	Way Seputih	13.099	37	3.535	n.a
24	Rumbia	12.814	31	6.923	n.a
25	Bumi Nabung	7.335	43	6.371	n.a
26	Putra Rumbia	10.595	29	2.780	n.a
27	Seputih Surabaya	4.717	39	13.339	n.a
28	Bandar Surabaya	4.070	469	16.364	23
	Lampung Tengah	273.136	5.216	232.776	8.982

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

Populasi ternak sapi dan kambing tercatat meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2020 populasi sapi menjadi 311.259 ekor meningkat 4,71 persen, sedangkan kambing menjadi 289.957 ekor meningkat sebesar 7,118 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat di Lampung Tengah lebih berminat untuk mengembangkan ternak sapi dan kambing. Rata-rata pertumbuhan selama tahun 2018-2020 untuk ternak sapi potong adalah 6,77 persen dan untuk kambing adalah 11,09 persen.

Tabel 2.113
Populasi Sapi Potong dan Kambing Kabupaten Lampung Tengah

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak		
		2018	2019	2020
1.	Sapi Potong	273.136	297.288	311.259
2.	Kambing	238.266	270.843	289.957

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah

Peternakan Sapi

Jumlah usaha peternakan sapi tidak linier dengan jumlah populasi sapi. Usaha peternakan sapi yang paling banyak di kecamatan Punggur, di mana jumlah populasinya menempati urutan ke 12. Di kecamatan Sepuluh Beyer, yang menempati urutan ke 2 populasi sapi bahkan tidak tercatat adanya usaha ternak sapi.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki populasi ternak sapi yang paling tinggi di provinsi Lampung, yaitu sebesar 41,7% dari 15 kabupaten yang ada. Peringkat berikutnya adalah kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra pengembangan ternak Sapi di Lampung yang berpotensi mendukung penyediaan daging sapi secara nasional.

4. Perdagangan

Sarana perdagangan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Pasar Kampung, Pasar Daerah, Mall/Supermarket/Mini Market. Jumlah infrastruktur tersebut semakin bertambah, terutama pada fasilitas perdagangan modern seperti Mall. Pada tahun 2020, pusat perbelanjaan Pasar Bendera Jaya diberikan izin sebagai Mall dan direncanakan untuk dilengkapi fasilitasnya untuk dapat beroperasi seperti layaknya pusat perbelanjaan tingkat Mall.

Perbandingan jumlah fasilitas perbelanjaan di Kabupaten Lampung Tengah tergambar pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2019, tercatat jumlah pasar kampung adalah 75 fasilitas, pasar daerah berjumlah 9 fasilitas, dan mall/supermarket/mini market berjumlah 146 fasilitas.

Tabel 2.114
Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2016 - 2020

No	Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasar Kampung	75	75	75	75	75
2	Pasar Daerah	9	9	9	9	9
3	Mini / Super Market / Mini Market	90	128	14	14	15
	JUMLAH	84	207	232	232	99

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Lampung Tengah

Sektor perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Lampung Tengah, setelah sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai ekspor tahun 2015 sebesar Rp 2,5 triliun dan meningkat 19 persen pada tahun 2020 yaitu 3,1 triliun. Nilai impor pada tahun 2015 sebesar Rp 676 milyar lebih turun menjadi sebesar Rp 643 milyar lebih pada tahun 2020. Rata-rata peningkatan ekspor tahun 2015-2020 adalah 7,35 persen per tahun.



Tabel 2.116
Pencapaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	2.550.100.159.313	2.019.952.631.500	2.434.400.045.140	2.213.057.574.352	2.190.306.610.565	2.550.477.339.795
	Nilai ekspor		2.224.167.109.453	2.878.385.489.788	2.383.806.678.339	2.226.873.268.383	2.389.331.384.488	4.224.397.406.873
	Nilai impor		878.067.040.100	885.406.888.388	928.108.633.180	913.888.413.000	78.884.737.000	843.920.068.778
2	Jumlah Pasar Rakyat			72	72	72	72	72
	Jumlah Pasar Desa			9	9	9	9	9
	Jumlah Mall/Super Market/ Mini Market			90	120	14	14	10

Sumber data: Dinas Perdagangan Kab. Lampung Tengah

5. Perindustrian

Bidang perindustrian salah satu bidang urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan industri. Di Kabupaten Lampung Tengah sektor industri menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Tengah. Rata-rata persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 31,38 persen per tahun.

Tabel 2.116
Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015 - 2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	13,49%	11,46%	27,03%	27,12%	0,77%	0,02%

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah



Tabel 2.117
Perkembangan Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah Unit Usaha (unit)					Jumlah Tenaga Kerja (orang)					Nilai Produksi (Rp. milyar)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	IKHL															
	besar	27	28	n.a	22	22	10.003	32.427	30.734	30.743	23.227	4.280	2.790	18.807,5	20.807,5	16.040
	menengah	72	137	170	170	170	2.128	2.439	1.728	1.728	1.390	318.171	319.171	832.328	832.327	237.877
	kecil	272	485	1.424	1.427	1.285	820	1.828	4.342	4.388	2.080	261.208	261.808	292.200	302.200	268.87
	jumlah	302	650	1.624	1.619	1.600	12.951	39.694	36.850	36.860	27.518	673.706	677.706	934.303,5	955.304,5	524.576
2	ILHSEKA															
	besar	28	22	n.a	n.a	n.a	25.284	2.641	n.a	n.a		25	27	n.a	n.a	n.a
	menengah	12	17	n.a	n.a	n.a	1.204	1.201	n.a	n.a		11.300	13.300	n.a	n.a	n.a
	kecil	28	268	14	14	14	182	828	228	228	300	92.000	92.000	108.222	118.224	102.288
	jumlah	67	307	14	14	14	27.381	2.147	296	296	300	107.885	108.387	106.322	116.324	102.302
3	SW TOTAL															
	besar	65	178	65	65	65	25.267	25.068	20.734	20.743	22.227	n.a	n.a	18.807,5	20.807,5	16.040
	menengah	88	124	170	170	170	2.992	7.210	1.728	1.728	1.390	n.a	n.a	832.328	832.327	237.874
	kecil	200	720	1.272	1.481	1.279	1.012	2.220	4.879	4.721	2.280	n.a	n.a	292.200	118.224	102.288
	Total	422	1.022	1.673	1.686	1.604	40.372	44.628	27.131	27.322	27.518	n.a	n.a	934.303	925.304	524.576

Sumber data: Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah

Rata-rata pertumbuhan jumlah unit usaha industri kecil, menengah, dan besar untuk kelompok IHPK dari ILMEKA tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan masing-masing yaitu industri kecil 58,04 persen per tahun, industri menengah 21,35 persen per tahun, dan industri besar 27,59 persen per tahun.

Rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja industri kecil, menengah, dan besar untuk kelompok IHPK dari ILMEKA tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung naik dan turun dengan tingkat pertumbuhan masing-masing yaitu industri kecil naik 50,54 persen per tahun, industri menengah turun 3,28 persen per tahun, dan industri besar turun 9,54 persen per tahun.

Sektor pertanian sangat mewarnai sektor-sektor lain di Kabupaten Lampung Tengah. Sektor hulu (ekskavator) di wilayah ini didominasi oleh industri hasil pertanian atau agroindustri. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor pertanian dengan berbagai komoditas unggulannya, akan memacu perkembangan sektor lainnya seperti industri.

Jumlah perusahaan industri pengolahan yang ber skala besar di Lampung Tengah tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan terutama untuk perusahaan ber skala besar, yakni 74 Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) dan 14 Industri Logam, Mesin, Elektronik, Kimia dan Aneka (ILMEKA). Penambahan jumlah industry pada skala kecil dan menengah IHPK dan ILMEKA yakni 4819 usaha IHPK dan 665 usaha ILMEKA. Dari sisi tenaga kerja, penambahan jumlah industri ini menyebabkan naiknya jumlah tenaga kerja di kedua jenis industri tersebut. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di IHPK ber skala kecil dan menengah bertambah sebanyak 194 orang. Sedangkan kenaikan tenaga kerja di ILMEKA ber skala kecil dan menengah hanya sebanyak 5 orang.

Nilai investasi dari tahun 2013 hingga 2015 terlihat nilai investasi IHPK 4 kali nilai investasi ILMEKA. Nilai investasi IHPK tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 434,41 milyar mencapai Rp. 434.50 milyar, sedangkan nilai investasi ILMEKA hanya Rp. 99,85 milyar. Persentase kenaikan nilai investasi selama 3 tahun terakhir, ILMEKA lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi IHPK. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, nilai investasi ILMEKA tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 0,23%, sementara nilai investasi IHPK hanya meningkat sekitar (0,02%).

Nilai investasi dari tahun 2013 hingga 2015 terlihat nilai investasi IHPK 4 kali nilai investasi ILMEKA. Nilai investasi IHPK tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 434,41 milyar mencapai Rp. 434.50 milyar, sedangkan nilai investasi ILMEKA hanya Rp 99,85 milyar. Persentase kenaikan

nilai investasi selama 3 tahun terakhir, ILMKA lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi IHPK. Bila dibandingkan dengan th.2014, nilai investasi ILMKA tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 0,23%, sementara nilai investasi IHPK hanya meningkat sekitar 0,02%.

6. Transmigrasi

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru yaitu:

- Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
- Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
- Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
- Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
- Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran penduduk asal (TPA). Selama kurun waktu 2016-2020, telah terjadi penambahan jumlah transmigran umum (KK) sebanyak 53 KK.

Tabel 2.118
Perkembangan Transmigran Asal Lampung Tengah 2015 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Transmigran Umum (KK)	20	10	10	13	0
2	Jumlah Transmigran Swakarta (KK)	0	0	0	0	0
3	Jumlah Transmigran Swakarta Mandiri (KK)	0	0	0	0	0
	Jumlah	20	10	10	13	0

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Minggu tahun 2020, Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki dokumen RPJPD 2005 - 2025 (Perda Nomor 03 Tahun 2010), RTRW 2011-2031 (Perda Nomor 01 Tahun 2012), RPJMD 2016-2021 (Perda Nomor 07 Tahun 2016). Rata-rata penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah 95 persen, rata-rata Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APED adalah 100 persen, dan rata-rata kesatuan rencana pembangunan dengan RTRW adalah 80 persen.



Tabel 2.119
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERDADO	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDADO	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran komposisi Program RKPD ke dalam RPMD		97%	97%	97%	94%	94%
	Jumlah program RPMD Tahun berkenaan		180	180	170	174	174
	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan		180	180	180	180	180
6	Penjabaran komposisi Program RKPD ke dalam RPMD		100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah program RPMD Tahun berkenaan		180	180	170	174	174
	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan		180	180	170	174	174
7	Kelajuan rencana pembangunan dengan RTRW		78%	81%	81%	81%	81%
	Realisasi program/ kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang		39	30	30	30	30
	Dokumen RTRW		37	37	37	37	37

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lampung Tengah

2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta aset daerah. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tahun Anggaran 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rata-rata dana SILPA tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah 7,9 persen per tahun, rata-rata dana urusan pendidikan, dan Bagi hasil kabupaten dan desa adalah 5,28 persen per tahun.



Tabel 2.130
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2018 - 2020

No	URAIAN	Satuan	TAMBAH					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Apas 90% terhadap target kesehatan	Waktu	0,4	0,59	0,67	0,79	0,79	0,79
2	SLPn	Rupiah	221.000.121.018,71	187.000.000.000,00	22.716.000.000,12	128.920.310.000,12	200.010.010.070,12	200.010.010.710,20
2	Pemerintah BUKA terhadap APBD	Persen	11,22	0,00	2,26	0,00	7,21	12,20
	Realisasi	Rupiah	221.000.121.018,71	187.000.000.000,00	22.716.000.000,12	128.920.310.000,12	200.010.010.070,12	200.010.010.710,20
	Real APBD	Rupiah	2.000.770.010.000,00	2.070.010.700.000,00	2.070.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.010.710,00	2.000.000.000.100,00
4	Pemerintah tidak pendanaan (50%)	Persen	12,67	20,12	20,20	27,27	20,91	22,22
	Jumlah Biaya/ Dalam Rangka Pemeliharaan	Rupiah	280.280.010.000,00	228.000.000.000,00	600.000.100.000	221.010.010.010	900.000.100.000	710.710.110.000,00
	Real APBD	Rupiah	2.000.770.010.000,00	2.070.010.700.000,00	2.070.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.010.710,00	2.000.000.000.100,00
4	Pemerintah biaya kesehatan (10%)	Persen	0,49	0,00	7,70	0,00	0,00	0,47
	Jumlah Biaya/ Dalam Rangka Pemeliharaan	Rupiah	2.070.720.000.000,00	127.000.000.000	100.010.070.000,00	180.000.110.000,00	217.000.010.000,00	200.710.000.070,11
	Real APBD	Rupiah	2.000.770.010.000,00	2.070.010.700.000,00	2.070.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.010.710,00	2.000.000.000.100,00



No	URSAH	Bentuk	TAMBAH					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
C	Pembangunan sarana ibadah lingkungan dengan akses jalan lingkungan	Persen	120,07	27,02	70,33	60,30	20,00	23,30
	Jumlah Diklat Berprestasi	Rupiah	1.100.000.000.000,00	800.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	600.000.000.000,00	900.000.000.000,00	270.000.000.000,00
	Total APBD	Rupiah	2.000.000.000.000,00	2.270.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
	Jumlah Diklat Realisasi lingkungan	Rupiah	200.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00
	Total APBD	Rupiah	2.000.000.000.000,00	2.270.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
F	Digitalisasi lingkungan dan akses	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Diklat Digitalisasi lingkungan dan akses	Rupiah	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00
	Total APBD	Rupiah	2.000.000.000.000,00	2.270.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
G	Pembangunan APBD		Tetapan Nilai	Tetapan Nilai	Tetapan Nilai	Tetapan Nilai	Tetapan Nilai	Tetapan Nilai

Sumber data: BPS/KD Kabupaten Lampung Tengah

3. Kepegawaian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Tengah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem NKRI.

Pada aspek sumber daya aparatur (PNS), jumlah PNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 sebanyak 11.017 orang, terdiri dari 5.099 orang laki-laki dan 5.918 orang perempuan. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebanyak 2.563 orang dibanding kondisi tahun 2015 sebanyak 13.580 orang. Dari sisi ketersediaan perangkat daerah, ratio ketersediaan PNS per 1.000 penduduk, yang merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik, adalah sebesar rata-rata 7 PNS melayani 1.000 penduduk. PNS menurut golongan terbanyak ada pada golongan III yakni sebanyak 4.874 orang dan paling sedikit golongan I sebanyak 71 orang. Selanjutnya, hal yang juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan adalah sebaran PNS menurut tingkat pendidikan.

Pada tahun 2020, tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh S-1 (55,63 persen), SMA (17,09 persen), dan D-3 (10,48 persen). Persentase data dan informasi kepegawaian yang valid mencapai 99 persen. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal juga terus meningkat.

Tabel 2.121
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2015 - 2020

No	Urutan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Golongan I	160	144	127	99	71	0
2	Golongan II	3.033	2.669	2.676	2.206	2.209	1.966
3	Golongan III	5.085	4.478	4.374	4.585	4.874	5.263
4	Golongan IV	5.202	4.551	4.295	4.150	3.863	3.554
Jumlah		13.580	11.837	11.672	11.040	11.017	10.803

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.122
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2015 - 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	197	166	126	89	70	55
2	SMP	255	226	173	151	108	97
3	SMA	3.789	3.457	3.077	2.558	2.127	1.859
4	D1	178	162	109	89	78	77
5	D2	2.098	2.700	2.413	1.967	1.035	728
6	D3	960	826	1.120	1.068	1.163	1.140
7	D4/ S1	5.075	3.948	4.225	4.687	5.852	6.377
8	S2	271	291	429	456	524	540
9	S3	2	1	3	2	3	3
Jumlah		12.770	11.837	11.672	11.040	11.012	10.876

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 2.123
Persentase Kompetensi Kepegawaian Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Setuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase kompetensi aparatur	Persen	-	-	-	-	60	65
2.	Persentase data dan informasi kepegawaian yang valid	Persen	90	92	94	94	95	99
3.	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat dan sosialisasi	orang	80	80	80	257	761	10

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah



Tabel 2.124
Pencapaian Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sistemasi lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	2	2	2	2	2	2
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	n.a	30	30	35*	70.1	10
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		30	30	30	35*	70.1	n.a
	Jumlah total ASN		15000	15000	15070	15040	15017*	15066*
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan ter	Persen	n.a	30	30	30	40	30
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural		300	30	30	30	40	30
	Jumlah total jabatan		1172	1172	1172	1172	1172	1172
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Unit	42	42	41	22	29	20
5	Jumlah jabatan administrator pada instansi pemerintah	unit	1010	1000	1000	970	1000	990
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Unit	10000	8000	8010	7011	7700	7000

Sumber: data BKRSDM Kabupaten Lampung Tengah

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk mengembangkan serta memvalidasi suatu produk tertentu yang di pakai dalam sebuah lembaga. Hasil penelitian dan pengembangan nanti hendaknya bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengeta-huan dan untuk kemakmuran masyarakat.

Rumusan kebijakan merupakan sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini, yang diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif.

Rata-rata persentase implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dengan tingkat penurunan 9,99 persen per tahun. Rata-rata persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah juga menurun dengan tingkat penurunan 13,35 persen per tahun.

Rata-rata persentase pemanfaatan hasil kelitbangan mencapai 89,02 persen per tahun. Rata-rata persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah meningkat 5,66 persen per tahun.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah memperoleh predikat SANGAT INOVATIF dari Kementerian Dalam Negeri dengan skor 1.705 (Kepmendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020).



Tabel 2.126
Pencapaian Kinerja Bidang Kependudukan Tahun 2015 - 2020

No	URAIAN	SATUAN	TAMU					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kependudukan		belikang belum ada	belikang belum ada	100,00%	97,88%	88,24%	78,00%
	Jumlah kelahiran dalam RKPD	kegiatan	belikang belum ada	belikang belum ada	11	13	15	13
	Jumlah kelahiran dalam RKPD	kegiatan	belikang belum ada	belikang belum ada	11	14	17	16
2	Jumlah kelahiran dalam rangka program daerah	rekomendasi	belikang belum ada	belikang belum ada	11	13	16	17
	Pemerataan SDA	ada	belikang belum ada	belikang belum ada	ada	ada	ada	ada
3	Persentase perangkat daerah yang dihasilkan dalam program kerja daerah	%	belikang belum ada	belikang belum ada	100,00%	100,00%	88,75%	71,88%
	Jumlah perangkat daerah yang dihasilkan	perangkat daerah	belikang belum ada	belikang belum ada	33	33	33	33
	Jumlah total perangkat daerah	perangkat daerah	belikang belum ada	belikang belum ada	33	33	33	33



No	URAIAN	SATUAN	TAMU					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Personil kebijakan inovasi yang diregulasi di daerah		salisang belum ada	salisang belum ada	10,28%	70,12%	100,00%	80,00%
	Jumlah kebijakan inovasi yang diregulasi	rekomendasi	salisang belum ada	salisang belum ada	15	23	43	34
	Jumlah inovasi yang diregulasi	rekomendasi	salisang belum ada	salisang belum ada	22	109	40	30
5	Indeks inovasi daerah	Indeks	salisang belum ada	salisang belum ada	n.a	n.a	n.a	1,734

Sumber data: Salisang Kabupaten Lampung Tengah

5. Pengawasan

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan dan dinamika turut meningkatkan tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. Segenap jajaran penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawat Intern Pemerintah (APIP). Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawasan internal APIP tidak hanya membantu mengawasi apakah pemerintah telah mengerjakan yang seharusnya dikerjakan, membelanjakan uangnya sesuai tujuan yang ditetapkan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*oversight*), namun juga memberikan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah (*insight*) serta mampu mengidentifikasi trend atau perkembangan dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah (*foresight*).

Pada tahun 2020 semua (100 persen) temuan sudah ditindaklanjuti. Rata-rata persentase Jumlah total temuan tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun dan pada tahun 2020 menurun 11,82 persen jika dibandingkan tahun 2019. Rata-rata persentase pelanggaran pegawai terus menurun dengan penurunan 6,33 persen per tahun.

Tabel 2.126
Pencapaian Kinerja Bidang Pengawasan Tahun 2015 - 2020

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	95,4	92,59	95,65	100	100	100
	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Jumlah	925	1000	1100	1200	1100	970
	Jumlah total temuan	Jumlah	970	1080	1190	1200	1100	970
2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,1	0,10	0,06	0,12	0,09	0,08
	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	11	15	7	15	10	8
	Jumlah total ASN	Orang	13.580	13.635	11.672	11.040	11.017	10.447
3	Jumlah temuan BPK	Jumlah	127	85	81	57	54	55

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

6. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Dalam pembentukan kebijakan pembangunan daerah terdapat unsur Lembaga legislatif, yang memiliki kewenangan membentuk, menyusun dan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Rata-rata rapat/sidang Hearing per tahun adalah 36,5 kali dalam setahun. Sedangkan Rata-rata rapat/sidang Banmud per tahun adalah 28 kali dalam setahun dan Peripurna adalah 21,5 kali setahun. Rata-rata persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati menjadi Perda adalah 51,5 persen per tahun.

Tabel 2.127
Jumlah Rapat/Sidang Yang Difasilitasi Tahun 2019 - 2020

No	Uraian	Satuan	2019	2020
1	Hearing	Kali	45	50
2	Rapat Banmud	Kali	22	34
3	Peripurna	Kali	27	16
	Jumlah		92	80

Sumber data: Sekretariat DPRD Lampung Tengah

Tabel 2.128
Pencapaian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2019 - 2020

No	Uraian	Satuan	2019	2020
1	Persentase Peraturan Daerah yang disepakati menjadi Perda	%	81	82

Sumber data: Sekretariat DPRD Lampung Tengah

7. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah.

Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,42 persen per tahun. Nilai SAKIP meningkat dengan rata-rata peningkatan 4,30 persen per tahun. Jumlah peraturan yang diterbitkan juga terus per tahun. Persentase KUR yang disalurkan juga terus per tahun.

Tabel 2.129
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	n.a	72,92	80,59	80,71	85,9	85,9
2	Nilai SAKIP	Skor		51,86	51,86	60,13	62,05	63,52
3	Nilai LPKD	Skor		1,0755	1,259	1,1266	n.a	n.a
4	Jumlah Paket Pengadaan Barang & Jasa	paket	802	1041	741	336	287	221
5	Jumlah Peraturan yang diterbitkan							
	- Peraturan Daerah	Buah		47	27	14	14	11
	- Peraturan Bupati	Buah		13	11	50	69	61
6	Persentase KUR yang disalurkan	Juta rp		516,010	109,251	630,666	802,162	1.107,876

Sumber data: Sekretariat Daerah Lampung Tengah

2.3.5. Fokus Layanan Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, pembinaan terhadap masyarakat dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan.

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dapat dilihat dari perkembangan jumlah LSM, Ormas dan Parpol yang terdaftar secara resmi di pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2020 jumlah LSM yang terdaftar sebanyak 45 LSM, kemudian jumlah Ormas berjumlah 116 Ormas, serta Partai Politik yang terdaftar sebanyak 12 parpol.

Rata-rata jumlah Ormas tahun 2017-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 15,75 persen per tahun. Namun rata-rata jumlah LSM terus menurun dengan penurunan 13,41 persen per tahun.

Tabel 2.130
Pencapaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	LSM	Unit	81	88	88	45
2.	Ormas	Unit	76	87	114	116
3.	Parpol	Unit	12	12	12	12

Sumber data: Badan Karbangpol Lampung Tengah

2.3.6. Fokus Layanan Umum Kewilayahan

Unsur kewilayahan ditingkat kabupaten dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah kecamatan selaku pelaksana sebagian kewenangan bupati yang diserahkan atau dikuasakan kepada camat. Pada saat ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 26 Kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat. Adapun tugas pokok dan fungsi camat adalah sebagai berikut:

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek daya saing ekonomi daerah dapat dilihat dari kemampau ekonomi daerah yang tercermin dari pengeluaran konsumsi masyarakat, rasio ekspor dan impor dan persentase desa (kampung) maju.

Rata-rata Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 5,14 persen per tahun. Sedangkan rata-rata Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita juga terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,66 persen per tahun.

Rata-rata rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,90 persen per tahun. Rata-rata Prosentase desa maju terhadap total desa juga terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 50,42 persen per tahun.

Tabel 2.131
Pencapaian Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita	Rupiah/bulan	376.934	421.095	451.886	432.544	469.587	420.895
2	Pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita	Rupiah/bulan	362.592	372.338	321.924	378.715	415.446	422.598
3	Rasio ekspor + import terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	n.a	73,50	68,70	72,00	74,77	75,86
4	Prosentase desa maju terhadap total desa	%	n.a	0,07	0,17	0,27	0,27	0,27

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing wilayah/ infrastruktur daerah dapat dilihat dari kondisi infrastruktur wilayah. Rata-rata persentase jalan mantap (baik dan sedan) tahun 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 5,64 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 sebanyak 61,9 persen jalan di Kabupaten Lampung Tengah masuk kategori jalan mantap.

Rata-rata cakupan rumah tinggal bersanitasi 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,96 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 cakupan rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai 94,35 persen. Rata-rata persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,57 persen per tahun. Hingga akhir tahun 2020 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sudah mencapai 89,30persen.

Tabel 2.132
Pencapaian Indikator Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jalan mantap (baik dan sedap)	%	n.a	82,62	87,62	84,42	81,62	81,9
2	Cakupan Rumah Tinggal Bersantitas	%	n.a	90,83	92,95	98,04	98,12	94,85
4	Tingkat kemandirian jaringan irigasi teknis kabupaten	%	n.a	26,86	28,63	31,18	37,08	43,71
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	n.a	84	88,13	88,99	84,89	89,80

Sumber: Dinas Bina Marga/Perumahan dan Permukiman/Pengairan

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Aspek daya saing iklim berinvestasi dapat dilihat dari kondisi iklim berinvestasi. Angka kriminalitas ratio per 10.000 penduduk cenderung menurun, menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah semakin aman. Kondisi ini semakin menjadi daya tarik investasi.

Tabel 2.133
Pencapaian Indikator Fokus Iklim Investasi Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kriminalitas ratio per 10.000 penduduk	ratio per 10.000 penduduk	3.92	3.05	3.33	4.40	4.25	4,19

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata ratio ketergantungan 2018-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus menurun dengan tingkat penurunan 0,38 persen per tahun. Pada akhir tahun 2020, ratio ketergantungan di Kabupaten Lampung Tengah hanya mencapai 46,6. Ini artinya dalam 100 orang penduduk hanya menanggung 46 orang.

Rata-rata penduduk yang tamat perguruan tinggi 2016-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 40,74 persen per tahun. Namun demikian tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah masih di dominasi tamatan SD, disusul dengan tamatan SMA/Seberajast, dan tamatan SMP/Seberajast.

Tabel 2.134
Pencapaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia
Tahun 2015 - 2020

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ratio Ketergantungan	ratio	49.59	49.34	49.16	49.03	48.92	48.6
2	Tamat SD	jumlah	n.a	232.448	232.448	182.330	307.664	242.612
4	Tamat SMP/ Sederajat	jumlah	n.a	232.293	232.293	182.061	171.328	172.518
5	Tamat SMA/ Sederajat	jumlah	n.a	127.900	127.900	172.460	159.648	126.010
6	Tamat Diploma	jumlah	n.a	74.750	74.750	9.482	15.966	11.414
7	Tamat Perguruan Tinggi	jumlah	n.a	10.671	10.671	26.895	25.062	30.239

Sumber data: BPS Lampung Tengah

2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal yang mendasari dari pelaksanaan SPM diantaranya adalah penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diturunkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi urusan yang mengharuskan adanya SPM, terdiri dari urusan bidang:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana
6. Sosial

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan yaitu 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, antara lain: (1) Pendidikan Dasar; (2) Pendidikan Kesetaraan; maupun (3) Pendidikan Anak Usia Dini. Capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Dasar pada Tahun 2020 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keberhasilan secara akademik dengan adanya kejuaraan lomba yang dari tahun ke tahun meningkat.
2. Nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai akhir kegiatan belajar mengajar dalam satuan jenjang tertentu baik SD maupun SMP mengalami peningkatan.
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana baik SD maupun SMP serta proses PPDB secara zonasi semakin dimengerti oleh masyarakat.

Sementara capaian kinerja jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 sebagai hasil dari penjangkauan ATS (Anak Tidak Sekolah).

Jenis layanan dasar untuk SPM bidang kesehatan tingkat kabupaten terdiri dari 12 jenis layanan. Rata-rata SPM tahun 2015-2020 di Kabupaten Lampung Tengah terus meningkat dengan pertumbuhan 16,31 persen per tahun. Rata-rata SPM pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat 0,10 persen per tahun, pelayanan kesehatan ibu bersalin turun 0,47 persen per tahun, kesehatan bayi baru lahir turun 5,90 persen per tahun, kesehatan balita turun 1,57 persen per tahun, kesehatan pada usia pendidikan dasar meningkat 44,24 persen per tahun, kesehatan pada usia produktif meningkat 1,70 persen per tahun, kesehatan pada usia lanjut meningkat 13,34 persen per tahun, kesehatan penderita hipertensi meningkat 4,43 persen per tahun, kesehatan penderita diabetes melitus meningkat 9,69 persen per tahun, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat meningkat 25,63 persen per tahun, kesehatan orang terduga tuberkulosis meningkat 48,92 persen per tahun, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya

tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) meningkat 32,88 persen per tahun.

Capaian kinerja SPM bidang perumahan rakyat tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan 2,91 persen. Indikator yang digunakan untuk mengukur SPM tersebut ada 4 (empat) indikator, yaitu adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni, persentase penurunan luasan kawasan kumuh, persentase penduduk berakses air bersih, dan persentase rumah tinggal bersanitasi.

SPM pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat satuan polisi pamong praja terdapat 2 (dua) jenis pelayanan. Untuk dapat melaksanakan target pencapaian dan penerapan SPM bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut terdapat 1 (satu) organisasi perangkat daerah (OPD) penanggung jawab, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Jenis. Hingga tahun 2020, SPM bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah mencapai 100 persen dan sudah menjangkau di seluruh kecamatan (28 kecamatan) yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Capaian kinerja SPM ketentraman ketetiban umum dan perlindungan masyarakat penanggulangan bencana pemadam kebakaran berdasarkan cakupan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dalam Kab. Lampung Tengah 4.789.82 Km², dengan meliputi seluruh aktifitas kepentingan public, masyarakat dan pemerintahan. Tingkat waktu tanggap (response time rate) target 100% capaian target realisasi 100% dari jumlah kasus kebakaran di wilayah WMK 22 kejadian yang tertangani pada waktu tanggap. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi target 25 orang realisasi target 4 % karena hanya 1 orang yang bersertifikasi keahlian dari Pusdiklatdar, Jumlah satgas target 90 orang realisasi target 27.8% hanya tersedia 25 orang satgas yang terdiri dari 4 PNS dan 21 Non PNS dan 2 orang Danru, jumlah mobil pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK target 28 unit realisasi kendaraan yang layak fungsi 14.29% sama dengan 3 unit.

SPM bidang sosial meliputi 5 (lima) layanan, yaitu pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, anak terlantar dipanti/LKSA, lanjut usia terlantar diluar panti, gelandangan dan napzah, dan saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Hingga tahun 2020 sudah mencapai 100 persen, kecuali pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan karena datanya tidak ditemukan.



Tabel 2.136
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi 2020
Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	99,80
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang belum mendapatkan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	0,87
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 0-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	84,33
Kesehatan				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	88,76
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	84,80
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	70,65
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	55,21



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
				2020
1	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	47,14
2	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	12,17
3	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	68,01
4	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	21,64
5	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	42,11
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	24,31
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	13,44
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang menimbulkan daya tahan tubuh menurun (HIV dan AIDS)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang menimbulkan daya tahan tubuh menurun (HIV dan AIDS) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	50,00



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
				2020
	Immunisasi bayi (Vaksin)			
	Pekerjaan Umum			
1	Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	94,58
2	Lumrah Koneksi Rumah	Presentase penurunan hunian kumuh rumah	100%	1,52
3	Akses Air Bersih	Presentase penduduk berakses air bersih	100%	29,8
4	Rumah Tinggal Bersusun	Presentase rumah tinggal beraturan	100%	94,5
	Kecamatan Umum			
1	Pelayanan Ketertarikan Dan Keterbacaan Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akses dari Pelayanan Mula dan Perdana	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan Dan Evaluasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan Dan Evaluasi Korban Kebakaran	100%	100%
	Sosial			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terintegrasi di luar pasar	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terintegrasi di luar pasar	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terintegrasi di luar	Jumlah anak terintegrasi yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar pasar	100%	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
				2020
	panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlokasi di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlokasi yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tunan sosial khususnya: gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh bantuan	100%	100%

2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 yaitu:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- g. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industri-alisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;

- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.



Tabel 2.136
Pencapaian Indikator SDGs Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 - 2020

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	12,9%	12,82%	12,82%	11,82%
1.3 Memonopoli secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui BPJS Bidang Kesehatan.	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3 Memonopoli secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketransportasi.	70%	80%	90%	90%
1.3 Memonopoli secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpancung hak dasarnya dan inklusivitas.	100%	100%	100%	100%
1.3 Memonopoli secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan rumah prapasar/Program Keluarga Harapan.	85%	84%	85%	



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020		
	saluran komunikasi bagi kalangan muslim dan rentan.						
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat muslim dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.1a	Persentase perempuan pernah hamil umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	90,01%	85,07%	87,8%	88,15%
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat muslim dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.1b	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100%	107%	103,5%	96,42%
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat muslim dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.1c	Persentase penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus menikah.	73,1%	72,88	71,2	
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat muslim dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.1d	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	86,15	86,15	86,12	



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	mayoritas miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, kesehatan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		sumber air minum layak dan berkelanjutan.				
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, kesehatan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (c)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	76,25	76,56	77,42	
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, kesehatan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SE/keselamatan	99,2	99,12	99,2	
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, kesehatan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SDP/SE/keselamatan	78,28	78,77	78,27	



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	kontrol kepemilikan lahan, pemanfaatan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro						
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lahan, pemanfaatan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.3j	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akses kreditasi.	82,0%	84,04	82,17	
1.4	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lahan, pemanfaatan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.3k	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penghidupan utamanya berasal baik dari PLH dan bukan PLH	80,12	83,00	84,30	
1.5	Pada tahun 2020, membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian alam, bencana iklim dan gangguan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.1a	Jumlah lokasi pengujian pengurangan risiko bencana daerah	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Pada tahun 2020, membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian alam, bencana iklim dan gangguan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.1b	Pemenuhan kebutuhan dasar berbasis bencana sosial.	100%	100%	100%	



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
1.5 Pada tahun 2020, membangun ketahanan masyarakat miskin dan marjinal yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.cii	Pendampingan pelaku usaha terkait bencana sosial.	N/A	N/A	N/A
1.5 Pada tahun 2020, membangun ketahanan masyarakat miskin dan marjinal yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.cii	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan lapangan khusus. (Diklat/Sosialis/ Madrasah Aman Bencana)	N/A	N/A	N/A
1.5 Pada tahun 2020, membangun ketahanan masyarakat miskin dan marjinal yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.cii	Proporsi sumber dana yang disediakan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	0,55	0,91	2,58
1.6 Menciptakan mobilitas yang signifikan tingkat sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi warga berpendatang, khususnya warga kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kegiatan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.6.2 ^a	Pengeluaran untuk layanan publik (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDICATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
2.1	Pada tahun 2020, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. Situasinya orang miskin dan marjinal yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bagi tertidap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1 ^a	Prevalensi Ketidakhadiran Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	N/A	N/A	N/A	N/A
2.1	Pada tahun 2020, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. Situasinya orang miskin dan marjinal yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bagi tertidap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1 (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.			2.57	
2.1	Pada tahun 2020, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. Situasinya orang miskin dan marjinal yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bagi tertidap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.2 ^a	Prevalensi penduduk dengan kekurangan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Status Pengukuran Kekurangan Pangan.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.1	Pada tahun 2020, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. Situasinya orang miskin dan marjinal yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bagi tertidap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1800 kkal/bagita/hari.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2	Pada tahun 2020, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan secara internasional untuk anak pendek dan semua di bawah usia 5 tahun, dan mengurangi kematian gizi remaja perempuan, ibu hamil	2.2.1 ^a	Prevalensi stunting (pendek) dan sangat pendek pada anak di bawah lima tahun/balita.	27%	28,33%	33,33%	



TARJET	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020		
2,2	dan menyusui, serta menyusui						
2,2	Pada tahun 2020, menghidangkan asupan bernutrisi kecukupan gizi, termasuk pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta menyusui	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/taduta	27%	28,20%	22,90%	
2,2	Pada tahun 2020, menghidangkan asupan bernutrisi kecukupan gizi, termasuk pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta menyusui	2.2.2	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tpt	5,53 %	5,51 %	5,52%	
2,2	Pada tahun 2020, menghidangkan asupan bernutrisi kecukupan gizi, termasuk pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta menyusui	2.2.3 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	5,7	7,7	11,20	
2,2	Pada tahun 2020, menghidangkan asupan bernutrisi kecukupan gizi, termasuk pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta menyusui	2.2.3 (b)	Prevalensi bayi usia kurang dari 5 tahun yang mendapatkan ASI eksklusif	77,1%	44,5%	55,1%	



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
3.2	Pada tahun 2020, menghadirkan segala bentuk kulineran gmn, termasuk pada tahun 2020 sebagai target yang diupayakan secara sistematis untuk anak pondok dan rumah di tanah ulat 2 tahun, dan memastikan kebutuhan gmn remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2 (a)	Kualitas konsumsi pangan yang dindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat dan tingkat konsumsi ikan.	21,8%	22,4%	22,7%	
3.3	Pada tahun 2020, menghidangkan produktivitas pertanian dan perdagangan produk makanan skala kecil, khususnya perikanan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengrajin dan nelayan, termasuk melalui skala yang aman dan sehat terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang akan tenaga, dan pelayanan nonpertanian	3.3.1 ^a	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	N/A	N/A	N/A	N/A
3.1	Pada tahun 2020, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1 ^a	Angka Kematian Ibu (AKI).	52,8	51,48	78	
3.1	Pada tahun 2020, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2 ^a	Fragorasi perempuan gemah-kasih umur 15-49 tahun yang secara melahirkan melahirkan dengan oleh tenaga kesehatan lain.	80,01	82,07	87,8	
3.1	Pada tahun 2020, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2 (a)	Persentase perempuan gemah-kasih umur 15-49 tahun yang secara melahirkan melahirkan di fasilitas kesehatan	90,01	92,07	97,8	



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
3.2	Pada tahun 2020, mengurangi kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KWL (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0,14	0,27	0,22	2,3
3.3	Pada tahun 2020, mengurangi kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan setidaknya hingga 12 per 1000 KWL (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.3.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	1,50	4,74	3,73	3,5
3.4	Pada tahun 2020, mengurangi kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KWL (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.4.3.a)	(AKN) per 1000 kelahiran hidup	1,72	4,94	3,34	0,8
3.5	Pada tahun 2020, mengurangi kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KWL (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.5.2.b)	Persentase kelahiran/bayi yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	N/A	N/A	N/A	N/A
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi epidemik AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit infeksi yang disebabkan, dan mempromosikan hepatitis, penyakit zoonosis air, serta penyakit.	3.6.1.a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	0,0086	0,001	0,001	



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	menular lainnya						
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri epidem AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan mengurangi hepatitis, penyakit beresumber air, serta penyakit menular lainnya	3.2.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidem AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan mengurangi hepatitis, penyakit beresumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.3*	Kapadlan Malaria per 1000 orang	0.007	0.004	0.00433	
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri epidem AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan mengurangi hepatitis, penyakit beresumber air, serta penyakit menular lainnya	3.2.2 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri epidem AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan mengurangi hepatitis, penyakit beresumber air, serta penyakit menular lainnya	3.2.4 (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan dokter distrik untuk infeksi Hepatitis B	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri epidem AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan mengurangi hepatitis, penyakit beresumber air, serta penyakit menular lainnya	3.2.5	Jumlah orang yang memotivasi intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri epidem AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan mengurangi hepatitis, penyakit beresumber air, serta penyakit	3.2.6 (a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	menular lainnya.						
3.3	Pada tahun 2020, mengakhiri episode AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang menular, dan mengurangi hepatitis, penyakit berakutir air, serta penyakit menular lainnya.	2.3.3.a	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria (berhasil lolos dalam survei pendataan transmis) tahap II.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4	Pada tahun 2020, mengakhiri episode AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang menular, dan mengurangi hepatitis, penyakit berakutir air, serta penyakit menular lainnya.	2.3.3.b	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria (berhasil lolos dalam survei pendataan transmis) tahap II.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4	Pada tahun 2020, mengurangi hingga seperti angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesadaran mental dan kesejahteraan.	2.4.1.a	Persepsi masyarakat pada penduduk umur >15 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4	Pada tahun 2020, mengurangi hingga seperti angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesadaran mental dan kesejahteraan.	2.4.1.b	Prevalensi tekanan darah tinggi.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4	Pada tahun 2020, mengurangi hingga seperti angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesadaran mental dan kesejahteraan.	2.4.1.c	Prevalensi diabetes pada penduduk umur >15 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4	Pada tahun 2020, mengurangi hingga seperti angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesadaran mental dan kesejahteraan.	2.4.2	Angka kematian (insidensi rata-rata) akibat bunut dini.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020		
	menjal dan kecakateraan.						
2.4	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesadaran mental dan kecakateraan.	2.4.2 (a)	Jumlah keluarga/orang yang memiliki psikotesis yang menunjukkan upaya kesadaran jiwa	87,6	87,6	87,6	87,6
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1 (a)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	87,6	87,6	87,6	87,6
3.6	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.6.2*	Konsumsi alkohol per per kapita oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir	87,6	87,6	87,6	87,6
3.7	Pada tahun 2020, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Prevalensi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki ketidakhadiran keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	72,1	78,6	71,2	
3.7	Pada tahun 2020, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berencana hamil.	72,1	78,6	71,2	
3.7	Pada tahun 2020, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi	3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (DCT) cara modern.	87,6	87,6	87,6	87,6



TARGET		INDICATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	kelembagaan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2 ^a	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A	N/A	N/A
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	1,33	1,3	1,3	1,36
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	26,87	24,45	18,76	
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2 ^a 1	Jumlah penduduk yang dilindungi asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan,	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
Alasan terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, akurat, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.9 Pada tahun 2020, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.a	Proporsi kematian akibat keracunan.	N/A	N/A	N/A
3.4 Mengimplementasikan the Framework Convention on Tobacco Control WMO di seluruh negara sebagai langkah yang nyata.	3.4.1*	Prevalensi merokok pada penduduk umur >15 tahun.	N/A	N/A	N/A
3.5 Mendukung pemenuhan dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, akurat the Data Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang memungkinkan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh kontribusi dalam kesepakatan atas Agreement Perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual untuk memastikan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.5.1.a	Prevalensi ketidoregulan obat dan vaksin di Puskesmas	100	100	100
3.6 Meningkatkan secara signifikan pembayaran kesehatan dan reformasi, pengembangan, pelatihan, dan sistem tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara	3.6.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	kurang berkembang, dan negara berkembang polku km)						
4.1	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1 ¹	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/SD berkualitas minimal 80.	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/SMAs berkualitas minimal 80.	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/teknokrat.	110,40	110,33	109,40	
4.1	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMAs/teknokrat.	90,72	86,18	88,2	



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pendidikan yang setara dan efektif						
4.1	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pendidikan yang setara dan efektif	4.1.1 (g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >15 tahun	7,22	7,31	7,37	
4.2	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pertumbuhan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan, pendidikan pra-skolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk memasuki pendidikan dasar	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	N/A	N/A	N/A	N/A
4.4	Pada tahun 2020, meningkatkan setara kegiatan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1 ²	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan sebagai informasi dan komunikasi (TGI)	N/A	N/A	N/A	N/A
4.5	Pada tahun 2020, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.5.1 ²	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/ITs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
4.2	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.2.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur <15 tahun	88,3	88,3	84,88	
4.3	Pada tahun 2020, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.3.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 34 tahun dan umur 15-33 tahun.	88,34	88,34	88,43	
4.4	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah perempuan serta dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.4.1 ¹	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) toilet; (b) internet untuk tujuan pembelajaran; (c) komputer untuk tujuan pengajaran; (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas; (e) air minum layak; (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin; (g) fasilitas cuci tangan (air mengalir, sabun, dan handuk bagi semua (WASH).	N/A	N/A	N/A	N/A
4.5	Pada tahun 2020, secara signifikan meningkatkan keahlian guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang lainnya.	4.5.1 ¹	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak-anak.	5.1.1 ¹	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2	Mengakhiri segala bentuk kekerasan	5.2.1 ¹	Proporsi perempuan dewasa dan	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.				
5.2 Menghagukan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2 Menghagukan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2 ¹ Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain dalam pasangan dalam 12 bulan terakhir.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2 Menghagukan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2 (a) Prevalensi korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.3 Menghagukan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1 ² Proporsi perempuan umur 20-34 tahun yang berstatus belum atau berkelahir hidup bersama, sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.3 Menghagukan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 20-49 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDICATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
3,3	Meningkatkan semua praktik kebajikan, seperti pernikahan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta semua pernikahan.	3.3.1 (a)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	0/A	0/A	0/A	0/A
3,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	3.5.1 ^a	Proporsi perempuan yang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi dan pemerintahan daerah	4	4	12	
3,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	3.5.2 ^a	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	0/A	0/A	0/A	0/A
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan bagi perempuan untuk yang telah ditetapkan sesuai dengan Program of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dalam mendukung hasil baru dari konferensi/konferensi tersebut	5.6.1 ^a	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang memiliki hubungan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	0/A	0/A	0/A	0/A
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan bagi perempuan untuk yang telah ditetapkan sesuai dengan Program of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dalam mendukung hasil baru dari konferensi/konferensi tersebut	5.6.1 (a)	Ukuran total KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang telah terpenuhi).	0/A	0/A	0/A	0/A



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
2.6	Meningkatkan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah ditetapkan sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumentasi hasil kerja dan keberhasilan tersebut.	2.6.1.a	Penggunaan dan pemahaman Rencana Tata Ruang (PTR) untuk memfasilitasi akses ke layanan kesehatan modern.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.6	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	2.6.1.b	Proporsi individu yang menguasai/memiliki keterampilan digital.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.1	Pada tahun 2020, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.a	Persebaran rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.1	Pada tahun 2020, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.b	Kapasitas pasokan air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta produksi air baku untuk pabrik-pabrik.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.1	Pada tahun 2020, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.c	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan terjangkau.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.1	Pada tahun 2020, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, dan meningkatkan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada komunitas kaum pinggiran, serta kelompok masyarakat rentan.	6.1.1.d	Proporsi populasi yang memiliki akses ke toilet yang layak, aman, dan terjangkau.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDICATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
6.1	Pada tahun 2020, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghematkan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.1.1.a	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.1	Pada tahun 2020, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghematkan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.1.1.b	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.2	Pada tahun 2020, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghematkan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.a	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	N/A	N/A	N/A	N/A
6.2	Pada tahun 2020, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghematkan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.d	Jumlah desa/kelurahan yang Dapa Debuasi Free (DDF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	N/A	N/A	N/A	N/A
6.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.2	Pada tahun 2020, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghematkan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.c	Proporsi rumah tangga yang	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghemat biaya buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta berupaya mengarsipkan rencana	terlayani sistem pengolahan air limbah terpusat.				
8.2 Pada tahun 2020, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan penggunaan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi asupan preparat air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	8.2.1 (a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengolahan lumpur sisa perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	N/A	N/A	N/A	N/A
8.2 Pada tahun 2020, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan penggunaan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi asupan preparat air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	8.2.1 (b) Preparat rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan lumpur sisa.	N/A	N/A	N/A	N/A
Pada tahun 2020, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan penggunaan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi asupan preparat air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan	8.2.2 (a) Kualitas air dasar	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDICATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, meningkatkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.1a	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tanah yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.1a	Insentif penghematan air pertanian/perikanan dan industri	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.1a	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diimplementasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW).	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.1a	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.1b	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
	ipah.		pengaliran sungai dan danau.				
6.5	Pada tahun 2020, menanggulangi pencemaran sumber daya air terpadu di semua lingkungan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.2	Kegiatan pemeliharaan kelengkapan sumber daya air.	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1	Pada tahun 2020, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1 ^a	Rasio elektrifikasi.	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1	Pada tahun 2020, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1	Pada tahun 2020, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	N/A	N/A	N/A	N/A
7.1	Pada tahun 2020, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	N/A	N/A	N/A	N/A
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1 ^a	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan	8.2.1 ^a	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat	N/A	N/A	N/A	N/A



TARJAH	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2021	2022	2023	2025
dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan pasar baru	pertumbuhan PDB riil per orang birokrat per tahun.				
8.3 Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1 ^a Persentase lapangan kerja informal sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.	N/A	N/A	N/A	N/A
8.3 Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.b Persentase tenaga kerja formal.	N/A	N/A	N/A	N/A
8.3 Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.c Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	N/A	N/A	N/A	N/A
8.3 Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.d Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	terhadap jasa keuangan						
5.1	Pada tahun 2020, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua kelompok dan lokasi, termasuk bagi pemuda dan berpendang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	5.1.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	N/A	N/A	N/A	N/A
5.2	Pada tahun 2020, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua kelompok dan lokasi, termasuk bagi pemuda dan berpendang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	5.2.2*	Tingkat pengangguran terukur berdasarkan jnsr kelamin dan kelompok umur.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.3	Pada tahun 2020, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua kelompok dan lokasi, termasuk bagi pemuda dan berpendang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	5.3.3(a)	Tingkat setengah pengangguran	N/A	N/A	N/A	N/A
5.4	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menaruh pendidikan atau pelatihan.	5.4.1*	Persebaran usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	N/A	N/A	N/A	N/A
5.5	Pada tahun 2020, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan peserta berkecukupan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	5.5.1*	Proporsi kontribusi peserta terhadap PDR.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.6	Pada tahun 2020, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk	5.6.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDICATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
5.8	Pada tahun 2020, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	5.8.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	N/A	N/A	N/A	N/A
5.9	Pada tahun 2020, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	5.9.1.(a)	Jumlah dunia sctor pariwisata	N/A	N/A	N/A	N/A
5.9	Pada tahun 2020, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	5.9.2 ¹	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	N/A	N/A	N/A	N/A
5.10	Memperluas kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	5.10.1 ¹	Jumlah bank per 100.000 penduduk dewasa	N/A	N/A	N/A	N/A
5.10	Memperluas kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	5.10.1.(a)	Batas rata-jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	N/A	N/A	N/A	N/A
5.10	Memperluas kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	5.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
3.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	3.1.1.(a)	Panjang pembangunan jalan tol.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.10	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	3.1.1.(a)	Panjang jalur kereta api.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	3.1.2.(a)	Jumlah damage pengotoran.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2020, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	3.2.1 ^a	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2020, secara signifikan meningkatkan proporsi industri.	3.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang						
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.1*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	N/A	N/A	N/A	N/A
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	N/A	N/A	N/A	N/A
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	N/A	N/A	N/A	N/A
9.4	Mempromosikan nilai tambah, meningkatkan kapasitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substantif meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.4.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
9.4	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.4.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobilis broadband.	N/A	N/A	N/A	N/A
9.5	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.5.1 (a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki keterampilan digital.	N/A	N/A	N/A	N/A
9.6	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.6.1 (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet.	N/A	N/A	N/A	N/A
10.1	Pada tahun 2020, secara progresif mengelola dan mempromosikan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dan populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	N/A	N/A	N/A	N/A
10.2	Pada tahun 2020, memberdayakan dan meningkatkan situasi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan pengendang disabilitas.	N/A	N/A	N/A	N/A
10.3	Mencapai keterampilan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan meningkatkan hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan.	10.3.1 (a)	Indeks Keterbacaan Sigil.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	mempromosikan kegiatan, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait kegiatan dan kebijakan tersebut.						
10.3	Menjamin keselamatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus diskriminasi, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan kegiatan, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait kegiatan dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(4)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum WKH Internasional	N/A	N/A	N/A	N/A
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan dasar, upah dan pendudukan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(6)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Kematangan	N/A	N/A	N/A	N/A
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta mematahkan kemiskinan.	11.1.1.(8)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.	N/A	N/A	N/A	N/A
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta mematahkan kemiskinan.	11.1.1.(9)	Jumlah layanan perumahan terjangkau yang memenuhi standar pelayanan perkotaan (SPU)	N/A	N/A	N/A	N/A
11.2	Pada tahun 2030, memperluas urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan pemukiman permukiman yang berkelanjutan dan integrasi di semua tingkat.	11.2.2.(6)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	N/A	N/A	N/A	N/A
11.4	Mempromosikan dan menjaga Warisan Budaya Dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(4)	Jumlah kota wisata di kawasan pariwisata internasional, kota besar, kota sedang dan kota.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
1.5	Pada tahun 2020, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1 ^a	Jumlah korban meninggal, hilang dan terluka dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Pada tahun 2020, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Pada tahun 2020, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1 (a)	Jumlah orang pengungsi dan tunas dan liris serta kehilangan.	N/A	N/A	N/A	N/A
11.5	Pada tahun 2020, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
11.2 Pada tahun 2020, mengurangi dampak lingkungan perikanan per kapita yang merugikan, termasuk dengan membongkar pemukiman khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah ikan.	11.2.1 (a)	Persentase sampah perikanan yang tertangani.	N/A	N/A	N/A
11.3 Pada tahun 2020, mengurangi dampak lingkungan perikanan per kapita yang merugikan, termasuk dengan membongkar pemukiman khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah ikan.	11.3.1 (b) J	Jumlah ikan hias yang mengembangkan dan memproduksi gross value di kawasan perikanan metropolitan.	N/A	N/A	N/A
11.7 Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manusia dan penyandang disabilitas	11.7.1 (a)	Jumlah ikan hias yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perikanan metropolitan dan kota sedang.	N/A	N/A	N/A
11.8 Pada tahun 2020, meningkatkan secara signifikan jumlah ikan dan perikanan yang menghadapi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang perikanan, akses sumber daya, tenaga dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.8.2 ¹	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	N/A	N/A	N/A
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengurangan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang ditetapkan dan secara signifikan	12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang telah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk memunculkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan					
12.6 Pada tahun 2020, secara sukarela mengurangi produksi limbah melalui pemisahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	12.6.1 (a) Jumlah timbunan sampah yang daur ulang	N/A	N/A	N/A	N/A
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi berkelanjutan dalam siklus pelatihan mereka	12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan standar ISO 14001	N/A	N/A	N/A	N/A
12.7 Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional	12.7.1 (a) Jumlah produk ramah lingkungan yang terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
12.8 Pada tahun 2020, menyajikan bahwa material di mana pun memiliki informasi yang relevan dan memadai terhadap perkembangan berkelanjutan dan gaya hidup yang sesuai dengan alam	12.8.1 (a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A
13.1 Meningkatkan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua tingkat	13.1.1 ^a Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A
13.1 Meningkatkan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua tingkat	13.1.2 ^a Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A
13.1 Pada tahun 2020, menjamin pelaksanaan, monitor dan pemantauan berkelanjutan dari sistem peringatan dan gerakan darurat zona	13.1.1 (a) Frekuensi kerugian hutan terhadap luak lahan kehutanan	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDICATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
	area lingkungannya, khususnya kawasan hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kebijakan berdasarkan perjanjian internasional).						
15.2	Pada tahun 2020, menghentikan pengurangan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena pengurangan, kolokron dan banjir, dan berusaha menegasi dunia yang bebas dari lahan terdegradasi).	15.2.1 (a)	Preparasi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan busukurutan).	N/A	N/A	N/A	N/A
15.8	Meningkatkan pembagian keuntungan yang ada dan meraka dan pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional).	15.8.1 ^a	Terdapatnya kerangka legalitas, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang ada dan meraka).	N/A	N/A	N/A	N/A
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai kearifan dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan).	15.9.1 (a)	Dimajukan rencana pemerintahan keanekaragaman hayati).	N/A	N/A	N/A	N/A
16.1	Setara signifikan mengurangi angka kemiskinan absolut dan relatif angka kemiskinan dimasyarakat).	16.1.1 (a)	Jumlah kasus kemiskinan pertumbuhan pada satu tahun terakhir).	N/A	N/A	N/A	N/A
16.1	Setara signifikan mengurangi angka kemiskinan absolut dan relatif angka kemiskinan dimasyarakat).	16.1.2 (a)	Kemiskinan absolut per 100.000 penduduk).	N/A	N/A	N/A	N/A
16.1	Setara signifikan mengurangi angka kemiskinan absolut dan relatif angka kemiskinan dimasyarakat).	16.1.2 (a)	Preparasi penduduk yang menjadi korban kemiskinan absolut dalam 12 bulan terakhir).	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
10.1. Secara signifikan mengurangi angka bunuh diri karena dan stres akibat kematian di rumah.	10.1.1 ^a	Prosentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	N/A	N/A	N/A
10.2. Menghentikan penyalahgunaan narkotika, alkoholisme, perjudian, dan angka bunuh diri karena dan penyalahgunaan terhadap anak.	10.2.1.a	Prosentase rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam struktur keluarga.	N/A	N/A	N/A
10.2. Menghentikan penyalahgunaan narkotika, alkoholisme, perjudian, dan angka bunuh diri karena dan penyalahgunaan terhadap anak.	10.2.1.b	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	N/A	N/A	N/A
10.2. Menghentikan penyalahgunaan narkotika, alkoholisme, perjudian, dan angka bunuh diri karena dan penyalahgunaan terhadap anak.	10.2.2.a	Prosentase perempuan dan laki-laki muda umur 15-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	N/A	N/A	N/A
10.2. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dalam angka korupsi.	10.2.1.a	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	N/A	N/A	N/A
10.8. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	10.8.1 ^a	Prosentase pengalokasian uraian pemerintah terhadap anggaran yang direncanakan.	N/A	N/A	N/A
10.8. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	10.8.1.a	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualan (WTP) atau Laporan Keuangan Komprehensif Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	N/A	N/A	N/A
10.8. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	10.8.1.b	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) Kementerian/Lembaga.	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR		CAPAIAN			
				2017	2018	2019	2020
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.1	dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). Persentase penggunaan E-prosedur terhadap seluruh pelayanan.	N/A	N/A	N/A	N/A
16.8	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.8.1.1	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Efisiensi Birokrasi Self Assessment/ Lomba dan Pemertan Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	N/A	N/A	N/A	N/A
16.8	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.8.2.1	Persentase Kepuasan Masyarakat U/ Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	N/A	N/A	N/A	N/A
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang rasional, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	N/A	N/A	N/A	N/A
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang rasional, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga legislatif (DPRD dan DPRD).	N/A	N/A	N/A	N/A
16.9	Pada tahun 2020, memberikan identitas yang tepat bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.1	Prevalensi anak umur di bawah 5 tahun yang telah terdaftar di semua lembaga pencatatan sipil, menurut jenis.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	
16.2 Pada tahun 2020, memberikan identitas yang tepat bagi semua, termasuk pendatang kelahiran.	16.10.2 (d)	Jumlah legitimasi sandihasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.	N/A	N/A	N/A	N/A
16.5 Menggalakan dan mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang telah diseminatif untuk pembangunan berkelanjutan	16.5.1 (a)	Jumlah kebijakan yang diseminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan perencanaan diseminasi menurut hukum WCI Internasional.	N/A	N/A	N/A	N/A
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1 ¹	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	N/A	N/A	N/A	N/A
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1 (a)	Basis pemerintahan pajak terhadap PDB.	N/A	N/A	N/A	N/A
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2 ²	Proporsi anggaran domestik yang berasal dari pajak domestik.	N/A	N/A	N/A	N/A
17.8 Meningkatkan kerjasama UtaraSelatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular antara regional dan internasional urban dan	17.8.2 (a)	Tingkat penetrasi akses tetap (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARJET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
siapa terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan bersama masyarakat tingkat lokal, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mahasiswa yang telah ada, khususnya di tingkat Pemerintahan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global					
17.8 Meningkatkan kerjasama Universitas, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular antara regional dan internasional untuk dan siapa terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan bersama masyarakat tingkat lokal, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mahasiswa yang telah ada, khususnya di tingkat Pemerintahan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global	17.8.2 (a)	Preparasi pendudukan layanan mobil broadband	N/A	N/A	N/A
17.8 Meningkatkan kerjasama Universitas, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular antara regional dan internasional untuk dan siapa terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan bersama masyarakat tingkat lokal, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mahasiswa yang telah ada, khususnya di tingkat Pemerintahan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global	17.8.2 (a)	Preparasi pendudukan layanan mobil broadband	N/A	N/A	N/A



TARGET		INDIKATOR	CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	
17.2	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembagian kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.2.1 ^a	Profil individu yang menggunakan internet	N/A	N/A	N/A	N/A
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-aneka dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan sumber daya strategi kerjasama.	17.17.1 ^a	Jumlah proyek yang ditanamkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	N/A	N/A	N/A	N/A
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-aneka dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan sumber daya strategi kerjasama.	17.17.1 ^b	Jumlah alokasi pemerintah untuk pemetaan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	N/A	N/A	N/A	N/A
17.12	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terjamin berdasarkan pendekatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan budaya nasional	17.12.1 ^a	Persentase komponen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	N/A	N/A	N/A	N/A
17.12	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang	17.12.1 ^b	Persentase komponen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan	N/A	N/A	N/A	N/A



TARJAT		INDIKATOR		KAPASITAS			
				2017	2018	2019	2020
	berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terdapat berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional		utama.				
17.12	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terdapat berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.12.1 (d)	Jumlah metadata layanan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRUSA)	N/A	N/A	N/A	N/A
17.12	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terdapat berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional	17.12.1 (d)	Perentase indikator SDGs terdapat yang relevan dengan target.	N/A	N/A	N/A	N/A



TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
17.18 Pada tahun 2020, mengadatkan instansi yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.18.1 (b)	Tersedianya data register tingkat kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	N/A	N/A	N/A
17.19 Pada tahun 2020, mengadatkan instansi yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.19.1 (e)	Jumlah pengunjung portal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	N/A	N/A	N/A
17.18 Pada tahun 2020, mengadatkan instansi yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melingkupi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	17.18.2 (d)	Persepsi responden yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	N/A	N/A	N/A

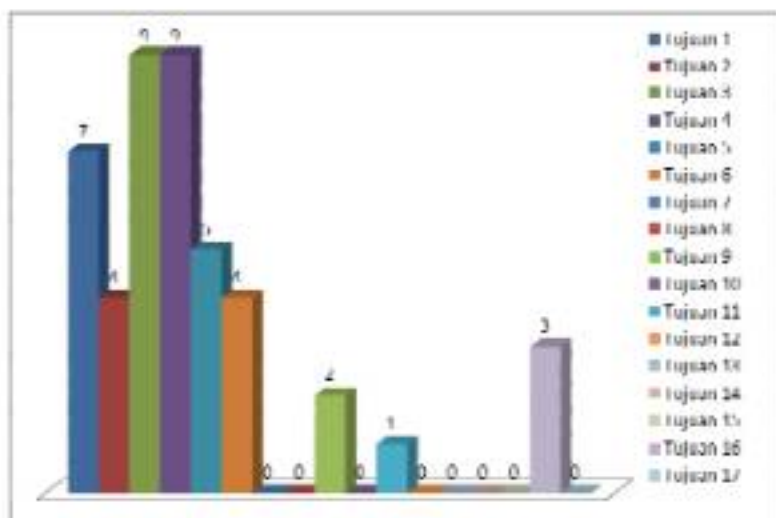
Berdasarkan pembagian kewenangan dan hasil dari analisis keterkaitan (*cross cutting*), terdapat 217 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Lampung Tengah. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda.

Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan yang masuk dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebanyak 33 indikator atau 15,94% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Capaian paling tinggi adalah tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia dan tujuan 4 yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Berikut adalah grafik capaian indikator berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS).

Gambar 2.24. Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)



Sumber data: Hasil Analisis, 2021

Keterangan:

- Tujuan 1 : Menghapus segala bentuk kemiskinan
- Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- Tujuan 7 : Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9 : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11 : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13 : Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14 : Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
- Tujuan 16 : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
- Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.137
Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional
Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target (SS)

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 1: Menghapus segala bentuk kemiskinan	1. Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap 2. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

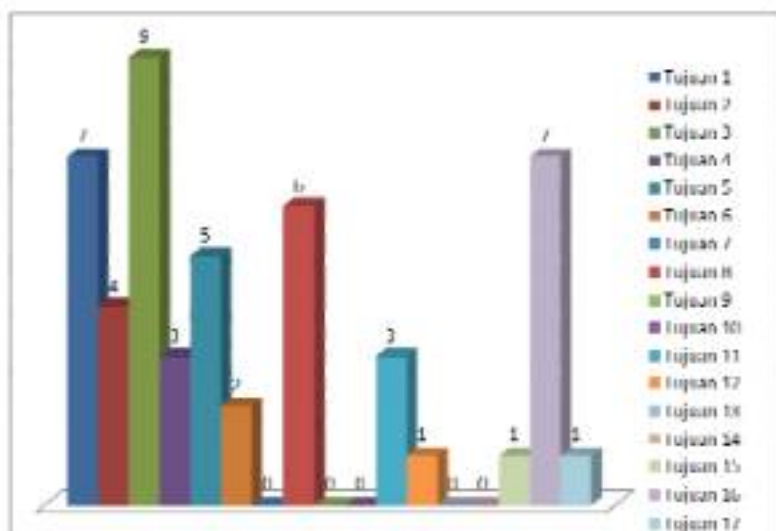
Tujuan	Indikator TPS
	layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 5. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan 6. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di SD / MI / sederajat 7. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di SMP / MTs / sederajat
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	1. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 2. Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita 3. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai: dan tingkat konsumsi ikan 4. Terselenggaranya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	1. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. 3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi 4. Prevalensi HIV pada populasi dewasa 5. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria. 6. Proporsi kasus Kusta yang ditemukan dan diobati 7. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa 8. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin. 9. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / sederajat. 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs / sederajat. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / sederajat. 4. Rata-rata lama sekolah penduduk umur >15 tahun. 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 6. Persentase APK SMA / SMK / MA / sederajat. 7. Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun 8. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/MI/ sederajat 9. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMP/MTs/ sederajat
Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / sederajat. 4. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD)

Tujuan	Indikator TPB
	Provinsi/Kabupaten/Kota). 5. Proporsi perempuan yang berada diposisi manajerial.
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 3. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 4. Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	1. Kondisi Mantap jalan Kabupaten 2. Panjang Jalur Kereta Api
Tujuan 11: Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	• Persentase pengguna mode transportasi umum di perkotaan.
Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua	1. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 2. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 3. Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 51 Indikator atau 23,8% dari keseluruhan target yang dikeji dalam kewenangan kabupaten. Capaian indikator hanya terjadi pada tujuan. Berikut adalah grafik capaian indikator berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB).

Gambar 2.25 Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)



Sumber data: Hasil Analisis, 2021

Keterangan :

- Tujuan 1 : Menghapus segala bentuk kemiskinan
- Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Tujuan 5 : Mencapai ketetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- Tujuan 7 : Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9 : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11 : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

- Tujuan 13 : Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14 : Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
- Tujuan 16 : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
- Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.138
Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 1: Menghapus segala bentuk kemiskinan	1. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 2. Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 4. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat 5. Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. 6. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di SMA / MA / sederajat 7. Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan memastikan pertanian berkelanjutan	1. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari 2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta 3. Prevalensi anemia pada ibu hamil 4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	1. Angka Kematian Ibu (AKI). 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 3. Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

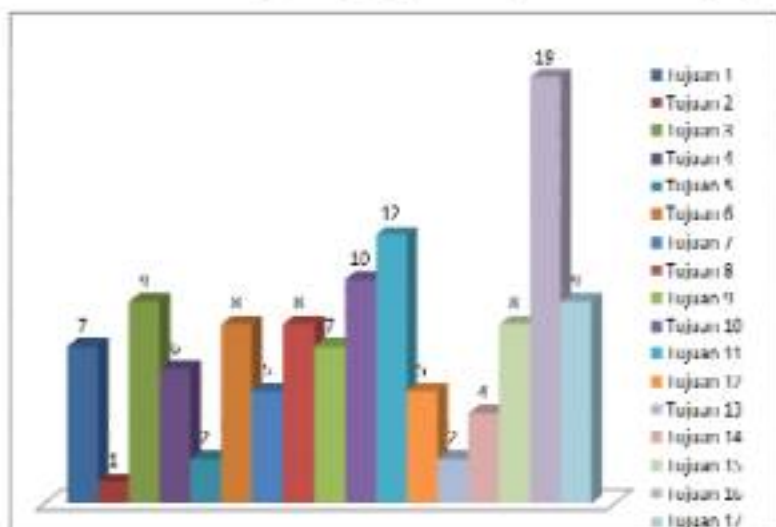
Tujuan	Indikator TPS
	4. Insiden Tuberkulosis (ITS) per 100.000 penduduk. 5. Prevalensi tekanan darah tinggi. 6. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun 7. Prevalensi penyalahgunaan narkoba. 8. Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). 9. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	1. Persentase SD/MI berskreditasi minimal B. 2. Persentase SMP/MTs berskreditasi minimal B. 3. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/ sederajat
Tujuan 5: Mencapai ketertaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional 2. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan 3. Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 4. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 5. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan	1. Jumlah desa/ kelurahan yang open defecation free (ODF) 2. Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. PDRE per kapita 2. Laju pertumbuhan PDRE perkapita 3. Laju pertumbuhan PDE per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDE Rili 4. Tingkat pengangguran terbuka 5. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma KB 6. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara	1. Jumlah Desa Tertinggal 2. Jumlah Desa Mandiri
Tujuan 11: Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1. Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 2. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 3. Tercapainya pengurangan resiko banjir yang merugikan masyarakat

Tujuan	Indikator TPB
Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.
Tujuan 15: Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua	- Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir. - Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir - Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. - Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melapor kepada polisi. - Proporsi aturan hukum dan undang-undang terhadap masyarakat keseluruhan - Jumlah Sosialisasi Aturan Hukum Partai Politik dan Ormas terhadap komponen masyarakat Kabupaten Lampung Tengah - Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Ratio penerimaan pajak terhadap PDB

Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Becara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 122 indikator atau 56,2% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Hampir setiap tujuan terdapat indikator yang tidak ada/belum ada datanya, kecuali pada tujuan 3 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Berikut adalah grafik capaian indikator berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah yang yang tidak ada/belum ada data (NA).

Gambar 2.26 Target TPB yang Tidak ada/belum ada Data (NA)



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Keterangan :

- Tujuan 1 : Menghapus segala bentuk kemiskinan
- Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- Tujuan 7 : Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9 : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11 : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

- Tujuan 13 : Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14 : Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
- Tujuan 16 : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
- Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.139
Indikator TPS Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)

Tujuan	Indikator TPS
Tujuan 1: Menghapus segala bentuk kemiskinan	1. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenaga kerjaan 2. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN 3. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang 4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 5. Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi 6. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana 7. Dokumen strategi pengurangan resiko bencana tingkat daerah
Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	• Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan
Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	1. Angka kematian neonatal (AKN) per1000 kelahiran hidup 2. Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B 3. Angka pencapaian pengobatan Penyakit Filariasis 100%. 4. Jumlah penyalahgunaan Narkotika dan penggunaan alkohol yang merugikan yang mengakses layanan rehabilitasi. 5. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. 6. Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu 7. Total Fertility Rate (TFR).

Tujuan	Indikator TPB
	8. Unmet need pelayanan kesehatan. 9. Persentase merokok pada penduduk ≥ 15 tahun
Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kemampuan belajar seumur hidup untuk semua	1. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 2. Persentase APK Perguruan Tinggi (PT). 3. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun. 4. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan / laki-laki di Perguruan Tinggi 5. Proporsi sekolah dengan akses ke listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi, fasilitas cuci tangan bagi semua 6. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik
Tujuan 5: Mencapai keadilan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	1. Proporsi perempuan umur 20-34 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 2. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan	1. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 2. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman. 3. Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik. 4. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 5. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. 6. Insentif penghematan air pertanian / perkebunan dan industri. 7. Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang di internalisasikan dalam RTRW 8. Jumlah jaringan sumberdaya air yang dibentuk
Tujuan 7: Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern	1. Efuran energi terbarukan 2. Intensitas energi primer 3. Konsumsi listrik perkapita 4. Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga 5. Rasio penggunaan gas rumah tangga
Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. Persentase tenaga kerja formal 2. Persentase tenaga kerja in formal sektor pertanian 3. Persentase akses layanan keuangan formal UMKM 4. Upah rata-rata per jam kerja 5. Tingkat setengah pengangguran 6. Persentase usia muda (15-24) yang sedang sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) 7. Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk bentuk pekerjaan terburuk

Tujuan	Indikator TPB
	untuk anak) 8. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
Tujuan 9: Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	1. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur 2. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB perkapita 3. Persentase perubahan emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca 4. Rasio Emisi CO ₂ / Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri 5. Proporsi penduduk yang terlayani mobil broadband 6. Proporsi individu yang menggunakan telp genggam 7. Proporsi individu yang menggunakan internet
Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara	1. Koefisien Gini 2. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur 3. Jumlah Daerah Tertinggal yang terentaskan 4. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 5. Indeks Kebebasan Sipil 6. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 7. Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat 8. Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan 9. Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan 10. Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi
Tujuan 11: Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 2. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 3. Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. 4. Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama 5. Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 6. Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. 7. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. 8. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 9. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. 10. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green di kawasan perkotaan metropolitan. 11. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 12. Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB)

Tujuan	Indikator TPB
	tingkat daerah
Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1. Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang 2. Jumlah peserta PROER yang mencapai minimal ranking biru 3. Jumlah limbah B3 terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan (sektor industri) 4. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001. 5. Jumlah produk ramah lingkungan yang teragiter.
Tujuan 13: Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 2. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Tujuan 14: Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan	1. Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. 2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. 3. Jumlah luas kawasan konservasi perairan. 4. Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).
Tujuan 15: Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi	1. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. 2. Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. 3. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 4. Jumlah ketetapan pengelolaan hutan 5. Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas. 6. Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. 7. Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. 8. Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020
Tujuan 16: Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadapadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua	1. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya 2. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 thn yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengaruh dalam setahun terakhir 3. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. 4. Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pet Layanan Hukum. 5. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 6. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualan

Tujuan	Indikator TPD
	(WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) 7. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota). 8. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. 9. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) 10. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota). 11. Indeks Lembaga Demokrasi. 12. Indeks Kebebasan Sipil. 13. Indeks Hak-hak Politik. 14. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. 15. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 16. Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 17. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. 18. Sebanyak 200 ribu penduduk yang tersebar di 24 kecamatan berhak mendapatkan akses pelayanan yang mudah 19. Semakin banyaknya masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi informasi/internet untuk menjalankan aktifitasnya
Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	1. Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota 2. Persentase penetrasi koneksi akses tetap (fixed broadband) di Perkotaan (20Mbps) dan di Perdesaan (10Mbps) 3. Persentase penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) di Perkotaan dan di Perdesaan 4. Persentase kabupaten ST yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet 5. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPSU). 6. Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPSU), transaksi proyek KPSU dan dukungan pemerintah. 7. Jumlah pejabat fungsional statistik dan pranata komputer pada Kementerian / Lembaga. 8. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. 9. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Secara keseluruhan menurut kategori dan jumlah total indikator yang digunakan dalam analisis capaian tujuan TPB di Kabupaten Lampung Tengah adalah dalam tabel berikut.

Tabel 2.140
Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Tercapai	Belum Mencapai Target	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	N/A	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	7	7	14	0	7	21
2	Tanpa Kelaparan	4	4	5	0	1	9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	9	9	18	0	9	27
4	Pendidikan Berkualitas	9	8	9	0	6	18
5	Kesetaraan Gender	5	5	7	0	2	12
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	2	10	0	8	14
7	Menyamin Akses Energi	0	0	5	0	5	5
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	0	6	14	0	8	14
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	2	0	7	0	7	9
10	Mengurangi Kesenjangan	0	2	12	0	10	12
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	1	8	18	0	12	16
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	0	1	6	0	5	6
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	0	2	0	2	2
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera	0	0	4	0	4	4
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	0	1	9	0	8	9
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	8	7	26	0	19	29
17	Komitmen untuk Mencapai Tujuan	0	1	10	0	9	10
	TOTAL	44	51	173	0	122	217

2.7 Pencapaian Kinerja RPJMD Periode 2016-2020

Secara substansi, bagian ini menjelaskan capaian kinerja atau pelaksanaan RPJMD periode 2016-2020 sesuai dengan Sasaran Pembangunan Daerah, serta capaian kerja sama yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.



2.7.1 Evaluasi Hasil Capaian Indikator RPJMD 2016-2020

Tabel 2.141
Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten Lampung Tahun 2016-2020

Rincian	Tujuan	Resapan	Indikator Resapan	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Yusuf RPJMD Minggu 2020 (%)
Rincian Resapan Kebijakan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	1. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	1. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	1. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rincian Resapan Kebijakan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	1. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	1. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	1. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Meningkatkan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang dalam kegiatan yang yang berlandaskan kegiatan, kegiatan, dan kegiatan yang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bidang	Tajuk	Beban	Indikator Beban	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Tajuk Khusus Kinerja 2020 (%)
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemukiman masyarakat	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,17	92,12	92,04	92,29	91,22	107,48
			2. Persentase pemerataan lahan berasak rumah	1,52	1,42	2,04	2,22	22,72	144,48
			3. Persentase penduduk berakses air bersih	89,84	89,14	89,18	89,18	89,4	101,79
			4. Persentase rumah tinggal kumuh	94,54	94,62	94,64	94,69	94,69	104,69
		5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	71,0	74,9	79,7	82,0	82,72	112,88
Bidang Kelapa : Membangun sistem kelestarian berbasis agrikultur dan ekologi berasid dengan melakukan pertanian organik	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian agro berakultur	2. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	1. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	4,82	4	4,84	4,88	11,84	188,34
			2. Pertumbuhan ekonomi sektor minyak	5,89	5,12	5,29	5,13	-5,54	-79,37
			3. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	5,89	5,87	5,28	5,85	-5,83	-71,55
			4. Persentase pengelolaan sistem usaha Koperasi	10,01	7,42	8,92	9,87	18,01	200,07



Bidang	Tajuan	Beban	Indikator Beban	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Yugan Khusus Kinerja 2020 (%)
		B. Rangka kelembagaan dengan maksud	Rata Rata Kelembagaan dengan	229,99	272,27	329,23	329,17	212,27	49,11
Bidang Kewilayatan - meningkatkan kegiatan pendidikan dan kegiatan sosial penduduk dan kegiatan lain	1. Meningkatkan kegiatan sosial penduduk	1. Meningkatkan kegiatan sosial dan kegiatan pendidikan	1. Rata Rata lama sekolah	7,27	7,28	7,26	7,27	7,28	99,79
			2. Lama harapan sekolah	12,91	12,91	12,91	12,91	12,92	100,00
			3. Nilai rata-rata ujian SD	75,00	75	75,5	75	75,5	100,00
			4. Nilai rata-rata ujian SMP	8,87	8,8	89,74	89	81,44	100,00
			5. Usia Harapan Melayu	29,12	29,23	29,12	29,12	29,21	100,00
	2. Meningkatkan kegiatan kesehatan penduduk	2. Meningkatkan kegiatan kesehatan penduduk	6. Angka Kematian Bayi	2,81	2,72	4,94	2,82	4,2	20,22
			7. Angka Kematian Ibu Kandungan	22,28	20	20,28	20,28	102,07	19,43
			8. Persentase Kandungan Kandungan	20,2	27	20,22	12,99	10,91	129,26
			9. Angka laju pertumbuhan penduduk	2,92	2,92	2,9	2,72	2,72	91,22
	3. Meningkatkan kegiatan kesehatan penduduk dan kegiatan lain	3. Meningkatkan kegiatan kesehatan penduduk dan kegiatan lain	1. Indeks Pembangunan Gender	89,89	89,89	89,87	89,89	89,8	99,81



No	Tajuk	Bilangan	Indikator Bilangan	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian Tajuk Khusus Kinerja 2020 (%)
		2. Menempatkan sambutan daerah	1. Menempatkan sambutan PNB terhadap Pembangunan Daerah	0.00	0.00	0.00	7.43	7.10	82.30
		2. Menempatkan sambutan kabupaten pelayanan masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	75.99	80.06	80.71	85.8	85.8	100.00

2.7.2 Capaian Kerjasama

Kerjasama dengan pihak lain (pihak ketiga) merupakan salah satu strategi untuk mempercepat proses pembangunan dalam rangka memanfaatkan potensi daerah secara maksimal sehingga sumber daya yang dimiliki dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah Daerah dapat mengambil inisiatif strategi kerjasama dengan berbagai pihak dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan. Pemerintah Daerah meyakini bahwa semangat menggabal kerjasama daerah antar kabupaten/kota, kerjasama luar negeri, dan dengan pihak lain merupakan bentuk kesadaran bahwa potensi yang dimiliki masing-masing pihak bisa didayagunakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik, efektif, dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah menjelaskan bahwa Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan 24 kerja sama dengan berbagai lembaga dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai kapasitas masing-masing lembaga (tabel dibawah ini).

Tabel 2.142
Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2015 - 2020

No.	NOMOR PKS	TANGGAL BERLAKU	DINAS/ INSTANSI	TUJUAN	METERANGAN
1	1.a /PKS/B.a.VII.02/2020 B.47 / KC-XIX/RTL/01/2020	2 Januari 2020 (12 Bulan)	DPKAD Lanteng - Bank BRI (Persero), TBK Cabang Bandar Jaya	Pengelolaan Rekening bagian Umum daerah (RKUD) dan Layanan Cash Manajemen.	Ditandatangani Kepala BPKAD
2	1.b/ PKS/B.a.VII.02/2020 11/Kc-BDJ/PKS/ /2020	2 Januari 2020 Satu Tahun	DPKAD Lanteng - PT. Bank BPD Lampung Cabang Bandar Jaya	Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ditandatangani Kepala BPKAD
3	1.C/PKS/3etda.1.04/2020 B.48 / KC-XIX/RTL/01/2020	2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020	Pemkab Lanteng - Bank BRI (Persero), Bandar Jaya	Penyaluran Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kampung dan Dana Kampung yang bersumber dari APBD dan APBD di Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2020	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah



No.	NOMOR PKS	TANGGAL BERLAKU	DINAS/ INSTANSI	TUJUAN	KETERANGAN
4	14/PKS/B.a.VII.03/2020 917/REG.3/JLK/PR/HK/01/2020	31 Januari 2020 30 Januari 2022	BPRD Badan Pengkola Pajak dan Retribusi Daerah - PT. Pai Indonesia (Persero)	Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Padat dan Perkotaan (PBB-P2)	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
5	02/MOU/Setda.1.03/2020 B-524/L.3.18/GPH/01/2020	5 Februari 2020 Satu Tahun	Bagian Hukum Keb. Lamtang - Kajeri Lampung Tengah	Peningkatan Masalah Hukum Sidang Perdata dan TUN pada wilayah Hukum Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
6	10/PKS/B.a.VII.02/2020 B.46/KC-XDK/PKS/LTD.2/2020	19 Februari 2020 24 BULAN	DPKAD Lamtang - PT. BRI Cabang Bandar Jaya	Jasa Kustodian	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
7	11/PKS/B.a.VII.02/2020		DPKAD Lamtang - BPJS Katanagakarjaan	Bagi ASK Non PKB di Kabupaten Lampung Tengah.	Ditanda- tangi Kepala BPKAD
8	12/PK/Setda.1.04/2020 01/TLJA/III-2020	10 Februari 2020	Pemkab Lamtang - PT. TAUHID LAMBAING JAYA ABADI	PERDAGANGAN	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
9	13/PKS/Setda.1.04/2020 02/TLJA/III-2020	23 Maret 2020 10 Bulan	Pemkab Lamtang - PT. TAUHID LAMBAING JAYA ABADI	Pembangunan Pasar Daerah Gaya Baru Kec. Sepuluh Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
10	14/POK/B.a.VI.01/B/2020 142/MOU/D.3-AU/P/2020	23 Maret 2020 s/d 4 tahun	BAPPEDA LT - Universitas Muhammadiyah Lampung.	Triderma PT	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
11	15/MOU/Setda.1.04/2020	1 April 2020	Bagian Hukum Lamtang - Law Firm Toza & Partner	Hukum	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
12	16/MOU/D.b.VI.15/2020 HK/201/6/17/PTD-STTD/2020	Mai 2020 s/d 5 tahun	Pemkab Lamtang - Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah melalui Tri Dharma Perguruan tinggi.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
13	17/PKS/D.b.VI.15/2020 HK/201/6/18/PTD-STTD-2020	Mai 2020 s/d 5 Tahun	Pemkab Lamtang - Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	Pemenuhan Kebutuhan SDM dibidang Perhubungan Darat.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
14	18/PKS/D.a.VI.02/2020 47/KTR/XII-07/0620	30 Juni 2020	Pemkab Lamtang - BPJS Kesehatan Cabang Metro	Kepesertaan Program jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang terdaftar oleh Pemkab. Lampung Tengah.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
15	19/PKS/D.b.VI.15/2020 DIB/TAD/PKS/07/2020	Juni 2020 5 Tahun	Dinas Perhubungan	Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pemkab Lampung Tengah.	Ditandatangani Kadiklub LT
16	20/PKS/D.a.VI.01/2020 DIB/TAD/PKS/07/2020	Juni 2020 4 Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jenjang Strata 1	Ditandatangani Kadik Pendidikan



No.	NOMOR PKS	TANGGAL BERLAKU	DINAS/ INSTANSI	TUJUAN	KETERANGAN
				(SI) Bagi Putra Putri Asli Pemilih LT di Universitas Gajah Mada.	dan Kebudayaan Kab.LT
17	489/PKS/B.a.VII.01/2020 1862/UNI/PEO/KIA/DL/2020	27 Maret 2020 8 Bulan	Bappeda Lamtang - FEB UGM	Penyusunan Grand Design Pembangunan Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Kepala BAPPEDA LT
18	100/67/Setda.I.04/2020 466.a/MTMO.18.02.AT.02.08/ VI/2020	8 Juli 2020 31 Desember 2020	EPKAD Lamtang - Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung LT	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Sekda LT
19	21/PKS/D.b.VI.15/2020 MOU/14/08/2020	19 Agustus 2020 8 Tahun	Pemkab Lamtang - BPJS Ketenagakerjaan	Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui mekanisme Pelaksanaan Perpanjangan KEUR dan izin Treyak Angkutan.	Ditandatangani Kadis Perhubungan LT
20	21.b/ADD-PKS/B.a.VII.09/2020 B/KC XIX/RTL/09/2020	1 September 2020	EPKAD Lamtang - PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya	Pengelolaan Rekening Kas umum Daerah Dan Layanan Cash Management.	Ditanda tangani Kepala EPKAD
21	PJ/HBM.00/26/0200/2020 484.a/B.a.VII.03/2020	18 september 2020 8 Tahun	EPKAD Lamtang - PT. PLN (Persero) Unit Jaduk Distribusi Lampung Ub.Metro	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Penda Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Bupati Lampung Tengah
22	22/IK/D.a.VI.01/2020 MOU/16/10/2020	9 November 2020 2 Bulan.	Dikbud Lamtang - BPJS Ketenaga Kerjaan	Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Guru Honorar dan TK3 Honorar di Dinas Dikbud Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab.LT
23	16/PRL.07- PK/18025/KAB/XIX/2020 442/2804/D.a.IV.02/XI/2020	12 November 2020 30 Desember 2020	SPU dan Cektas	Rapid Test dan Swab Petugas PEMILU Kabupaten Lampung Tengah.	Ditandatangani Kadis Kesehatan Kab. Lampung Tengah
24	886/2111/D.a.VI.17/2020 225/EPK5-BJS/Dir/XII/2020	10 Desember 2020	Dinas Koperasi - EPK5 Rajasa	Penyaluran Bantuan Stimulasi Penguatan Modal bagi pelaku Usaha Mikro terdampak Covid - 19 Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	Ditandatangani Kadis Koperasi Kab. Lampung Tengah

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Pada Bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu (lima tahun terakhir) serta kerangka pendanaan proyeksi APBD lima tahun ke depan selama periode RPJMD Tahun 2021-2026.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang terdiri dari:

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
 - 1) Hasil Pajak Daerah;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah.
- B. Dana Perimbangan, yaitu:
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2) Dana Alokasi Umum;
 - 3) Dana Alokasi Khusus;
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas:
 - 1) Pendapatan hibah;
 - 2) Dana bagi hasil pajak propinsi;
 - 3) Dana Penyesuaian/ Dana Transfer lainnya dari Pemerintah

Selama tahun 2015-2020, secara umum kinerja Pendapatan Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari sebesar Rp 2.023.623.520.880,85 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 2.496.892.254.153,48 pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 5,12 % pertahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2016 hal ini disebabkan oleh dimulainya pengalokasiannya dana desa.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2015	2.043.029.262.804,00	2.023.623.520.880,85	98,81	-	-
2016	2.454.740.548.775,00	2.269.083.164.816,27	92,44	19,86	12,15
2017	2.450.724.735.038,00	2.349.375.634.771,12	95,86	0,16	3,54
2018	2.848.700.281.403,00	2.474.602.072.396,60	87,17	2,92	2,23
2019	2.625.337.294.964,43	2.533.349.563.432,37	96,53	2,43	4,62
2020	2.496.892.254.153,48	2.491.392.253.320,89	97,37	-5,25	-6,08

Sumber data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2015-2020 didominasi oleh sumber dana

perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 72,52 %, dikurusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Bah dengan proporsi rata-rata sebesar 20,58 %, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata baru mencapai 6,89 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Tabel 3.2
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Tahun						Rata-Rata Kontribusi
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pendapatan Asli Daerah	5,75	8,33	6,26	6,68	7,43	7,40	6,61
2	Dana Perimbangan	63,08	73,33	73,32	73,24	69,42	66,87	71,52
3	Lain-lain Pendapatan Yang Bah	26,17	18,14	20,43	20,07	23,10	25,73	20,58

Sumber data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp 116.342.550.598,56 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 179.667.473.861,86 pada tahun 2020, dengan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan selama tahun 2015-2020 secara rata-rata baru mencapai 6,61 %, yang menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Semakin besar angka ratio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar.
2. Dana Perimbangan mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp 1.377.672.256.118 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 1.625.918.929.774,00 pada tahun 2020, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,21%. Dana perimbangan merupakan sumber terbesar realisasi pendapatan daerah selama tahun 2015-2020, dengan kontribusi rata-rata sebesar 71,90%. Komponen penyumbang terbesar terhadap Dana Perimbangan selama periode tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum .

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dari sebesar Rp 529.606.714.164,29 pada tahun 2015 menjadi Rp 625.555.855.465,03 pada tahun 2020, dengan kontribusi pertahun rata-rata per tahunnya sebesar 21,49 %.

3.1.1.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengukuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan. Belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Bunga
 - Belanja Hibah
 - Belanja Bantuan Sosial
 - Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - Belanja Tidak Terduga
- 2) Belanja Langsung
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Modal

Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun

anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Selama tahun 2015-2020, secara umum Belanja Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari Rp 1.898.882.243.080,57 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 2.470.642.148.631,00 pada tahun 2020. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2015-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 90,30%.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Belanja	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2015	2.180.635.482.247,43	1.898.882.243.080,57			
2016	2.656.908.882.645,00	2.274.041.706.308,00	85,59	21,84	19,76
2017	2.648.348.821.368,98	2.491.288.236.818,98	94,07	(0,32)	9,88
2018	2.600.914.768.688,00	2.388.867.281.894,87	91,88	(1,79)	(4,11)
2019	2.774.292.878.046,88	2.829.108.618.744,86	91,16	6,87	8,87
2020	2.684.007.886.387,16	2.470.642.148.631,00	92,08	(8,28)	(2,81)

Sumber data: Data LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah selama tahun 2015-2020 didominasi untuk pemenuhan belanja tidak langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 64,48 %, sementara untuk belanja langsung sebesar 33,55 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja tidak langsung (terutama untuk aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS), dimana komposisi terbesar PNSD di Kabupaten Lampung Tengah merupakan guru dan tenaga kesehatan yang bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang sifatnya wajib.

Tabel 3.4
Kontribusi Komponen Realisasi Belanja

No	Uraian Belanja	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Tidak Langsung	67,20	68,37	88,73	61,82	62,58	73,82	64,42
2	Belanja Langsung	62,80	36,88	41,27	38,48	37,45	26,28	35,55

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp 1.276.027.065.360,00 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 1.811.482.433.535,00 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh berpindahnya penggajian guru sekolah menengah ke pemerintah provinsi, serta adanya biaya Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2018. Tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2015-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 92,96%.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Belanja Tidak Langsung	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2015	1.438.552.685.530,80	1.276.027.065.360,00	87,49	-	-
2016	1.709.428.409.001,00	1.440.949.069.379,00	84,29	17,20	12,92
2017	1.475.764.942.771,92	1.463.089.823.069,00	99,14	(18,67)	1,54
2018	1.532.375.227.242,00	1.469.645.931.275,86	95,91	3,84	0,45
2019	1.656.018.272.451,58	1.582.067.174.342,00	95,53	8,07	7,65
2020	1.898.866.005.529,63	1.811.482.433.535,00	95,42	14,63	14,90

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

- Belanja Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp 622.855.177.720,87 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 659.189.715.096,00 pada tahun 2020. Tingkat realisasi Belanja Langsung selama tahun 2015-2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 86,05%.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Lampung Tengah

Tahun	Target Belanja Langsung	Realisasi	Tingkat Capaian	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2015	722.082.882.666,68	622.885.177.720,87	86,26	-	-
2016	947.480.478.644,00	838.092.686.929,00	87,98	31,21	88,75
2017	1.172.588.878.594,06	1.028.198.418.749,98	87,69	23,76	28,42
2018	1.068.589.588.441,00	919.228.850.818,71	86,03	(8,87)	(10,60)
2019	1.118.274.800.595,05	947.086.441.402,86	84,69	4,65	8,08
2020	785.641.850.757,58	659.189.715.096,00	83,90	(29,75)	(80,89)

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/ dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan).

Selama tahun 2015-2020, realisasi pembiayaan daerah cenderung berfluktuasi, tergantung dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah. Realisasi pembiayaan daerah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 106.980.277.183,43; pada tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp 202.582.627.819,71; pada tahun 2017 turun menjadi sebesar Rp 197.624.086.327,96, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi sebesar Rp 84.214.484.280,12, tahun 2019 sebesar Rp 140.264.890.282,15, dan kemudian tahun 2020 sebesar Rp 187.115.105.613,55.



Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2010-2020
Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Berapakah Pertumbuhan (%)
1	REVENUE	2.022.826.189.212,28	2.289.262.181.218,27	2.245.272.821.775,12	2.471.402.218.299,42	2.822.215.966.122,27	2.141.222.222.222,22	5,59%
1.1	Revenues of the Budget	114.018.185.000	127.875.000.000	127.818.000.000	148.111.758.000	159.201.178.010	175.227.178.000	6,12%
1.1.1	Tax Revenue	+5.022.040.220	51.022.022.102	51.024.122.224	75.722.242.242	12.012.078.246	12.422.027.222	17,81%
1.1.2	Domestic Revenue	0.000.000.000	1.027.017.000	1.000.000.000	2.010.000.000	18.000.000.000	0.000.000.000	0,02%
1.1.2.1	Rata-Rata Pertumbuhan Keuangan Daerah yang diperoleh dari sektor pajak yang terdapat dalam buku pajak daerah	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0,00%
1.1.2.2	Rata-Rata Pertumbuhan Keuangan Daerah yang diperoleh dari sektor pajak yang terdapat dalam buku pajak daerah	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0,00%
1.2	Non Revenue	1.908.808.004.212	2.161.387.181.218	2.117.454.821.775	2.323.290.540.299	2.663.014.788.112	1.966.005.044.222	4,60%
1.2.1	Non Revenue of the Budget / Non Revenue of the Budget	18.018.077.110	18.022.000.000	18.024.758.000	21.122.118.000	22.022.022.000	22.022.022.000	+4,12%
1.2.2	Non Revenue of the Budget	1.890.790.000.000	2.143.365.181.218	2.099.429.063.775	2.302.168.422.299	2.641.002.766.112	1.944.003.044.222	2,02%
1.2.4	Non Revenue of the Budget	128.722.712.000	+21.022.011.472	208.727.072.000	+27.042.022.222	272.022.022.000	212.022.022.000	44,44%
1.2.4.1	Non Revenue of the Budget	822.822.722.124	822.822.022.824	872.822.822.822	822.822.122.124	822.822.822.822	822.822.822.822	4,22%
1.2.4.2	Non Revenue of the Budget	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	+2,22%
1.2.4.3	Non Revenue of the Budget	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	+1,72%
1.2.4.4	Non Revenue of the Budget	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000	+1,72%

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

3.1.2.1 Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (*current asset*) dan aset non lancar/ tetap (*long-term asset*).

Jumlah Aset Lancar berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu dari sebesar Rp 341.366.270.537,26 pada tahun 2015; menurun menjadi Rp 275.002.622.275,52 pada tahun 2016; kemudian menurun menjadi sebesar Rp 166.138.941.763,97 pada tahun 2017; dan meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 257.771.462.026,63; tahun 2019 meningkat menjadi Rp 266.066.574.334,47, serta pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 218.421.366.774,95. Apabila dibandingkan antara jumlah aset lancar pada tahun 2015 dengan aset lancar pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 36,02 %.

Jumlah investasi jangka panjang cenderung meningkat yang semula sebesar Rp 20.666.787.830,92 tahun 2015; kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 20.549.069.406,18; kemudian meningkat menjadi Rp 21.590.802.020,00 pada tahun 2017; tahun 2018 menjadi Rp 24.114.573.922,00; tahun 2019 menjadi Rp 26.295.625.445,00, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 36.445.105.417,66. Apabila kita bandingkan antara jumlah investasi jangka panjang pada tahun 2015 dengan jumlah investasi jangka panjang pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 57,66 %.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena

peralatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Jumlah kewajiban Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015 sebesar Rp 35.660.536.607,11; kemudian meningkat menjadi Rp 52.662.975.533,00 pada tahun 2016; kemudian cenderung mengalami penurunan menjadi Rp 38.958.184.852,00 pada tahun 2017; dan pada tahun 2018 menjadi 38.035.334.318,42; serta kembali menurun menjadi Rp 31.999.440.769,59 pada tahun 2019. Adapun pada tahun 2020 jumlah kewajiban menjadi Rp 48.258.607.854,33 Apabila dibandingkan antara jumlah kewajiban pada tahun 2015 dengan jumlah kewajiban pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 35,33 %.

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Jumlah ekuitas dana Kabupaten Lampung Tengah yang semula sebesar Rp 2.302.721.057.776,31 pada tahun 2015 menjadi Rp 2.913.091.670.544,78 pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi Rp 3.017.232.498.767,99 pada tahun 2017; dan meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi Rp 3.215.837.533.868,00 kemudian meningkat menjadi Rp 3.235.504.653.479,49 pada tahun 2019 serta menjadi Rp 3.182.319.653.920,60 pada tahun 2020. Apabila dibandingkan antara Ekuitas pada tahun 2015 dengan ekuitas pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 38,20 %.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2015- 2020

No	Tahun	Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase Belanja Aparatur	Presentase Belanja Non Aparatur
1	2015	1.111.086.296.802,00	787.798.946.278,87	88,81	41,49
2	2016	1.188.978.881.112,00	1.144.890.982.846,00	80,81	49,69
3	2017	1.081.218.988.489,00	1.460.069.881.829,98	41,89	88,61
4	2018	1.026.188.089.790,00	1.864.882.191.804,87	42,98	87,07
5	2019	1.068.166.809.979,00	1.461.987.108.768,88	42,22	87,78
6	2020	1.202.647.086.869,00	1.487.888.782.978,61	48,21	84,79

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah 2020

Becara umum persentase belanja aparatur (gaji dan tunjangan aparatur) dari tahun 2015 sampai dengan 2020 cenderung mengalami penurunan yaitu dari 88,81% pada tahun 2015 menjadi 48,21% pada tahun 2020.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Tengah ditinjau berdasarkan surplus ataupun deficit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi deficit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Tabel berikut menunjukkan analisis pembiayaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran pembiayaan daerah, dan surplus/ deficit ril.



Defisit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SilPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah.



Tabel 3.10
Defisit RII Anggaran 2015-2020

Detail	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	2.312.033.322.890,33	2.328.062.104.812,27	2.349.273.326.771,12	2.474.208.243.280,00	2.583.349.305.628,27	2.421.322.158.821,02
Belanja						
Belanja Swasta	1.289.888.212.081,00	1.274.251.709.289,00	1.451.288.228.819,00	1.289.887.281.280,00	1.289.100.512.794,00	1.409.870.285.428,00
Pembayaran	-	88.287.787.128,00	-	1.289.288.288,00	1.289.288.288,00	18.288.727.288,00
Defisit/Rugi/Rol	102.741.817.800,33	104.480.228.061,73	104.198.032.067,80	26.142.782.802,02	32.743.933.286,02	104.309.873.600,00

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 3.11
Komposisi Pemutup Defisit RII Anggaran

Detail	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran		881.288.121.818,71	187.281.288.287,88	187.141.288.288,00	128.812.878.288,00	881.212.888.878,00
Teknik Anggaran Berkelebihan		88.287.787,00				
Pembiayaan Hibah/Insentif dari Pembiayaan Lain					1.288.812.288,00	
Pembiayaan Pembiayaan Lain		104.198.032.061,73	187.281.288.287,88	104.141.288.288,00	141.284.888.288,00	104.198.032.061,73
Saldo Lebih Pembiayaan Teknik Berkelebihan		187.281.288.287,88	104.141.288.288,00	128.812.878.288,00	141.284.888.288,00	187.281.288.287,88

Sumber data: LRA APBD Kabupaten Lampung Tengah



Tabel 3.12
Realisasi Dina Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari RTR	Rp	% dari RTR	Rp	% dari RTR	Rp	% dari RTR
1	Jumlah RTR	107.430.000.000		93.171.104.000		100.000.000.000		99.910.000.000	
2	Saluran pemerintah	10.000.000.000	9,36%	110.700.000.000	119,75%	1.100.000.000	0,93%	0.071.000.000	0,11%
3	Saluran pemerintah sara	- 100.170.000.000	-94,21%	- 60.000.000.000	-64,50%	- 22.014.072.400	-21%	- 10.000.000.000	-10,10%
4	Saluran pemerintah sara dan pemerintah sara yang ada	- 10.000.000.000	-9,36%	-100.000.000.000	-108,00%	- 20.000.000.000	-19%	- 10.000.000.000	-10,10%
5	Saluran pemerintah sara dan pemerintah sara yang ada	100.170.000.000	94,21%	107.000.000.000	114,67%	110.000.000.000	102%	100.000.000.000	102,00%
6	Saluran pemerintah sara dan pemerintah sara yang ada	100.170.000.000	94,21%						
7	Saluran pemerintah sara dan pemerintah sara yang ada	100.170.000.000	94,21%						
8	Saluran pemerintah sara dan pemerintah sara yang ada	100.170.000.000	94,21%						
9	Saluran pemerintah sara dan pemerintah sara yang ada	100.170.000.000	94,21%						
10	Saluran pemerintah sara dan pemerintah sara yang ada	100.170.000.000	94,21%						

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendapatan memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk menghasilkan informasi jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dan rencana penggunaannya dalam membiayai prioritas pembangunan daerah.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, meliputi:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dilaksanakan melalui:
 - a) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e) Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
 - f) Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD online, e-PAD, Tapping Box serta kerjasama pembayaran on line dengan toko modern;
 - g) Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
 - h) Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
 - i) Melaksanakan pengawaran perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
 - j) Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (tax clearance) yang mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Lampung Tengah;
 - k) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

- 1) Melaksanakan pemutakhiran basis data PPS P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.
- (2) Dana Perimbangan, dilaksanakan melalui:
 - a) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah
 - b) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah
 - c) Penyiapan data base yang akurat sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan usulan DAK.
- (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dilaksanakan melalui:
 - a) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan bagi hasil pajak;
 - b) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pemerintah pusat untuk mendapatkan dana hibah.

3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Tengah diarahkan untuk:

1. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat;
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kampung/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten;
8. Menyesuaikan Belanja pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah;

3.3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pengelolan pembiayaan daerah meliputi:

- 1) Pada posisi penerimaan daerah, ditempuh melalui kebijakan:
 - a) Sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA)
 - b) Pencairan Dana Cadangan;
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
 - g) peraturan perundang-undangan.
- 2) Pada posisi pengeluaran daerah, ditempuh melalui kebijakan:
 - a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b) Penyertaan Modal Daerah;
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau;
 - e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.



Tabel 3.18
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2023-2028
Kabupaten Lampung Tengah

Waktu	Uraian	Perkiraan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0	REKAPITULASI DAERAH							
4.1	REKAPITULASI JALUR DAERAH (JAD)		100.812.104.248	204.612.727.822	316.876.881.388	329.879.284.221	212.180.222.171	286.287.822.122
4.1.01	Bahan Bakar	Da	27.261.728.288	52.221.124.212	52.221.222.222	124.762.222.222	111.245.222.222	117.712.222.222
4.1.02	Bantuan Daerah	Da	0.222.222.222	0.221.222.222	12.221.222.222	11.221.222.222	11.221.222.222	12.222.222.222
4.1.03	Biaya Pengawasan Keuangan Daerah yang Dipertahankan	Da	7.221.222.222	7.221.222.222	0.221.222.222	0.221.222.222	0.221.222.222	0.222.222.222
4.1.04	Layanan P2D yang Baru	Da	80.124.222.222	22.111.222.222	22.221.222.222	124.221.222.222	111.221.222.222	117.221.222.222
4.2	REKAPITULASI TRANSFER		2.122.124.221.222	0.222.222.222.222	0.221.222.222.222	0.222.222.222.222	0.222.222.222.222	0.222.222.222.222
4.2.01	Dana Transfer Keperwakilan Kantor	Da	2.222.124.221.222	0.222.222.222.222	0.222.222.222.222	0.222.222.222.222	0.222.222.222.222	0.222.222.222.222
4.2.02	Dana Transfer Keperwakilan Kantor	Da	112.222.222.222	122.222.222.222	122.222.222.222	122.222.222.222	122.222.222.222	122.222.222.222
4.4	REKAPITULASI DAERAH YANG BARU		212.212.222.212	222.222.222.222	222.222.222.222	222.222.222.222	222.222.222.222	242.222.222.222

[illegible]



NO	KELOMPOK	KELOMPOK	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.1	KELOMPOK TANAMAN		20.000.000.000	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00
1.1.01	Bekas Tanah Tanaman		20.000.000.000	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00	20.000.000.000.00
1.1	KELOMPOK TANAMAN		188.882.212.222	178.888.121.121.00	168.888.188.827.88	158.722.222.827.12	151.888.271.812.80	142.722.288.782.80
1.1.01	Bekas Tanah Tanaman	8%	1.721.272.222	16.221.221.271.00	15.722.172.221.00	11.222.722.227.12	11.222.121.212.80	10.122.222.227.00
1.1.02	Bekas Tanah Tanaman	8%	188.882.212.222	168.778.812.121.00	157.778.888.827.88	148.888.888.827.12	141.722.121.812.80	131.222.221.227.00
	Jumlah Bekas Tanah		3.442.188.882.122	3.488.812.122.121.78	3.712.221.221.812.12	3.212.222.222.712.80	3.222.222.222.712.80	3.222.222.222.712.80
	Tanah Bekas Tanah		18.882.172.222	18.882.222.121.00	18.882.222.172.12	17.122.271.222.12	16.122.121.227.00	15.222.221.227.00
2	KELOMPOK KELOMPOK							
2.1	KELOMPOK KELOMPOK		22.882.172.222	122.272.222.222.00	122.272.222.272.12	122.222.222.122.12	122.222.222.122.00	122.222.222.122.00
2.1.01	Bekas Tanah Tanaman		22.882.172.222	122.272.222.222.00	122.272.222.272.12	122.222.222.122.12	122.222.222.122.00	122.222.222.122.00
	Bekas Tanah Tanaman		22.882.172.222					
2.2	KELOMPOK KELOMPOK	8		122.272.222.172	122.222.222.122	122.222.222.122	122.222.222.122	122.222.222.122
2.2.01	Bekas Tanah Tanaman			122.272.222.172	122.222.222.122	122.222.222.122	122.222.222.122	122.222.222.122
2.2.02	Bekas Tanah Tanaman							
	Bekas Tanah Tanaman		22.882.172.222	122.272.222.122	122.222.222.122	122.222.222.122	122.222.222.122	122.222.222.122
	Bekas Tanah Tanaman							



Revisi	Saldo Awal	Saldo Akhir	2019	2020	2020	2020	2020	2020
	TOTAL 2020		3.447.048.000,00	3.710.825.428.000,79	3.708.240.382.270,10	3.388.817.805.000,00	3.904.810.882.186,07	3.976.418.331.077,79

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah, menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah setiap tahunnya diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 5%, sehingga dengan asumsi peningkatan tersebut, maka pendanaan Pembangunan daerah 5 tahun Kedepan yaitu tahun 2021-2026 hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah, yaitu:

1. Proyeksi tahun 2021 sebesar Rp 2.564.207.560.185,00,-
2. Proyeksi tahun 2022 sebesar Rp 2.624.727.005.566,00,-
3. Proyeksi tahun 2023 sebesar Rp 2.686.918.604.564,00,-
4. Proyeksi tahun 2024 sebesar Rp 2.750.836.888.488,00,-
5. Proyeksi tahun 2025 sebesar Rp 2.816.546.673.677,00,-
6. Proyeksi tahun 2026 sebesar Rp 2.884.103.164.944,00,-

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Bisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja wajib dan mengikat, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.



Tabel 3.14
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanaai Pembangunan Daerah
Kekayaan Lampung Tengah

Uraian	PENDAFT (Rp. milyar)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan	2.004.207.000.000,00	2.004.727.000.000,00	2.030.913.000.000,00	2.730.223.000.000,00	2.310.340.070.000,00	2.236.102.100.000,00
Pendapatan Pembangunan	22.922.172.000,00	22.761.000.000,00	27.000.000.000,00	22.201.000.000,00	72.000.000.000,00	72.001.000.000,00
Netto PENDAFT	2.027.100.000.000,00	2.026.913.000.000,00	2.734.000.000.000,00	2.918.000.000.000,00	2.937.000.000.000,00	2.936.913.000.000,00
Modal Kekayaan						
Modal dan modal Pembangunan	1.000.000.000.000,00	1.072.000.000.000,00	1.712.000.000.000,00	1.700.000.000.000,00	1.707.000.000.000,00	1.999.000.000.000,00
KAPASITAS RILL KEKAYAAN DAERAH	973.410.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	1.100.000.000.000,00

Sumber data: BPS Kota

Jumlah Kapasitas Fill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dalam membiayai:

- a. Rencana Alokasi Prioritas I, yakni berkaitan dengan Tema atau Program Unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagai mana diamanatkan didalam RPJMD, dan amanat kebijakan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan 20% dan Kesehatan 10%, penanggulangan Kemiskinan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urutan wajib pelayanan dasar. Selain itu program prioritas I ini berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berakala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi - misi Daerah serta diprioritaskan pada belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Rencana Alokasi Prioritas II, yakni berkaitan dengan program unggulan ditingkat Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing Segmentasi Masyarakat yang dilayani, sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.
- c. Rencana alokasi prioritas III, yakni dialokasikan untuk belanja-belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer seperti belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan, serta belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa. Pengalokasian pada prioritas III mendahulukan pemenuhan Dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.



Tabel 3.12
Rencana Penggunaan Kapasitas Rili Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

No	Uraian	Rencana 2020					
		2020	2020	2020	2020	2020	2020
1	Revisi dan penyempurnaan anggaran	276.115.471.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Proses (Kantor Kecamatan Lampung)	180.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
3	Proses II	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4	Proses III	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

BAB IV

PERMASALAHAN

DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah disajikan pada Bab 2 yang diuraikan menurut permasalahan pokok pembangunan daerah sebagai masalah yang bersifat makro bagi daerah untuk dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan setiap urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat dengan tujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.1.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Belum tercapainya program wajib belajar 12 tahun (82,38%);
- 2) Rendahnya rata-rata lama sekolah (7,57%);
- 3) Masih kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan;
- 4) Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
- 5) Masih kurangnya partisipasi Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan anak berkebutuhan khusus;

- 6) Belum semua SD terpenuhinya persyaratan Akreditasi (3,4 persen) dan Sekolah Menengah Pertama (4,9 persen).

2. Kesehatan

Permasalahan dibidang urusan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan belum meratanya distribusi ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas di setiap fasilitas layanan kesehatan;
- 2) Masih rendahnya puskesmas dengan jumlah nakes yang sesuai standar;
- 3) Angka kematian ibu dan anak yang relatif masih tinggi;
- 4) Masih Rendahnya perilaku hidup sehat di masyarakat;
- 5) Kasus kematian ibu dan kematian bayi relatif masih tinggi, Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor-faktor lainnya;
- 6) Masalah gizi balita yang masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah gizi buruk dan gizi kurang, stunting (pendek) merupakan masalah banyak terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan bergizi, kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat;
- 7) Tingginya angka kecacatan akibat penyakit menular terutama penyakit berbasis lingkungan (DSD, Tb, Malaria dll);
- 8) Tingginya angka kejadian penyakit tidak menular (PTM) terutama hipertensi, Diabetes, jantung, dan paru;
- 9) Prosentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan yang masih rendah;
- 10) Akses dan mutu layanan kesehatan yang masih rendah (Ketersediaan dan Akreditasi Fasilitas kesehatan).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

- 1) Masih belum optimalnya kondisi jalan mantap;
- 2) Belum optimalnya kondisi jaringan irigasi;
- 3) Belum optimalnya penyediaan air minum bagi masyarakat;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan kawasan kumuh;
- 5) Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
- 6) Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
- 8) Masih belum optimalnya ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah;

- 9) Masih belum optimalnya infrastruktur daerah;
- 10) Pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomian masyarakat.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan pada bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah:

- 1) Belum optimalnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni;
- 2) Masih kurangnya penyediaan sarana, prasarana dan utilitas dalam lingkungan perumahan dan permukiman;
- 3) Terdapat wilayah permukiman kumuh dan daerah potensi tumbuhnya permukiman dan perumahan kumuh;
- 4) Masih kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau dalam lingkungan perumahan dan permukiman;
- 5) Minimnya akses air bersih dan masih kurangnya prasarana sanitasi dalam lingkungan perumahan dan permukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- 1) Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda rendah dan rendahnya penegakan perda oleh petugas;
- 2) Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda masih rendah;
- 3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban dilingkungannya;
- 4) Belum optimalnya koordinasi antar OPD dan instansi vertikal lainnya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Masih tingginya angka gangguan keamanan dan kriminalitas;
- 6) Masih tingginya potensi konflik sosial di masyarakat;
- 7) Kurangnya kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana.

6. Sosial

Permasalahan di bidang urusan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Tingginya jumlah penduduk miskin dan angka penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
- 2) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
- 3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 4) Kurangnya kemandirian potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai mitra pemerintah dalam penanganan PMKS;

- 5) Rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana bagi Lansia dan disabilitas;
- 6) Belum optimalnya penanganan bencana alam dan dampak sosialnya;
- 7) Belum optimalnya pelayanan dasar bidang sosial (SPM).

4.1.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
- 2) Rendahnya penyerapan, penempatan, dan kompetensi pencari kerja;
- 3) Rendahnya kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
- 4) Rekomendasi dan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) belum sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL);
- 5) Perlindungan tenaga kerja belum optimal;
- 6) Masih banyak perusahaan belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan;
- 7) Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

- 1) Penanganan pengaduan, trafficking, kekerasan dan sarana prasarana terhadap Perlindungan korban anak dan perempuan belum optimal;
- 2) Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 4) Belum optimalnya penerapan regulasi pro gender dan perlindungan anak;
- 5) Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat;
- 6) Indeks pemberdayaan gender (IDG) relatif masih rendah dibanding dengan Kabupaten lain;
- 7) Belum optimalnya mengembangkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATEM).

3. Pangan

Permasalahan di bidang urusan pangan:

- 1) Masih timpangnya ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan;

- 2) Pola konsumsi masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (BISBA);
- 3) Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang baik dan bermutu;
- 4) Masih rendahnya tingkat keamanan pangan segar;
- 5) Belum optimalnya diversifikasi panganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis pangan lokal.

4. Pertanian

Permasalahan di bidang urusan pertanian:

- 1) Masih adanya kasus konflik pertanian antara masyarakat dan Negara terkait tanah negara.
- 2) Masih adanya kasus konflik pertanian di masyarakat.
- 3) Masih adanya tanah yang belum bersertifikat.
- 4) Masih terdapat tanah terlantar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
- 5) Terdapat tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang urusan Pertanian di Kabupaten Lampung Tengah:

- 1) Menurunnya kualitas air pada sumber-sumber air;
- 2) Masih tingginya kerusakan lingkungan dan banyaknya lahan kritis;
- 3) Menurunnya kualitas lingkungan pada wilayah DAS
- 4) Masih tingginya pencemaran air sungai,
- 5) Belum optimalnya pengelolaan limbah padat, limbah cair, emisi udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh berbagai sektor
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan Limbah
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan;
- 8) Masih kurangnya kuantitas dan belum optimalnya fungsi ruang terbuka hijau;
- 9) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan pertampahan berbasis masyarakat melalui penerapan pola 3R (*reduce, reuse, recycle*) dari hulu ke hilir secara efektif dan terpadu;
- 10) Masih rendahnya cakupan pelayanan pertampahan;
- 11) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan pertampahan terpadu (TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)
- 12) Masih rendahnya upaya pengurangan sampah pada sumbernya;

- 13) Belum terdiedinya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 14) Belum terdiedinya regulasi (peraturan bupati) mengenai persampahan;
- 15) Belum terdiedinya regulasi di tingkat daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
- 16) Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- 17) Belum optimalnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
- 18) Belum terdiedinya SDM fungsional pengendali dampak, pejabat pengawas, dan PPNS lingkungan hidup.
- 19) Belum optimalnya pengelolaan air bersih dan sanitasi layak di kawasan permukiman.
- 20) Permasalahan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri rumah tangga.
- 21) Masih rendahnya pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah.
- 22) Masih rendahnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STEM).
- 23) Masih rendahnya IPAL Komunal.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan di bidang urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Belum semua penduduk memiliki e KTP berbasis NIK dan kepemilikan KTP Tunggal dan dokumen kependudukan lainnya (kartu identitas anak, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga).
- 2) Belum optimalnya data base kependudukan untuk data dasar pembangunan dengan data kependudukan instansi lainnya.
- 3) Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas (ahli informatika dan teknologi/IT).
- 5) Belum maksimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian petugas pelayanan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan KK) di tingkat Kecamatan (petugas pelayanan/operator berstatus pegawai kecamatan/bukan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

- 6) Terbatasnya blangko KTP elektronik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Lampung Tengah:

- 1) Minimnya sarana dan prasarana di perdesaan;
- 2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
- 3) Belum optimalnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
- 4) Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;
- 5) Belum optimalnya regulasi penggunaan dana kampung.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah:

- 1) Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi;
- 2) Kualitas kesertaan ber-KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB, tingkat kemandirian ber-KB dan rata-rata kawin pertama wanita masih rendah;
- 3) Jumlah drop out (DO) kesertaan ber-KB masih tinggi;
- 4) Rasio jumlah penyuluh KB berbanding jumlah desa/kelurahan belum ideal (44.80%);
- 5) Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang ber-KB dengan presentase 1,25%;
- 6) Belum maksimalnya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi ke faskes dan masyarakat;
- 7) Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah maupun di luar sekolah.

9. Perhubungan

Permasalahan di bidang urusan Perhubungan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan belum memadai;
- 2) Penataan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan belum optimal;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi belum optimal;
- 4) Jumlah aparatur perhubungan yang memiliki kompetensi dibidang perhubungan masih kurang;
- 5) Disiplin pengguna jalan dan pemahaman keselamatan lalu lintas dan angkutan masih rendah;

- 6) Pelayanan jasa sektor perhubungan belum optimal;
- 7) Masih rendahnya angkutan umum daerah dan biro jasa pariwisata yang menuju destinasi wisata.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi belum optimal;
- 2) Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
- 3) Belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi yang ada di SKPD dan Desa;
- 4) Kualitas sumberdaya manusia belum memadai;
- 5) Regulasi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK belum maksimal;
- 6) Masih minimnya jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan dibidang urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
- 2) Masih rendahnya pemahaman tentang perkoperasian;
- 3) rendahnya kapasitas SDM koperasi;
- 4) masih rendahnya pengelolaan UKM (tradisional);
- 5) Masih belum optimalnya daya saing produk;
- 6) Rendahnya produktivitas UKM;
- 7) Masih belum optimalnya jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil;
- 8) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan;
- 9) Masih rendahnya akses UMKM ke layanan keuangan;
- 10) Masih belum optimalnya penyediaan tempat usaha bagi pedagang kreatif;
- 11) Masih minimnya kegiatan sosialisasi pelatihan industri kecil kreatif.

12. Penanaman Modal

Permasalahan di bidang urusan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung investasi;
- 2) Belum adanya kepastian ruang untuk pelaksanaan investasi;
- 3) Belum tersedianya rencana detail tata ruang yang telah memiliki aspek legal;

- 4) Masih terbatasnya studi kelayakan penanaman modal yang berkualitas untuk ditawarkan kepada investor;
- 5) Alih fungsi lahan untuk aktivitas penanaman modal;
- 6) Promosi investasi yang belum optimal;
- 7) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- 8) Belum adanya persepsi yang sama antara SKPD dalam pelayanan perizinan;
- 9) Belum optimalnya perencanaan terhadap potensi suatu daerah untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang urusan Kepemudaan Dan Olahraga di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang mandiri dan kreatif dalam berbagai aktifitas;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda baik secara individu maupun kelembagaan;
- 3) Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana olahraga masyarakat;
- 4) Terbatasnya pembinaan atlet;
- 5) Masih rendahnya kegiatan lomba tingkat kabupaten yang diselenggarakan pemerintah daerah.

14. Statistik

Permasalahan di bidang urusan Statistik di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data/ statistik daerah;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal;
- 3) Belum adanya e-database sebagai informasi pembangunan daerah;
- 4) Masih rendahnya tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data statistik;
- 5) Masih minimnya jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.

15. Persandian

Permasalahan di bidang urusan Persandian di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Belum optimalnya tata kelola persandian dalam penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya persandian;
- 3) Belum optimalnya operasional pengamanan persandian;

- 4) Belum optimalnya pola hubungan persandian antar organisasi perangkat daerah.

16. Kebudayaan

Permasalahan di bidang urusan Kebudayaan di Kabupaten Lampung

Tengah:

- 1) Belum optimalnya pelestarian seni budaya daerah;
- 2) Belum optimalnya pelestarian/ pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya;
- 3) Belum Optimalnya pendataan dibidang kebudayaan;
- 4) Belum Optimalnya pembinaan terhadap sanggar seni.

17. Perpustakaan

Permasalahan dibidang urusan Perpustakaan di Kabupaten Lampung

Tengah adalah:

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan;
- 2) Kurangnya tenaga pustakawan yang ahli di seluruh perpustakaan;
- 3) Belum optimalnya promosi dan publikasi dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat;
- 4) Akses layanan perpustakaan belum optimal;
- 5) Belum optimalnya perpustakaan kampung.

18. Kearsipan

Permasalahan dibidang urusan Kearsipan di Kabupaten Lampung

Tengah adalah:

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- 2) Masih rendahnya sumber daya pengelola kearsipan;
- 3) Penyelamatan Arsip bernilai sejarah masih belum optimal;
- 4) Pengelolaan Kearsipan sesuai standar baku masih rendah.

4.1.1.3 Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Permasalahan dibidang urusan Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura) adalah:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani gurem;
- 2) Masih terbataanya SDM Pertanian serta rendahnya Pengetahuan Petani;
- 3) Belum optimalnya produksi pertanian;
- 4) Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
- 5) Belum optimalnya infrastruktur pendukung pertanian;
- 6) Banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian

- 7) Pemanfaatan teknologi pertanian untuk mendukung pertanian masih minim.

Permasalahan di bidang urusan Pertanian (Peternakan):

- 1) Masih rendahnya skala usaha ekonomis masyarakat peternak;
- 2) Pengelolaan usaha peternakan masih bersifat tradisional;
- 3) Belum optimalnya kemampuan manajemen usaha peternak baik dalam proses produksi maupun pasca produksi;
- 4) Tidak meratanya ketersediaan sumber pakan hijauan ternak;
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular.

Permasalahan di bidang urusan Pertanian (Perkebunan):

- 1) Belum maksimalnya pengolahan hasil perkebunan;
- 2) Masih rendahnya hasil olahan hasil perkebunan sumberdaya lokal;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan kelompok tani sektor perkebunan.

2. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang urusan Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap;
- 2) Belum profesionalnya pengelolaan kelembagaan kelompok tani ikan dan nelayan serta unit usaha bersama;
- 3) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dan nelayan;
- 4) Masih rendahnya aksesibilitas pembudidaya ikan dan nelayan terhadap permodalan serta tata niaga pasar;
- 5) Belum optimalnya produksi dan produktivitas hasil perikanan.

3. Pariwisata

Permasalahan di bidang urusan Pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Masih belum optimalnya dukungan infrastruktur;
- 2) Kurangnya pemahaman SDM wisata tentang sapta persona wisata serta kurangnya SDM wisata;
- 3) Ketidapan destinasi pariwisata yang belum optimal;
- 4) Kurang optimalnya promosi wisata dan budaya berbasis digital yang dilakukan daerah.

4. Perdagangan

Permasalahan di bidang urusan Perdagangan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Masih terbatasnya kemampuan pengelola pasar;

- 2) Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen;
- 3) Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern;
- 4) Masih rendahnya system pemasaran produk hasil olahan lokal;
- 5) Masih belum optimal pelaksanaan standarisasi serta pengawasan produk;
- 6) Kurang stabil fluktuasi harga pada situasi tertentu;
- 7) Masih rendahnya standar pelayanan sarana prasarana perdagangan.

5. Perindustrian

Permasalahan di bidang urusan Perindustrian di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Masih belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
- 2) Masih belum optimalnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan pengankaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbataanya akses ekspor.
- 3) Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan;
- 4) Belum adanya sinergi antara IKM dan industri menengah besar/rendahnya IKM sebagai pemasok IMB;
- 5) Masih rendahnya pengawasan industri yang ramah lingkungan;
- 6) Masih belum optimal pengelolaan sumberdaya lokal/unggul menjadi produk olahan yang unggul;
- 7) Masih rendahnya kualitas produk IKM unggulan.

7. Transmigrasi

Permasalahan pada urusan Transmigrasi di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Terbataanya keterampilan para transmigran lokal dalam mengolah lahan usahanya;
- 2) Adanya ketenjangan antara besarnya minat/animu masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan terbataanya quota yang tersedia di daerah penempatan;
- 3) Belum optimalnya pendataan terkait data transmigrasi.

4.1.1.4 Penunjang Urusan

1. Pengawasan

Permasalahan dibidang urusan Pengawasan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Belum optimalnya peran APIP dalam pengawasan;
- 2) Belum optimalnya penerpanan SPIP;
- 3) Sarana prasarana yang menunjang kerja masih kurang;
- 4) Keterbatasan jumlah SDM APIP (tenaga auditor masih kurang).

2. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan dibidang urusan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan;
- 2) Belum optimalnya sinkronisasi data perencanaan pembangunan antar pusat dan daerah;
- 3) Kinerja sumberdaya manusia perencana belum optimal;
- 4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan;
- 5) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pembangunan sebagai dasar perencanaan;
- 6) Belum optimalnya koordinasi, asistensi dan evaluasi monitoring, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

3. Keuangan

Permasalahan dibidang urusan Keuangan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Masih adanya aset yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah/tersertifikasi;
- 2) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan barang milik daerah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) serta sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPD);
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan asli daerah;
- 4) Belum optimalnya sumber daya manusia perpajakan.

4. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan dibidang urusan kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah:

- 1) Belum optimalnya sistem penilaian kinerja ASN;
- 2) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
- 3) Masih rendahnya pemerataan pegawai di tiap OPD;
- 4) Belum efektifnya koordinasi antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah lain dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan (setiap Perangkat Daerah yang mengirimkan pegawai atau undangan provinsi/K/L tidak menginformasikan kepada BKPSDM).

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dibidang urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Keterbatasan SDM dalam melakukan penelitian dan pengembangan;
- 2) Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah yang membutuhkan dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan.

4.1.1.5 Fungsi Lainnya Pendukung Urusan

1. Sekretariat Daerah

Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang urusan fungsi lainnya yaitu:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan rencana aksi hak asasi manusia (HAM);
- 2) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
- 3) Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- 5) Belum optimalnya pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan administrasi pembangunan;
- 6) Belum optimalnya sistem pengadaan barang dan jasa;
- 7) Belum optimalnya kerja sama daerah;
- 8) Belum optimalnya sistem perencanaan dan pelaporan di lingkup sekretariat daerah;
- 9) Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban barang dan aset milik daerah.

4.1.1.6 Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lampung Tengah:

- 1) Kesadaran pendidikan politik masyarakat masih rendah
- 2) Krisis kepercayaan terhadap pemerintah
- 3) Harmonisasi kehidupan beragama cenderung menurun
- 4) Potensi konflik terhadap ketentraman dan ketertiban masih tinggi
- 5) Pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan perda masih rendah
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan utama pembangunan yang mengemuka dan berdasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah serta permasalahan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang teridentifikasi. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang.

Perumusan isu strategis mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar, baik lingkungan internal maupun eksternal yang disebut sebagai lingkungan strategis, sebagaimana tercantum pada skema di bawah ini.



Gambar 4.1
Lingkungan Strategis Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Isu
Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Perincian penelaahan dari kondisi masing-masing isu strategis dapat diuraikan dibawah ini.

4.2.1 Telaah Isu Strategis Lingkungan Global

Lingkungan global dapat berpotensi menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peluang bagi pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Tumbuhnya perekonomian negara-negara maju dan di beberapa kawasan seperti kawasan Amerika, Eropa, Jepang, Cina, dan negara-negara emerging market lainnya juga akan mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Di sisi lain terdapat hal-hal yang harus tetap diwaspadai yaitu potensi terjadinya inflasi global, gejolak harga minyak dunia, kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah, dan lain-lain yang juga akan mempengaruhi pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Beberapa isu strategis lingkungan global yang perlu dipertimbangkan dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 diantaranya, pertama, kondisi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Kedua, peran ekonomi kawasan Asia Pasifik yang semakin penting dalam perekonomian global. Perekonomian kawasan Asia Pasifik memperlihatkan kondisi mulai membaik yang ditandai oleh permintaan domestik yang kuat, munculnya investasi swasta, dan munculnya berbagai kerjasama lintas negara di Asia Pasifik. Beberapa kerjasama tersebut diantaranya *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *East Asia Summit (EAS)*, *Trans Pacific Partnerships (TPP)*, dan *Shanghai Cooperation Organisation (SCO)*. Selain itu, juga termasuk beberapa kesepakatan-kesepakatan lain dari Pemerintah Pusat yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah.

Ketiga, adanya potensi ancaman krisis global. Krisis dan kelesuan ekonomi global yang terjadi mulai 2008 hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Fenomena keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (UE) atau biasa dikenal sebagai "Brexit" semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia. Ditambah lagi mulai tahun 2020 muncul isu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* juga sangat mempengaruhi pergerakan perekonomian global. Isu-isu global lain yang mempengaruhi perekonomian diantaranya isu terorisme global, propaganda Korea Utara-Korea Selatan, perang di kawasan Timur Tengah, dan lain-lain juga memberikan dampak terhadap kecepatan pemulihan ekonomi global.

Keempat, potensi ketidakpastian ekonomi global khususnya di Kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara tujuan ekspor Indonesia seperti Jepang, India, Tiongkok, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Singapura, Selandia Baru, dan Australia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan perekonomian. Saat ini dan dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan banyak negara mengalami tekanan ekonomi. Kondisi ini tentunya akan berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia dan juga akan mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Kelima, adanya keterbukaan pasar ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemberlakuan pasar tunggal di kawasan ASEAN melalui MEA sejak tahun 2016 memberikan peluang dan tantangan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah penduduk yang besar memberikan peluang terhadap ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten bagi Indonesia dan bagi Kabupaten Lampung Tengah. Di samping itu, kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, aliran investasi, dan aliran modal lintas batas negara juga menuntut kesiapan negara dan daerah untuk mengantisipasinya secara tepat, cepat, kompetitif.

Keenam, adanya perubahan iklim global (*global climate change*). Perubahan iklim muncul diantaranya karena proses pembangunan yang mengerampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup. Dampak munculnya perubahan iklim adalah rusaknya kelestarian ekosistem alam, kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir, longsor lahan, abrasi pantai, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 diperlukan program-program yang memungkinkan adanya proses mitigasi bencana dan penanggulangan bencana.

Ketujuh, adanya perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus batas negara. Kemampuan teknologi yang mampu menghantarkan proses globalisasi, mengintegrasikan proses perdagangan, dan menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas perlu diantisipasi dengan cara mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memanfaatkan era revolusi industri 4.0 (RI 4.0) dengan mengkombinasikan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data*, *internet of thing*, dan lain-lain dalam pembangunan ekonomi daerah.

4.2.2 Telaah Isu Strategis Terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis". KLHS juga bisa diartikan sebagai rangkaian analisa sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (PP Nomor 46 Tahun 2016). Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dimana KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD (Permendagri Nomor 7 Tahun 2018).

Tujuan dari pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Tengah ini adalah:

1. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam TPE dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

2. Meningkatkan kualitas RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam memberikan kontribusi terhadap materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan melalui:

- a. Perumusan skenario upaya tambahan dan *Business As Usual* (BAU) yang meliputi analisis isu pembangunan berkelanjutan, skenario dan target pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perumusan rekomendasi penyempurnaan pencapaian TPB pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.
- b. Peningkatan, penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.
- c. Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Hasil konsultasi publik Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen KLHS di peroleh 11 (sebelas) isu Pembangunan yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD, yaitu:

1. Terdapat permasalahan mengenai stunting.
2. Masih adanya tenaga pendidik yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.
4. Banyaknya objek wisata yang belum dikembangkan.
5. Pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomian masyarakat.
6. Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak di kawasan permukiman.
7. Permasalahan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri.
8. Ketidaksiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana.
9. Banyaknya timbulan sampah.
10. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
11. Kesetaraan gender.

Pemilihan isu strategis yang akan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam Penyusunan RPJMD dirumuskan melalui peleburan isu yang bersumber dari 4 (empat), yaitu analisis pencapaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan, isu pembangunan dari konsultasi publik, hasil capaian evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021, dan Indikator Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan hasil peleburan isu dari keempat sumber tersebut maka dihasilkan 28 isu strategis.

Tabel 4.1
Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Strategis Pilar Sosial	Isu Strategis Pilar Ekonomi
1. Menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah 2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kesehatan 3. Meningkatkan Pelayanan Dasar Bidang Sosial (SPdS) 4. Menurunkan Angka Stunting 5. Prevalensi anemia pada Ibu Hamil 6. Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 7. Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 8. Meningkatkan Pelayanan tanggap siaga kesehatan 9. Meningkatkan Pelayanan terhadap PUS belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 10. Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan 11. Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 12. Meningkatkan pelayanan KB dan alcon terhadap pasangan usia subur	1. Meningkatkan PDB Perkapita 2. Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata 3. Membangun ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah 4. Mengurangi persentase tingkat kemiskinan 5. Mengurangi Jumlah data tertinggal 6. Mengoptimalkan PAD
Isu Strategis Pilar Lingkungan	Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan
1. Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 2. Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 3. Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana 4. Mengurangi timbunan sampah perkotaan 5. Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan 6. Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah 7. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	1. Mensosialisasikan aturan hukum dan undang-undang 2. Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif 3. Meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

4.2.3 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJM Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Adapun tema pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan".

Penjabaran tema pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut adalah sebagai:

1. Berpenghasilan menengah-tinggi akan diwujudkan dengan cara (a) Transformasi struktural berjalan; (b) Produktifitas tenaga kerja meningkat; (c) Iklim investasi kondusif; dan (d) GNI per kapita USD 3.896 - USD 12.033
2. Sejahtera akan diwujudkan dengan cara (a) Kualitas hidup meningkat; (b) Perilaku disiplin dan beradab; (c) SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (d) Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil akan diwujudkan dengan cara (a) Ketimpangan menurun; dan (b) Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan akan diwujudkan dengan cara (a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung; dan (b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Adapun isu Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu untuk diperhatikan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia, yang meliputi (a) Pelayanan Dasar; dan (b) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi yang meliputi (a) Pangan; (b) Energi; (c) Pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital; dan (d) Industri manufaktur kelautan dan kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan yang meliputi (a) Sentra pertumbuhan; dan (b) Komoditas unggulan daerah pertumbuhan perkotaan
4. Pembangunan infrastruktur yang meliputi (a) Transportasi; (b) Telekomunikasi; dan (c) Sumber daya air perumahan dan pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan yang meliputi (a) Hukum dan regulasi; (b) Hankam; dan (c) Politik

Adapun arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia. Pembangunan manusia dilakukan melalui peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial; serta sumberdaya berkualitas dan berdaya saing.

2. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi diimplementasikan melalui pembangunan sektor pangan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, digital, industri manufaktur dan kelautan kemaritiman.
3. Pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan diupayakan dengan membangun sentra-sentra pertumbuhan, komoditas unggulan daerah dan pertumbuhan perkotaan.
4. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui peningkatan transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, perumahan dan permukiman.
5. Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Pembangunan ini dilakukan dengan perbaikan dan penegakan hukum dan regulasi, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan politik yang baik dan sehat.

4.2.4 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Visi pembangunan Provinsi Lampung 2005-2025 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung adalah "Lampung Maju dan Sejahtera 2025". Maju mempunyai konotasi modern atau industrialised. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan civilization (politik dan hukum). Upaya mewujudkan Visi jangka panjang Provinsi Lampung 2005-2025, dapat dilaksanakan melalui implementasi misi, yaitu (1) Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global; (2) Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; (3) Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (4) Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah; (5) Mewujudkan daerah yang asri dan lestari; (6) Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan keteraturan, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis; dan (7) Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sebagai mana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 adalah "Rakyat Lampung Berjaya". Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 yaitu (1) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai; (2) Misi-2: Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan

pelayanan publik; (3) Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas; (4) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah; (5) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan; dan (6) Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat agenda kerja utama dan sektor prioritas pembangunan yang perlu dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026. Agenda Kerja Utama dan Sektor Prioritas Pembangunan tersebut seperti tercantum pada pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Agenda Kerja Utama Berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan Dalam RPJMD Provinsi Lampung

Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
<i>Misi ke-1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman Dan Damai</i>	
Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya	1. Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan
	2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorar, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Panjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta PENTR, berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
	3. Lampung Mengaji: memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran
	4. Lampung Kaya Festival : menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kearifan serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan
	5. Lampung Menuju Bebas Narkoba
<i>Misi ke-2: Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik</i>	
Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan, melalui sistem penjurusan karir berbasis kinerja dan kompetensi (job fit assessment) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
	2. APED Rakyat Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APED untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
	3. Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation

Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
4. Pendampingan Program Pembangunan Desa	
Misi ke-3: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Dan Penyandang Disabilitas	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perempuan Berjaya : memandirikan perempuan secara ekonomi, penguatutamaan gender dan pendampingan hukum perempuan 2. Lampung Ramah Perempuan dan Anak : mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota) 3. Anak Muda Berjaya : mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja 4. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi serta memperbaiki tata kelola organisasi olahraga
Pembangunan Bidang Kesehatan	Lampung Sehat : Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
Pembangunan Bidang Pendidikan	1. Smart School : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan 2. Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK ke dunia kerja (kurikulum magang)
Misi ke-4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi Dan Produktivitas Wilayah	
Pembangunan Bidang Infrastruktur	1. Infrastruktur Lampung Berjaya : konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi 2. Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT 3. Lampung Terang Berjaya: swasembada sumber energi listrik
Misi ke-5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Perdesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan	
Pembangunan Bidang Pertanian Dan Perdesaan	1. Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas) 2. Beasiswa Mahasiswa Pertanian : mendorong minat generasi muda pada pertanian 3. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu 4. Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper) 5. Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri

Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama
	6. Nelayan Berjaya : untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak nelayan, SPBU untuk nelayan 7. Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas) 8. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)
Pembangunan Bidang Industri	1. Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 2. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi 3. Lampung Ramah usaha : menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha 4. Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan)
Misi ke-6: Menwujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama	
Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	1. Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat 2. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nuantara

4.2.5 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJMD Daerah Lain

Kabupaten Lampung Tengah secara administratif berbatasan dengan Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Pematang. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021 - 2026 juga perlu memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD daerah lain di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk membangun keterpaduan dan keterkaitan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar untuk menruekskan tujuan pembangunan daerah dan pembangunan pada tingkat yang lebih luas, yaitu pembangunan tingkat provinsi dan pembangunan nasional. Keterkaitan bisa berupa keterkaitan pada saat perencanaan, pada saat implementasi, ataupun pada saat pengawatan pelaksanaan pembangunan. Kebijakan yang dibuat daerah sekitar (daerah tetangga) dan atau kebijakan pusat terhadap daerah tetangga secara langrung maupun tidak langrung akan berpengaruh kepada pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.

Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah dari daerah sekitar (daerah tetangga) yang perlu diperhatikan dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi Pembangunan Kota Metro adalah "Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif". Adapun penekanan misi pembangunannya adalah peningkatan kualitas SDM sektor pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan good governance. Strategi dan arah kebijakan Kota Metro adalah:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan, tenaga pendidik, manajemen kependidikan, sarana prasarana, pendidikan dasar, ekstrakurikuler, pendidikan khusus, budaya baca masyarakat, akses dan mutu pelayanan kesehatan, dokter spesialis, kepesertaan PBI-JKN, kemandirian peserta KB, layanan konseling, kota layak anak, life skill kepemudaan, dan pemasyarakatan seni dan budaya;
 - b. Peningkatan industri kreatif, sinergi industri, pengembangan wisata keluarga, kualitas koperasi UMKM, perlindungan social, SDM tenaga kerja, dan ketersediaan pangan
 - c. Memantapkan kondisi transportasi jalan, jembatan, pemerataan infrastruktur, pelayanan listrik dan PJU, cakupan layanan internet SKPD s/d kelurahan, optimalisasi RTRW, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan, taman kota & rest area sebagai tujuan wisata keluarga, proteksi bahaya kebakaran, dan kecukupnagaan serta mitigasi bencana;
 - d. Optimalisasi SAKIP, pengawasan internal, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan manajemen aset daerah, arsip daerah dan sistem reward dan punishment.
2. Visi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang adalah Terwujudnya Tulang Bawang Yang Aman, Mandiri, dan Sejahtera. Adapun penekanan misi pembangunannya adalah meningkatkan kualitas kerukunan agama dan budaya, layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, perekonomian untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, good governance, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Tulang Bawang adalah:

- a. Meningkatkan ketentraman, wawasan kebangsaan, dan kehidupan beragama dan adat istiadat;
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan penduduk, kualitas hidup perempuan dan anak, kompetensi pemuda, kemandirian infrastruktur dasar, dan fasilitas dan cakupan transportasi;
 - c. Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas industri dan koperasi, kepastian investasi, destinasi pariwisata, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja;
 - d. Meningkatkan transparansi birokrasi, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, tertib administrasi kependudukan, dan partisipasi masyarakat kampung;
 - e. Meningkatkan pelestarian SDA berkelanjutan
3. Visi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing. Adapun penekanan misi pembangunannya adalah Mengembangkan SDM produktif, kreatif, dan inovatif; perekonomian daerah yang kokoh, merata, dan berkelanjutan; memperluas cakupan prasarana dan yang terintegrasi antar wilayah; good governance; kehidupan masyarakat yang religius, partisipatif, taat hukum, dan mentransformasi budaya daerah sebagai sumber energi sosial pembangunan. Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
- a. Peningkatan layanan pendidikan, layanan kesehatan, kompetensi angkatan kerja, iklim ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, kesetaraan gender, Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA), layanan kesejahteraan sosial, layanan kepemudaan, dan pembinaan prestasi olahraga;
 - b. Penguatan pangan, agroindustri, jaminan kepastian investasi, prasarana pendukung perdagangan, perlindungan Konsumen, akses permodalan, teknologi, perlindungan usaha, pemodernisasian usaha koperasi, dan destinasi dan objek pariwisata daerah;
 - c. Pemantapan jaringan transportasi, layanan infrastruktur persampahan, air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, layanan jaringan telekomunikasi dan energi, dan mengendalikan pencemaran;
 - d. Peningkatan layanan prima, pendampingan aparatur pemerintah tiyuh, tata kelola keuangan dan aset daerah, iklim investasi daerah, Sistem Merit, kesepakatan tata batas antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kabupaten sekitarnya;

- e. Peningkatan keamanan masyarakat, pengurangan risiko bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat terdampak bencana, internalisasi nilai-nilai agama dan budaya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, wawasan kebangsaan, masyarakat yang taat hukum, nilai dan norma.

4.2.6 Telaah Isu Strategis Terhadap RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 merupakan salah satu bahan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah 2011 - 2031 adalah "Terwujudnya Lampung Tengah sebagai Kawasan Agribisnis yang berwawasan Lingkungan serta mampu menggerakkan perekonomian wilayah". Kebijakan penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah 2011 - 2031 adalah:

1. Pengembangan pertanian modern; berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan didukung dunia usaha;
2. Perkuatan dan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah;
3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;
4. Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai potensi lestari;
5. Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Adapun rencana program pembangunan wilayah menurut RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011 - 2031 meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan. Penjelasan masing-masing program pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang, yang meliputi rencana pusat kegiatan, kawasan perkotaan dan perdesaan, dan rencana sistem prasarana wilayah.

a. Rencana pusat kegiatan. Adapun rencana pusat kegiatan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011 - 2031 adalah sebagai berikut:

- 1). Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKWp Kabupaten Lampung Tengah yaitu kawasan Terbagus (Terbanggi Besar, Bandar Jaya, dan Gunung Sugih) dan memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan unggulan terpadu, perdagangan dan jasa, pusat koleksi dan distribusi, permukiman perkotaan, dan sistem transportasi regional.
- 2). Pusat Kegiatan Lokal (PKL), berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Lampung Tengah yaitu PKL Kalirejo (Kecamatan Bangun Rejo dan Kecamatan Bekri), dan PKL Seputih Banyak (Kecamatan Way Seputih, Seputih Raman, Rumbia, dan Seputih Surabaya).
- 3). Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), ditetapkan di Bandar Seri Kecamatan Padang Ratu dan berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan jasa dan konservasi. PKLp Bandar Seri akan melayani beberapa kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Anak Ratu Aji, Pubian, Sendang Agung, dan Selagai Lingga.
- 4). Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). PPK di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan di empat wilayah yaitu (a) PPK Kota Gajah berfungsi pengembangan hasil pertanian, perdagangan dan jasa, serta kawasan minapolitan dan melayani Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Punggur, dan Kecamatan Trimurjo; (b) PPK Wates berfungsi sebagai pusat pengembangan tanaman bahan pangan dan buah-buahan, dan pusat pemasaran produk unggulan dan melayani Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan Bekri; (c) PPK Kurnia Mataram berfungsi sebagai pengembangan pertanian dan perkebunan, industri kecil dan rumah tangga, dan pengembangan peternakan sapi dan melayani Kecamatan Seputih Mataram; dan (d) PPK Gaya Baru I berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perkebunan, perdagangan dan jasa, dan kawasan konservasi dan melayani Kecamatan Seputih Surabaya, Bandar Surabaya, Bandar Mataram, dan Bumi Nabung.
- 5). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), ditetapkan di 13 wilayah yaitu (a) PPL Dono Arum berfungsi sebagai pengembangan peternakan sapi dan industri menengah dan melayani seluruh Kecamatan Seputih Agung; (b) PPL Sendang Mulyo berfungsi

sebagai pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan industri, dan pariwisata; (c) PPL Bangun Rejo berfungsi sebagai pengembang komoditi perkebunan, peternakan, dan kawasan industri; (d) PPL Sukobinangun berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan kering dan industri kecil dan menengah dan Kecamatan Way Seputih; (e) PPL Reno Baruki berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan dan melayani Kecamatan Rumbia; (f) PPL Eina Karya Utama berfungsi sebagai pengembangan komoditi perkebunan dan melayani Kecamatan Putra Rumbia; (g) PPL Surabaya Ilir berfungsi sebagai kawasan minapolitan, perdagangan dan jasa, serta konservasi kawasan lindung dan melayani Kecamatan Bandar Surabaya; (h) PPL Negeri Kepayang berfungsi sebagai pengembangan pertanian perkebunan, dan agribisnis/industri pengolahan dan melayani Kecamatan Pubian; (i) PPL Gedung Sari berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan permukiman pedesaan dan melayani Kecamatan Anak Ratu Aji; (j) PPL Trimurjo berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah dan kering, sentra pemasaran hasil pertanian, dan perdagangan dan jasa dan melayani Kecamatan Trimurjo; (k) PPL Tanggul Angin berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan agribisnis, serta perdagangan dan jasa dan melayani Kecamatan Punggur; (l) PPL Rukti Harjo berfungsi sebagai pengembangan pertanian lahan basah, dan pengembangan ternak besar dan melayani Kecamatan Seputih Raman; dan (m) PPL Kokumodadi berfungsi sebagai pengembangan perkebunan, peternakan, dan tanaman hortikultura dan melayani Kecamatan Bekri.

- b. Kawasan perkotaan dan pedesaan. Kawasan perkotaan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Bandar Jaya, Kalirejo, Tanjung Harapan, Bandar Seri, Kota Gajah, Watex, Kurnia Mataram, Trimurjo, dan Gaya Baru I. Sedangkan kawasan pedesaan meliputi Dono Arum (Seputih Agung), Jati Datar Mataram (Bandar Mataram), Tanggul Angin (Punggur), Nyukang Harjo (Selagai Lingga), dan Rukti Harjo (Seputih Raman).
- c. Rencana sistem prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan prasarana transportasi (darat, sungai, dan udara), sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air (lintas

wilayah, sungai, irigasi, air bersih, pengendalian banjir), sistem jaringan prasarana pertambangan, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem drainase.

2. Rencana Pola Ruang, yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari:

- a. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Lampung Tengah adalah Register 22 Way Waya ($\pm$ 8.118 Ha), Register 39 Kota Agung Utara ($\pm$ 17.647 Ha), dan Register 8 Way Rumbia ($\pm$ 5.066,72 Ha) dengan total $\pm$ 27.831,72 Ha
- b. Kawasan sempadan sungai yaitu sungai besar ($\pm$ 18.484,84 Ha) dan sungai kecil ($\pm$ 68.382,72 Ha). Selain itu kawasan sempadan irigasi primer ditetapkan sekitar 2.941.880 meter atau $\pm$ 294,19 Ha.
- c. Kawasan sempadan danau yaitu danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak, danau Telogo Rejo di Kecamatan Sendang Agung, danau Way Waya Srimulyo, Way Waya Krui, Way Tatangan I dan II, Way Muaramas di Kecamatan Kalirejo, Way Tipo Lunik, Way Tipo Belak, Way Brikaton, serta Way Ilan Belak di Kecamatan Bangunrejo dengan total luas $\pm$ 314,95 hektar.
- d. Kawasan sempadan rel kereta api dengan panjang rel kereta api 30,894 Km dan dengan luas sekitar 67,97 Ha.
- e. Kawasan rawan bencana banjir di sekitar bantaran sungai Way Seputih yang melalui sebagian besar wilayah, namun demikian kawasan yang paling rawan diantaranya adalah Kecamatan Bandar Surabaya khususnya di Kampung Cabang dan di Kecamatan Bekri.
- f. Kawasan rawan bencana tanah di sekitar kawasan hutan lindung di Kecamatan Belagel Linggga, Pubian, dan Sendang Agung.

Sedangkan kawasan budidaya menurut RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011 - 2031 meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi di Register 47 Way Terusan di sekitar Kecamatan Bandar Mataram $\pm$ 12.500 ha.
- b. Kawasan tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 107.760 hektar akan dikembangkan di Kecamatan Padang Ratu, Pubian, Sendang Agung, Trimurjo, Punggur, Kota Gajah, Seputih Agung dan Seputih Raman.
- c. Kawasan tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 70.684 hektar dan diperuntukan bagi pengembangan berupa tanaman pangan seperti padi ladang, ubi kayu, serta jagung dan tanaman palawija. Sentra pengembangan di Kecamatan Anak Tuha, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nubang, Terbanggi Besar, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, Seputih Banyak, Way Seputih,

- Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Seputih Surabaya, Bandar Surabaya, Selagai Lingga, Kalirejo, Bangun Rejo, Bekri, Bandar Mataram dan Seputih Mataram.
- d. Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 142.755 hektar ditetapkan di Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Anak Tuha, dan Kecamatan Seputih Raman.
- e. Kawasan pertanian tanaman hortikultura meliputi cabe (Kecamatan Bekri, Seputih Banyak, dan Rumbia), nenas (Kecamatan Punggur, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, dan Seputih Raman), kelengkeng (Kecamatan Padang Ratu, Terbanggi Besar, Bekri, dan Anak Ratu Aji), durian (Kecamatan Selagai Lingga, Pubian, dan Sendang Agung), jeruk (Kecamatan Bandar Mataram dan Anak Tuha), alpukat (Kecamatan Bangun Rejo), dan durian (Kecamatan Kalirejo).
- f. Kawasan pertanian tanaman perkebunan, meliputi kelapa sawit (Kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha, Pubian, Kalirejo, Sendang Agung, Bangun Rejo, Bekri, dan Way Pengubuan), kelapa (Kecamatan Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Punggur, Kota Gajah, Terbanggi Besar, Seputih Raman, Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya), perkebunan kopi dan lada (Kecamatan Selagai Lingga), tebu (Terusan Nunyai, Way Pengubuan, Terbanggi Besar dan Bandar Mataram), kakao (Kecamatan Kalirejo, Bangunrejo, Sendang Agung, Pubian, Selagai Lingga dan Padang Ratu), dan karet (Kecamatan Terbanggi Besar, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Bumi Nabung, Bandar Surabaya, Seputih Surabaya, Rumbia, Putra Rumbia, Terusan Nunyai, dan Seputih Banyak).
- g. Kawasan Peternakan, meliputi peternakan sapi, domba, ayam buras, dan ayam pedaging.
- h. Kawasan perikanan, meliputi perikanan tangkap, Budidaya Air Payau, Budidaya Air Tawar, pengolahan ikan, dan Minapolitan.
- i. Kawasan Pertambangan, meliputi Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, batubara, Minyak bumi. Jumlah sumber daya hidrokarbon (minyak dan gas) di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, adalah 503.063,06 MSTB (Million Stock Tank Barrel).

- j. Kawasan Industri, meliputi Kawasan industri skala Besar, Kawasan industri skala Menengah, dan Kawasan industri kecil. Kegiatan industri Besar dan Menengah di Kecamatan Gunung Sugih khususnya pada kawasan Ibukota Kabupaten, akan dikendalikan dan dibatasi pengembangannya. Kawasan Pariwisata, meliputi Danau Tirta Gangga, Air Terjun Curup Hilik, Air Terjun Curup Tujuh, Danau Telogo Rejo, Danau Belri, Pemancingan Ikan Way Seputih, Pemancingan Kolam Kalirejo, Gedung Nuwo Balak dan Setat Agung, Tugu Pepadun, Tugu Kopiah Mat, Makam Malik Abdullah, Gua Maria, Perkebunan dan Pengalengan Nanas, dan Perkebunan Buah-buahan.
- k. Permukiman Perkotaan, yaitu Kawasan Terbagus (Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih) akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Sementara Kalirejo, Tanjung Harapan (Seputih Banyak), dan Bandar Sari (Padang Ratu) sebagai PKL juga akan berkembang sebagai pusat permukiman perkotaan. Demikian pula pada Pusat Pelayanan Kawasan di Kota Gajah, Seputih Surabaya (Gaya Baru), Bumi Ratu Nuban (Wates), dan Trimurjo, serta Pusat Pelayanan Lokal di masing-masing ibukota kecamatan akan berkembang menjadi permukiman perkotaan.
- l. Permukiman Perdesaan, berupa bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah, MCK diluar rumah dan sebagian besar menggunakan sumur (air tanah) sebagai sumber air minum dan belum mendapat aliran listrik. Ciri permukiman bersifat mengelompok dan tersebar secara sporadis.
- m. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan meliputi zona pertempuran militer di kecamatan seputih Surabaya, zona komunikasi militer, zona belakang militer, zona latihan militer pertahanan pantai, zona latihan militer pertahanan akhir, kompleks markas Kepolisian Resort, kompleks markas komando Brigade Mobil, dan kompleks markas Kepolisian Sektor.
3. Rencana Kawasan. Kawasan Strategis untuk Kabupaten Lampung Tengah adalah:
- a. Kawasan Agropolitan. Beberapa desa di Kecamatan Terbanggi Besar yang dapat masuk ke dalam kawasan strategis agropolitan adalah Desa Terbanggi Besar, Yukum Jaya, Puncowati, Adi Jaya, Indra Putra Subing, Karang Endah, Nembah Dadi, dan Ono Harjo
- b. Kawasan Minapolitan. Kawasan Minapolitan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Kecamatan Kota Gajah Kawasan Minapolitan Patin, Kecamatan Kalirejo Kawasan Minapolitan

Gurame, dan Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang) Kawasan Minapolitan Pesisir.

- c. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp). Adapun PKWp yang dimaksud adalah Terbanggi Besar-Bandar Jaya dan Gunung Sugih (TERBAQUS) di Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Pusat Pendidikan Terpadu Berbasis Potensi Lokal yang akan dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah (Desa Suluhuban).

4.2.7 Telaah Isu Strategis Terhadap RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 tahapan ke-4. Visi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 yaitu "Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera". Adapun misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 adalah (i) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan religius; (ii) mewujudkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat; (iii) meningkatkan persatuan dan keharmonisan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan agama, budaya, politik dan hukum secara demokratis dan berkeadilan; (iv) meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan terasi; (v) mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance*; dan (vi) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 telah memprediksi bahwa pada periode lima tahunan keempat (RPJMD tahap IV tahun 2021 - 2025) strategi pembangunan daerah akan diprioritaskan pada program-program/kegiatan yang pelaksanaannya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada periode lima tahun ketiga sekaligus juga bertujuan untuk memacu dan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2021-2026 harus mempedomani RPJPD Tahun 2005 - 2025 ini. sehingga visi, misi, strategi, dan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2021 - 2025 adalah sebagai salah satu upaya untuk pencapaian visi jangka panjang dalam RPJPD Tahun 2005 - 2025 tersebut.

Arah Pembangunan Daerah jangka panjang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang perlu dipedomani dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan religius. Pembangunan kualitas SDM diarahkan pada peningkatan kualitas berbagai aspek yaitu:
 - a. Aspek pendidikan, dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, nilai rata-rata kelulusan ujian nasional, daya tampung sekolah, angka melek huruf dan teredainya sarana/prasarana pendidikan.
 - b. Aspek kesehatan, dengan indikator usia harapan hidup, angka kematian ibu dan bayi, status gizi balita, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, dan sarana/prasarana kesehatan.
 - c. Aspek ketenagakerjaan, dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran terbuka, perlindungan kerja, kecelakaan kerja, dan kasus ketenagakerjaan lainnya.
 - d. Aspek moralitas dan perilaku, dengan indikator beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, saling percaya, tenggang rasa dan toleransi, menjunjung tinggi hukum dan HAM.
 - e. Aspek kepemudaan dan olah raga, dengan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan dan prestasi olah raga.
 - f. Aspek pemberdayaan perempuan, dengan indikator kualitas hidup dan peran perempuan, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, trafficking dan diskriminasi perempuan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
2. Mewujudkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat. Perekonomian daerah didasarkan pada aspek:
 - a. Aspek pertanian (dalam arti luas/agribisnis) dan kelautan, diarahkan melalui: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan kelautan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana pertanian; (3) pengembangan sistem budidaya; (4) penguatan kelembagaan dan permodalan usaha tani; dan (5) peningkatan fasilitasi pemasaran hasil.
 - b. Aspek industri, diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, pengembangan industri kecil dan menengah, dan penguatan struktur industri
 - c. Aspek perdagangan dan jasa, diarahkan pada pengembangan pusat perdagangan dan jasa, penguatan sistem distribusi, penguatan lembaga keuangan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

- d. Aspek koperasi dan UKM, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi dan UKM, pengembangan struktur koperasi dan UKM, penguatan permodalan usaha, dan peran koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah.
 - e. Aspek investasi dan penanaman modal, diarahkan pada peningkatan penanaman modal (PMA/PMDN), promosi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan penyederhanaan mekanisme dan prosedur perizinan.
3. Meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keamanan masyarakat melalui pendekatan agama, budaya, politik, hukum secara demokratis dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya dilakukan melalui:
- a. Aspek pembangunan agama, yaitu agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan, dan kerukunan hidup umat beragama dan toleransi.
 - b. Aspek budaya, diarahkan pada pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur, seni dan budaya daerah.
 - c. Aspek politik, diarahkan pada kesadaran politik masyarakat, pengembangan budaya politik, dan penanaman nilai-nilai MAM.
 - d. Aspek supremasi hukum, yaitu kesadaran dan pelayanan hukum, penegakan supremasi hukum, dan menciptakan kondisi yang aman dan damai.
 - e. Aspek pengembangan nilai-nilai kebangsaan, diarahkan pada peningkatan wawasan kebangsaan, bela negara, dan rasa nasionalisme.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras dan terasi. Pembangunan infrastruktur wilayah meliputi:
- a. Pembangunan jalan dan jembatan, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, meningkatkan arus barang dan jasa, membuka daerah terisolir dan tertinggal, mempercepat laju pertumbuhan sentra-sentra produksi dan daerah pertumbuhan baru.
 - b. Pembangunan jaringan irigasi, diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas saluran irigasi dan peningkatan pengelolaan sumberdaya air.
 - c. Pembangunan perumahan pemukiman, diarahkan pada peningkatan fasilitas umum dan sarana prasarana pemukiman.
 - d. Pembangunan bidang transportasi, diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk keamanan dan kenyamanan lalu lintas.

- e. Pembangunan bidang telekomunikasi, diarahkan pada peningkatan dan pengembangan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah.
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance*, diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi masyarakat, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas SDM profesional, peningkatan pengawasan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam daerah, pengembangan obyek-obyek wisata, sumber daya energi, konservasi dan rehabilitasi, dan pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.



Tabel 4.3
Keterkaitan Ies Strategi Nasional, Provinsi, KILHS, dan Kabupaten Lampung Tengah

Ies Strategi Nasional RPJMN 2020-2024	Ies Strategi Sektor Pusat RPJMD Prov. Lampung 2019-2024	Ies Strategi Arah Pembangunan RPJPD Kab. Lampung Tengah 2020- 2025	Ies Strategi KILHS Kab. Lampung Tengah	Ies Strategi Kab. Lampung Tengah 2020-2025
- Pembangunan manusia yang meliputi (a) pelayanan dasar; dan (b) SDG berkualitas dan Berdosa Seng - Pembangunan ekonomi yang meliputi (a) Pangan; (b) energi; (c) pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital; dan (d) industri manufaktur kreatif dan berkelanjutan - Pembangunan berdaya yang meliputi (a) usaha pemerintahan; dan (b) kemadiraan unggul dalam pertumbuhan perikanan - Pembangunan infrastruktur yang meliputi (a) transportasi; (b) telekomunikasi; dan (c) Sumber daya air perikanan dan pemukiman - Pembangunan	- Pembangunan bidang pariwisata dan budaya - Reformasi birokrasi - Pembudayaan pertempuran dan perlindungan anak - Pembangunan bidang kesehatan - Pembangunan bidang pendidikan - Pembangunan bidang infrastruktur - Pembangunan bidang pertanian dan perikanan - Pembangunan bidang industri - Pembangunan bidang lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas SDG yang berdaya sang dan religius - Meningkatkan sistem agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis perekonomian masyarakat - Meningkatkan pertumbuhan dan keadilan serta keamanan masyarakat melalui pendidikan agama, budaya, gender, hukum secara komprehensif dan berkesinambungan - Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, seefisien dan aman - Meningkatkan kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab serta meningkatkan partisipasi	Riar Sosial, meliputi: - Meningkatkan persentase komisioner pembangunan peran dan fungsi lembaga - Meningkatkan pelayanan dasar bidang sosial (SDG) - Meningkatkan angka stunting - Penilaian anemia pada ibu hamil - Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif - Meningkatkan angka Harapan Hidup - Meningkatkan pelayanan terpadu tingkat kesehatan - Meningkatkan pelayanan terpadu PUS secara menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (OKLPI)	- Peningkatan kualitas infrastruktur publik - Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman - Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan - Peningkatan kualitas pendidikan dan pengangguran - Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan - Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan



Pelaksanaan yang meliputi (a) hukum dan regulasi; (b) ekonomi; dan (c) politik		maspraker dalam pembangunan sesuai prinsip-prinsip good governance. 2. Meningkatkan pengalihan sumber daya alam dan pesisiran lingkungan secara berkelanjutan, diarahkan pada pengalihan	2. Meningkatkan risiko dan tekanan di bidang pendidikan 10. Memastikan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 11. Meningkatkan pelayanan RS dan akses pelayanan kesehatan 12. Meningkatkan PDR 13. Meningkatkan PDR 14. Meningkatkan PDR 15. Meningkatkan PDR 16. Meningkatkan PDR 17. Meningkatkan PDR 18. Meningkatkan PDR 19. Meningkatkan PDR 20. Meningkatkan PDR 21. Meningkatkan PDR 22. Meningkatkan PDR 23. Meningkatkan PDR 24. Meningkatkan PDR 25. Meningkatkan PDR 26. Meningkatkan PDR 27. Meningkatkan PDR 28. Meningkatkan PDR 29. Meningkatkan PDR 30. Meningkatkan PDR 31. Meningkatkan PDR 32. Meningkatkan PDR 33. Meningkatkan PDR 34. Meningkatkan PDR 35. Meningkatkan PDR 36. Meningkatkan PDR 37. Meningkatkan PDR 38. Meningkatkan PDR 39. Meningkatkan PDR 40. Meningkatkan PDR 41. Meningkatkan PDR 42. Meningkatkan PDR 43. Meningkatkan PDR 44. Meningkatkan PDR 45. Meningkatkan PDR 46. Meningkatkan PDR 47. Meningkatkan PDR 48. Meningkatkan PDR 49. Meningkatkan PDR 50. Meningkatkan PDR 51. Meningkatkan PDR 52. Meningkatkan PDR 53. Meningkatkan PDR 54. Meningkatkan PDR 55. Meningkatkan PDR 56. Meningkatkan PDR 57. Meningkatkan PDR 58. Meningkatkan PDR 59. Meningkatkan PDR 60. Meningkatkan PDR 61. Meningkatkan PDR 62. Meningkatkan PDR 63. Meningkatkan PDR 64. Meningkatkan PDR 65. Meningkatkan PDR 66. Meningkatkan PDR 67. Meningkatkan PDR 68. Meningkatkan PDR 69. Meningkatkan PDR 70. Meningkatkan PDR 71. Meningkatkan PDR 72. Meningkatkan PDR 73. Meningkatkan PDR 74. Meningkatkan PDR 75. Meningkatkan PDR 76. Meningkatkan PDR 77. Meningkatkan PDR 78. Meningkatkan PDR 79. Meningkatkan PDR 80. Meningkatkan PDR 81. Meningkatkan PDR 82. Meningkatkan PDR 83. Meningkatkan PDR 84. Meningkatkan PDR 85. Meningkatkan PDR 86. Meningkatkan PDR 87. Meningkatkan PDR 88. Meningkatkan PDR 89. Meningkatkan PDR 90. Meningkatkan PDR 91. Meningkatkan PDR 92. Meningkatkan PDR 93. Meningkatkan PDR 94. Meningkatkan PDR 95. Meningkatkan PDR 96. Meningkatkan PDR 97. Meningkatkan PDR 98. Meningkatkan PDR 99. Meningkatkan PDR 100. Meningkatkan PDR	
---	--	--	--	--



			Manajemen (STSM) 3. Meningkatkan ketrampilan suatu daerah dalam menghadapi bencana 4. Mengurangi ancaman sampah perkotaan 5. Memantau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan 6. Meningkatkan pembinaan dan ulang sangray dan pengalasan lahan 7. Proporsi luas lahan kota yang dihutanisasi terhadap luas lahan keseluruhan Pilar Hukum & Tata Kelola Pemerintahan, meliputi: 1. Menekanisasikan etika hukum dan undang-undang 2. Meningkatkan peranatan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif 3. Meningkatkan jumlah kegiatan sertifikasi pejabat Pengelola pelayanan dan Dokumentasi (SDG)	
--	--	--	--	--

4.2.8 Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Kabupaten Tengah Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil telaahan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penetapan isu-isu strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Kabupaten Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Lampung Tengah mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2019 sebesar 3,46 %, diatas pertumbuhan ekonomi provinsi yang sebesar 3,25%, dan berada di atas Nasional (3,17%). Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan tersebut stagnan di angka 5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang dan bahkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan mencapai (-1,02%) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Masih tingginya angka kemiskinan penduduk Kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 11,82 persen, atau jumlahnya mencapai 152.280 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Lampung yang sebesar 12,34%. Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah sedikit lebih baik, namun apabila dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 9,65%, Kabupaten Lampung Tengah masih yang masih ketinggalan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 berada di posisi 8 terendah angka penganggurannya dibandingkan 14 kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung, walaupun di tahun 2020 TPT Kabupaten Lampung Tengah mengalami posisi tertinggi sepanjang 4 tahun belakangan ini.

3. Belum optimalnya kualitas pembangunan manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 terealisasi sebesar 70,16 masih dibawah IPM nasional tahun 2020

sebesar 71,94 meskipun berdasar data capaian provinsi Lampung sebesar 69,69 di tahun yang sama.

Kualitas pembangunan manusia dari sisi kesetaraan gender dapat diketahui dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pencapaian IPG di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dari sebesar 59,23 pada tahun 2017 menjadi 59,86 pada tahun 2020. Kabupaten Lampung Tengah menempati ranking ke-5 di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

4. Tingginya angka kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas memuat kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas pada tahun 2020 mencapai 4,25 kasus per 10.000 penduduk. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi.

5. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan luhuran suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi pembangunan antar wilayah di Kabupaten Lampung Tengah sampai tahun 2020 belum merata. Dengan luas wilayah wilayah mencapai 4.546 km², dan secara administratif terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 301 kampung dan 10 kelurahan, dalam hal bidang pembangunan infrastruktur jalan, dari total jalan kabupaten sepanjang 1.343,326 km, tingkat kelayakan jalan baru mencapai 61,9% pada tahun 2020 atau masih terdapat sepanjang 511,612 km jalan dalam kondisi rusak. Begitu juga dengan tingkat aksesibilitas jalan kabupaten pada tahun 2020 sebesar 86,36%.

6. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar

Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang layak, yang ditunjukkan oleh persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman di tahun 2019 adalah sebesar 88,12%. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi di tahun 2019 adalah sebesar 93,12%. Persentase rumah tidak Layak huni di Tahun 2019 adalah

sebesar 86,18%. Hal ini perlu terus diupayakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

7. Belum optimalnya indeks kualitas lingkungan hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 di Kabupaten Lampung sebesar 59,43, mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dari tahun 2019 sebesar 59,40 poin. Jika ditinjau dari komposit Indeks Kualitas Air dan Indeks kualitas tutupan lahan mengalami kenaikan akan tetapi indeks kualitas udara mengalami penurunan sebesar 2 poin dari tahun 2019 menjadi sebesar 64,35 poin. Hal ini perlu diupayakan lebih baik lagi agar indeks kualitas lingkungan hidup tersebut semakin meningkat.

8. Belum optimalnya reformasi birokrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 sudah menunjukkan adanya kemajuan diantaranya diperolehnya opini BPK atas laporan keuangan daerah kategori WTP pada beberapa tahun ini, namun demikian masih ada beberapa penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal seperti pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang masih masih kategori B (63,52 poin). Kemudian reformasi birokrasi yang belum dilakukan evaluasi secara optimal, sehingga belum diketahui hasil penilaian reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu juga menurunnya penilaian atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari kategori tinggi menjadi sedang.

Tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara tidak langsung tata kelola pemerintahan yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu terus didorong dengan penerapan reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk perbaikan kinerja aparatur melalui penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan.

Reformasi birokrasi diarahkan pada pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi baru mencapai predikat "B" nilai 63,52. Penilaian ini menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, baik pada tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Namun demikian perlu upaya peningkatan agar tidak tertinggal dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun terakhir tahun 2018 sampai tahun 2020 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Hasil ini perlu terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Pernyataan visi merupakan pandangan jauh ke depan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi di masa depan. Visi disusun dengan mempertimbangkan inisiasi, idealisme, informasi, kondisi permulaan, serta permasalahan yakni pemildiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan serta memperhatikan aspirasi atau keinginan stakeholders.

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 tahapan ke-4. Visi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025 yaitu *"Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera"*. Oleh karena itu, selain sebagai penegasan atas janji politik Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah terpilih yang harus diwujudkan, visi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 juga merupakan upaya untuk pencapaian visi jangka panjang dalam RPJPD Lampung Tengah tersebut.

Secara normatif, beberapa alasan dasar perlunya visi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Adanya kebutuhan untuk mengendalikan cita-cita institusi.

Visi pada dasarnya mencerminkan apa yang ingin dicapai. Fungsi visi dalam hal ini adalah sebagai alat kendali institusi sehingga memiliki arah yang jelas yang telah ditentukan.

2. Adanya kebutuhan mengenai arah dan fokus strategi yang jelas.

Visi akan mengarahkan seluruh jajaran institusi memiliki titik tolak dalam merumuskan misi dan tujuan organisasi secara lebih operasional.

3. Adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi kesempatan atau untuk mengatasi tantangan baru.

Visi akan mengarahkan langkah operasional dalam mengantisipasi perubahan lingkungan yang mengharuskan adanya kajian terhadap berbagai strategi untuk menghadapinya.

4. Adanya kebutuhan terhadap kesatuan akan imajinasi bersama.

Visi merupakan perekat yang menyatukan berbagai gagasan strategi yang terdapat dalam institusi sehingga menumbuhkan saling pengertian dalam merumuskan peran dan fungsi masing-masing jajaran dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai.

5. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan di masa kini bukanlah jaminan bagi keberhasilan di masa datang.

Visi akan mengorientasikan seluruh jajaran institusi untuk memiliki kesadaran strategis dalam pengelolaan rutinitas operasi sehingga dapat berpartisipasi dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan melalui pemanfaatan peluang yang muncul dari lingkungan yang terus berubah.

6. Adanya kebutuhan untuk membebaskan diri dari kendala operasional yang dihadapi masa kini.

Visi akan menstimulasi solusi strategik operatif terhadap masalah-masalah operasional setiap jajaran institusi. Hal tersebut akan memberikan arahan yang jelas terhadap masalah-masalah operasional yang dihadapi oleh seluruh jajaran institusi.

7. Adanya kebutuhan untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran institusi.

Visi akan menumbuhkan rasa kebermanaan pada setiap jajaran institusi dalam upaya untuk mencapai tujuan institusi. Hal ini akan mendorong antusiasme dan keterlibatan emosional pada segenap jajaran institusi.

8. Adanya kebutuhan untuk menjamin kesinambungan.

Visi akan memberikan pedoman bagi segenap jajaran institusi dalam aktivitas operasionalnya dalam mencapai cita-cita institusi sehingga momentum pergantian kepemimpinan kabupaten tidak memberikan kendala bagi pelaksanaan operasional rutin institusi.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, termasuk pertimbangan atas isu strategis daerah, potensi wilayah, tuntutan masyarakat, dinamika pembangunan, dan sinkronisasi dengan visi tingkatan pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan nasional), maka Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

"Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"

Visi Rakyat Lampung Tengah Berjaya pada uraian visi pembangunan tersebut dimaknakan sebagai kondisi sebagai berikut:

1. Pendidikan Berjaya

Makna Pendidikan Berjaya adalah terwujud dengan meningkatnya mutu pendidikan yang mampu menciptakan generasi cemerlang bagi pelajar, santri, dan mahasiswa.

2. Kesehatan Berjaya

Kesehatan Berjaya menunjukkan kehadiran dan kemampuan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, berbudaya, serta sehat jasmani dan rohani.

3. Pemuda Milenial Berjaya

Makna Pemuda Milenial Berjaya adalah mewujudkan generasi muda yang kreatif, inovatif, memiliki kompetensi, menguasai teknologi dalam menjawab tantangan dan peluang.

4. SIJALU Berjaya

SIJALU merupakan akronim dari *Setiap Infrastruktur Jalan Mulus*, diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadirkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan alam dan keberlanjutan (*sustainability*). Kehadiran infrastruktur yang berkualitas akan memberikan kemudahan bagi pergerakan manusia, modal, barang/jasa, dan lain-lain di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran infrastruktur yang berkualitas juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Petani Berjaya

Petani Berjaya menunjukkan kemauan, kemampuan, dan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bercirikan sebagai masyarakat agraris di Kabupaten Lampung Tengah.

6. BUNKAM Berjaya

BUNKAM merupakan akronim dari Badan Usaha Milik Kampung. BUNKAM Berjaya terwujud dengan terbentuknya BUNKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam upaya menekan angka kemiskinan.

7. Keberagaman Umat Berjaya

Makna Keberagaman Umat Berjaya diartikan sebagai kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan rasa dan situasi aman dan damai bagi masyarakat pada khususnya dan umumnya bagi para stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah dan masyarakat menjamin keamanan dan kedamaian bagi semua pihak yang sedang berada, beraktifitas, dan berusaha di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

8. Pelayanan Berjaya

Makna Pelayanan Berjaya memberikan arti kemampuan unsur pemerintah dalam menghadirkan *good governance* bagi masyarakat dan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Lampung Tengah. Segala bentuk pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan akan memenuhi standar dan unsur yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kondisi *good governance*.

5.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna 'berjaya' di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).
5. Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

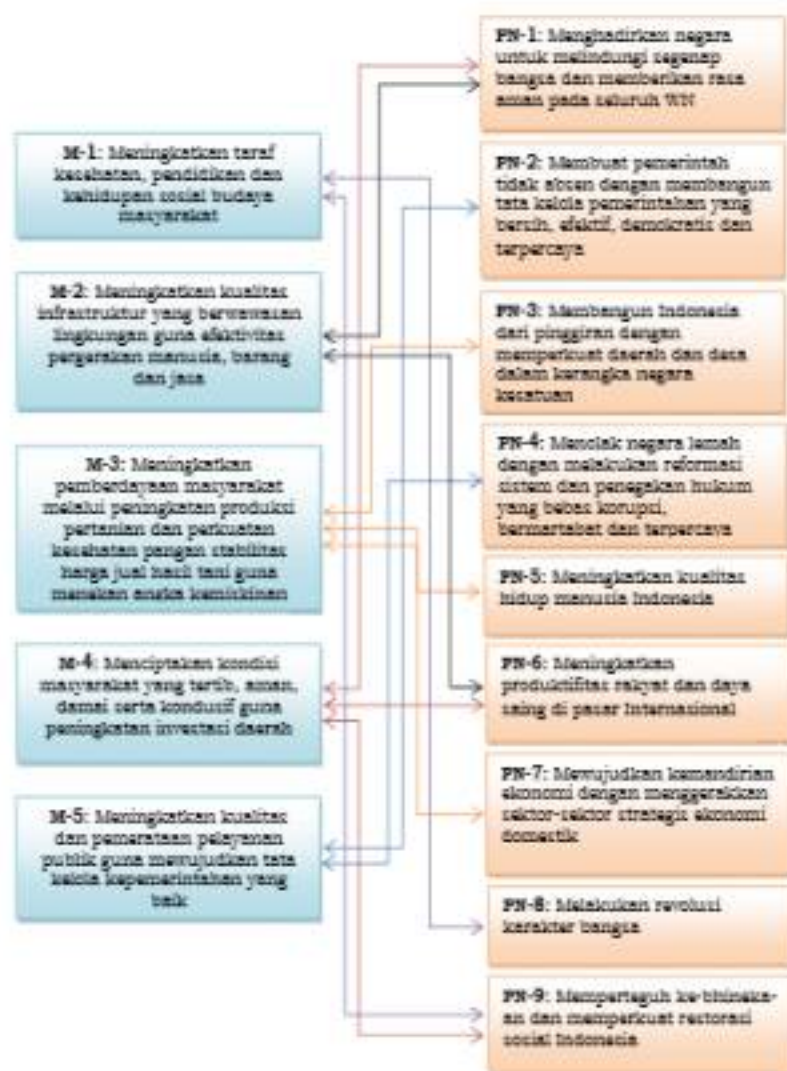
Jika ditelaah lebih dalam, uraian 5 (lima) misi Kabupaten Lampung Tengah berkaitan erat dengan agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita II) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Misi ke-1, Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, terkait dengan Prioritas Nasional 8 dan 9, dimana Misi ke-1 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat; mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas; mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau; meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, serta mewujudkan kelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Misi ke-2, Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa, terkait dengan Prioritas Nasional 1 dan 6, dimana Misi ke-2 ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah; dan mewujudkan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Misi ke-3, Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan, terkait dengan Prioritas Nasional 3, 5 dan 7, dimana Misi ke-3 ini bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkannya angka kemiskinan, mewujudkan kampung unggul berdasarkan karakteristik lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; mewujudkan daya dukung investasi bagi pembangunan kampung yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja; serta mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.



Gambar 5.1 Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Prioritas Nasional (Nawa Cita II)

Misi ke-4, Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah, terkait dengan Prioritas Nasional 1, 6 dan 9, dimana Misi ke-4 ini bertujuan mewujudkan kondisi

aman, tertib dan sentram dalam kehidupan masyarakat; menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat; dan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Misi ke-5, Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan Prioritas Nasional 2 dan 4, dimana Misi ke-5 ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas; dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, ramah, berkualitas dengan melibatkan seluruh potensi umat beragama.



Tabel 5.1

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025, Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dan Misi & Tujuan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

Misi RPJMD Kab. Lampung Tengah Tahun 2021-2025	Misi RPJPD Kab. Lampung Tengah 2005-2025	Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	Misi RPJMN 2020-2024	Tujuan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024
Misi ke-1: Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat	Misi ke-1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan religius	Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas SDM, mengembangkan upaya peningkatan anak, pemberdayaan perempuan, dan pengabdian disabilitas	Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia Misi ke-5: Kemajuan budaya yang memantapkan kepribadian bangsa	• Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Berakhlak mulia dan gunggunan kebudayaan
Misi ke-2: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeseluruhan lingkungan guna cakupan pelayanan manusia, barang dan jasa	Misi ke-4: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah secara seimbang, selaras, dan serasi	Misi ke-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan wilayah	Misi ke-4: Menegasi lingkungan hidup yang berkelanjutan	• Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Misi ke-3: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan kesehatan pangan stabilitas harga	Misi ke-3: Meningkatkan Sistem Agribisnis yang maju dan tangguh yang didukung oleh dunia usaha sebagai basis pertumbuhan	Misi 3: Membangun ketahanan sistem masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan	Misi ke-3: Mendukung ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing Misi ke-3: Pembangunan	• Mempromosikan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan • Mengembangkan



asal hasil dari guna mendian angka kemiskinan	mayoritas		yang merasa dan berkeadilan	nilai-nilai untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin pemerataan
nilai ke-4: pembangunan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, aman, damai serta kehidupan yang pemerataan, keadilan, dan kehidupan	nilai ke-3: pembangunan kehidupan dan keadilan serta keadilan mayoritas melalui pemerataan, agama, budaya, politik dan kehidupan serta pemerataan dan keadilan	nilai 1: pembangunan kehidupan yang religius (agama), berbudaya, aman, dan damai	nilai ke-5: Penguatan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan berkeadilan nilai ke-7: Penguatan bagi upaya bangsa dan keadilan serta aman pada seluruh warga	+ pembangunan stabilitas kehidupan dan keadilan pemerataan
nilai ke-6: pembangunan kehidupan dan pemerataan pemerataan guna pemerataan serta keadilan kehidupan yang baik	nilai ke-8: pembangunan kehidupan yang baik dan keadilan serta pemerataan kehidupan dalam pembangunan kehidupan yang baik Good Governance	nilai 2: pembangunan "good governance" untuk pemerataan keadilan dan pemerataan kehidupan	nilai ke-9: Penguatan pemerataan yang keadilan, keadilan, dan keadilan nilai ke-10: Penguatan pemerataan dalam kehidupan bangsa keadilan	+ pembangunan kehidupan dan keadilan pemerataan

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN 2020-2024, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021- 2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 5.2
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Lampung Tengah 2021-2028

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Tahunan					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Visi Menghasilkan Rakyat Lampung Tengah Sejahtera									
Misi ke-1. Meningkatkan Tatal Kelola, Pendidikan Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat									
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berprestasi dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,18	70,34	71,19	71,34	72,18	72,31	74,34
Sasaran 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Gender Paritas dan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,87	89,27	89,38	89,38	91,19	91,89	93,89
	Persentase angka kelahiran yang terencana pada awal nasional (2014)	Persen	17,85	17,85	21,17	21	22,17	22,14	22,14
Sasaran 2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat dan pelayanan budaya daerah	Persentase lama sekolah (2018)	Tahun	7,28	7,2	7,22	7,24	7,25	7,28	7,7
	Lama belajar sekolah (2018)	Tahun	12,82	12,82	12,84	12,82	12,85	12,87	12,88
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	11,8	11,8	12	12	12	12	17
Sasaran 3. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya kesehatan	Daya harapan hidup	Tahun	69,86	69,86	70,86	70,14	70,84	70,84	70,84
	Persentase pelayanan kesehatan	Persen	14,24	14,7	14,36	14,14	14,74	14,14	14,4



Tipean/Manajemen	Indikator Kualitas	Satuan	Rata-rata 2019-2020	Tahun Revisi					Rendahnya Nilai
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
perumahan masyarakat	Rumah layak huni	Persen	27,12	22,74	21,74	17,40	12,80	11,12	0,91
	Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan aman	Persen	88,3	88,0	81,0	83,08	84,08	83,7	88,33
	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan aman	Persen	84,0	84,08	84,08	84,08	87,08	87,07	88,10
Desain 3: Menunjukkan pelayanan fungsi rumah layak akan dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	SKA	32	70	70,2	73	73,2	70	70,2
	Indeks Kualitas Air	SKA	72	22	26	27	28	28	22
	Indeks Kualitas Tanah	SKA	48	21	24	24	26	24	22
Desain 5: Menunjukkan kualitas pemukiman yang layak dan aman	Persentase pemukiman layak dan aman	Persen	78	78	88	88	81	88	88
Tipean Menunjukkan Kualitas Lingkungan Hidup									
Desain 6: Menunjukkan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Rumah Layak Huni									
Tipean 1: Menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif melalui peningkatan nilai ekspor yang signifikan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	11,28	8,1	8,8	8,8	8,8	11,4	8,8
	Nilai Ekspor	USD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Nilai Ekspor (USD)	Juta	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28
	Nilai Ekspor (USD)	Persen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipe dan Mekanisme	Instansi/ Badan	Sektor	Revisi Awal RAP 2022	Rencana Kegiatan						Revisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
penyempurnaan kemampuan yang terampil	Persamaan Pendidikan Mulus	Pendidikan	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10
Asesmen 1: Kemampuan pengambilan keputusan sederhana dengan memahami informasi dengan menggunakan kemampuan kemampuan	Asesmen PPK	Pendidikan	22,2	22,2	22,2	21,2	20	22,2	22	22
	Pendidikan Tahap Pendidikan, Keturunan Pendidikan terhadap Pendidikan	Pendidikan	20,00	20,0	20,0	21	21,0	21,7	20	20
	Kemampuan untuk pengambilan keputusan Pendidikan	Pendidikan	5,71	10	11	11,3	10	10,3	10	10
	Kemampuan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan kemampuan dalam PPK	Pendidikan	22,24	22,0	22,2	22,7	20	21,2	22	22
Asesmen 2: Kemampuan kemampuan dengan yang kemampuan kemampuannya kemampuan kemampuannya kemampuan kemampuannya	Kemampuan kemampuannya Kemampuan	Pendidikan	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6,7	6,0	6,0
Asesmen 3: Kemampuan kemampuan dengan yang kemampuan kemampuannya kemampuan kemampuannya	Pendidikan kemampuannya kemampuan kemampuannya	Pendidikan	10,00	20	20	20	20	20	20	20
Asesmen 4: Kemampuan kemampuan dengan yang kemampuan kemampuannya	Pendidikan kemampuannya kemampuan kemampuannya	Pendidikan	6,7	10	10	10	10	10	10	10
Asesmen 5: Kemampuan kemampuan dengan yang kemampuan kemampuannya	Kemampuan kemampuannya kemampuan kemampuannya	Pendidikan	0,0000	0,7000	0,700	0,7000	0,7000	0,7007	0,0000	0,0000



Tipean/Keadaan	Indikator Keadaan	Satuan	Revisi Awal RPJMD	Tipean Keadaan					Revisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
Keadaan 6. Jumlahnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,00	73,00	73,9	74,23	74,73	75,13	75,0
Keadaan 7. Meningkatnya pemangsaan masalah kesehatan sosial	Persentase penurunan angka melek (STK) Melek 1	Persen	0,16	0	0	0	0	0	22
Tipean Menunjukkan Kekayaan Lampung Tengah Betawa									
Misi ke-1: Meningkatkan Kualitas Masyarakat yang Berkah, aman, damai serta mandiri serta Meningkatkan Kualitas Masyarakat									
Tipean 1: Menunjukkan kondisi aman, berkah dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas per 100000	Persen	0,0	0,00	0	0,70	0,0	0,00	0
	Indeks harmonisasi umat beragama	Indeks	0,14	0,14	0,14	13	13	14	13
Keadaan 1. Meningkatnya pengalasan pelayanan kesehatan sosial	Jumlah layanan kesehatan sosial	Sal	0	0	0	0	0	0	0
Keadaan 5. Meningkatnya pengalasan pelayanan kesehatan sosial	Persentase penurunan jumlah pelayanan kesehatan sosial	Persen	0,16	10	10	10	10	10	10



Tipe/Kelembagaan	Indikator Kinerja	Satuan	Revisi Awal RPJMD	Tipe/Kelembagaan					Revisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
Isuasi 1. Meningkatnya layanan masyarakat dalam penanganan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	85	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14	14,14
Tipe/Kelembagaan: Kabupaten Lampung Tengah									
Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemanfaatan Pelayanan Publik Melalui Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
Tipe/Kelembagaan: Pemerintahan yang Baik, Integritas, Akuntabilitas dan Profesionalisme pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Pelayanan Pemerintah	Pendapatan	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Indeks SP2D	Pendapatan	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Isuasi 1. Meningkatnya layanan yang baik dan akuntabel	Indeks SP2D	Pendapatan	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Indeks SP2D	Pendapatan	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Isuasi 2. Meningkatnya layanan yang cepat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Isuasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Permendagri 86/2017). Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Lampung Tengah

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1.	Misi KD-1: Meningkatkan Tingkat Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompetensi dan produktif	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta lulusan masyarakat dan pelestarian budaya daerah	Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemerataan SDG, meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan TI untuk meningkatkan kualitas pendidikan
				Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat
				Menghentikan nilai-nilai budaya lokal, kebiasaan tradisional, sejarah serta adat budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya
			Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan tingkat kesehatan	Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
			Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga	Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana dan ketahanan keluarga
			Meningkatnya keadilan dan kesteraan Gender, proteksi dan gizi pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan gender melalui pemberdayaan perempuan, pemberdayaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak melalui pemberdayaan hak anak dan perlindungan khusus anak



No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Kawasan RPJMD	Strategi RPJMD
				Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelepas, pemuda muda, dan Pemuda Muda Muda sebagai generasi agar dapat hidup sejahtera dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan atlet peningkatan kompetensi atlet berteknik, disiplin dan nilai melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga
2	Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berkeseluruhan Lingkungan Guna Efektivitas Penguasaan Manusia, Material, Metode dan Jarak	Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkeseluruhan, kerdanya saling dan berkeseluruhan lingkungan	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang berkeseluruhan lingkungan Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan Kabupaten Meningkatkan kualitas jaringan jalan Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, melalui pembangunan dan rehabilitasi Meningkatkan keselamatan masyarakat terhadap air bersih Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi berkeseluruhan Kabupaten Pengurangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rumah, dan peningkatan kualitas perumahan rumah baru Meningkatkan koordinasi rumah layak huni melalui pemberian bantuan rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan perumahan, rehabilitasi rumah layak huni bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah



No	Misi RPJMD	Tipe RPJMD	Kawasan RPJMD	Strategi RPJMD
			Meningkatkan pemanfaatan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup Meningkatkan kualitas pelayanan ruang komersial lingkungan	Meningkatkan pengelolaan SDA lingkungan hidup sesuai daya dukung daya lingkungan Meningkatkan pengelolaan sampah dengan memperbaiki area pelayanan sampah, pengelolaan sampah di TPA, dan pengurangan sampah (3R) Meningkatkan koordinasi pelayanan ruang daerah
2	Visi ke-2: Meningkatkan Pembudayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produk Pertanian dan Perikanan Kesehatan Terges Stabilitas Harga Mati Tani Guna Mendukung Komitmen	Terdapatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengembangan sektor unggulan yang mendukung penguatan komitmen yang terpadu	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan penguatan kawasan pangan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, penguatan kapasitas sumber daya petani, serta penanganan bencana pertanian Meningkatkan pengembangan lahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dan pemanfaatan teknologi pertanian, serta peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan veteriner Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pemerataan cara budidaya ikan yang baik, pendampingan pemasaran, inovasi pengolahan perikanan, dan penyediaan sarana produksi perikanan Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang sehat baik dari jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau Meningkatkan sarana distribusi perdagangan, mempermudah perijinan serta pendaliran, pelayanan perdagangan, pemerataan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong usaha skala lokal



No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Kebijakan RPJMD	Strategi RPJMD
			Menciptakan kemandirian daerah yang didukung inovasi dan pemanfaatan perdagangan asli daerah Meningkatkan kinerja koperasi dan UKM dalam memajukan perekonomian rakyat Meningkatkan iklim investasi daerah Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung Menerapkan angka pengangguran	Meningkatkan kunjungan wisata dan mengembangkan daerah tujuan wisata unggulan dan destinasi wisata baru, agrowisata dan ekowisata, serta infrastruktur pengembangan pariwisata • Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah • Meningkatkan kontribusi BUMN dalam upaya peningkatan PAD melalui pembinaan koperasi BUMN dan anak perusahaan BUMN baru Mendorong perkembangan BUMI, BUMS, dan koperasi Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi, pemasaran investasi dan kemudahan pendirian berusaha di daerah Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan UMKM, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat Kampung, pengembangan Terpadu, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah Kampung Meningkatkan inovasi dan daya saing tenaga kerja yang telah dibekali keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Meningkatkan upaya penciptaan dan penciptaan permasalahan ketenagakerjaan/tubuhan industri



No	Misi RPJMD	Tupak RPJMD	Kawasan RPJMD	Strategi RPJMD
			Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan pribadi dan sumber kesejahteraan sosial
8	Misi ke-8: Memoptimalkan Rendah Masyarakat yang Turun, Aman, Damai serta Konduktif guna Peningkatan Investasi Daerah	Memajukan kondisi aman, tertib dan tenang dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan potensi konflik sosial Memperkuat penegakan Peraturan Daerah dan meningkatkan kedisiplinan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Peningkatan kedisiplinan daerah, pendidikan politik dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan potensi konflik sosial di masyarakat Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan ketertiban umum melalui penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum, penanganan tindak pidana maupun Perkotaan, dan penanganan PPKS Meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penanganan sistem dasar penanganan bencana
9	Misi ke-9: Memajukan Kualitas dan Penguasaan Fungsi Guna Memajukan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Memajukan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional serta pelayanan publik yang berkualitas	Memajukan kinerja yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kualitas layanan keuangan Pemerintah Daerah Meningkatkan kualitas pemerintahan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas SDM pemerintah, peningkatan jabatan pusat dan daerah, perbaikan mekanisme pemerintahan serta optimalisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Meningkatkan inovasi daerah melalui penyediaan pendirian dan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan bisnis



No	Misi RPJMD	Tupak RPJMD	Kawasan RPJMD	Strategi RPJMD
			Meningkatkan kualitas layanan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan rekomendasi lembaga-lembaga daerah Pengembangan e-governance untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open government) dan pelayanan publik antara online yang andal, terintegrasi serta terjangkau Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM pemerintah Peningkatan implementasi single door didukung teknologi informasi terintegrasi Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Meningkatkan kapabilitas dan kemampuan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Meningkatkan pengelolaan kecapaian melalui dan pengembangan sarana dan prasarana layanan Peningkatan kualitas pelayanan transmigran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Lampung/Indonesia Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sesuai standar operasional prosedur	Meningkatkan kualitas layanan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, ekonomi, pembangunan dan penyelenggaraan administrasi umum melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi dan penyusunan rekomendasi lembaga-lembaga daerah Pengembangan e-governance untuk menunjang sistem pemerintahan yang terbuka (open government) dan pelayanan publik antara online yang andal, terintegrasi serta terjangkau Meningkatkan keamanan informasi melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kompetensi SDM pemerintah Peningkatan implementasi single door didukung teknologi informasi terintegrasi Meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Meningkatkan kapabilitas dan kemampuan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Meningkatkan pengelolaan kecapaian melalui dan pengembangan sarana dan prasarana layanan Peningkatan kualitas pelayanan transmigran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Lampung/Indonesia Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sesuai standar operasional prosedur

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta pemulihan perekonomian dan sosial dengan semangat Gotong Royong	Percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas infrastruktur dan SDM	Pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan	Pembangunan ekonomi kerakyatan didukung sumberdaya manusia yang berdaya saing	Penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didukung pelayanan publik yang berkualitas	Perteguhan rakyat Lampung Tengah Berjaya

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, serta pemulihan perekonomian dan sosial dengan Semangat Gotong Royong"**. Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

- Peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pengendalian stunting;
- Peningkatan kualitas infrastruktur dengan semangat gotong royong;
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan ketahanan pangan;
- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: ***"Percepatan Pemulihan Ekonomi Dan Kesehatan Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan SDM"***. Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas infrastruktur berwawasan Lingkungan;
- b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan;
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
- e. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Umat Beragama

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: ***"Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perakomian Daerah Serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan"***

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- b. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup
- c. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
- e. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat.

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: ***"Pembangunan Ekonomi Kerakyatan didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing"***

- a. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup
- b. Pengembangan potensi ekonomi unggulan dan investasi daerah
- c. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
- d. peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat.
- e. Peningkatan kondisitas wilayah dan kerukunan umat beragama

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: ***"Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas"***

- a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
- b. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan
- c. Penguatan stabilitas wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.
- d. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas
- e. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif.

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 sebagai tahun terakhir RPJMD diarahkan pada: *"Perwujudan rakyat Lampung Tengah Berjaya"*

- a. Pemantapan kebersamaan dalam mengial pembangunan dan menjaga kondusifitas wilayah.
- b. Pemantapan keunggulan dan daya saing ekonomi berbasis potensi sumberdaya lokal
- c. Pemantapan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter
- d. Pemantapan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel)
- e. Pemantapan sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

6.2.2 Isu Strategi dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis terhadap RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, maka terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti di dalam program pembangunan daerah pada dokumen RPJMD dan program perangkat daerah/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra perangkat daerah berdasarkan isu strategis sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tabel 6.3
Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Sosial

Isu Strategis	Rekomendasi
• Menurunkan Persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah	• Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. • Menyediakan kebutuhan bagi Usaha Pangan Kreatif melalui upaya • Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya. • Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat • Meningkatkan infrastruktur jalan guna memperlancar distribusi barang-barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah. • Dukungan dana dari pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait program peningkatan ekonomi masyarakat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum). • Mengoptimalkan Penataan PKL melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang kaki Lima. • Merujukkan Pasar Sehat di Kabupaten Lampung Tengah. • Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
• Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kesehatan	• Meningkatkan Infrastruktur khususnya kesehatan yang ada di Lampung Tengah. • Memberikan update data terbaru masyarakat penerima jaminan kesehatan. • Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat terkait.
• Meningkatkan Pelayanan Dasar Bidang Sosial (SPM)	• Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskades) dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. • Memberikan bantuan obat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. • Meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat disabilitas dan lansia. • Mencukupi semua kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah minimal pada setiap daerah.
• Menurunkan Angka Stunting	• Memperbarui data mengenai status gizi anak di bawah lima tahun dalam tingkat Provinsi maupun kota/Kabupaten. • Melakukan kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TIP2K). • Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah. • Melakukan Pendampingan bagi ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 5x selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi(Fe). • Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan. • Pemberian vitamin untuk anak sekolah usia 6-12 Tahun.
• Prevensi anemia pada Ibu Hamil.	• Memberikan sosialisasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. • Mengadakan program periksa kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan. • Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil. • Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada saat kehamilan untuk menurunkan komplikasi saat persalinan.

Isu Strategis	Rekomendasi
Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	- Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minia 5 (lima) kali selama masa kehamilan melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun pos kesehatan desa. - Pemberian makanan / nutrisi dan vitamin selama kehamilan guna memperbanyak produksi dan memperlancar ASI. - Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif. - Melakukan sosialisasi tentang cara mendapatkan ASI eksklusif untuk ibu hamil. - Memberikan buku saku untuk ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan tentang makanan yang harus di konsumsi agar mencukupi kebutuhan bayi.
Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	- Melakukan sosialisasi tentang cara hidup sehat kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. - Pembukaan lapangan kerja sesuai luasnya dengan melakukan kerjasama antar sektor swasta. - Pemberian pembelajaran tentang pembukaan usaha berbasis ekonomi kreatif. - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskodes), rumah sakit daerah maupun swasta. - Menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di rumah sakit swasta.
Meningkatkan Pelayanan tanggap siaga kesehatan	- Melakukan perbaruan database infrastruktur penunjang kesehatan setiap tahun. - Melakukan penambahan pegawai kesehatan agar mencukupi angka minimal pelayanan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. - Menyediakan mobil Ambulan minimal 2 mobil per 1 puskesmas, pustu maupun poskodes.
Meningkatkan Pelayanan terhadap FUS belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	- Melakukan pembinaan mengenai tata cara permintaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. - Melakukan pelatihan pelayanan berbasis teknologi demi mempermudah pendataan. - Melakukan monitoring dan evaluasi kerja anggota instansi.
Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan	- Meningkatkan infrastruktur pendidikan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. - Melakukan penambahan jumlah tenaga pengajar di setiap satuan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA) - Pemberian jaminan gaji tenaga pengajar.
Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	- Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban. - Melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal. - Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan.
Meningkatkan pelayanan KB dan alcon terhadap pasangan usia subur	Pemberian sosialisasi tentang pelayanan KB untuk pasangan muda.

Sumber data: KLMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Tabel 6.4
Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Ekonomi

Isu Strategis	Rekomendasi
Meningkatkan PDB Perkapita	- Peningkatan infrastruktur daerah. - Melakukan pelatihan tentang industri ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. - Meningkatkan pembangunan Industri maupun jasa dengan melakukan kerjasama melalui pihak swasta. - Pembukaan tempat-tempat wisata dan pembukaan lokasi kuliner untuk mendukung perekonomian warga sekitar daerah wisata.
Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata.	- Membangun tempat wisata yang ramah, aman dan nyaman. - Memperbaiki infrastruktur jalan agar mempermudah masyarakat mengunjungi tempat wisata. - Melakukan branding destinasi wisata agar dapat di kenal oleh masyarakat luar Kabupaten Lampung Tengah. - Bekerja sama dengan angkutan umum daerah atau pariwisata.
Membangun ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah	- Memperbaiki infrastruktur jalan, air bersih serta sanitasi pada setiap daerah. - Melakukan perencanaan yang optimal terhadap potensi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta. - Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang memiliki potensi.
Mengurangi Persentase tingkat kemiskinan	- Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta. - Meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia produktif. - Pemberian pelatihan softskill bagi para masyarakat usia produktif.
Mengurangi Jumlah desa tertinggal	Menyelenggarakan program-program untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi, sosial dan infrastruktur.
Mengoptimalkan PAD	- Membuat workshop tentang optimalisasi pajak yang diikuti oleh SKPD. - Melakukan pembayaran wajib pajak bagi setiap masyarakat perdagangan dan jasa Kabupaten Lampung Tengah. - Melakukan pemetaan potensi pajak pada berdasarkan data dari PDRE Kabupaten Lampung Tengah.

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Tabel 6.5
Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Lingkungan

Isu Strategis	Rekomendasi
Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	- Peningkatan infrastruktur air bersih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. - Melakukan program sumur bor pada daerah pemukiman yang sulit mendapatkan air bersih. - Melakukan sosialisasi tentang air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. - Program penanaman 1000 pohon pada daerah dengan kategori yang sulit air.

Isu Strategis	Rekomendasi
Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	- Meningkatkan IPAL komunal. - Meningkatkan PAMSIMAS. - Melakukan sosialisasi pentingnya STBM.
Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana	- Sosialisasi BPED terhadap bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat. - Pelatihan tanggap bencana oleh BPED Kabupaten Lampung Tengah. - Membangun bangunan yang kokoh tahan akan bencana setiap gempa bumi.
Mengurangi timbunan sampah perkotaan	- Membuka TPS baru sesuai dengan kesiapan lahan yang ada. - Melakukan sistem pembakaran sampah dan pembuatan pupuk dari limbah hortikultura.
Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan	- Melakukan perencanaan kesesuaian lahan. - Menggunakan tanaman yang cocok untuk ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan rencana RTH Kabupaten Lampung Tengah. - Memberikan ruang masyarakat agar dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas yang semestinya pada RTH yang akan di rencanakan.
Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah	- Membuat bank sampah di setiap kelurahan maupun kecamatan. - Melakukan pelatihan industri kreatif dengan memanfaatkan sampah yang dapat di daur ulang. - Menyediakan tempat pembuangan sampah pada setiap titik kelurahan atau kecamatan. - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah yang baik dan benar.
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan	- Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan kritis. - Pengembangan keanekaragaman hayati. - Pembuatan terasering atau sengkedan. - Pengoptimalan fungsi DAS. - Penggemburan Tanah alami dan penggunaan pupuk organik.

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

Tabel 6.6

Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Isu Strategis	Rekomendasi
Mencentralisasikan aturan hukum dan undang-undang	Mengadakan sosialisasi rutin terhadap aturan hukum dan undang-undang oleh aparaturnegara kepada masyarakat di instansi atau pusat pendidikan.
Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif	Memberi peluang kepada Perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif.

Isu Strategis	Rekomendasi
• Meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	• Memberikan kemudahan akses dan pendanaan untuk mengikuti ke pelatihan dan diklat-diklat pejabat.

Sumber data: KLHS Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

6.3.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Berdasarkan tujuan penataan ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah, kebijakan serta strategi penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pertanian modern, berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan didukung dunia usaha. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian modern dan ketahanan pangan.
 - b. Meningkatkan produksi pertanian secara luas sebagai basis perekonomian daerah dan sebagai lumbung padi Provinsi Lampung.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan Kawasan agropolitan dan minapolitan mendukung pembangunan wilayah.
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan industri rakyat, kecil dan menengah.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi, pemasaran, perdagangan dan jasa.
 - f. Menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan usaha kecil menengah.
 - g. Menumbuh-kembangkan produktivitas dan inovasi produk serta usaha baru yang berkualitas
 - h. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
- 2) Perkuatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:
 - a. Memantapkan dan meningkatkan sistem pusat pelayanan kegiatan wilayah promosi menjadi pusat kegiatan wilayah secara nasional dan sebagai pusat koleksi/distribusi skala kabupaten, atau beberapa kabupaten

- b. Meningkatkan jangkauan skala pelayanan pusat kegiatan lokal promosi menjadi pusat kegiatan lokal dan memantapkan pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal.
 - c. Mempertahankan fungsi dan luas kawasan hutan dan kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten.
 - d. Mengembangkan kawasan budidaya secara optimal sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan serta arahan peruntukkan ruangnya.
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah dan penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah.
- 3) Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumber daya air (irigasi) yang terpadu dan merata
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman secara seimbang
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, industri dan perdagangan
 - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.
- 4) Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai dengan potensi lestari. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau dan tawar;
 - b. Memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan;
 - c. Mengembangkan industri pengolahan perikanan.
- 5) Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang dan lestari
 - b. Menetapkan dan mempertahankan kawasan lindung sesuai fungsinya, serta membatasi pengembangan aktifitas budi daya pada kawasan lindung baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam
 - c. Menjaga dan mengendalikan eksploitasi dan eksplorasi penambangan bahan galian dan perambahan hutan pada kawasan lindung
 - d. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sebagai kawasan pengembangan terbatas dan mempersiapkan mitigasi bencana.
 - e. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.
 - f. Mendeliniasi serta menetapkan luasan lahan pangan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan regional dan nasional.
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan kawasan pendidikan terpadu dan meningkatkan mutu serta pelayanan pendidikan.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata dan sesuai daya dukung lingkungan.
 - d. Memberdayakan masyarakat perkotaan dan pedesaan.
 - e. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan.
- 7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:
- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

6.4 Program Pembangunan Daerah

6.4.1 Program Unggulan Kabupaten Lampung Tengah

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan upaya strategis dan perlu dikedepankan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan tersebut, meliputi:

1. Pendidikan Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berjaya adalah:
 - a. Memperluas akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM tenaga pendidik dan tenaga honorer.
 - d. Pemerataan keunggulan tempat pendidikan.
 - e. Pemberian beasiswa bagi pelajar dan santri yang berprestasi dan kurang mampu.
 - f. Bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam upaya peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Tengah.
 - g. Memberdayakan pondok pesantren serta memberikan insentif bagi guru ngaji dan marbot masjid.
2. Kesehatan Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesehatan berjaya adalah:
 - a. Mendorong peran serta kader-kader kesehatan dan bidan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan pemerataan jangkauan penanganan Kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di wilayah timur dan di wilayah barat.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan alat kesehatan serta ketersediaan obat di puskesmas.
 - d. Meningkatkan pelayanan puskesmas pembantu (Pustu).
 - e. Menjadikan Rumah Sakit Demang Sepulu Raya sebagai rumah sakit yang ramah dan berkualitas.
3. Pemuda Milenial Berjaya. Agenda Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan wadah yang menghimpun, mengakomodir ragam kreatifitas dan inovasi untuk menunjang peningkatan UMKM serta ekonomi kreatif.
4. SIJALU Berjaya. Untuk mewujudkan SIJALU Berjaya, agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat akan melakukan:
 - a. Percepatan perbaikan seluruh jalan kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun; dan

- b. Pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan/ kampung sebagai akses transportasi hasil bumi.
- 5. Petani Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan petani berjaya adalah:
 - a. Memberikan bantuan usaha bagi kelompok tani.
 - b. Memberikan bantuan bibit tanaman produktif kepada KWT, Gapoktan, dan Petani Mandiri.
 - c. Memberikan bantuan bibit peternakan kepada kelompok masyarakat.
 - d. Menjamin kelancaran distribusi pupuk bersubsidi.
 - e. Penguatan regional Sentra Produk Pertanian dengan memberikan rasa nyaman dan aman kepada petani mulai dari pra panen, saat panen, dan pasca panen.
- 6. BUMKAM Berjaya. Agenda pemerintah daerah dalam upaya mendorong peran BUNKAM di setiap Kampung sebagai poros ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan.
- 7. Keberagaman Umat Berjaya. Agenda pemerintah daerah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keberagaman umat berjaya adalah:
 - a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya serta golongan.
 - b. Meningkatkan dana bagi pengelola keamanan di kampung (Linmas dan Perangkat Kampung).
 - c. Bekerja sama dengan aparat hukum dan tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat untuk Bersama Meningkatkan Keamanan Daerah guna menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
 - d. Memfasilitasi agar terjadi komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan untuk meminimalisir potensi konflik di masyarakat.
 - e. Mendorong dan menjaga upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal.
 - f. Penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada agama, budaya, dan adat istiadat
- 8. Pelayanan Berjaya. Agenda pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan berjaya adalah:
 - a. Menjaring aspirasi dan melayani masyarakat secara langsung setiap dua hari dalam satu minggu.
 - b. Melakukan jejak pendapat dengan turun langsung dan ber Kantor di Kampung dan kecamatan yang telah dijadualkan
 - c. Memangkas rantai birokrasi demi terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat.

- d. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan (skrining) Kesehatan gratis di di Kampung dan kecamatan secara berkala.
- e. *DPNPT mobile* yang terjadwal di setiap Kecamatan.
- f. Memudahkan segala aspek perizinan usaha sampai ke tingkat kampung/kelurahan, menggratiskan perizinan SIUP dan TDP dan selesai dalam satu hari.
- g. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat guna terciptanya pemenuhan hak masyarakat dalam hal bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum.

Program unggulan daerah Kabupaten Lampung Tengah merupakan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam lima tahun kedepan dengan penjabaran kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 6.7

Penjabaran Program Unggulan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 Sebagaimana Dimutakhirkan Melalui Permendagri No. 060-3708 Tahun 2020

No	Program Unggulan	Urutan	Hierarki Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permendagri 90/2019 dan Permendagri 060-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pendidikan Berprestasi	1.01 Pendidikan	Program Penguasaan Pendidikan	Penguasaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penguasaan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Kelas Rehabilitasi Gedung/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Gedung/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Gedung/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penguasaan Alat Pemahat Tenggol Sekolah Penguasaan Peralengkapan Sekolah Penguasaan Peralengkapan Dapur Pemeliharaan Batin Bangunan Gedung dan Ruang Pemeliharaan Batin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Sektur Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sektur Pendidikan Sekolah Dasar



No	Program Unggulan	Dinas	Revisi/Amendemen Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kegiatan 90/2019 & Kegiatan 90/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pendidikan Siswa Menengah Pertama		Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Laboratorium Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Gedung/Balai Gedung Sekolah Rehabilitasi Gedung/Balai Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Gedung/Balai Ruang Guru Sekolah Rehabilitasi Gedung/Balai Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Gedung/Balai Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Gedung/Balai Laboratorium Pengadaan Peralengkapan Sekolah Pengadaan Peralengkapan Siswa Pemeliharaan Ruang Gedung Gedung dan Ruang Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Pendidikan dan Tenaga Pengelolaan bagi Siswa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



No	Program Unggulan	Dinas	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 2021 dan Perencanaan 2022 2021/2022		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pengembangan Kariir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rehabilitasi Gedung/Serai Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rehabilitasi Gedung/Serai Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pembangunan Ruten Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pemeliharaan Ruten Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Perlengkapan PAUD Pengadaan Peningkatan Sarana PAUD Peningkatan Proses Belajar PAUD Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Kariir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
			Pengadaan Pendidikan NonFormal/Kepesertaan		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kepesertaan Rehabilitasi Gedung/Serai Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan NonFormal/Kepesertaan Rehabilitasi Gedung/Serai Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kepesertaan



No	Program Unggulan	Dinas	Revisi/Status Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 2021/2022 dan Revisi/Status 2023/2024		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Rumn Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kecamatan
					Pengadaan Peningkatan Pendidikan Nonformal/Kecamatan
					Pengadaan Alat Peraga dan Tenaga Bantu Nonformal/Kecamatan
					Pengembangan Proses Belajar Nonformal/Kecamatan
					Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kecamatan
					Pengembangan Kariir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kecamatan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kualitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kecamatan	Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kecamatan
3	Kecamatan Bujuraya	1.3 Kecamatan	Program Pemenuhan Ujaya Kesehatan Perorangan dan Ujaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UJIF dan UJIF Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit bencana Sarana dan Prasarana Pendidikan
					Pembangunan Puskesmas
					Pengembangan Rumah Sakit
					Pengembangan Puskesmas



No	Program Unggulan	Dinas	Rencana/Detail Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 2021/2022 & Perencanaan 2023/2024		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pendukung Model Fasilitas Pelayanan Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Baku, Bahan Pakai (BIBAP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UMD Binaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Menyusui
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan Balita
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan Dasar
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Perencanaan
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan Remaja Reproduksi
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Seksual
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang Terganggu Tuberculosis
					Pengadaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Penyakit Menular



No	Program Unggulan	Dinas	Revisi/Modifikasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permenadag 90/2019 & Regmenadag 000-3708/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit
					Operasional Pelayanan Puskesmas
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Program Peningkatan kagiatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Penguatan Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Penguatan Tenaga Kesehatan serta Tindakan Lanjut Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
				Peningkatan Kebersihan dan Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKL di Wilayah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kebersihan dan Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKL di Wilayah Kabupaten/Kota
				Peningkatan dan Distribusi serta Pemantauan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan dan Distribusi serta Pemantauan Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Peningkatan Kebersihan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara Standar	Peningkatan Kebersihan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara Standar
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Program Unggulan	Dinas	Revisi/Modifikasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permenkumham 90/2019 & Permenkumham 600/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	Pemuda Nisnais Beraja	1.07 Tenaga Kerja 2.13 Koperasi dan UKM	Program Pembinaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advisasi, Penguatan, Koordinasi, Pengkajian Perekam serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengkajian Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Koordinasi dan Penguatan Masyarakat
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat (UKMD) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Simulasi Toksik dan Supranal Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Desa Masyarakat (UKMD)
			Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kejurangan bagi Tenaga Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi
			Program pendirian dan Latihan Persempitan	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Pemahaman dan Penguasaan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM Peningkatan Pemahaman dan Penguasaan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
			Program pembinaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UKMK)	Pembinaan Usaha mikro yang dilakukan melalui Pendidikan, Koordinasi, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Pembinaan melalui Koordinasi Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Berusaha Usaha Mikro



No	Program Unggulan	Dinas	Revisi/Statistik Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 2021/2022 & Revisi/Statistik 2022/2023		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pemangku Kepemimpinan	
			Program Pengembangan Usaha	Pengembangan Usaha	Penilaian Usaha Mikro Menjadi Usaha
					Kecil dalam Pengembangan Produk dan
	2.14 Pemuda dan Olahraga				Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta
					Desain dan Teknologi
		2.14 Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan, Penguatan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Rotor Kabupaten/Kota, Kecamatan Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinergi, dan Pengembangan Pemuda Daya Saing Muda Usaha Pemuda
		2.14 Pemuda dan Olahraga	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Saing, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Dalam dan Luar Negeri
		2.14 Pemuda dan Olahraga	Program Penyelenggaraan Jalan	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota	Burny Kendal Jalan/Jembatan, Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Jalan Menuju Bandar, Pemeliharaan Jalan Menuju Lajur, Pemeliharaan Jalan



No	Program Unggulan	Durasi	Revisi/Status Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 2019/2020 dan Pelaksanaan 2019/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Berokas Jalan Pemeliharaan Burin Jalan Pembangunan Jembatan Pembangunan Flyover Pembangunan Underpass Pembangunan Terowongan/Tunnel Penggantian Jembatan Selebaran Jembatan Rehabilitasi Jembatan Pemeliharaan Kaki Jembatan Pemeliharaan Berokas Jembatan Pemertan/pertemuan Tembak/Tangkai Daurat Pemertan dan Daurat Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
5	Potensi Wisata	2.27 Potensial	Program Pemertan dan Penyelenggaraan Daurat Daurat	Pemertan Berokas/Burin Tembak dan Daurat Tembak yang Sumbunya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Berokas/Burin Tembak yang Sumbunya dan Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Hujan Pakan Tembak yang Sumbunya dan Daerah Kabupaten/Kota Lain



			Revisi/Status Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Permenadag RI 90/2019 & Peraturan Menteri Perdagangan 3708/2020		
No	Program Unggulan	Dinas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dali Padi
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Deryu Air
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Petak Rumah
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyusutan di
					Desametan serta sarana pendukungnya
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			Penyamanan Kecamatan	Pengembangan dan Penguatan Sarana	
			Desametan serta sarana pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pem	



No	Program Unggulan	Urutan	Revisi/Status Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 90/2019 dan Revisi/Status 000/2020		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pendirian dan Pengembangan Pasar/Forum Tradisi Kesehatan Masyarakat Tradisional	Pendampingan Unit Usaha Kewan dan Produk Kewan
			Program Pemasaran Usaha Perikanan	Pendirian dan Usaha Perikanan yang Kegiatan Utamanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendirian dan Pengembangan Pemasaran Ikan Usaha Perikanan
				Pendirian dan Usaha Produksi Hasil/Barang Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Kewan, Rumah Sakti Kewan, Pasar Kewan, Rumah Petang Kewan	Pengembangan Pemasaran Ikan Usaha Fasilitas Pemeliharaan Kewan
				Pendirian dan Usaha Pengvoer (Toko, Ritel, Sub Distributor) Hasil Kewan	Pengembangan Pemasaran Ikan Usaha Rumah Sakti Kewan/ Pasar Kewan
					Pengembangan Pemasaran Ikan Usaha Rumah Petang Kewan
			Program Penyuluhan Perikanan	Pemasaran Penyuluhan Perikanan	Pengembangan Kegiatan Kolaborasi Penyuluhan Perikanan di Kecamatan dan Desa
					Pengembangan Kegiatan Kolaborasi Perikanan di Kecamatan dan Desa
					Penyediaan dan Pemasaran Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
					Pembentukan Badan Usaha Milik Perikanan dan Peningkatan dan Peningkatan Badan Usaha Milik Perikanan
					Solusi Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
			Program Peningkatan	Pendirian dan	Pengembangan Informasi Harga Perikanan dan



No	Program Unggulan	Urutan	Rencana Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 2021/2022 & Realisasi 2021/2022		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Diseminasi dan Sosialisasi Peningkatan Masyarakat	Pertemuan Peningkatan Pelaku atau Peningkatan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Forum Bahan Makanan Pemasukan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pengembangan Kolaborasi Usaha Pangan Masyarakat dan Tani Tani Indonesia
				Pertemuan Marga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Diseminasi Pemasukan Marga Minimum Pangan Pokok Lokal
6	KEBERAGAMAN SMPK	3.17 Pembudayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Penguatan Penguatan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pembudayaan SMPK Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
7	Kebudayaan Umat SMPK	3.18 Pembudayaan Umat Kebudayaan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Ilmu Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kolaborasi Pemerintahan,	Perumusan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Ilmu Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kolaborasi Pemerintahan, Perawatan dan Pemeliharaan, Pemeliharaan Umat/Pendidikan Umat Kepala Daerah, serta Pemantapan Struktur Politik Di Daerah



No	Program Unggulan	Dinas	Rencana Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 2021/2022 & Perencanaan 2023/2024		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Pemilihan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pasirang Pelaksanaan Pemilihan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pemilihan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pasirang Pelaksanaan Pemilihan, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Komaraklat	Perumusan Kebijakan Politik dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Komaraklat	Pengawasan Dalam Perumusan Kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Studi Singkron Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas yang di Daerah
					Pelaksanaan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Studi Singkron Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas yang di Daerah
					Pelaksanaan Koordinasi bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Studi Singkron Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas yang di Daerah

[illegible]



No	Program Unggulan	Dinas	Rencana/Struktur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perencanaan 2021/2022 & Realisasi 2021/2022		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	Pengelolaan Sampah	1.1 Kesehatan	Program pemantauan upaya Kesehatan Perumahan dan Tempat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UHSP dan UHSP Rukun Tunggal Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Diri, Komunitas, Keluarga, Pemeriksaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Koordinasi Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kolektifasi Bidang Kesehatan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		1.1.1 Kesehatan	Program Pemantauan Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UHSP dan UHSP Rukun Tunggal Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesehatan Diri, Komunitas, Keluarga, Pemeriksaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Koordinasi Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kolektifasi Bidang Kesehatan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		1.1.2 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pengelolaan Pendaftaran Penduduk	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		1.1.3 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Sipil	Pengelolaan Pendaftaran Sipil	Operasional Pelayanan Rumah Sakit



No	Program Unggulan	Urutan	Rencana Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Periode 2019/2020 & Periode 2020/2021		
			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Program Pengadaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengembangan Pengadaan Informasi Administrasi Kependudukan	Facilitasi terkait Pengadaan Informasi Administrasi Kependudukan
		2.18 Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu, Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kemungkinan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Pelayanan Terpadu Penanaman dan Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		7.01 Untuk Kelayakan (Kelayakan)	Program Pengembangan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		5.02 Kawasan	Program Pengadaan Pendayagunaan Daerah	Kegiatan Pengadaan Pendayagunaan Daerah	Pelaksanaan dan Koordinasi Pjdn Daerah
		5.03 Penguasaan	Program Penguasaan Penguasaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengurusan Penguasaan dan Penguasaan	Koordinasi Pengurusan dan Penguasaan Penguasaan dan Penguasaan Daerah Kabupaten/ Kota

6.4.2 Program Rekomendasi KLHS Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 6.8
Rekomendasi KLHS dan Program Kabupaten Lampung Tengah

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
1	Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan
2	Menyediakan kebutuhan bagi Usaha Pangan Kreatif melalui upaya Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional dan penyiapan tempat berusaha bagi pedagang kreatif.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
3	Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya.	Program perencanaan tenaga kerja. Program pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan Usaha mikro (UMKM) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan UKM Dinas Penanaman Modal PTSP
4	Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat	Program pelatihan kerja dan produktifitas kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Meningkatkan infrastruktur jalan guna memperlancar distribusi barang-barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah.	Program peningkatan jalan dan jembatan sarana dan prasarana kabinamargaan	Dinas Bina Marga
6	Dukungan dana dari pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait program peningkatan ekonomi masyarakat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum)	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	BPPRD
7	Mengoptimalkan Penataan PKL melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang kaki Lima	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Sekretariat Daerah Dinas Koperasi dan UKM
8	Mewujudkan Pasar Sehat di Kabupaten Lampung Tengah	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan
9	Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial
10	Meningkatkan Infrastruktur khususnya kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah	Program Pemanuan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Memberikan update data terbaru masyarakat penerima jaminan kesehatan.		

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
	Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat terkait	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.		
14	Meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat disabilitas dan lansia.		
15	Mencukupi semua kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah minimal pada setiap daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
16	Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu		
17	Memperbaharui data mengenai status gizi anak di bawah lima tahun dalam tingkat Provinsi maupun kota/Kabupaten.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
18	Melakukan kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;	Dinas Kesehatan
19	Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program	Dinas Kesehatan
20	Melakukan Pendampingan bagi ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 8x selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi(Fe).	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat,	Dinas Kesehatan
21	Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan.		Dinas Kesehatan
22	Pemberian vitamin untuk anak sekolah usia 8-12 Tahun.		
23	Memberikan sosialisasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
24	Mengadakan program pemeriksaan kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan		Dinas Kesehatan
25	Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi)		Dinas Kesehatan

No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
	pada ibu hamil.		
26	Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada		Dinas Kesehatan
27	Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minia 3 (tiga) kali selama masa kehamilan melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun pos kesehatan desa.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Kesehatan
28	Pemberian makanan / nutrisi dan vitamin selama kehamilan guna memperbanyak produksi dan memperlancar ASI		
29	Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif.		
30	Melakukan sosialisasi tentang cara mendapatkan ASI eksklusif untuk ibu hamil		
31	Memberikan buku saku untuk ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan tentang makanan yang harus di konsumsi agar mencukupi kebutuhan bayi		
32	Melakukan sosialisasi tentang cara hidup sehat kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
33	Pembukaan lapangan kerja bersama dengan melakukan kerjasama antar sektor swasta		
34	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskades), rumah sakit daerah maupun swasta.		
35	Menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di rumah sakit swasta.		
36	Melakukan perbaruan database infrastruktur penunjang kesehatan setiap tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
37	Melakukan penambahan pegawai kesehatan agar mencukupi angka minimal pelayanan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan



No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
	Tengah		
38	Menyediakan mobil Ambulan minimal 2 mobil per 1 puskesmas, pusda maupun pokdesdes.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;	Dinas Kesehatan
39	Melakukan pembinaan mengenai tata cara permintaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan keluarga berencana.	Dinas Kesehatan
40	Melakukan pelatihan pelayanan berbasis teknologi demi mempermudah pendataan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
41	Melakukan monitoring dan evaluasi kerja anggota instansi		Dinas Kesehatan
42	Meningkatkan infrastruktur pendidikan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah	Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Kesehatan
43	Melakukan penambahan jumlah tenaga pengajar di setiap satuan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	Pemberian jaminan bagi tenaga pengajar		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban	Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak,	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
46	Melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
47	Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48	Pemberian sosialisasi tentang pelayanan KB untuk pasangan muda	Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga berencana.	Dinas Pengendalian penduduk dan KB
49	Peningkatan infrastruktur daerah	Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Bina Marga Dinas Pengairan Dinas Perumahan Rakyat Dan



No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
		(3da) Program Pengembangan Perumahan.	Kawatan Pemukiman
50	Melakukan pelatihan tentang industri ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
51	Meningkatkan pembangunan industri maupun jasa dengan melakukan kerjasama melalui pihak swasta.	Program Pengembangan Iklim Penanaman, Modal Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal PTSP
52	Pembukaan tempat-tempat wisata dan pembukaan lokasi kuliner untuk mendukung perekonomian warga sekitar daerah wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
53	Membangun tempat wisata yang ramah, aman dan nyaman.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,	Dinas Pariwisata Dinas Bina Marga
54	Memperbaiki infrastruktur jalan agar mempermudah masyarakat mengunjungi tempat wisata.	Program Penyelenggaraan Jalan	
55	Melakukan branding destinasi wisata agar dapat di kenal oleh masyarakat luar Kabupaten Lampung Tengah.		
56	Bekerja sama dengan angkutan umum daerah atau pariwisata.		
57	Memperbaiki infrastruktur jalan, air bersih serta sanitasi pada setiap daerah.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga
58	Melakukan perencanaan yang optimal terhadap potensi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta.	Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
59	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang memiliki potensi.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pengairan
60	Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
61	Meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia produktif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi dan UKM
62	Pemberian pelatihan softskill bagi para masyarakat usia produktif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
63	Menyelenggarakan program-program untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat



No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
	pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dalam program ini mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan infrastruktur	Masyarakat Hukum Adat	Kampung
64	Membuat workshop tentang optimalisasi pajak yang di ikuti oleh SKPD.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPRD
65	Melakukan pembayaran wajib pajak bagi setiap masyarakat perdagangan dan jasa Kabupaten Lampung Tengah.		
66	Melakukan pemetaan potensi pajak pada berdatarakan data dari PDRE Kabupaten Lampung Tengah.		
67	Peningkatan infrastruktur air bersih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
68	Melakukan program sumur bor pada daerah pemukiman yang sulit mendapatkan air bersih.		
69	Melakukan sosialisasi tentang air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.		
70	Program penanaman 1000 pohon pada daerah dengan kategori yang sulit air.	Program Pengelolaan Keenekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
71	Meningkatkan IPAL komunal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
72	Meningkatkan PAMSIMAS	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
73	Melakukan sosialisasi pentingnya STEM	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
74	Sosialisasi BPBD terhadap bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
75	Penelitian tanggap bencana oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah		
76	Membangun bangunan yang kokoh tahan akan bencana setiap gempa bumi.	Program Pengembangan Perumahan Program Penanganan Bencana	BPBD



No	Rekomendasi KLHS	Program	Perangkat Daerah
77	Membuka TPS baru sesuai dengan kesiapan lahan yang ada	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Lingkungan Hidup
78	Melakukan sistem pembakaran sampah dan pembuatan pupuk dari limbah hortikultura	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
79	Melakukan perencanaan kesesuaian lahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pengairan
80	Menggunakan tanaman yang cocok untuk ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan rencana RTH Kabupaten Lampung Tengah.		Dinas Pengairan
81	Memberikan ruang masyarakat agar dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas yang semestinya pada RTH yang akan di rencanakan.		Dinas Pengairan
82	Membuat bank sampah di setiap kelurahan maupun kecamatan.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
83	Melakukan pelatihan industri kreatif dengan memanfaatkan sampah yang dapat di daur ulang.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
84	Menyediakan tempat pembuangan sampah pada setiap titik kelurahan atau kecamatan.		
85	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah yang baik dan benar.		
86	Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan kritis	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
87	Pengembangan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kahati)	Dinas Pengairan
88	Pembuatan terasering atau sangkolan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pengairan
89	Pengoptimalan fungsi DAS		
90	Pengemburan Tanah alami dan penggunaan pupuk organik		
91	Mengadakan sosialisasi rutin terhadap aturan hukum dan undang-undang oleh operator negara kepada masyarakat di Instansi atau pusat pendidikan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
92	Memberi peluang kepada Perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Partisipasi Politik Dan Lembaga	Dinas PP dan PA Badan Kesbangpol

No	Rekomendasi RLMS	Program	Perangkat Daerah
		Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
95	Memberikan kemudahan akses dan pendanaan untuk mengikuti ke pelatihan dan diklat-diklat pejabat.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	BKPSDM Dinas Komunikasi dan Informatika

6.6 Program Pembangunan Daerah

Setelah dirumuskan strategi dan arah kebijakan di atas, maka untuk pelaksanaannya disusun Program Pembangunan berdasarkan Nomenklatur yang ada beserta pagu indikatif sebagaimana dapat di lihat dalam tabel 6.9



No. Urut Berkas Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Indikator Kinerja Pengantar Monev/evaluasi	Status	Tgl. Pengantar Monev/evaluasi	Tipe/Urut/Pengantar dan Monev/evaluasi												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Ya		01	20150101	01	20160101	01	20170101	01	20180101	01	20190101	01	20200101	Pengantar Monev/evaluasi Berkas (01 & 02)
	Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Ya		01		01		01		01		01		01		
Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Ya		01	20150101	01	20160101	01	20170101	01	20180101	01	20190101	01	20200101	Pengantar Monev/evaluasi Berkas (01 & 02)
	Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Ya		01		01		01		01		01		01		
Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Ya		01		01		01		01		01		01		
	Pengantar Monev/evaluasi Berkas	Ya		01		01		01		01		01		01		



No. Urut Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Status	Tahun 2015 2016 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan/Subkegiatan												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan Kegiatan Subkegiatan	gagal		10		10		10		10		10		10		
	Program Kegiatan Subkegiatan Kegiatan Subkegiatan	gagal	10	10	100.000.000	10	100.000.000	100	1.000.000.000	10	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan Kegiatan Subkegiatan	gagal	10	10		10		10		10		10		10		
	Program Kegiatan Subkegiatan Kegiatan Subkegiatan	gagal	10	10	100.000.000	10	100.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan Kegiatan Subkegiatan	gagal	10	10	100.000.000	10	100.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	
	Program Kegiatan Subkegiatan Kegiatan Subkegiatan	gagal	10	10	100.000.000	10	100.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori	Kategori	Tipe/Urut/Program dan Kegiatan/Kelembagaan												No
				Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	10	11			12		13		14		15		
				16	17			18		19		20		21		
				22	23			24		25		26		27		
				28	29			30		31		32		33		
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	34	35			36		37		38		39		
				40	41			42		43		44		45		
				46	47			48		49		50		51		
				52	53			54		55		56		57		
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	58	59			60		61		62		63		
				64	65			66		67		68		69		
				70	71			72		73		74		75		
				76	77			78		79		80		81		
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	82	83			84		85		86		87		
				88	89			90		91		92		93		
				94	95			96		97		98		99		
				100	101			102		103		104		105		



No. Urut Kategori Pengeluaran Kendaraan	Keterangan Pengeluaran Kendaraan	Jenis Kendaraan	No. Urut Kendaraan	Pengeluaran Pengeluaran dan Pengeluaran												Total
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	jenis			10.00.00.00		10.00.00.00		10.00.00.00		10.00.00.00		10.00.00.00		10.00.00.00	Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan
	Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	jenis		10		10		10		10		10		10		
	Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	jenis		10		10		10		10		10		10		
	Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	jenis		10		10		10		10		10		10		
	Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	jenis		10		10		10		10		10		10		
	Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	jenis		10		10		10		10		10		10		
	Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	jenis		10		10		10		10		10		10		
Kategori Pengeluaran Kendaraan Pengeluaran Kendaraan	jenis		10		10		10		10		10		10			



No. Urut Kategori Program Kebijakan Kebijakan	Indikator Kinerja Program/Kebijakan Kebijakan	Status	Tahun 2015 2016	Target Kinerja Program dan Kebijakan/Kebijakan												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai
	Kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dasar	baik		10		10		10		10		10		10		Tercapai



No. Urut Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Subkegiatan	Status	Tahun 2015 2016	Target Kinerja Program dan Kegiatan/Subkegiatan												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan	gagal		10		10		10		10		10		10		
	Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan	gagal		10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan	gagal	10	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Kategori Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Kategori Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan	gagal	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	Kategori Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Kategori Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan Kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja tahunan	gagal		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Kategori Kegiatan Kegiatan Kegiatan



No. Urut Rencana Pengembangan Kecamatan	Indikator Kinerja Pengembangan Kecamatan	Bentuk	Tipe Program Kecamatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rencana Pengembangan Kecamatan Bontol	Penerapan kelembagaan yang terpadu di semua pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan		20	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	Rencana Kecamatan Pengembangan Kecamatan Bontol
	Penerapan kelembagaan yang terpadu di semua pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan		20	20		20		20		20		20		20		
	Penerapan kelembagaan yang terpadu di semua pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan		20	20		20		20		20		20		20		
	Penerapan kelembagaan yang terpadu di semua pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan		20	20		20		20		20		20		20		
	Penerapan kelembagaan yang terpadu di semua pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan		20	20		20		20		20		20		20		
	Penerapan kelembagaan yang terpadu di semua pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan		20	20		20		20		20		20		20		
	Penerapan kelembagaan yang terpadu di semua pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan		20	20		20		20		20		20		20		



No. Urut Kategori Program Kegiatan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan	Bulan	Tahun 2015 2016	Target Kinerja Program dan Kegiatan/Target												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori Program Kegiatan	Kegiatan Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Catatan Program Kegiatan Kegiatan
	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kategori Program Kegiatan	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Catatan Program Kegiatan Kegiatan
	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kategori Program Kegiatan	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Catatan Program Kegiatan Kegiatan
	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kategori Program Kegiatan	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Catatan Program Kegiatan Kegiatan
	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kategori Program Kegiatan	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Catatan Program Kegiatan Kegiatan
	Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Tipe/Urut/Program dan Kegiatan/Kelembagaan												Tipe
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori



Sl. No.	Revenue Project Description	Status	Total Area Hect	Targeted Project for Sample Revenue												Total
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Year	2015	2016	1,00,00,000	2017	1,00,00,000	2018	1,00,00,000	2019	1,00,00,000	2020	1,00,00,000	2021	1,00,00,000	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk
Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Year	2015	2016	1,00,00,000	2017	1,00,00,000	2018	1,00,00,000	2019	1,00,00,000	2020	1,00,00,000	2021	1,00,00,000	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk
Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Year	2015	2016	1,00,00,000	2017	1,00,00,000	2018	1,00,00,000	2019	1,00,00,000	2020	1,00,00,000	2021	1,00,00,000	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk
Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Year	2015	2016	1,00,00,000	2017	1,00,00,000	2018	1,00,00,000	2019	1,00,00,000	2020	1,00,00,000	2021	1,00,00,000	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk
Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Year	2015	2016	1,00,00,000	2017	1,00,00,000	2018	1,00,00,000	2019	1,00,00,000	2020	1,00,00,000	2021	1,00,00,000	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk
Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Year	2015	2016	1,00,00,000	2017	1,00,00,000	2018	1,00,00,000	2019	1,00,00,000	2020	1,00,00,000	2021	1,00,00,000	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk
Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Year	2015	2016	1,00,00,000	2017	1,00,00,000	2018	1,00,00,000	2019	1,00,00,000	2020	1,00,00,000	2021	1,00,00,000	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk
Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk	Year	2015	2016	1,00,00,000	2017	1,00,00,000	2018	1,00,00,000	2019	1,00,00,000	2020	1,00,00,000	2021	1,00,00,000	Revenue Project for Kadugata Sampang Taluk



No. Urut Kategori Pengeluaran Kendali	Keterangan Kegiatan Pengeluaran Kendali	Bentuk Pengeluaran Kendali	Tipe Pengeluaran Kendali	Terdapat Pengeluaran dan Pengeluaran												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	100%	100%			100%		100%		100%		100%		
	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	100%	100%	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000
	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	100%	100%	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000
	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	100%	100%	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	100%	100%	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	Program Pengeluaran Kendali	100%	100%	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000



No. Urut Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	Pengeluaran Program dan Kegiatan												Total
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	
				1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12	
				1.1.1.1.1	1.1.1.1.2	1.1.1.1.3	1.1.1.1.4	1.1.1.1.5	1.1.1.1.6	1.1.1.1.7	1.1.1.1.8	1.1.1.1.9	1.1.1.1.10	1.1.1.1.11	1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	
				1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12	
				Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1					1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12.1	
Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	Kategori Pengeluaran Kendali	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12.1	Kategori Pengeluaran Kendali
				1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.11.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.12.1.1	



No. Urut Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Bentuk	Tipe Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan/Kelembagaan												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan		-	1 Maret 2015	10.000.000	2 Maret 2016	10.000.000	2 Maret 2017	10.000.000	2 Maret 2018	10.000.000	2 Maret 2019	10.000.000	2 Maret 2020	10.000.000	Program Kegiatan Subkegiatan Kategori Program Kegiatan Subkegiatan
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan		-		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Program Kegiatan Subkegiatan Kategori Program Kegiatan Subkegiatan
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan	2015	Q1	2	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	Program Kegiatan Subkegiatan Kategori Program Kegiatan Subkegiatan
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan	2015	Q1	2	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	Program Kegiatan Subkegiatan Kategori Program Kegiatan Subkegiatan
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan	2015	Q1	2	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	Program Kegiatan Subkegiatan Kategori Program Kegiatan Subkegiatan
Kategori Program Kegiatan Subkegiatan	Program Kegiatan Subkegiatan	2015	Q1	2	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	Program Kegiatan Subkegiatan Kategori Program Kegiatan Subkegiatan



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Tipe/Urut/Program dan Kegiatan/Kelembagaan												No
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kategori Kategori Kategori	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Kategori Kategori Kategori	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Kategori Kategori Kategori	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
	Kategori	year		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	



No. Urut Rekam Program Keberhasilan Kantor	Indikator Kinerja Program/Keberhasilan Kantor	Status	Tahun Pelaksanaan 2015	Target Kinerja Program dan Keberhasilan Kantor												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pengembangan Kapasitas Manajemen Kantor Kecamatan Kalongi	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan	ya		45	100.000	45	100.000	45	100.000	45	100.000	45	100.000	45	100.000	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan
	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan	ya		10		10		10		10		10		10		
	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan	ya		10		10		10		10		10		10		
	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan	ya		10		10		10		10		10		10		
	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan	ya		10		10		10		10		10		10		
Program Pengembangan Kapasitas Manajemen Kantor Kecamatan Kalongi	Penyediaan sarana dan prasarana kecamatan	ya	10			10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan
Program Pengembangan Kapasitas Manajemen Kantor Kecamatan Kalongi	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan	ya	10	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan
Program Pengembangan Kapasitas Manajemen Kantor Kecamatan Kalongi	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan	ya	10	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan
Program Pengembangan Kapasitas Manajemen Kantor Kecamatan Kalongi	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan	ya	10	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	Peningkatan kemampuan manajemen kecamatan



No. Urut Rekam Program Kelembagaan Kesehatan	Indikator Kinerja Program/Kelembagaan Kesehatan	Bulan	Tahun Pelaksanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kelembagaan Kesehatan												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	year		1	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara
Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	year	2015	10		10		10		10		10		10		Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara
Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	year	2016	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara
Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	year	2017	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara
Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	year	2018	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara
Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	year	2019	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara
Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara	year	2020	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	Rekam Kelembagaan Kesehatan Kecamatan Kuala Kertara



No. Urut Kategori Program Kelembagaan Kantor	Indikator Kinerja Program/Kelembagaan Kantor	Status	Tahun 2015 2016 2017	Target Kinerja Program dan Kelembagaan Kantor												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori program/kelembagaan kelembagaan kelembagaan	guru	10	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	Catatan Kategori Program dan Kelembagaan Kantor
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1000	17%		17%		17%		17%		17%		17%		
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	10	10		10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	10	100.00%	
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	Catatan Kategori Program dan Kelembagaan Kantor
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	Catatan Kategori Program dan Kelembagaan Kantor
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	Catatan Kategori Program dan Kelembagaan Kantor
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	
Kategori Program dan Kelembagaan Kantor	Kategori Kelembagaan	guru	1	1		1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	



No. Urut Rekam Kategori Rekam	Judul Rekam (Kategori) Rekam	Jenis Rekam	Tahun Rekam	Tipe Rekam (Kategori) dan Rekam (Kategori)												No.
				A1		A2		A3		A4		A5		A6		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rekam Kategori Kategori	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
Rekam Kategori Kategori	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
Rekam Kategori Kategori	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		
	Rekam Kategori Kategori	Rekam	2015	2015				2015		2015		2015		2015		



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori	Kategori	Tipe/Urut/Program dan Kegiatan/Kelembagaan												Nilai
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori	Kategori	Tipe/Urut/Pengantar dan Keterangan												No
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kategori Kategori Kategori	jenis		15		15		15		15		15		15		
	Kategori Kategori Kategori	jenis		15		15		15		15		15		15		
	Kategori Kategori Kategori	jenis		15		15		15		15		15		15		
	Kategori Kategori Kategori	jenis		15		15		15		15		15		15		
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	jenis		15	15/15/15	15	15/15/15	15	15/15/15	15	15/15/15	15	15/15/15	15	15/15/15	Kategori Kategori Kategori
	Kategori Kategori Kategori	jenis		15		15		15		15		15		15		

[illegible]



No. Urut Kategori Program Subprogram Berkas	Indikator Kinerja Program/Program Kegiatan	Sasaran	Tahun 2015 2016 2017	Target Kinerja Program dan Kegiatan/Thematic												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program pembinaan dan pelatihan kepemimpinan manajemen, dan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendari Kendari	year	10	10		17		10		10		10		17		
	Program Pembinaan Keuangan Kendari	year	10	10		10		10		10		10		17		
	Program pembinaan Keuangan Kendari	year	10.4	10.4		6		10		10		10		10		
Program Pembinaan Keuangan Kendari	Program Pembinaan Keuangan Kendari Kendari	year	10	10	1-1.000.000	10	1-1.000.000	10	1-1.000.000	10	1-1.000.000	10	1-1.000.000	10	1-1.000.000	Program Pembinaan Keuangan Kendari Kendari
Program Pembinaan Keuangan Kendari	Program Pembinaan Keuangan Kendari	year	10.10	10.10		10.10		10.10		10.10		10.10		10.10		
Program Pembinaan Keuangan Kendari	Program Pembinaan Keuangan Kendari	year			1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		Program Pembinaan Keuangan Kendari Kendari
Program Pembinaan Keuangan Kendari	Program Pembinaan Keuangan Kendari	year	10	10		10		10		10		10		10		



No. Urut Kategori Kegiatan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Status	Tahun 2015 2016	Target Kinerja Kegiatan dan Sasaran/Target												Catatan
				2015		2016		2015		2016		2015		2016		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kegiatan Kegiatan	Peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	baik	10	10		10		10		10						



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Tipe/Detail Program dan Kegiatan/Kelembagaan												No		
				2015		2016		2017		2018		2019		2020			2021	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kategori Kategori Kategori		
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kategori Kategori Kategori		
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			



The Types of Program Performance Results	Indicators (Metric Types/Program Activities)	Status	Target or Value	Target Group/Program or Group/Performance												Total
				G1		G2		G3		G4		G5		G6		
				G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program performance and program activities Target: overall program performance increase (e.g., growth in revenue) Actual: 80% increase in revenue Status: good	good	80	80		75		75		80		80		75		
	Program performance and program activities Target: overall program performance increase (e.g., growth in revenue) Actual: 80% increase in revenue Status: good	good	80	80		75		75		80		80		75		

[illegible]



No. Urut Kategori Materi Pokok Bahasa	Indikator Materi Pokok Bahasan Bahasa	Kelas	Tingkat Kemampuan Siswa	Tingkat Penguasaan dan Pemahaman												Nilai
				Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Kategori Kata, kalimat, paragraf yang mencakup struktur gramatikal yang benar	kelas						10		10		10		10		
	Kategori Kata, kalimat, paragraf yang mencakup struktur gramatikal yang benar	kelas						10		10		10		10		
	Kategori Kata, kalimat, paragraf yang mencakup struktur gramatikal yang benar	kelas	1	1				10		10		10		10		
	Kategori Kata, kalimat, paragraf yang mencakup struktur gramatikal yang benar	kelas	10	10				10		10		10		10		
	Kategori Kata, kalimat, paragraf yang mencakup struktur gramatikal yang benar	kelas	10	10				10		10		10		10		
	Kategori Kata, kalimat, paragraf yang mencakup struktur gramatikal yang benar	kelas	10	10				10		10		10		10		



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Tipe/Urut/Program dan Kegiatan/Kelembagaan												Tipe
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Kategori Kategori Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029



Die Typen des Projekt- Management- Baus	Internationale Projekt- Management- Standards	Norm	ISO 9000 ISO 14000 ISO 26000	Vorgehensmodelle für das Projektmanagement												PM
				PM		PM		PM		PM		PM		PM		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Normen ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 26001, ISO 9004, ISO 14004, ISO 26004, ISO 9005, ISO 14005, ISO 26005, ISO 9006, ISO 14006, ISO 26006, ISO 9007, ISO 14007, ISO 26007, ISO 9008, ISO 14008, ISO 26008, ISO 9009, ISO 14009, ISO 26009, ISO 9010, ISO 14010, ISO 26010, ISO 9011, ISO 14011, ISO 26011, ISO 9012, ISO 14012, ISO 26012, ISO 9013, ISO 14013, ISO 26013, ISO 9014, ISO 14014, ISO 26014, ISO 9015, ISO 14015, ISO 26015, ISO 9016, ISO 14016, ISO 26016, ISO 9017, ISO 14017, ISO 26017, ISO 9018, ISO 14018, ISO 26018, ISO 9019, ISO 14019, ISO 26019, ISO 9020, ISO 14020, ISO 26020, ISO 9021, ISO 14021, ISO 26021, ISO 9022, ISO 14022, ISO 26022, ISO 9023, ISO 14023, ISO 26023, ISO 9024, ISO 14024, ISO 26024, ISO 9025, ISO 14025, ISO 26025, ISO 9026, ISO 14026, ISO 26026, ISO 9027, ISO 14027, ISO 26027, ISO 9028, ISO 14028, ISO 26028, ISO 9029, ISO 14029, ISO 26029, ISO 9030, ISO 14030, ISO 26030, ISO 9031, ISO 14031, ISO 26031, ISO 9032, ISO 14032, ISO 26032, ISO 9033, ISO 14033, ISO 26033, ISO 9034, ISO 14034, ISO 26034, ISO 9035, ISO 14035, ISO 26035, ISO 9036, ISO 14036, ISO 26036, ISO 9037, ISO 14037, ISO 26037, ISO 9038, ISO 14038, ISO 26038, ISO 9039, ISO 14039, ISO 26039, ISO 9040, ISO 14040, ISO 26040, ISO 9041, ISO 14041, ISO 26041, ISO 9042, ISO 14042, ISO 26042, ISO 9043, ISO 14043, ISO 26043, ISO 9044, ISO 14044, ISO 26044, ISO 9045, ISO 14045, ISO 26045, ISO 9046, ISO 14046, ISO 26046, ISO 9047, ISO 14047, ISO 26047, ISO 9048, ISO 14048, ISO 26048, ISO 9049, ISO 14049, ISO 26049, ISO 9050, ISO 14050, ISO 26050, ISO 9051, ISO 14051, ISO 26051, ISO 9052, ISO 14052, ISO 26052, ISO 9053, ISO 14053, ISO 26053, ISO 9054, ISO 14054, ISO 26054, ISO 9055, ISO 14055, ISO 26055, ISO 9056, ISO 14056, ISO 26056, ISO 9057, ISO 14057, ISO 26057, ISO 9058, ISO 14058, ISO 26058, ISO 9059, ISO 14059, ISO 26059, ISO 9060, ISO 14060, ISO 26060, ISO 9061, ISO 14061, ISO 26061, ISO 9062, ISO 14062, ISO 26062, ISO 9063, ISO 14063, ISO 26063, ISO 9064, ISO 14064, ISO 26064, ISO 9065, ISO 14065, ISO 26065, ISO 9066, ISO 14066, ISO 26066, ISO 9067, ISO 14067, ISO 26067, ISO 9068, ISO 14068, ISO 26068, ISO 9069, ISO 14069, ISO 26069, ISO 9070, ISO 14070, ISO 26070, ISO 9071, ISO 14071, ISO 26071, ISO 9072, ISO 14072, ISO 26072, ISO 9073, ISO 14073, ISO 26073, ISO 9074, ISO 14074, ISO 26074, ISO 9075, ISO 14075, ISO 26075, ISO 9076, ISO 14076, ISO 26076, ISO 9077, ISO 14077, ISO 26077, ISO 9078, ISO 14078, ISO 26078, ISO 9079, ISO 14079, ISO 26079, ISO 9080, ISO 14080, ISO 26080, ISO 9081, ISO 14081, ISO 26081, ISO 9082, ISO 14082, ISO 26082, ISO 9083, ISO 14083, ISO 26083, ISO 9084, ISO 14084, ISO 26084, ISO 9085, ISO 14085, ISO 26085, ISO 9086, ISO 14086, ISO 26086, ISO 9087, ISO 14087, ISO 26087, ISO 9088, ISO 14088, ISO 26088, ISO 9089, ISO 14089, ISO 26089, ISO 9090, ISO 14090, ISO 26090, ISO 9091, ISO 14091, ISO 26091, ISO 9092, ISO 14092, ISO 26092, ISO 9093, ISO 14093, ISO 26093, ISO 9094, ISO 14094, ISO 26094, ISO 9095, ISO 14095, ISO 26095, ISO 9096, ISO 14096, ISO 26096, ISO 9097, ISO 14097, ISO 26097, ISO 9098, ISO 14098, ISO 26098, ISO 9099, ISO 14099, ISO 26099, ISO 9100, ISO 14100, ISO 26100, ISO 9101, ISO 14101, ISO 26101, ISO 9102, ISO 14102, ISO 26102, ISO 9103, ISO 14103, ISO 26103, ISO 9104, ISO 14104, ISO 26104, ISO 9105, ISO 14105, ISO 26105, ISO 9106, ISO 14106, ISO 26106, ISO 9107, ISO 14107, ISO 26107, ISO 9108, ISO 14108, ISO 26108, ISO 9109, ISO 14109, ISO 26109, ISO 9110, ISO 14110, ISO 26110, ISO 9111, ISO 14111, ISO 26111, ISO 9112, ISO 14112, ISO 26112, ISO 9113, ISO 14113, ISO 26113, ISO 9114, ISO 14114, ISO 26114, ISO 9115, ISO 14115, ISO 26115, ISO 9116, ISO 14116, ISO 26116, ISO 9117, ISO 14117, ISO 26117, ISO 9118, ISO 14118, ISO 26118, ISO 9119, ISO 14119, ISO 26119, ISO 9120, ISO 14120, ISO 26120, ISO 9121, ISO 14121, ISO 26121, ISO 9122, ISO 14122, ISO 26122, ISO 9123, ISO 14123, ISO 26123, ISO 9124, ISO 14124, ISO 26124, ISO 9125, ISO 14125, ISO 26125, ISO 9126, ISO 14126, ISO 26126, ISO 9127, ISO 14127, ISO 26127, ISO 9128, ISO 14128, ISO 26128, ISO 9129, ISO 14129, ISO 26129, ISO 9130, ISO 14130, ISO 26130, ISO 9131, ISO 14131, ISO 26131, ISO 9132, ISO 14132, ISO 26132, ISO 9133, ISO 14133, ISO 26133, ISO 9134, ISO 14134, ISO 26134, ISO 9135, ISO 14135, ISO 26135, ISO 9136, ISO 14136, ISO 26136, ISO 9137, ISO 14137, ISO 26137, ISO 9138, ISO 14138, ISO 26138, ISO 9139, ISO 14139, ISO 26139, ISO 9140, ISO 14140, ISO 26140, ISO 9141, ISO 14141, ISO 26141, ISO 9142, ISO 14142, ISO 26142, ISO 9143, ISO 14143, ISO 26143, ISO 9144, ISO 14144, ISO 26144, ISO 9145, ISO 14145, ISO 26145, ISO 9146, ISO 14146, ISO 26146, ISO 9147, ISO 14147, ISO 26147, ISO 9148, ISO 14148, ISO 26148, ISO 9149, ISO 14149, ISO 26149, ISO 9150, ISO 14150, ISO 26150, ISO 9151, ISO 14151, ISO 26151, ISO 9152, ISO 14152, ISO 26152, ISO 9153, ISO 14153, ISO 26153, ISO 9154, ISO 14154, ISO 26154, ISO 9155, ISO 14155, ISO 26155, ISO 9156, ISO 14156, ISO 26156, ISO 9157, ISO 14157, ISO 26157, ISO 9158, ISO 14158, ISO 26158, ISO 9159, ISO 14159, ISO 26159, ISO 9160, ISO 14160, ISO 26160, ISO 9161, ISO 14161, ISO 26161, ISO 9162, ISO 14162, ISO 26162, ISO 9163, ISO 14163, ISO 26163, ISO 9164, ISO 14164, ISO 26164, ISO 9165, ISO 14165, ISO 26165, ISO 9166, ISO 14166, ISO 26166, ISO 9167, ISO 14167, ISO 26167, ISO 9168, ISO 14168, ISO 26168, ISO 9169, ISO 14169, ISO 26169, ISO 9170, ISO 14170, ISO 26170, ISO 9171, ISO 14171, ISO 26171, ISO 9172, ISO 14172, ISO 26172, ISO 9173, ISO 14173, ISO 26173, ISO 9174, ISO 14174, ISO 26174, ISO 9175, ISO 14175, ISO 26175, ISO 9176, ISO 14176, ISO 26176, ISO 9177, ISO 14177, ISO 26177, ISO 9178, ISO 14178, ISO 26178, ISO 9179, ISO 14179, ISO 26179, ISO 9180, ISO 14180, ISO 26180, ISO 9181, ISO 14181, ISO 26181, ISO 9182, ISO 14182, ISO 26182, ISO 9183, ISO 14183, ISO 26183, ISO 9184, ISO 14184, ISO 26184, ISO 9185, ISO 14185, ISO 26185, ISO 9186, ISO 14186, ISO 26186, ISO 9187, ISO 14187, ISO 26187, ISO 9188, ISO 14188, ISO 26188, ISO 9189, ISO 14189, ISO 26189, ISO 9190, ISO 14190, ISO 26190, ISO 9191, ISO 14191, ISO 26191, ISO 9192, ISO 14192, ISO 26192, ISO 9193, ISO 14193, ISO 26193, ISO 9194, ISO 14194, ISO 26194, ISO 9195, ISO 14195, ISO 26195, ISO 9196, ISO 14196, ISO 26196, ISO 9197, ISO 14197, ISO 26197, ISO 9198, ISO 14198, ISO 26198, ISO 9199, ISO 14199, ISO 26199, ISO 9200, ISO 14200, ISO 26200, ISO 9201, ISO 14201, ISO 26201, ISO 9202, ISO 14202, ISO 26202, ISO 9203, ISO 14203, ISO 26203, ISO 9204, ISO 14204, ISO 26204, ISO 9205, ISO 14205, ISO 26205, ISO 9206, ISO 14206, ISO 26206, ISO 9207, ISO 14207, ISO 26207, ISO 9208, ISO 14208, ISO 26208, ISO 9209, ISO 14209, ISO 26209, ISO 9210, ISO 14210, ISO 26210, ISO 9211, ISO 14211, ISO 26211, ISO 9212, ISO 14212, ISO 26212, ISO 9213, ISO 14213, ISO 26213, ISO 9214, ISO 14214, ISO 26214, ISO 9215, ISO 14215, ISO 26215, ISO 9216, ISO 14216, ISO 26216, ISO 9217, ISO 14217, ISO 26217, ISO 9218, ISO 14218, ISO 26218, ISO 9219, ISO 14219, ISO 26219, ISO 9220, ISO 14220, ISO 26220, ISO 9221, ISO 14221, ISO 26221, ISO 9222, ISO 14222, ISO 26222, ISO 9223, ISO 14223, ISO 26223, ISO 9224, ISO 14224, ISO 26224, ISO 9225, ISO 14225, ISO 26225, ISO 9226, ISO 14226, ISO 26226, ISO 9227, ISO 14227, ISO 26227, ISO 9228, ISO 14228, ISO 26228, ISO 9229, ISO 14229, ISO 26229, ISO 9230, ISO 14230, ISO 26230, ISO 9231, ISO 14231, ISO 26231, ISO 9232, ISO 14232, ISO 26232, ISO 9233, ISO 14233, ISO 26233, ISO 9234, ISO 14234, ISO 26234, ISO 9235, ISO 14235, ISO 26235, ISO 9236, ISO 14236, ISO 26236, ISO 9237, ISO 14237, ISO 26237, ISO 9238, ISO 14238, ISO 26238, ISO 9239, ISO 14239, ISO 26239, ISO 9240, ISO 14240, ISO 26240, ISO 9241, ISO 14241, ISO 26241, ISO 9242, ISO 14242, ISO 26242, ISO 9243, ISO 14243, ISO 26243, ISO 9244, ISO 14244, ISO 26244, ISO 9245, ISO 14245, ISO 26245, ISO 9246, ISO 14246, ISO 26246, ISO 9247, ISO 14247, ISO 26247, ISO 9248, ISO 14248, ISO 26248, ISO 9249, ISO 14249, ISO 26249, ISO 9250, ISO 14250, ISO 26250, ISO 9251, ISO 14251, ISO 26251, ISO 9252, ISO 14252, ISO 26252, ISO 9253, ISO 14253, ISO 26253, ISO 9254, ISO 14254, ISO 26254, ISO 9255, ISO 14255, ISO 26255, ISO 9256, ISO 14256, ISO 26256, ISO 9257, ISO 14257, ISO 26257, ISO 9258, ISO 14258, ISO 26258, ISO 9259, ISO 14259, ISO 26259, ISO 9260, ISO 14260, ISO 26260, ISO 9261, ISO 14261, ISO 26261, ISO 9262, ISO 14262, ISO 26262, ISO 9263, ISO 14263, ISO 26263, ISO 9264, ISO 14264, ISO 26264, ISO 9265, ISO 14265, ISO 26265, ISO 9266, ISO 14266, ISO 26266, ISO 9267, ISO 14267, ISO 26267, ISO 9268, ISO 14268, ISO 26268, ISO 9269, ISO 14269, ISO 26269, ISO 9270, ISO 14270, ISO 26270, ISO 9271, ISO 14271, ISO 26271, ISO 9272, ISO 14272, ISO 26272, ISO 9273, ISO 14273, ISO 26273, ISO 9274, ISO 14274, ISO 26274, ISO 9275, ISO 14275, ISO 26275, ISO 9276, ISO 14276, ISO 26276, ISO 9277, ISO 14277, ISO 26277, ISO 9278, ISO 14278, ISO 26278, ISO 9279, ISO 14279, ISO 26279, ISO 9280, ISO 14280, ISO 26280, ISO 9281, ISO 14281, ISO 26281, ISO 9282, ISO 14282, ISO 26282, ISO 9283, ISO 14283, ISO 26283, ISO 9284, ISO 14284, ISO 26284, ISO 9285, ISO 14285, ISO 26285, ISO 9286, ISO 14286, ISO 26286, ISO 9287, ISO 14287, ISO 26287, ISO 9288, ISO 14288, ISO 26288, ISO 9289, ISO 14289, ISO 26289, ISO 9290, ISO 14290, ISO 26290, ISO 9291, ISO 14291, ISO 26291, ISO 9292, ISO 14292, ISO 26292, ISO 9293, ISO 14293, ISO 26293, ISO 9294, ISO 14294, ISO 26294, ISO 9295, ISO 14295, ISO 26295, ISO 9296, ISO 14296, ISO 26296, ISO 9297, ISO 14297, ISO 26297, ISO 9298, ISO 14298, ISO 26298, ISO 9299, ISO 14299, ISO 26299, ISO 9300, ISO 14300, ISO 26300, ISO 9301, ISO 14301, ISO 26301, ISO 9302, ISO 14302, ISO 26302, ISO 9303, ISO 14303, ISO 26303, ISO 9304, ISO 14304, ISO 26304, ISO 9305, ISO 14305, ISO 26305, ISO 9306, ISO 14306, ISO 26306, ISO 9307, ISO 14307, ISO 26307, ISO 9308, ISO 14308, ISO 26308, ISO 9309, ISO 14309, ISO 26309, ISO 9310, ISO 14310, ISO 26310, ISO 9311, ISO 14311, ISO 26311, ISO 9312, ISO 14312, ISO 26312, ISO 9313, ISO 14313, ISO 26313, ISO 9314, ISO 14314, ISO 26314, ISO 9315, ISO 14315, ISO 26315, ISO 9316, ISO 14316, ISO 26316, ISO 9317, ISO 14317, ISO 26317, ISO 9318, ISO 14318, ISO 26318, ISO 9319, ISO 14319, ISO 26319, ISO 9320, ISO 14320, ISO 26320, ISO 9321, ISO 14321, ISO 26321, ISO 9322, ISO 14322, ISO 26322, ISO 9323, ISO 14323, ISO 26323, ISO 9324, ISO 14324, ISO 26324, ISO 9325, ISO 14325, ISO 26325, ISO 9326, ISO 14326, ISO 26326, ISO 9327, ISO 14327, ISO 26327, ISO 9328, ISO 14328, ISO 26328, ISO 9329, ISO 14329, ISO 26329, ISO 9330, ISO 14330, ISO 26330, ISO 9331, ISO 14331, ISO 26331, ISO 9332, ISO 14332, ISO 26332, ISO 9333, ISO 14333, ISO 26333, ISO 9334, ISO 14334, ISO 26334, ISO 9335, ISO 14335, ISO 26335, ISO 9336, ISO 14336, ISO 26336, ISO 9337, ISO 14337, ISO 26337, ISO 9338, ISO 14338, ISO 26338, ISO 9339, ISO 14339, ISO 26339, ISO 9340, ISO 14340, ISO 26340, ISO 9341, ISO 14341, ISO 26341, ISO 9342, ISO 14342, ISO 26342, ISO 9343, ISO 14343, ISO 26343, ISO 9344, ISO 14344, ISO 26344, ISO 9345, ISO 14345, ISO 26345, ISO 9346, ISO 14346, ISO 26346, ISO 9347, ISO 14347, ISO 26347, ISO 9348, ISO 14348, ISO 26348, ISO 9349, ISO 14349, ISO 26349, ISO 9350, ISO 14350, ISO 26350, ISO 9351, ISO 14351, ISO 26351, ISO 9352, ISO 14352, ISO 26352, ISO 9353, ISO 14353, ISO 26353, ISO 9354, ISO 14354, ISO 26354, ISO 9355, ISO 14355, ISO 26355, ISO 9356, ISO 14356, ISO 26356, ISO 9357, ISO 14357, ISO 26357, ISO 9358, ISO 14358, ISO 26358, ISO 9359, ISO 14359, ISO 26359, ISO 9360, ISO 14360, ISO 26360, ISO 9361, ISO 14361, ISO 26361, ISO 9362, ISO 14362, ISO 26362, ISO 9363, ISO 14363, ISO 26363, ISO 9364, ISO 14364, ISO 26364, ISO 9365, ISO 14365, ISO 26365, ISO 9366, ISO 14366, ISO 26366, ISO 9367, ISO 14367, ISO 26367, ISO 9368, ISO 14368, ISO 26368, ISO 9369, ISO 14369, ISO 26369, ISO 9370, ISO 14370, ISO 26370, ISO 9371, ISO 14371, ISO 26371, ISO 9372, ISO 14372, ISO 26372, ISO 9373, ISO 14373, ISO 26373, ISO 9374, ISO 14374, ISO 26374, ISO 9375, ISO 14375, ISO 26375, ISO 9376, ISO 14376, ISO 26376, ISO 9377, ISO 14377, ISO 26377, ISO 9378, ISO 14378, ISO 26378, ISO 9379, ISO 14379, ISO 26379, ISO 9380, ISO 14380, ISO 26380, ISO 9381, ISO 14381, ISO 26381, ISO 9382, ISO 14382, ISO 26382, ISO 9383, ISO 14383, ISO 26383, ISO 9384, ISO 14384, ISO 26384, ISO 9385, ISO 14385, ISO 26385, ISO 9386, ISO 14386, ISO 26386, ISO 9387, ISO 14387, ISO 26387, ISO 9388, ISO 14388, ISO 26388, ISO 9389, ISO 14389, ISO 26389, ISO 9390, ISO 14390, ISO 26390, ISO 9391, ISO 14391, ISO 26391, ISO 9392, ISO 14392, ISO 26392, ISO 9393, ISO 14393, ISO 26393, ISO 9394, ISO 14394, ISO 26394, ISO 9395, ISO 14395, ISO 26395, ISO 9396, ISO 14396, ISO 26396, ISO 9397, ISO 14397, ISO 26397, ISO 9398, ISO 14398, ISO 26398, ISO 9399, ISO 14399, ISO 26399, ISO 9400, ISO 14400, ISO 26400, ISO 9401, ISO 14401, ISO 26401, ISO 9402, ISO 14402, ISO 26402, ISO 9403, ISO 14403, ISO 26403, ISO 9404, ISO 14404, ISO 26404, ISO 9405, ISO 14405, ISO 26405, ISO 9406, ISO 14406, ISO 26406, ISO 9407, ISO 14407, ISO 26407, ISO 9408, ISO 14408, ISO 26408, ISO 9409, ISO 14409, ISO 26409, ISO 9410, ISO 14410, ISO 26410, ISO 9411, ISO 14411, ISO 26411, ISO 9412, ISO 14412, ISO 26412, ISO 9413, ISO 14413, ISO 26413, ISO 9414, ISO 14414, ISO 26414, ISO 9415, ISO 14415, ISO 26415, ISO 9416, ISO 14416, ISO 26416, ISO 9417, ISO 14417, ISO 26417, ISO 9418, ISO 14418, ISO 26418, ISO 9419, ISO 14419, ISO 26419, ISO 9420, ISO 14420, ISO 26420, ISO 9421, ISO 14421, ISO 26421, ISO 9422, ISO 14422, ISO 26422, ISO 9423, ISO 14423, ISO 26423, ISO 9424, ISO 14424, ISO 26424, ISO 9425, ISO 14425, ISO 26425, ISO 9426, ISO 14426, ISO 26426, ISO 9427, ISO 14427, ISO 26427, ISO 9428, ISO 14428, ISO 26428, ISO 9429, ISO 14429, ISO 26429, ISO 9430, ISO 14430, ISO 26430, ISO 9431, ISO 14431, ISO 26431, ISO 9432, ISO 14432, ISO 26432, ISO 9433, ISO 14433, ISO 26433, ISO 9434, ISO 14434, ISO 26434, ISO 9435, ISO 14435, ISO 26435, ISO 9436, ISO 14436, ISO 26436, ISO 9437, ISO 14437, ISO 26437, ISO 9438, ISO 14438, ISO 26438, ISO 9439, ISO 14439, ISO 26439, ISO 9440, ISO 14440, ISO 26440, ISO 9441, ISO 14441, ISO 26441, ISO 9442, ISO 14442, ISO 26442, ISO 9443, ISO 14443, ISO 26443, ISO 9444, ISO 14444, ISO 26444, ISO 9445, ISO 14445, ISO 26445, ISO 9446, ISO 14446, ISO 26446, ISO 9447, ISO 14447, ISO 26447, ISO 9448, ISO 14448, ISO 26448, ISO 9449, ISO 14449, ISO 26449, ISO 9450, ISO 14450, ISO 26450, ISO 9451, ISO 14451, ISO 26451, ISO 9452, ISO 14452, ISO 26452, ISO 9453, ISO 14453, ISO 26453, ISO 9454, ISO 14454, ISO 26454, ISO 9455, ISO 14455, ISO 26455, ISO 9456, ISO 14456, ISO 26456, ISO 9457, ISO 14457, ISO 26457, ISO 9458, ISO 14458, ISO 26458, ISO 9459, ISO 14459, ISO 26459, ISO 9460, ISO 14460, ISO 26460, ISO 9461, ISO 14461, ISO 26461, ISO 9462, ISO 14462, ISO 26462, ISO 9463, ISO 14463, ISO 26463, ISO 9464, ISO 14464, ISO 26464, ISO 9465, ISO 14465, ISO 26465, ISO 9466, ISO 14466, ISO 26466, ISO 9467, ISO 14467, ISO 26467, ISO 9468, ISO 14468, ISO 26468, ISO 9469, ISO 14469, ISO 26469, ISO 9470, ISO 14470, ISO 26470, ISO 9471, ISO 14471, ISO 26471, ISO 9472, ISO 14472, ISO 26472, ISO 9473, ISO 14473, ISO 26473, ISO 9474, ISO 14474, ISO 26474, ISO 9475, ISO 14475, ISO 26475, ISO 9476, ISO 14476, ISO 26476, ISO 9477, ISO 14477, ISO 26477, ISO 9478, ISO 14478, ISO 26478, ISO 9479, ISO 14479, ISO 26479, ISO 9480, ISO 14480, ISO 26480, ISO 9481, ISO 14481, ISO 26481, ISO 9482, ISO 14482, ISO 26482, ISO 9483, ISO 14483, ISO 26483, ISO 9484, ISO 14484, ISO 26484, ISO 9485, ISO 14485, ISO 26485, ISO 9486, ISO 14486, ISO 26486, ISO 9487, ISO 14487, ISO 26487, ISO 9488, ISO 14488, ISO 26488, ISO 9489, ISO 14489, ISO 26489, ISO 9490, ISO 14490, ISO 26490, ISO 9491, ISO 14491, ISO 26491, ISO 9492, ISO 14492, ISO 26492, ISO 9493, ISO 14493, ISO 26493, ISO 9494, ISO 14494, ISO 26494, ISO 9495, ISO 14495, ISO 26495, ISO 9496, ISO 14496, ISO 26496, ISO 9497, ISO 14497, ISO 26497, ISO 9498, ISO 14498, ISO 26498, ISO 9499, ISO 14499, ISO 26499, ISO 9500, ISO 14500, ISO 26500, ISO 9501, ISO 14501, ISO 26501, ISO 9502, ISO 14502, ISO 26502, ISO 9503, ISO 14503, ISO 26503, ISO 9504, ISO 14504, ISO 26504, ISO 9505, ISO 14505, ISO 26505, ISO 9506, ISO 14506, ISO 26506, ISO 9507, ISO 14507, ISO 26507, ISO 9508, ISO 14508, ISO 26508, ISO 9509, ISO 14509, ISO 26509, ISO 9510, ISO 14510, ISO 26510, ISO 9511, ISO 14511, ISO 26511, ISO 9512, ISO 14512, ISO 26512, ISO 9513, ISO 14513, ISO 26513, ISO 9514, ISO 14514, ISO 26514, ISO 9515, ISO 14515, ISO 26515, ISO 9516, ISO 14516, ISO 26516, ISO 9517, ISO 14517, ISO 26517, ISO 9518, ISO 14518, ISO 26518, ISO 9519, ISO 14519, ISO 26519, ISO 9520, ISO 14520, ISO 26520, ISO 9521, ISO 14521, ISO 26521, ISO 9522, ISO 14522, ISO 26522, ISO 9523, ISO 14523, ISO 26523, ISO 9524, ISO 14524, ISO 26524, ISO 9525, ISO 14525, ISO 26525, ISO 9526, ISO 14526, ISO 26526, ISO 9527, ISO 14527, ISO 26527, ISO 9528, ISO 145															



No. Urut Kategori Pengeluaran Kendaraan	Keterangan, Maksud dan Tujuan Pengeluaran	Status	Tahun Anggaran 2015	Terdistribusi Pengeluaran dan Pengeluaran Realisasi												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan			10		10		10		10		10		10		
	Kendaraan Kendaraan Kendaraan			10		10		10		10		10		10		
Kategori Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Ya	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	Kategori Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Ya	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Ya	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	Kategori Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Ya	10	10		10		10		10		10		10		
Kategori Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Ya	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	Kategori Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Ya	10	10		10		10		10		10		10		



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Indikator Kinerja Kategori Kategori	Status	Tahun Kategori Kategori	Target Kinerja Program dan Kegiatan Realisasi												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	guru	10	10		10		10		10		10		10		
	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	guru		10	100/100/100	10	100/100/100	10	100/100/100	10	100/100/100	10	100/100/100	10	100/100/100	100/100
	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	guru		10		10		10		10		10		10		
	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	guru		10		10		10		10		10		10		
	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	guru		10		10		10		10		10		10		
Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	guru	10	10		10		10		10		10		10		
	Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori	guru	10	10		10		10		10		10		10		



No. Urut Rencana Program Keberhasilan Berkas	Indikator Kinerja Program/Keberhasilan	Status	Tahun Pelaksanaan 2015	Target Kinerja Program dan Keberhasilan												Catatan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		
				Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rencana Keberhasilan Berkas Baru	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan	Baru	1	1		10		10		10		10		10		
	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan	Baru	10	10		10		10		10		10		10		
	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan	Baru	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan
	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan	Baru		10		10		10		10		10		10		
	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan	Baru		10		10		10		10		10		10		
	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan	Baru		10		10		10		10		10		10		
Rencana Keberhasilan Berkas Baru	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan	Baru	10.1	10.1		10.1		10.1		10.1		10.1		10.1		
	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan	Baru	10.1	10.1	1.000.000.000	10.1	1.000.000.000	10.1	1.000.000.000	10.1	1.000.000.000	10.1	1.000.000.000	10.1	1.000.000.000	Rencana Keberhasilan Berkas Baru Keberhasilan



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori	Kategori	Kategori												Kategori	
				Kategori													
				Kategori													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	
Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	
Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	
Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	



No. Urut Revisi Program Revisi Revisi	Jumlah Revisi Program Revisi	Revisi	Tahun Revisi Revisi	Tipe Revisi Program dan Revisi Revisi												Revisi
				Revisi		Revisi		Revisi		Revisi		Revisi		Revisi		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi Revisi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



No. Urut Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori	Tipe/Urut/Program dan Kegiatan/Kelembagaan												No
				Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori Kategori Kategori Kategori	Kategori	Kategori													Kategori Kategori Kategori Kategori

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan penyajian program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III, tidak lagi mengacu pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan perubahan aturan perundang-undangan dalam penganggaran dan tata cara nomenklatur program- kegiatan-sub kegiatan, maka kapasitas riil seharusnya diperoleh dari proyeksi total penerimaan daerah. Untuk itu, perlu adanya perubahan format penyajian tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel di bawah.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021-2026
Kabupaten Lampung Tengah

Daerah	Rupiah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KABUPATEN KOTAKabupaten Lampung Tengah	978.410.877.308	1.008.888.191.740	1.034.272.411.411	1.063.702.381.388	1.094.182.418.800	1.126.778.322.888
BELANJA	2.647.162.032.185	2.885.818.862.440	2.749.321.244.948	2.824.886.088.740	2.882.038.870.784	2.882.318.037.481
BELANJA OPERASI	1.888.108.744.104	1.881.417.278.328	1.919.042.909.820	1.937.426.848.418	1.994.278.382.382	2.006.908.893.080
Belanja Pegawai	1.302.687.038.880	1.302.687.038.880	1.328.700.277.200	1.351.284.784.848	1.378.278.880.840	1.391.808.478.184
Belanja Barang dan Jasa	228.228.470.780	271.027.388.280	282.308.011.821	284.128.181.304	306.042.275.891	318.183.323.204
Belanja Sukesi	844.478.000	888.284.900	888.471.790	877.801.228	889.287.280	891.144.328
Belanja Hibah	104.965.755.775	107.268.070.891	109.308.272.208	111.280.499.754	112.818.209.790	113.890.675.845
Belanja Bantuan Sosial	42.000.000	42.840.000	43.896.800	44.270.728	45.482.120	46.271.284
BELANJA MODAL	282.948.989.881	297.104.820.084	311.948.858.891	327.830.917.884	343.892.912.789	361.074.788.828
Belanja Modal Tanah	2.841.262.000	2.983.322.100	3.132.481.355	3.288.112.923	3.453.271.719	3.626.350.305
Belanja Modal Pemukiman dan Desa	71.407.282.982	74.877.823.424	78.728.226.108	82.882.282.911	86.789.006.087	91.128.808.280



Kategori	Program					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Biaya Modal Gedung dan Bangunan	30.812.782.122	30.343.921.239	33.900.007.301	30.000.010.000	27.440.974.199	28.313.022.909
Biaya Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	177.482.020.744	180.388.028.081	193.024.929.402	202.409.207.400	213.742.007.822	220.829.801.224
Biaya Modal Aset Tetap Lainnya	425.610.000	434.122.200	443.804.644	451.860.737	460.892.952	469.907.821
SALINAN TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Biaya Tidak Terduga	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
SALINAN TRANSFER	468.082.318.220	478.096.424.121	488.308.625.828	499.728.322.820	511.886.271.842	523.733.285.761
Biaya Bagi Hasil	8.734.373.020	10.220.091.871	10.732.146.255	11.268.752.587	11.832.191.248	12.423.800.808
Biaya Bantuan Keuangan	400.247.942.200	400.772.242.480	417.470.209.222	430.409.209.002	449.734.120.282	461.209.224.922
PENSIYAHAN	82.932.472.800	83.791.636.874	82.282.629.983	83.847.200.226	85.488.997.107	87.211.872.527
PENSIYAHAN	82.932.472.800	83.791.636.874	82.282.629.983	83.847.200.226	85.488.997.107	87.211.872.527
Sisa Laba Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	32.282.472.000	102.870.080.081,28	87.282.629.983	88.247.200.226	70.488.997.107	72.211.872.527
PENYELUARAN	0	45.012.862.470	45.860.287.820	43.821.828.187	41.774.082.410	38.800.242.897



Kategori	Program					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengembangan Model Desa	-	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembangunan Ruang Rural (m2)		40.015.883.470	40.000.921.830	28.031.338.187	36774982412	20.000.943.297

7.2 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih untuk periode 2021-2024.

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kota Batam juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detail program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 di bawah ini.



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Monev No	Kredit Rasio (Rasio)	Rasio Kinerja Kegiatan dan Kinerja Persepsi														No	Keterangan
					Rasio		Rasio		Rasio		Rasio		Rasio		Rasio					
					P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Tingkat penyerapan dana kegiatan dan T. B dan Rasio Kualitas	1	100	100		100		100		100		100		100		100			
		Tingkat penyerapan dana kegiatan dan T. B dan Rasio Kualitas	1	100	100		100		100		100		100		100		100			
100	Rasio Kualitas Kegiatan	Rasio Kualitas Kegiatan	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Jumlah Rasio Kinerja dan Rasio Persepsi																				
100	Rasio Kualitas Kegiatan	Rasio Kualitas Kegiatan	1		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Rasio Kualitas Kegiatan	1		100		100		100		100		100		100		100			
		Rasio Kualitas Kegiatan	1		100		100		100		100		100		100		100			



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kantor Instansi Kegiatan)	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta (Orang)	Tipe dan Jumlah Peserta/Kegiatan												No	Catatan
					PBB		PBB		PBB		PBB		PBB		PBB			
					P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Pemerintah Kabupaten Kalteng	1		10		10		10		10		10		10			
		Pemerintah Kabupaten Kalteng	2		10		10		10		10		10		10			
1000	Pemerintah Kabupaten Kalteng	Pemerintah Kabupaten Kalteng	3														Pemerintah Kabupaten Kalteng	
		Pemerintah Kabupaten Kalteng	4		100													



No.	Kategori Kegiatan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Materi	Kategori Kegiatan dan Program Kegiatan	Rekapitulasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran												Jumlah Kegiatan	Jumlah Realisasi Anggaran
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Jumlah Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran																		
100	Pusat Kegiatan dan Program Kegiatan	Pusat Kegiatan dan Program Kegiatan	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
101	Pusat Kegiatan dan Program Kegiatan	Pusat Kegiatan dan Program Kegiatan	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
102	Pusat Kegiatan dan Program Kegiatan	Pusat Kegiatan dan Program Kegiatan	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
103	Pusat Kegiatan dan Program Kegiatan	Pusat Kegiatan dan Program Kegiatan	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		



No.	Nama Pemohon dan Program Kegiatan	Jenis Kegiatan (Kategori Kegiatan)	No. Urut	Jumlah Dokumen (Kategori)	Jumlah Dokumen yang Berespon												No.	Jenis
					DOK		DOK		DOK		DOK		DOK		DOK			
					D	R	D	R	D	R	D	R	D	R	D	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pemerintah Kabupaten Bantul	Program Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemerintah Kabupaten Bantul	Program Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemerintah Kabupaten Bantul	Program Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemerintah Kabupaten Bantul	Program Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemerintah Kabupaten Bantul	Program Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Nama Masyarakat dan Program Kegiatan	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah Kelas (kelas)	Rincian Biaya Kegiatan dan Keperluan												No	Catatan
				BPP		BPP		BPP		BPP		BPP		BPP			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1001	Kegiatan Pengujian Keterampilan dan Keterampilan Kerja	10	10	10		10		10		10		10		10		Kegiatan Pengujian Keterampilan dan Keterampilan Kerja	1001
				10		10		10		10		10		10			
				10		10		10		10		10		10			
				10		10		10		10		10		10			
1002	Kegiatan Pengujian Keterampilan dan Keterampilan Kerja	10	10	10		10		10		10		10		10		Kegiatan Pengujian Keterampilan dan Keterampilan Kerja	1002
				10		10		10		10		10		10			
				10		10		10		10		10		10			
				10		10		10		10		10		10			
1003	Kegiatan Pengujian Keterampilan dan Keterampilan Kerja	10	10	10		10		10		10		10		10		Kegiatan Pengujian Keterampilan dan Keterampilan Kerja	1003
				10		10		10		10		10		10			
				10		10		10		10		10		10			
				10		10		10		10		10		10			



No.	Nama Instansi Pemerintah dan Program Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Jenis Dokumen (Survei, Laporan, dll.)	No. Dokumen	Tahun dan Bulan Terbit	Tipe dan Lokasi Pengumpulan Dokumen												No.	Tgl.
					Survei		Laporan		Survei		Laporan		Survei		Laporan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Proyek Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	1		10		10		10		10		10		10		Kegiatan Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	2010
		Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	2		10	10/10/10	10	10/10/10	10	10/10/10	10	10/10/10	10	10/10/10	10	10/10/10		
		Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	3		10		10		10		10		10		10			
		Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	4		10		10		10		10		10		10			
		Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	5		10		10		10		10		10		10			
2	Proyek Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	1		10		10		10		10		10		10		Kegiatan Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	2010
		Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	2		10	10/10/10	10	10/10/10	10	10/10/10	10	10/10/10	10	10/10/10	10	10/10/10		
		Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	3		10		10		10		10		10		10			
		Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	4		10		10		10		10		10		10			
		Survei Arkeologi Kebudayaan dan Sejarah Kalteng	5		10		10		10		10		10		10			



No	Kategori Pemerintah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kualitas (Output) Kegiatan	Monev (%)	Kredit Rasio Rendahnya	Tipe Kinerja Program dan Kegiatan												No	KPI
					P1		P2		P3		P4		P5		P6			
					P1	P2	P2	P2	P3	P3	P4	P4	P5	P5	P6	P6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
100%	Pemerintah Kalselguben Kalselguben	Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben																		
100%	Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Pemerintah Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben Kalselguben	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jenis Kegiatan	Monev	Kredit Realisasi (Rp)	Rekapitulasi Program dan Kegiatan												No	Catatan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
100	Program Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa	Y	-	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	100	Program Pembangunan Jalan Desa
		Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	Program Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	Program Pembangunan Jalan Desa
		Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
102	Program Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	Program Pembangunan Jalan Desa
		Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	Program Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	Program Pembangunan Jalan Desa
		Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	Program Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	Program Pembangunan Jalan Desa
		Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	Program Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	Program Pembangunan Jalan Desa
		Pembangunan Jalan Desa	Y	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kerja (Kantor/Kendaraan Kendaraan)	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan (Unit)	Rekapitulasi Kegiatan dan Kinerja														No	Keterangan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2015	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	
		Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2016	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	
		Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Bus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Masa Waktu (hari)	Gaji Bulan (Rp.000)	Rekapitulasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran												No	Catatan
					2017		2018		2019		2020		2021		2022			
					P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10 10 10 10	4000	4000		4000		4000		4000		4000		4000			
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Jumlah Revisi Kegiatan dan Realisasi Anggaran																		
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan
1000	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan	10	40	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000	40	1000000		Revisi Kegiatan Kegiatan Kegiatan



No.	Nama Kategori dan Program Kegiatan	Lokasi Kerja (Kantor/Instansi/Tempat)	Jenis Kegiatan	Jumlah Karyawan	Jumlah Kendaraan	Rekapitulasi Kegiatan dan Kinerja												No	Kategori
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Manajemen Pengelolaan Keuangan Masyarakat	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan masyarakat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Manajemen Pengelolaan Keuangan Masyarakat	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan masyarakat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Manajemen Pengelolaan Keuangan Masyarakat	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan masyarakat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Manajemen Pengelolaan Keuangan Masyarakat	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan masyarakat.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kerja (Kantor Instansi Sasaran)	Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan (Kode)	Rincian Kegiatan dan Sasaran												Catatan	Keterangan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Program Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	
		Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	
Jumlah seluruh kegiatan dan sasaran yang dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan																		
2.	Program Pengembangan Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	
		Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	
		Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	
		Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	
		Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kecamatan Pengembangan Kecamatan	



No.	Nama Masyarakat dan Program Kegiatan Sampung	Jumlah Warga Sampung (orang)	Jumlah Korban (orang)	Jumlah Korban Program dan Kegiatan												No.	Keterangan
				2015		2016		2017		2018		2019		2020			
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1.1.1	Program Kegiatan Kegiatan	Program Kegiatan Kegiatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2	Program Kegiatan Kegiatan	Program Kegiatan Kegiatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.3	Program Kegiatan Kegiatan	Program Kegiatan Kegiatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4	Program Kegiatan Kegiatan	Program Kegiatan Kegiatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jenis Kegiatan	Monev	Kredit	Rekapitulasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran												Catatan	No	Urut
					2015		2016		2017		2018		2019		2020				
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
[Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2015-2020]																			
1002	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD	Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan lain yang ada di dalam APBD		
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD	Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
1003	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD	Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100		Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan lain yang ada di dalam APBD		
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD	Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
1004	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD	Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100		Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan lain yang ada di dalam APBD		
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
		Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				
	Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD	Revisi dan pemantauan pelaksanaan APBD	1		100		100		100		100		100		100				



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jenis Kegiatan dan Lokasi Kegiatan	Monev No.	Kredit Rak Rp.000 (Rp.)	Rekapitulasi Kegiatan dan Kinerja												No	KPI
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah	1	175	1.18		100		100		0		0		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah	2	175	1.18		100		100		0		0		10			
1.100	Pusat Kesehatan Kecamatan Kuala Kluang	Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10	1.20-1.20	10	1.20-1.20	10	1.20-1.20	0	1.20-1.20	0	1.20-1.20	0	1.20-1.20	Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah	
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
		Penerapan Program Kegiatan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuala Kluang Kabupaten Kuala Kluang Provinsi Kalimantan Tengah		10	10		10		10		10		10		10			
	</																	



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kecamatan/Kabupaten)	Monev	Kredit (Rp.000.000)	Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah												No	Catatan		
					2015		2016		2017		2018		2019		2020					
					P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
REKAPITULASI KEBERKAYAAN KECAMATAN																				
1.1	Kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	-		100	2.175.000.000	100	2.000.000.000	90	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.175.000.000	100	2.000.000.000	-	-		
1.2	Kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	-		100	2.175.000.000	100	2.000.000.000	90	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.175.000.000	100	2.000.000.000	-	-		
1.3	Kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	-		100	2.175.000.000	100	2.000.000.000	90	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.175.000.000	100	2.000.000.000	-	-		



No.	Nama Instansi dan Program Kerja	Lokasi Kerja (Kantor/Instansi)	Monev	Kendali	Rencana Kegiatan dan Kinerja												No	KPI
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
JAWABAN PERTANYAAN KELOMPOK DISKUSI																		
1.02	Kantor Kecamatan Lingsibau	Kantor Kecamatan Lingsibau	Kantor Kecamatan Lingsibau	Kantor Kecamatan Lingsibau	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	Kantor Kecamatan Lingsibau	KPI
2.02	Kantor Kecamatan Lingsibau	Kantor Kecamatan Lingsibau	Kantor Kecamatan Lingsibau	Kantor Kecamatan Lingsibau	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	Kantor Kecamatan Lingsibau	KPI



No.	Nama Instansi dan Program Kerja/Proyek	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai	Tipe dan Sub-Tipe	Tipe dan Program Kerja/Proyek/Proses												Nilai	Catatan
					P1		P2		P3		P4		P5		P6			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Penyusunan Rencana Kerja yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah	1	2015	100			100		100		100		100		100		
		Penyusunan Rencana Kerja yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah	1	2015	100			100		100		100		100		100		
2. 2. 2.	Program Kerja	Penyusunan Rencana Kerja yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah	1	2015	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Program Kerja yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah	
		Penyusunan Rencana Kerja yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah	1	2015	100			100		100		100		100		100		



No.	Nama Penerbit dan Tahun Terbit	Judul Buku (atau Lembar Judul)	No. Urut	Klasifikasi Desimal	Kategori Klasifikasi Klasifikasi												No.	Urut
					000		001		002		003		004		005			
					a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Buku tentang sifat dan fungsi sistem sirkulasi darah pada manusia	1	61	61			61			61		61		61			
		Buku tentang sifat dan fungsi sistem sirkulasi darah pada manusia	1	61	61			61			61		61		61			
		Buku tentang sifat dan fungsi sistem sirkulasi darah pada manusia	1	61	61			61			61		61		61			



No.	Nama Peserta Didik dan Program Kejuruan	Jenis Kelamin	Umur	Grafik	Kejuruan												Nilai	Rata				
					IPA				IPS				Mat						Bah			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4
1			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			
			Persepsi																			



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kualitas (Output) Kualitas	Monev (K)	Kredit Rasio (K)	Tipe dan Program dan Kegiatan												K1	K2
					P1		P2		P3		P4		P5		P6			
					P1	P2	P2	P2	P3	P4	P4	P4	P5	P5	P6	P6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Indikator																
		Revisi 2015 dan lain-lain Revisi 2016 Revisi 2017 Revisi 2018 Revisi 2019 Revisi 2020	1		10		10		10		10		10		10			
		Revisi 2015 dan lain-lain Revisi 2016 Revisi 2017 Revisi 2018 Revisi 2019 Revisi 2020	1		10		10		10		10		10		10			
2.10	Revisi 2015 dan lain-lain Revisi 2016 Revisi 2017 Revisi 2018 Revisi 2019 Revisi 2020	Revisi 2015 dan lain-lain Revisi 2016 Revisi 2017 Revisi 2018 Revisi 2019 Revisi 2020	1	1.0	1.0	10.0000	1	10.0000	1.0	10.0000	1	1.0000	1.0	10.0000	1	10.0000	Revisi 2015 dan lain-lain Revisi 2016 Revisi 2017 Revisi 2018 Revisi 2019 Revisi 2020	
		Revisi 2015 dan lain-lain Revisi 2016 Revisi 2017 Revisi 2018 Revisi 2019 Revisi 2020	1	1.0	1.0		1		1		1		1		1			



No.	Nama Unit Kegiatan dan Program Kegiatan Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kecamatan, Desa, RT)	Monev (No.)	Kredit Rak (Rp.000)	Rekapitulasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran												No	Catatan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.1	Kegiatan Pengembangan dan Pemertahanan Kegiatan	Pemertahanan kegiatan yang sudah ada dan kegiatan kegiatan yang baru yang belum ada	1	1	1.1	100.000	0	10.000.000	0.00	10.00.000	0	1.000.000	0.00	10.000.000	0	10.000.000		Pemertahanan kegiatan yang sudah ada (Rp.000.000)
1.1.1.2	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Pemertahanan kegiatan yang sudah ada dan kegiatan kegiatan yang baru yang belum ada	1	1.00	1.00	10.000.000	0	10.000.000	0.17	10.000.000	0	10.000.000	0.17	10.000.000	0	10.000.000		Pemertahanan kegiatan yang sudah ada (Rp.000.000)
1.1.1.3	Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Pemertahanan kegiatan yang sudah ada dan kegiatan kegiatan yang baru yang belum ada	1	1.00	1.00	10.000.000	0	10.000.000	0.17	10.000.000	0	10.000.000	0.17	10.000.000	0	10.000.000		Pemertahanan kegiatan yang sudah ada (Rp.000.000)
		Pemertahanan kegiatan yang sudah ada dan kegiatan kegiatan yang baru yang belum ada	1															



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kerja (Kantor/Instansi/Tempat)	Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan	Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran												Catatan	No.	Tgl.
					2011		2012		2013		2014		2015		2016				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.1	Kantor Kecamatan Lingsar	Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian utara Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian timur Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian barat Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian tengah Kecamatan Lingsar, yang terletak di bagian selatan																	



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jenis Kegiatan	Monev	Kredit	Rekapitulasi Program dan Kegiatan												No	Catatan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.10	Kepala Kecamatan Kecamatan Tana Toraja	Revisi Revis																



No.	Nama Masyarakat dan Program Kegiatan	Jenis Kegiatan dan Lokasi Kegiatan	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta (orang)	Rekapitulasi Kegiatan dan Hasil Kegiatan														No.	Catatan
					2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berkas			10		10		10		10		10		10		10			
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berkas			10		10		10		10		10		10		10			
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berkas			10		10		10		10		10		10		10			
1.101	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas																		
1.102	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas																		
1.103	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas																		
1.104	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Berkas																		



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kerja (Kabupaten/Kota)	Monev (Ya/Tidak)	Kredit Rak (Rp.000.000)	Rekapitulasi Kegiatan dan Kinerja												No	KPI
					2011		2012		2013		2014		2015		2016			
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Jumlah Kegiatan dan Kinerja																		
1.1.1	Pegawai Pengelola dan Statistik	Kecamatan Tanjung Paling Kabupaten Tanjung Paling	Ya				10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	Pegawai Pengelola dan Statistik	
Jumlah Kegiatan dan Kinerja																		
		Kecamatan 200 Kabupaten 200	Ya				10		10		10		10		10			
Jumlah Kegiatan dan Kinerja																		
	Pegawai Pengelola dan Statistik					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Pegawai Pengelola dan Statistik	
Jumlah Kegiatan dan Kinerja																		
1.1.2	Pegawai Pengelola dan Statistik	Kecamatan 200 Kabupaten 200	Ya	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	Pegawai Pengelola dan Statistik	
Jumlah Kegiatan dan Kinerja																		



No.	Nama Unit Kecamatan dan Program Kegiatan	Lokasi (Kantor Kecamatan/Desa)	Masa Waktu	Jumlah Orang (SDP)	Rekapitulasi Kegiatan dan Pengeluaran												No	Catatan
					2011		2012		2013		2014		2015		2016			
					a	kg	a	kg	a	kg	a	kg	a	kg	a	kg		
1234	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Tengah	Kecamatan Tengah Kecamatan Tengah	1	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Tengah
REKAM DOKUMEN KEBUDAYAAN LAMPUNG TENGAH																		
1235	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Tengah	Kecamatan Tengah Kecamatan Tengah	1		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Tengah
		Kecamatan Tengah Kecamatan Tengah	1		10		10		10		10		10		10			
		Kecamatan Tengah Kecamatan Tengah	1		10		10		10		10		10		10			
		Kecamatan Tengah Kecamatan Tengah	1		10		10		10		10		10		10			
1236	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Tengah	Kecamatan Tengah Kecamatan Tengah	1	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Tengah



No	Nama Instansi dan Program Kerja/Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Mata Pelajaran	Kategori	Target Kinerja Program dan Kegiatan/Program												Catatan	Keterangan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
JABATAN KEPALA DINAS DAN KETUA DINAS																		
1002	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	
1003	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	
1004	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kantor Kecamatan Kampung Mawar Kampung Mawar Kampung Mawar	



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah Kelas (Kelas)	Jumlah Siswa (Siswa)	Rincian Biaya Kegiatan dan Kelembagaan												No	Catatan		
					BPP		BPP		BPP		BPP		BPP		BPP					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1001	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	1000	10	1000	1000	1.175.000,00	1000	1.200.000,00	1000	1.225.000,00	1000	1.250.000,00	1000	1.275.000,00	1000	1.300.000,00	1000	1.325.000,00	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	
1002	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	1000	10	1000	1000	1.350.000,00	1000	1.375.000,00	1000	1.400.000,00	1000	1.425.000,00	1000	1.450.000,00	1000	1.475.000,00	1000	1.500.000,00	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	
1003	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	1000	10	1000	1000	1.525.000,00	1000	1.550.000,00	1000	1.575.000,00	1000	1.600.000,00	1000	1.625.000,00	1000	1.650.000,00	1000	1.675.000,00	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	
Jumlah (Rincian Biaya Kegiatan dan Kelembagaan)																				
1004	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	1000	10	1000	1000	1.700.000,00	1000	1.725.000,00	1000	1.750.000,00	1000	1.775.000,00	1000	1.800.000,00	1000	1.825.000,00	1000	1.850.000,00	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	
1005	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	1000	10	1000	1000	1.875.000,00	1000	1.900.000,00	1000	1.925.000,00	1000	1.950.000,00	1000	1.975.000,00	1000	2.000.000,00	1000	2.025.000,00	Pusat Kegiatan Masyarakat Kecamatan Lampung Tengah	



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kualitas (Output) Kuantitatif	Monev (%)	Kredit Rasio (%)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja												No	KPI
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Penyediaan 50 tempat tidur untuk pasien Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap	5		10		10		10		10		10		10			
		Penyediaan 50 tempat tidur untuk pasien Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap	5		10		10		10		10		10		10			
1.1.1	Program Kesehatan Jantung Jantung Jantung	1.1.1.1 Jantung Jantung Jantung Jantung Jantung Jantung	5	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
		Penyediaan 50 tempat tidur untuk pasien Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap Rawat Inap	5	100	100		100		100		100		100		100			
1.1.2	Program Kesehatan Jantung Jantung Jantung	1.1.2.1 Jantung Jantung Jantung Jantung Jantung Jantung	5	10	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.1.3	Program Kesehatan Jantung Jantung Jantung	1.1.3.1 Jantung Jantung Jantung Jantung Jantung Jantung	5				10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000		
1.1.4	Program Kesehatan Jantung Jantung Jantung	1.1.4.1 Jantung Jantung Jantung Jantung Jantung Jantung	5		10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	10	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kantor Instansi Sasaran)	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta (Orang)	Rekapitulasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran												No	Catatan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah																		
Jumlah Realisasi dan Realisasi Anggaran																		
Lamp.	Kantor Pengurus Kantor Peng																	



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jumlah Tenaga Karya (orang)	Masa Waktu (hari)	Kredit Total (Rp.000.000)	Rincian Biaya Kegiatan dan Kegiatan Lain												No	Catatan
					BPP		BPP		BPP		BPP		BPP		BPP			
					P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.771	Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru	Kegiatan pemeriksaan kegiatan	1	10	10,0	1.275.000,00	10,0	1.275.000,00	10,0	1.275.000,00	10,0	1.275.000,00	10,0	1.275.000,00	10,0	1.275.000,00		Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru
2.772	Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru	Kegiatan pemeriksaan kegiatan	1		1,0	27.750,00	1,0	27.750,00	1,0	27.750,00	1,0	27.750,00	1,0	27.750,00	1,0	27.750,00		Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru
2.773	Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru	Kegiatan pemeriksaan kegiatan	1	1	1,1	4.447.500,00	1,1	4.447.500,00	1,1	4.447.500,00	1,1	4.447.500,00	1,1	4.447.500,00	1,1	4.447.500,00		Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru
2.774	Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru	Kegiatan pemeriksaan kegiatan	1		10	1.275.000,00	10	1.275.000,00	10	1.275.000,00	10	1.275.000,00	10	1.275.000,00	10	1.275.000,00		Kantor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru
		Kegiatan pemeriksaan kegiatan	1		10		10		10		10		10		10			
		Kegiatan pemeriksaan kegiatan	1		10		10		10		10		10		10			
		Kegiatan pemeriksaan kegiatan	1		10		10		10		10		10		10			



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kabupaten/Kota)	Monev No.	Kategori No.	Rekapitulasi Kegiatan dan Kinerja												No.	Kategori
					2011		2012		2013		2014		2015		2016			
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			12 13 14															
101	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep (Kantor Pemerintah)	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep (Kantor Pemerintah)	1	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep	
102	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep (Kantor Pemerintah)	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep (Kantor Pemerintah)	2	2	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep	
103	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep (Kantor Pemerintah)	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep (Kantor Pemerintah)	3	3	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000	Kantor Pemerintah Kabupaten Pangkep	



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jenis Kegiatan (Kategori Kegiatan)	Masa Waktu	Kategori Kegiatan	Tipe Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan												No.	Kategori
					Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Program Kegiatan	Kegiatan																
2	Program Kegiatan	Kegiatan																
3	Program Kegiatan	Kegiatan																
Kategori Kegiatan Kegiatan dan Kegiatan																		
4	Program Kegiatan	Kegiatan																
5	Program Kegiatan	Kegiatan																
6	Program Kegiatan	Kegiatan																
7	Program Kegiatan	Kegiatan																
8	Program Kegiatan	Kegiatan																
9	Program Kegiatan	Kegiatan																
10	Program Kegiatan	Kegiatan																
11	Program Kegiatan	Kegiatan																
12	Program Kegiatan	Kegiatan																
13	Program Kegiatan	Kegiatan																
14	Program Kegiatan	Kegiatan																
15	Program Kegiatan	Kegiatan																
16	Program Kegiatan	Kegiatan																
17	Program Kegiatan	Kegiatan																
18	Program Kegiatan	Kegiatan																
19	Program Kegiatan	Kegiatan																
20	Program Kegiatan	Kegiatan																



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jumlah Tenaga Karya (orang)	Masa Waktu	Kredit Rak (Rp.000 000)	Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah												No	KIP
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.01	Program Pengembangan Basis Data Kampung	Pengembangan sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi	1	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	Agenda Kampung Pengembangan Basis Data Kampung	
1.02	Program Pengembangan Basis Data Kampung	Pengembangan sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi	1		-10	10.000.000	-10	10.000.000	-10	10.000.000	-10	10.000.000	-10	10.000.000	-10	10.000.000	Agenda Kampung Pengembangan Basis Data Kampung	
		Pengembangan sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi	1		10		10		10		10		10		10			
		Pengembangan sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi	1		10		10		10		10		10		10			
		Pengembangan sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi	1		10		10		10		10		10		10			
1.03	Program Pengembangan Basis Data Kampung	Pengembangan sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi sistem informasi	1	10	10		10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	Agenda Kampung Pengembangan Basis Data Kampung	



No.	Nama Masyarakat dan Program Kegiatan	Lokasi Kerja (Kantor/Tempat Kegiatan)	Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan	Rekapitulasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran												No	Catatan
					2011		2012		2013		2014		2015		2016			
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1001	Program Konservasi Satwa Kawasan Konservasi	Kawasan satwa dan alam konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi	Konservasi Satwa	Konservasi	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000		Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi
1002	Program Konservasi Satwa Kawasan Konservasi	Kawasan satwa dan alam konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi	Konservasi Satwa	Konservasi	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000		Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi
Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran																		
1003	Program Konservasi Satwa Kawasan Konservasi	Kawasan satwa dan alam konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi	Konservasi Satwa	Konservasi	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000		Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi
					10		10		10		10		10		10			
					10		10		10		10		10		10			
					10		10		10		10		10		10			
					10		10		10		10		10		10			



No.	Nama Masyarakat dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kecamatan/ Kabupaten)	Monev (%)	Kredit Rak (Rp.000)	Rencana Kegiatan dan Anggaran Masyarakat												No	Cat
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		00																
2015	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kalteng Kecamatan Batu	5	100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	
2016	Agensi Pengembangan dan Pengembangan Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kalteng Kecamatan Batu	5	100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	Agensi Pengembangan dan Pengembangan Masyarakat	
2017	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kalteng Kecamatan Batu	5	100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	
2018	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kalteng Kecamatan Batu	5	100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	
2019	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kalteng Kecamatan Batu	5	100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	
2020	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	Pemerintah Kabupaten Kalteng Kecamatan Batu	5	100	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	Agensi Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat	
					00		00		00		00		00		00			



No.	Nama Masyarakat dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Desa/Kelurahan/ Kampung)	Jumlah Peserta	Kategori Kegiatan	Rincian Kegiatan dan Sasaran														No.	Catatan
					Kegiatan 1		Kegiatan 2		Kegiatan 3		Kegiatan 4		Kegiatan 5		Kegiatan 6					
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru	5		1		1		1		1		1		1		1			
		Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru Kecamatan Kotawaringin Baru	5		10		10		10		10		10		10		10			
		Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baru Kecamatan Kotawaringin Baru Kecamatan Kotawaringin Baru	5		10		10		10		10		10		10		10			
Jumlah Kegiatan dan Sasaran																				
2015	Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Baru	Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Baru	50	10	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000	Kegiatan Kecamatan Kotawaringin Baru	



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kabupaten/Kota)	Monev (Ya/Tidak)	Kredit Rak (Rp.000.000)	Tipe dan Luas Kegiatan (Kategori)												No	Kategori
					PBB		PBB		PBB		PBB		PBB		PBB			
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DAFTAR KEGIATAN																		
1.1	Kantor Pemerintah Kabupaten Sungai Raya Kalsel	Kantor Pemerintah Kabupaten Sungai Raya Kalsel	Ya		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	
1.2	Kantor Pemerintah Kabupaten Sungai Raya Kalsel	Kantor Pemerintah Kabupaten Sungai Raya Kalsel	Ya		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	
1.3	Kantor Pemerintah Kabupaten Sungai Raya Kalsel	Kantor Pemerintah Kabupaten Sungai Raya Kalsel	Ya		100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	10.000.000.000	100	



No	Kecamatan dan Kabupaten	Desa dan Kelurahan	Desa No	Kantor Desa No	Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk												No	K
					P1		P2		P3		P4		P5		P6			
					P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15.1	Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene	Kecamatan Pangkalan Desa No. 001	1	10	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene	10
		Kecamatan Pangkalan Desa No. 002	2	10	10		10		10		10		10		10			
		Kecamatan Pangkalan Desa No. 003	3	10	10		10		10		10		10		10			
		Kecamatan Pangkalan Desa No. 004	4	10	10		10		10		10		10		10			
Jumlah keseluruhan																		
15.2	Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene	Kecamatan Pangkalan Desa No. 001	1		10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	10	1.000.000.00	Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene Kecamatan Pangkalan dan Pangkajene	10
		Kecamatan Pangkalan Desa No. 002	2		10		10		10		10		10		10			
		Kecamatan Pangkalan Desa No. 003	3		10		10		10		10		10		10			
		Kecamatan Pangkalan Desa No. 004	4		10		10		10		10		10		10			



No	Nama Masyarakat dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kecamatan/ Desa)	Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan	Rincian Kegiatan dan Realisasi Anggaran												Catatan	No
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
REKAPITULASI																		
1012	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Kumpang Desa Kumpang Kecamatan Kumpang Kabupaten Kumpang	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Kumpang Desa Kumpang Kecamatan Kumpang Kabupaten Kumpang	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Kumpang Desa Kumpang Kecamatan Kumpang Kabupaten Kumpang	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Kumpang Desa Kumpang Kecamatan Kumpang Kabupaten Kumpang	
					100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
					100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
					100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
1013	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Kumpang Desa Kumpang Kecamatan Kumpang Kabupaten Kumpang	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Kumpang Desa Kumpang Kecamatan Kumpang Kabupaten Kumpang	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Kumpang Desa Kumpang Kecamatan Kumpang Kabupaten Kumpang	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Kumpang Desa Kumpang Kecamatan Kumpang Kabupaten Kumpang	
					100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
					100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
					100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		



No.	Kategori Pembangunan dan Program Kegiatan Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Kegiatan (Kabupaten/Kota)	Monev (Ya/Tidak)	Kredit Rak (Rp.000.000)	Tipe dan Luas Kegiatan dan Luas Pengelolaan												No	Kategori
					P1		P2		P3		P4		P5		P6			
					P1	P2	P2	P2	P3	P4	P4	P4	P5	P5	P6	P6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Indah																
		Pusat Pengelolaan Lingkungan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP)	Ya		100		100		100		100		100		100			
		Pusat Pengelolaan Lingkungan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP)	Ya		100		100		100		100		100		100			
		Pusat Pengelolaan Lingkungan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP) Kawasan Perkotaan (PPLP)	Ya		100		100		100		100		100		100			
2014	Kategori Pengelolaan Lingkungan dan Pertanian	Pusat Pengelolaan Lingkungan dan Pertanian (PPLP)	Ya	100.000.000	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	3.000.000.000	100	4.000.000.000	100	5.000.000.000	100	6.000.000.000		Pusat Pengelolaan Lingkungan dan Pertanian
		Pusat Pengelolaan Lingkungan dan Pertanian (PPLP)	Ya	100.000.000	100		100		100		100		100		100			
		Pusat Pengelolaan Lingkungan dan Pertanian (PPLP)	Ya	100.000.000	100		100		100		100		100		100			



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kerja (Kantor/Instansi/Kendaraan)	Jenis Kendaraan	Kategori Kendaraan (Kendaraan Kendaraan)	Rekam DOKUMEN												No.	Jenis		
					Rekam DOKUMEN															
					REKAM DOKUMEN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
REKAM DOKUMEN																				
1001	Kantor Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001		
					1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	
					1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
					1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
1002	Kantor Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan	Kendaraan Kendaraan Kendaraan	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002			
					1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	1002	



No	Kategori Kegiatan dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Kuantitas	Kualitas (Skor)	Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan												Catatan	No
					2018		2019		2020		2021		2022		2023			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
REKAM DANA MELAKUKAKAN																		
1.1	Kategori Kegiatan dan Program Kegiatan	Kegiatan rekam data dan informasi publik	1	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kegiatan rekam data dan informasi publik	
		Kegiatan rekam data dan informasi publik	1	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000				
		Kegiatan rekam data dan informasi publik	1	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000				
		Kegiatan rekam data dan informasi publik	1	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000				
REKAM DANA MELAKUKAKAN																		
1.2	Kategori Kegiatan dan Program Kegiatan	Kegiatan rekam data dan informasi publik	1	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kegiatan rekam data dan informasi publik	
		Kegiatan rekam data dan informasi publik	1	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000				
		Kegiatan rekam data dan informasi publik	1	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000				
		Kegiatan rekam data dan informasi publik	1	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000				



No	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Jumlah Tenaga Karya (orang)	Masa Waktu (hari)	Kredit Fiskal Rp.000 Miliar	Rincian Biaya Kegiatan dan Kinerja												No	Catatan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng	P	Ng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	5		10		10		10		10		10		10			
		Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	5		10		10		10		10		10		10			
		Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	5		10		10		10		10		10		10			
2015	Pusat Pengembangan dan Pengawasan	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	5	10	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	
2016	Pusat Pengembangan dan Pengawasan	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	5	10	10	750.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	
Jumlah																		
2017	Pusat Pengembangan dan Pengawasan	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	5		10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kampung	



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kabupaten/Kota)	Masa Waktu	Kredit Total (Rp.000.000)	Rekapitulasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran												No	Catatan
					2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program Kegiatan Kegiatan																
		Program Kegiatan Kegiatan	1		100		100		100		100		100		100			
		Program (B) Kegiatan Kegiatan	1		100		100		100		100		100		100			
		Program Kegiatan Kegiatan	1		100		100		100		100		100		100			
102.0.1	Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Program Kegiatan Kegiatan	1		100		100		100		100		100		100			Kegiatan Kegiatan Kegiatan
102.0.1	Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Program Kegiatan Kegiatan	1		100		100		100		100		100		100			Kegiatan Kegiatan Kegiatan
102.0.1	Kegiatan Kegiatan Kegiatan	Program Kegiatan Kegiatan	1	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	Kegiatan Kegiatan Kegiatan



No.	Nama Kantor Kecamatan dan Kabupaten	Jenis Kantor Kecamatan Kabupaten	No. Kantor	Kantor Kecamatan Kabupaten	Rekam DOKUMEN Kabupaten Lampung Utara														No.	Kantor
					Kantor		Kantor		Kantor		Kantor		Kantor		Kantor		Kantor			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22.1.1	Kantor Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	1	12	12	12.1.1.1	12	12.1.1.2	12	12.1.1.3	12	12.1.1.4	12	12.1.1.5	12	12.1.1.6	12	12.1.1.7	12	
22.1.2	Kantor Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	1	12	12	12.1.2.1	12	12.1.2.2	12	12.1.2.3	12	12.1.2.4	12	12.1.2.5	12	12.1.2.6	12	12.1.2.7	12	
	Kantor Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	1	12	12	12.1.3.1	12	12.1.3.2	12	12.1.3.3	12	12.1.3.4	12	12.1.3.5	12	12.1.3.6	12	12.1.3.7	12	
22.1.4	Kantor Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	1	12	12	12.1.4.1	12	12.1.4.2	12	12.1.4.3	12	12.1.4.4	12	12.1.4.5	12	12.1.4.6	12	12.1.4.7	12	
22.1.5	Kantor Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	1	12	12	12.1.5.1	12	12.1.5.2	12	12.1.5.3	12	12.1.5.4	12	12.1.5.5	12	12.1.5.6	12	12.1.5.7	12	
22.1.6	Kantor Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	1	12	12	12.1.6.1	12	12.1.6.2	12	12.1.6.3	12	12.1.6.4	12	12.1.6.5	12	12.1.6.6	12	12.1.6.7	12	
22.1.7	Kantor Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	Kecamatan Kabupaten Lampung Utara	1	12	12	12.1.7.1	12	12.1.7.2	12	12.1.7.3	12	12.1.7.4	12	12.1.7.5	12	12.1.7.6	12	12.1.7.7	12	



No.	Nama Instansi dan Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kantor/Instansi/Tempat)	Masa Waktu	Kategori Kegiatan	Rekapitulasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran												Catatan	Tgl
					2011		2012		2013		2014		2015		2016			
					P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp	P	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
25. 2	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan dan Kecamatan Kecamatan	12		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan	2011
	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan dan Kecamatan Kecamatan	Program Pengembangan Kelembagaan Kecamatan dan Kecamatan Kecamatan	12		100		100		100		100		100		100			
Total:						100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tertuang pada tabel 8.1.



Tabel 3.1
Panategen Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Mendat Awal (2020)	Target Tahun					Kendat Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
Indikator 1: Peningkatan Tata Kelola, Pendidikan dan Kesehatan Sosial Masyarakat Masyarakat									
1	Indeks pembangunan gender (IPG)	indeks	88,87	90,37	90,68	91,08	91,48	91,88	92,28
2	Rata-rata lama sekolah (S/15)	tahun	7,58	7,60	7,62	7,64	7,66	7,68	7,70
3	Lama harapan sekolah (S/15)	tahun	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	12,97	12,98
4	Ura harapan hidup	tahun	69,64	69,64	70,04	70,14	70,24	70,34	70,44
5	Persentase internet rumah	persen	12,34	12,7	12,86	11,42	10,78	10,14	9,50
6	Laju pertumbuhan penduduk	persen	0,71	0,66	0,61	0,56	0,51	0,46	0,41
7	Indeks pembangunan keluarga (IPK)	N/A	N/A	87	87	88	88	87	87
8	Persentase cabang olahraga yang berprestasi pada event nasional (jawa)	persen	17,56	17,56	21,43	25,30	28,57	32,14	35,14
9	Indeks pembangunan literasi masyarakat	indeks	N/A	N/A	12	14	16	18	17
Indikator 2: Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berbasis Lintas Sektor, Rencanan, Program, Monev, Riset dan Jasa									
10	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	persen	61,30	63,30	65,30	67,30	69,30	71,30	73,30
11	Tingkat aksesibilitas jalan kabupaten	persen	68,36	69,36	70,36	71,36	72,36	73,36	74,36
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota	persen	82	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00
13	Keajaiban desa kabupaten/kota	N/A	0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93
14	Persentase luas area tanah yang terakumulasi	persen	91,87	92,70	93,70	94,88	96,00	96,88	97,80
15	Persentase luas area tanah daerah ingan dengan IP > 3	persen	92,00	94,000	95,408	96,737	97,076	98,3180	99,0180
16	Jumlah luas kawasan hutan	ha	61,77	62,33	63,61	64,89	66,17	67,45	68,73
17	Durasi kerja kerja umum	persen	97,18	97,74	97,74	97,40	97,00	96,13	95,01
18	Persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak dan aman	persen	89,30	89,80	91,80	93,38	94,63	95,70	96,55
19	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap	persen	94,00	94,44	95,44	96,55	97,55	97,87	98,13



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Tahun					Kondisi Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
20	Indeks layan dan aman								
21	Indeks kualitas lingkungan RT	pers	55	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	76,50
22	Indeks kualitas udara	pers	72	82	86	91	96	99	99
23	Indeks kepuasan lahan	pers	50	51	53	55	56	58	58
24	Prosentase ketersediaan pemukiman ruang dan rumah layak ruang	persen	76	76	80	82	84	86	88
Subkap-5: Meningkatkan Pemasokan Masyarakat Melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perawatan Kesehatan Dengan Standar Harga Jual Hasil Tani guna Meningkatkan Angka Kesejahteraan									
25	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan terhadap PDRB	persen	26,09	26,40	26,80	27,00	27,30	27,70	28,00
26	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	9,74	10	11	11,8	12	12,8	13
27	Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dalam PDRB	persen	23,54	23,90	23,30	23,70	24,00	24,50	25,00
28	Sektor PDRB	persen	86,10	86,10	86,70	87,30	88,00	88,50	89,00
29	Prosentase peningkatan rumah usaha koperasi	persen	18,04	30	30	30	30	30	30
30	Dasar kemandirian fiskal	persen	7,30	7,80	7,80	8,10	8,40	8,70	9,00
31	Prosentase peningkatan kesehatan	persen	8,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
32	Indeks daya kesehatan	persen	0,89	0,71	0,74	0,76	0,78	0,80	0,82
33	Tingkat partisipasi engkutan kerja	persen	73,08	73,48	73,80	74,33	74,78	75,18	75,60
34	Prosentase penurunan angka kematian (ITK) Desa 1	persen	N/A	4	4	4	4	4	20
Subkap-6: Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Tertinggal, Sederhana dan Rendah guna Peningkatan Kualitas Desa									
35	Jumlah kegiatan konflik sosial	jumlah	0	0	0	0	0	0	0
36	Prosentase penurunan jumlah pelanggaran perda	persen	N/A	10	10	10	10	10	10
37	Indeks risiko bencana	indeks	22,00	23,16	23,33	23,48	23,64	23,80	23,96
Subkap-7: Meningkatkan Kualitas dan Zonasi Kawasan Ekowisata Tani guna Meningkatkan Tata Kelola Ekowisata yang Berkualitas									
38	Optim RPK saat laporan tahunan	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Indeks SPSE	indeks	N/A	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3



No	Indikator	Satuan	Kendali Awal (2020)	Target Tahun					Kendali Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
39	Nilai AMIP Pemantapan Kabupaten Lampung Tengah	persentase	80	80	80	80	80	80	80
40	Indeks IPYMS Daerah	indeks	1.705	1.735	1.745	1.765	1.785	1.800	1.820
41	Indeks Kualitas Masyarakat Desa (Kualitas Guduk)	nilai	55,21	55,21	55,72	55,81	56,41	56,10	56,30
42	Indeks profesionalitas ASN	nilai	55	55	57	58	59	60	61

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah tertuang pada tabel 8.2.



Tabel 5.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2025

NO	ASPEK/URUSAN/BIASANYA URUSAN/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR (2025)	KST
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN SASAR										
SEKORANG PERSEKORANG										
1	Tingkat pelayanan warga negara usia 0-5 tahun dalam pendidikan usia dini	95,00	95,00	95,00	95,00	95,0	95,00	95,00	95,00	SPK
2	Tingkat pelayanan warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	SPK
3	Tingkat pelayanan warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
4	Tingkat pelayanan warga negara usia 17-18 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	99,7	99	99	99	99	99	99	99,7	SPK
SEKORANG RESEKORANG										
1	Basis data lengkap SD terhadap jumlah penduduk	%	9,11	9,11	9,10	9,10	9,10	9,10	9,17	
2	Presentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terlengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	SPK
4	Presentasaku bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	SPK
5	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	SPK
6	Revisi pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPK



NO	ASPEK/POKOK/ISU/ALOKASI/DESKRIPSI STRATEGI	SATUAN	KURSI AKSI (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKSI KURSI (2020)	WKT
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Persentase orang tua pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPU
8	Persentase orang tua 12-20 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase orang tua 20-30 tahun dan atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPU
10	Persentase pendirian layanan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPU
11	Persentase pendirian IKT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPU
12	Persentase BKKW Desa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPU
13	Persentase orang tua 30-40 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPU
14	Persentase orang tua dengan risiko rendah IKT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	SPU
REKAPITULASI UNIK DAN PERKATAAN KURSI										
1	Rasio luas kawasan pemukiman rumah yang terdapat di lingkungan pemukiman rumah di lingkungan kabupaten	%	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	
2	Rasio daerah yang berbatasan kabupaten yang dijajah oleh jangkauan sungai	Agribasi	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses layanan di rumah SPK2 jangkauan pelayanan terdistribusi terdistribusi terdistribusi	%	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat layanan pelayanan di rumah kabupaten	%	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	
5	Rasio layanan IKT	%	20	20	20	20	20	20	20	
6	Tingkat keterlambatan jalan	%	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	



No	ASPEK/POKOK/ISU/ASPEK KEBERHASILAN/INDIKATOR	SATUAN	AKHIR 2020 (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AWAL 2020 (2020)	SPT
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dasar tenaga operator teknik analitis yang memiliki sertifikasi	%	0	66,66	77,77	88,88	88,88	88,88	88,88	
2	Dasar proyek yang menjadi pembangunan pelayanan warga berdasarkan kebutuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	
SIDANG PERLOMBAAN DAN KEMASUKAN PERLOMBAAN										
1	Persiapan dan pembinaan rumah layak huni bagi	%	100	100	100	100	100	100	100	SPK
2	Facilitas pelayanan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana gugur pemerintah	Agenda	100	100	100	100	100	100	100	
4	persentase layanan pemukiman rumah layak huni di kabupaten yang dibangun	%	88,71	88	88	88	88	88	88	SPK
5	berikutnya jumlah unit rumah	%	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	SPK
6	Jumlah pelayanan yang telah di tingkat PBT (Pemerintah, sarana dan sarana umum)	%	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	SPK
KEMASUKAN PERLOMBAAN, KEMASUKAN KEMASUKAN, DAN PERLOMBAAN KEMASUKAN										
1	Persentase pelayanan kesehatan yang dilaksanakan	Persentase	88	88	88	88	88	88	88	SPK
2	Persentase PBT dan sarana yang dibangun	%	88	88	88	88	88	88	88	SPK
3	Jumlah warga masyarakat yang memperoleh layanan kesehatan rumah layak huni	%	88,88	88	88	88	88	88	88	SPK
4	Jumlah warga masyarakat yang memperoleh layanan kesehatan dan pembangunan kesehatan	%	88,88	88	88	88	88	88	88	SPK
4	Jumlah warga masyarakat yang memperoleh layanan kesehatan dan pembinaan rumah layak huni	%	88,88	88	88	88	88	88	88	SPK
4	Persentase pelayanan pembangunan dan pembinaan rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	SPK
7	Waktu tunggu layanan penanganan bencana	Detik	12	12	12	12	12	12	12	
KEMASUKAN KEMASUKAN										
1	Persentase pelayanan kesehatan terdampak bencana, layanan kesehatan dan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	SPK



No	ASPEK/POKOK/ISU/ASPEK KEBERHASILAN/INDIKATOR	SATUAN	AKHIR 2020 (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR 2020 (2020)	WKT
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kegiatan minimum dan target aktivitas									
1	Penggunaan anggaran tahun berjalan yang disalurkan melalui media	%	100	100	100	100	100	100	100	
	akademik/kegiatan belajar									
2	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	85,12	87,83	89,31	90	89,12	90,15	91,88	
3	Perencanaan pengalokasian anggaran	%	40	40	40	40	40	40	40	
4	Revisi anggaran yang sudah direvisi dan/atau									
5	kegiatan terhadap apa lingkungan, apa PPLH, dan	%	0/4	0	00	70	80	90	100	
6	apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah									
	SIDANG ADMINISTRASI KEMENDIDIKAN & PENCATATAN SIPD									
1	Persamaan STP Kabupaten	%	90	90	90	90	90	90	90	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu)	%	0,88	8	10	11	13	13	14	
3	dan yang memiliki KIR									
4	Pengawasan oleh pemerintah	%	87,71	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,77	
5	Jumlah DPO yang telah memonitorisasi data	PA	2	3	3	11	12	12	17	
6	kegiatan/kegiatan pelayanan/pelayanan/pelayanan									
7	Persentase data kependudukan oleh kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	dalam 1 tahun									
	SIDANG PERENCANAAN KEMENDIDIKAN & PENCATATAN SIPD									
1	Persentase pengalokasian dana terintegrasi	Poin	2,00	2,00	2,10	2	2	2	2	
2	Persentase pengalokasian dana oleh pemerintah	dan	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	10,10	10,10	
	SIDANG PERENCANAAN KEMENDIDIKAN & PENCATATAN SIPD									
1	DPS (Angka kelulusan total)	%	2,12	2,12	2,12	2,10	2,10	2,12	2,12	
2	Persentase pemerintah terintegrasi dengan	%	71,81	71,89	79,87	79,89	79,89	79,81	79,79	
3	Persentase keabsahan terintegrasi yang telah terintegrasi	%	8,10	8,10	8,10	7,10	7,10	7,10	8,10	
4	(satu) dan/atau									
	SIDANG PERENCANAAN									
1	Basis keabsahan Kabupaten/ Kota	%	84	84	84	84	84	84	84	
2	Basis data keabsahan Kabupaten/ Kota	1/10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	
	SIDANG KEMENDIDIKAN & PENCATATAN SIPD									



No	ASPEK/POKOK BIDANG/KELOMPOK/SEKSI/STAF	SATUAN	AKHIR MAREK (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR MAREK (2025)	RPT
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Presensi anggota perangkat daerah yang terlengkap dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	8,87	8,87	8,87	10	88	88	88	
2	Presensi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	81,81	81,81	81,81	17,87	17,88	18,18	78,88	
3	Presensi masyarakat yang menjadi sasaran pemberian informasi publik, mengikuti pelatihan dan program prioritas pemerintah daerah	%	10	10	10	17	10	20	30	
ASPEK MANAJEMEN, KEMAS MANAJ, DAN MANAJEMEN										
1	Manajemenya kegiatan kehumasan	%	0,00	0,00	10,10	10,10	20,20	20,20	20,20	
2	Manajemenya kerja sama yang menjadi prioritas	%	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,1	0,78	
ASPEK MANAJEMEN MANAJ										
1	Presensi pengetahuan manaj	%	10	10	10	10	10	10	10	
SIDANG KEPERUSAHAAN DAN OLAKKADA										
1	Target perolehan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,00	0,10	0,10	0,10	0,0	0,00	0,78	
2	Target perolehan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,01	0,78	0,00	0,10	0,01	0,00	0,00	
3	Peningkatan prestasi olah raga	%	17,88	17,88	21,60	20,00	20,07	20,15	22,15	
ASPEK MANAJEMEN										
1	Presensi anggota perangkat daerah yang mempunyai data statistik dalam penyusunan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Presensi BPD yang mempunyai data statistik dalam melakukan analisis pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
SIDANG PERKABIDAN										
1	Target kemajuan data	%	100	100	100	100	100	100	100	
SIDANG KEBUDAYAAN										
1	Pelaksanaan kerja budaya	%	88,78	88	88	88	88	88	88	



No	ASPEK/POKOK/ISU/ALOKASI/DESKRIPSI STRATEGI	SATUAN	AKHIR 2020 (2020)	TARGET TAHUN					KONDISI AWAL 2020 (2020)	SPT
				2021	2022	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh dan sesuai dengan kebutuhan	Ribu	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase jumlah realisasi pupuk	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase sarana air, jalan, irigasi dan perlengkapan lainnya berdasar dana yang ada	%	71,10	72	73	77	78	80	80	
ASPEK PEMERIKSAAN										
1	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	%	-0,27	1	2	2	2	2	2	
2	Persentase jumlah hasil pemeriksaan dan pengujian dengan jumlah dan waktu industri (TI) kecil dan industri menengah yang dibutuhkan oleh industri kecil	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase jumlah hasil pemeriksaan dan pengujian dengan jumlah dan waktu industri (PPI) kecil dan industri menengah yang dibutuhkan oleh industri kecil	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah hasil pemeriksaan dan pengujian dengan jumlah dan waktu industri (LKI) dan dan waktu pemeriksaan industri (PPI)	%	100	100	100	100	100	100	100	
POKOK/POKOK/ISU/ALOKASI/DESKRIPSI STRATEGI										
PENINGKATAN DAN KEBERHASILAN										
1	Realisasi belanja pegawai dan gaji dan tunjangan	Ribu Rp/1000	21,00	22	22	24	25	25	27	
2	Realisasi PDB	Ribu	7,8	7,8	7,8	8,1	8,4	8,7	8,8	
3	Manajemen sistem pengelolaan sistem pemerintahan	Ribu	2,227	2,1	2,12	2,17	2,18	2,21	2,22	
4	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan sistem pemerintahan (PPI)	Ribu	2,4	2	2	2	2	2	2	
5	Realisasi belanja sistem pemerintahan	Ribu	27,88	28	28	28	28	28	28	



No	ASPEK/POKOK/ASAS/KELOMPOK/DESKRIPSI STRATEGI	SATUAN	ANGKA AKUAL (2022)	TARGET TAHUN					KONDISI AKUAL RKJMD (2022)	SMT
				2023	2023	2023	2024	2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
2	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
4	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
5	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
6	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
7	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
8	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
9	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
10	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
11	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
12	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
13	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
14	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
15	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
16	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
17	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
18	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
19	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
20	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
21	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
22	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
23	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
24	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
25	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
26	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
27	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
28	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
29	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
30	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
31	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
32	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
33	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
34	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
35	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
36	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
37	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
38	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
39	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
40	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
41	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
42	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
43	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
44	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
45	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
46	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
47	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
48	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
49	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	
50	Kelembagaan (organisasi)	Organi	100	100	100	100	100	100	100	

BAB IX PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

9.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPED tahun 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

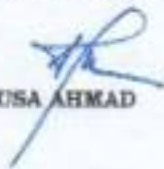
Kaidah pelaksanaan RPJMD di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- Bupati Lampung Tengah berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban melakukan penyusunan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2022 hingga tahun 2026;
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.



Sebagai rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah yaitu **"Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"** dapat tercapai.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD